LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025



BAGIAN ORGANISASI
SETDAKAB. LAMPUNG SELATAN

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat Informasi Kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2025 dan 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 dan 2025-2029, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government.*

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Gubernur/Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, tetapi tidak bertanggung jawab secara materil terhadap isi substansi laporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan periode Kepala Daerah sebelumnya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kalianda, 8 Juli 2026

Bupati Lampung Selatan



Radityo Egi Pratama

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Disamping itu, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Target dan realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi target IKU Kabupaten, dikarena dari 19 indikator masih terdapat 2 indikator yang belum memenuhi kategori capaian, adapun indikator tersebut yakni persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM/ Indeks Merit.

Pada sektor pariwisata masih belum optimal dengan kontribusi 0.75% (2025), jauh di bawah target 2.90%, mengindikasikan perlunya strategi pemulihan yang lebih agresif pasca pandemi.

Faktor-faktor yang mepengaruhi belum tercapainya persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB antara lain:

1. Kualitas infrastruktur: Kualitas infrastruktur pariwisata yang belum memadai, seperti jalan, akomodasi, dan fasilitas lainnya;
2. Keterampilan sumber daya manusia: Keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia di sektor pariwisata yang belum memadai;
3. Kualitas produk pariwisata: Kualitas produk pariwisata yang belum memadai, seperti kurangnya variasi atraksi wisata dan kurangnya kualitas jasa;
4. Keterlibatan masyarakat: Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata yang belum optimal;
5. Perubahan iklim: Perubahan iklim dapat mempengaruhi kualitas lingkungan dan mengurangi daya tarik wisata;
6. Persaingan dengan destinasi lain: Persaingan dengan destinasi lain dapat mempengaruhi pilihan wisatawan.

Pada capaian indikator Penataan Sistem Manajemen SDM/ Indeks Merit atas penilaian tahun 2023 Kabupaten Lampung Selatan masih kategori I (buruk). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, maka mencabut Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem Dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), maka tugas dari KASN termasuk penilaian Sistem Merit diserahkan seluruhnya ke BKN Pusat Jakarta. Kabupaten Lampung Selatan melalui BKD Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penilaian mandiri Sistem Merit melalui aplikasi Sipinter yang siap di verifikasi oleh BKN, namun sampai dengan 31 Desember 2024 tidak ada penilaian atas Sistem Merit melalui aplikasi Sipinter.

Kabupaten Lampung Selatan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan selama periode 2022-2025. Indeks Merit tidak selaras masih berada pada kategori 1 (2022-2025), belum mencapai target kategori III (baik) pada 2025, mengindikasikan perlunya penguatan sistem rekrutmen dan promosi berbasis merit.

Faktor-faktor yang mepengaruhi belum tercapainnya Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM/Indeks Merit antara lain:

1. Kurangnya Komitmen Pimpinan. Pimpinan instansi yang kurang mendukung penerapan sistem merit dapat menghambat perubahan;
2. Budaya Organisasi yang Belum Berorientasi pada Kinerja. Masih adanya praktik nepotisme dan kolusi dalam proses rekrutmen, promosi, dan rotasi pegawai. Kinerja individu dan kompetensi belum menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan SDM.

3. Keterbatasan Kapasitas dan Kompetensi SDM. Kurangnya pemahaman tentang sistem merit di kalangan pegawai dan pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan SDM.
4. Sistem dan Regulasi yang Belum Optimal. Regulasi terkait sistem merit belum sepenuhnya diterapkan atau masih memiliki celah yang memungkinkan intervensi non-meritokratis.
5. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi Pendukung. Sistem informasi manajemen kepegawaian yang belum terintegrasi dengan baik. Keterbatasan teknologi dalam mendukung transparansi dan objektivitas proses seleksi, promosi, dan evaluasi kinerja.
6. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lemah. Mekanisme pengawasan dan evaluasi belum berjalan efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip sistem merit. Sanksi bagi pelanggaran sistem merit belum diterapkan dengan tegas.

Pada tahun Anggaran 2025 pencapaian kinerja didukung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan Belanja Daerah Tahun 2025 Rp2.569.477.094.027,26 dan dapat direalisasikan Rp2.307.947.530.745,93 atau mencapai 90%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang menggambarkan Capaian Kinerja pada tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Visi Kabupaten Lampung Selatan.

Kalianda, 8 Juli 2026

Bupati Lampung Selatan,



Radityo Egi Pratama

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN 2
C. DASAR HUKUM 2
D. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 3
1. Kondisi Umum Dan Kondisi Daerah 3
2. Kondisi Pemerintahan 30
3. Jumlah Aparatur Sipil Negara 34
E. PERMASALAHAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN STRATEGIS 37
1. Permasalahan Strategis 37
2. Kebijakan strategis 37
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN 39
BAB II PERENCANAAN KINERJA 41
A. PERENCANAAN STRATEGIS 41
1. Visi 42
2. Misi 44
3. Tujuan 47
4. Sasaran 53
5. Strategi 62
6. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 70
7. Kebijakan dan Program 77
B. PERJANJIAN KINERJA 135
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 161
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 181
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini 181
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir IKU 189
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 196
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 202
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta realisasi kinerja tahun alternative solusi yang telah dilakukan 206
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 221
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 228

B. REALISASI ANGGARAN 260
a. Pengelolaan Pendapatan Daerah 260
b. Pengelolaan Belanja Daerah 270
c. Kondisi Pembiayaan Daerah 296
BAB IV P E N U T U P 298
A. Kesimpulan 298
B. Langkah-langkah untuk tahun mendatang guna peningkatkan kinerja 300

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Potensi Desa/Kelurahan Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Selatan	8
Tabel 1.2.	Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan	13
Tabel 1.3.	Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Menurut Jenis Kelamin Semester II Tahun 2025	14
Tabel 1.4.	Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Lampung Selatan Semester II Tahun 2025	15
Tabel 1.5.	Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Yang Menjadi Kewenangan Daerah	33
Tabel 1.6.	Rekapitulasi ASN menurut Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	34
Tabel 1.7.	Rekapitulasi ASN menurut Golongan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	35
Tabel 1.8.	Rekapitulasi ASN menurut Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	35
Tabel 1.9.	Rekapitulasi ASN menduduki Jabatan Struktural	36
Tabel 1.10.	Rekapitulasi ASN menduduki Jabatan JFU/JFT	36
Tabel 2.1.	Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026	50
Tabel 2.2.	Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan, Kondisi Awal dan Target Jangka Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029	51
Tabel 2.3.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026	56
Tabel 2.4.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029	60
Tabel 2.5.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD 2021-2026	62
Tabel 2.6.	Penahapan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029	64
Tabel 2.7.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026 berdasarkan Strategi	70
Tabel 2.8.	Arah Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029	72
Tabel 2.9.	Program Prioritas RPJMD Tahun 2021-2026	77
Tabel 2.10.	Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029	98
Tabel 2.11.	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025	135
Tabel 2.12.	Program dan Anggaran Data Anggaran Per Program Pada APBD Tahun Anggaran 2025	136
Tabel 2.13.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target	141
Tabel 2.14.	Program dan Anggaran	142
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Ordinal	162
Tabel 3.2.	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	163

	Tahun 2021-2026	
Tabel 3.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029	171
Tabel 3.4.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2021-2026 dan IKU Tahun 2021-2026	181
Tabel 3.5.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2025-2029	185
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini,Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir IKU 2021-2026	189
Tabel 3.7.	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini,Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir IKU 2025-2029	193
Tabel 3.8.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Jangka Menengah RPJMD Tahun 2021-2026	196
Tabel 3.9.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD Tahun 2025-2029	199
Tabel 3.10.	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional IKU Tahun 2021-2026	202
Tabel 3.11.	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional IKU Tahun 2025-2029	204
Tabel 3.12.	Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kabupaten Lampung Selatan	212
Tabel 3.13.	Rincian hasil evaluasi Nilai SAKIP	215
Tabel 3.14.	Penghargaan Tahun 2025	217
Tabel 3.15.	Penghargaan Tahun 2026	219
Tabel 3.16.	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	221
Tabel 3.17.	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	223
Tabel 3.18.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	227
Tabel 3.19.	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	261
Tabel 3.20.	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	270
Tabel 3.21.	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	296
Tabel 4.1.	Capaian Kinerja yang dilihat berdasarkan tiap-tiap Indikator berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	299
Tabel 4.2.	Capaian Kinerja yang dilihat berdasarkan tiap-tiap Indikator berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029	300

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan.....	4
Gambar 1.2.	Peta Topografi Kabupaten Lampung Selatan.....	5
Gambar 1.3.	Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Selatan.....	6
Gambar 1.4.	Peta Hidrogeologi Kabupaten Lampung Selatan.....	7
Gambar 1.5.	Peta Iklim Kabupaten Lampung Selatan.....	7
Gambar 1.6.	Peta Rawan Bencana Kabupaten Lampung Selatan.....	11
Gambar 1.7.	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Selatan.....	12
Gambar 1.8.	Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Lampung Selatan.....	12
Gambar 1.9.	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan.....	13
Gambar 1.10.	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.	15
Gambar 1.11.	Peta Kawasan dan Rencana Pola Ruang Kabupaten Lampung Selatan.....	17
Gambar 1.12.	Rencana Pentahapan Pengembangan Bandar Udara Radin Inten II....	18
Gambar 1.13.	Rencana Pengembangan *Sport Center* dan *Exhibition Center*.....	19
Gambar 1.14.	Rencana Pembangunan *Shortcut* Tegineneng-Tarahan dan Jalur Bandar Lampung-Bakauheni.....	20
Gambar 1.15.	Rencana Pembangunan *Double Track* (Ruas Batas Sumatera Selatan-Giham dan Kotabumi-Tarahan).....	20
Gambar 1.16.	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan.....	23
Gambar 1.17.	Rencana Pengembangan Kawasan Agrowisata Way Handak.....	24

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran kinerja, Pengelolaan data kinerja, Pelaporan kinerja, Reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pelaporan kinerja terbagi menjadi 2 (dua) yaitu laporan kinerja triwulan dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan dari pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LKjIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. LKjIP Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

tahun 2025 dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). LKjIP Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 merupakan tahun Pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya.

LKjIP yang telah disusun disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah selama tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029, sebagai bahan pengambilan kebijakan, serta penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini didasarkan pada ketentuan peraturanperundangan-undangan sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenLampung Selatan 2025-2029.

D. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Kondisi Umum dan Kondisi Daerah

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105°14’ sampai dengan 105°45’ Bujur Timur dan 5°15’ sampai dengan 6° Lintang Selatan, dengan demikian sama seperti daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis. Daerah yang terletak paling ujung bagian selatan pulau Sumatera ini memiliki sebuah pelabuhan di kecamatan Bakauheni dan merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau Sumatera. Jarak antara pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) dengan pelabuhan Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 29 km dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Selain memiliki pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki bandara Raden Inten II yang terletak di Kecamatan Natar.

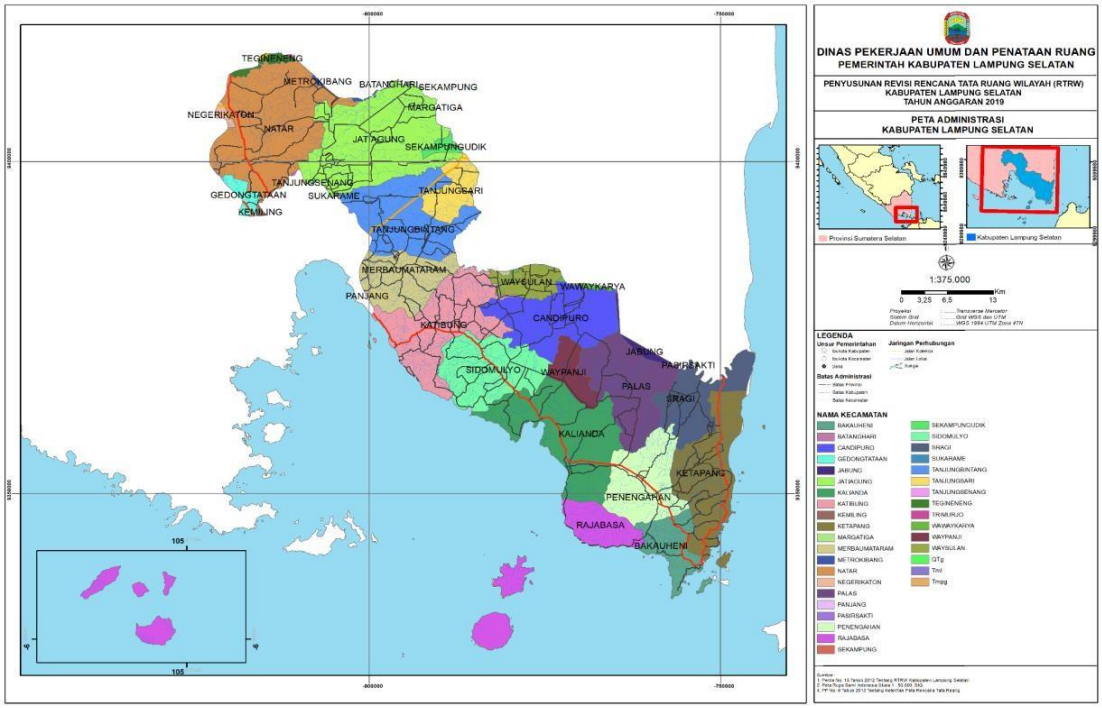
Wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Sunda;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa.

Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih

adalah 2.109,74 km² (berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan), dengan Kantor Pusat Pemerintahan di Kota Kalianda, yang diresmikan menjadi Ibukota Kabupaten Lampung Selatan oleh Menteri Dalam Negeri pada Tanggal 11 Februari 1982. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Tanggamus, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2006, terjadi pemekaran Kabupaten Pesawaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada Tahun 2008, terjadi pemekaran di Kabupaten Lampung Selatan yaitu, Kecamatan Tanjung Sari, Way Sulan, Way Panji, dan Kecamatan Bakauheni, dengan demikian jumlah Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan secara eksisting berjumlah 17 kecamatan dan selanjutnya terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 256 desa dan 4 kelurahan.

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan

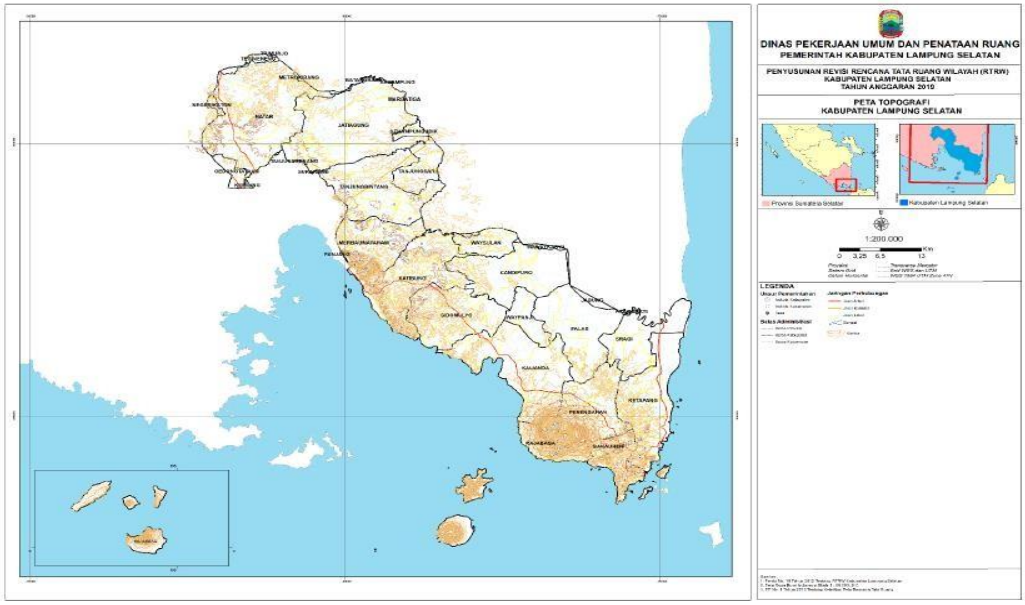


Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lampung Selatan Tahun 2011-2031

Secara umum, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah dataran dengan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi. Daerah dataran tertinggi berada di Kecamatan Merbau Mataram dengan ketinggian 102 meter dari permukaan laut (mdpl). Kecamatan Natar dan Kecamatan Katibung sebagai wilayah terbesar berada pada ketinggian masing-masing 85 mdpl dan 100 mdpl. Sedangkan kecamatan dengan dataran terendah yaitu Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni yang berada di bawah 3 mdpl. Sementara, Kecamatan Kalianda sebagai ibukota pemerintahan berada pada 33 mdpl. Berdasarkan ketinggian

tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan beriklim panas.

Gambar 1.2 Peta Topografi Kabupaten Lampung Selatan

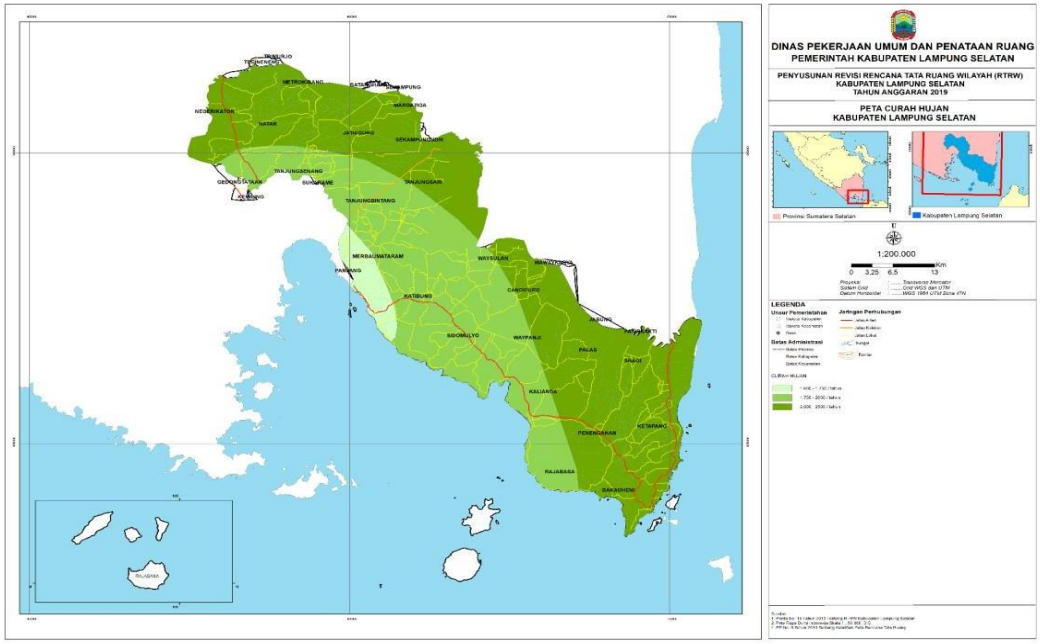


Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lampung Selatan Tahun 2011-2031

Kabupaten Lampung Selatan mempunyai beberapa gunung, yang tertinggi adalah Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa, dengan ketinggian 1.280 mdpl, sedangkan sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Lampung Selatan antara lain antara lain Way Sekampung, Way Jelai, Way Katibung, Way Pisang dan Way Gatal. Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki Kawasan Hutan Suaka/Taman/Lahan suatu kawasan yang cukup luas.

Kondisi Hidrogeologi Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dari kondisi Cekungan Air Tanah (CAT). Kondisi CAT Kabupaten Lampung Selatan, termasuk ke dalam dua cekungan yaitu CAT Metro-Kotabumi dan CAT Kalianda. CAT Metro-Kotabumi memiliki rata-rata imbuhan air tanah bebas mencapai ± 11.807.000.000 m3 per tahunnya, dan imbuhan air tanah yang tertekan pada lapisan aquifernya mencapai ± 524.000.000 m3 per tahunnya. CAT Metro-Kotabumi merupakan CAT yang dominan di Provinsi Lampung. Sedangkan CAT Kalianda memiliki rata-rata imbuhan air tanah bebas mencapai ± 128.000.000 m3 per tahunnya, dan imbuhan air tanah yang tertekan pada lapisan aquifernya hanya ± 11.000.000 m3 per tahunnya. CAT Kalianda hanya merupakan CAT yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan CAT Metro-Kotabumi.

Gambar 1.3 Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Selatan



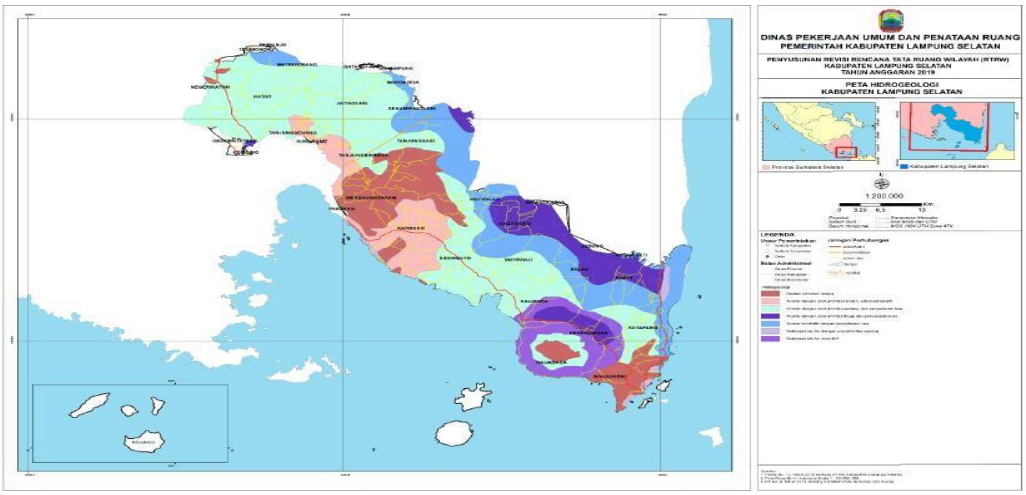
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lampung Selatan Tahun 2011-2031

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, antara lain:

- Tanah Latosol
  Jenis tanah ini paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, hampir menutupi seluruh wilayah barat dan sebagian besar dari bagian tengah. Tanah latosol berwarna coklat tua sampai kemerah-merahan adalah hasil pelapukan bahan induk komplek turfinmedier. Penyebaran pada daerah bertopografi bergelombang sampai bergunung.
- Tanah Podsolik
  Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk turfazam sedimen batuan plotonik yang bersifat asam, tersebar pada wilayah yang bertopografis berbukit sampai bergunung. Tanah podsolik berwarna merah kuning, juga terdapat di daerah yang luas, tersebar pada wilayah bagian utara Kabupaten Lampung Selatan.
- Tanah Andosol
  Jenis tanah ini adalah pelapukan dari bahan induk komplek turfinmedier dan basah, berwarna coklat sampai hitam. Penyebarannya terdapat pada daerah bertopografis bergelombang sampai bergunung. Jenis tanah ini tidak begitu banyak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- Tanah Hidromorf
  Tanah Hidromorf adalah hasil pelapukan dari bahan induk sedimen turfazam sampai entermedier, berwarna kelabu, terdapat pada daerah datar sampai berombak. Tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan bagian timur.

- Tanah Alluvial
  Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai, terdapat pada daerah dengan bentuk wilayah datar.

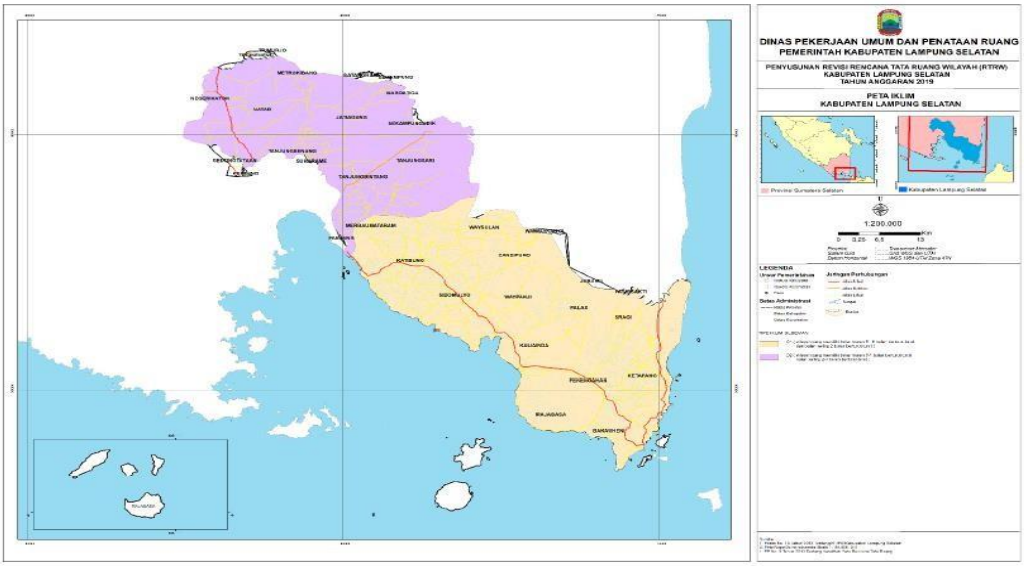
Gambar 1.4 Peta Hidrogeologi Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lampung Selatan Tahun 2011-2031

Iklim di Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh angin Muson, maka daerah Lampung Selatan tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan.

Gambar 1.5 Peta Iklim Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lampung Selatan Tahun 2011-2031

Kabupaten Lampung Selatan memiliki 42 pulau, besar maupun kecil, dengan pulau terbesar adalah Pulau Sebesi dengan luas 4.643 Ha. Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki garis pantai terpanjang se-Provinsi Lampung dengan panjang 182 km^2. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan sangat berpotensi dalam hal positif, seperti peluang perkembangan pariwisata, maupun berpotensi dalam hal negatif seperti potensi bencana. Terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang termasuk dalam daerah yang berpotensi rawan bencana tsunami. Berikut adalah persebaran potensi rawan bencana per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 1.1. Data Potensi Desa/Kelurahan Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Selatan

No	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN		BANJIR	TANAH LONGSOR	KEKERINGAN	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TSUNAMI
1	KALIANDA	1	Pauh Tanjung Iman	√	√	√		√
		2	Kalianda	√				√
		3	Maja		√	√		√
		4	Jondong		√	√		
		5	Babulang	√	√	√		
		6	Tajimalela	√		√		
		7	Marga Catur	√		√		
		8	Buah Brak	√	√			
		9	Sukatani	√		√		
		10	Canggu	√	√	√		
		11	Kedaton	√		√		
		12	Merak Belantung	√		√		√
		13	Gunung Terang	√		√		
		14	Munjuk Sampurna	√		√		
		15	Bulok	√	√	√		
		16	Agom	√		√		
		17	Negeri Pandan	√		√		
		18	Sumur Kumbang		√	√		
		19	Pematang		√	√		
		20	Kecapi		√	√		
2	RAJABASA	1	Batu Balak		√			√
		2	Tejang Pulau Sebesi		√		√	√
		3	Banding		√		√	√
		4	Canti		√			√
		5	Canggung		√		√	√

No	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN		BANJIR	TANAH LONGSOR	KEKERINGAN	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TSUNAMI
		6	Betung		√		√	√
		7	Tanjung Gading		√	√	√	√
		8	Kota Guring		√	√		
		9	Kunjir				√	√
		10	Way Muli				√	√
		11	Way Muli Timur				√	√
		12	Sukaraja				√	√
		13	Rajabasa				√	√
3	CANDIPURO	1	Sidoasri	√		√	√	
		2	Way Gelam	√		√	√	
		3	Sinar Palembang			√	√	
		4	Titiwangi	√		√		
		5	Sinar Pasemah	√		√		
		6	Beringin Kencana	√		√		
		7	Banyumas	√		√		
		8	Cintamulya	√		√		
4	SIDOMULYO	1	Suak	√		√		
		2	Siring Jaha	√	√	√		
		3	Sukamaju	√		√		
		4	Sidowaluyo	√		√		
		5	Sidorejo	√		√		
		6	Sidodadi	√		√		
		7	Bandar Dalam	√		√		
		8	Sidomulyo	√		√		
5	SRAGI	1	Bakti Rasa	√		√		
		2	Kuala Sekampung	√		√	√	
		3	Sukapura	√		√	√	
		4	Mandalasari	√		√		
		5	Sumber Agung	√		√		
6	KETAPANG	1	Ketapang	√		√		√
		2	Bangun Rejo	√		√		
		3	Karang Sari	√		√		
		4	Taman Sari	√		√		
		5	Lebung Nala	√		√		
		6	Sidoasih	√		√		

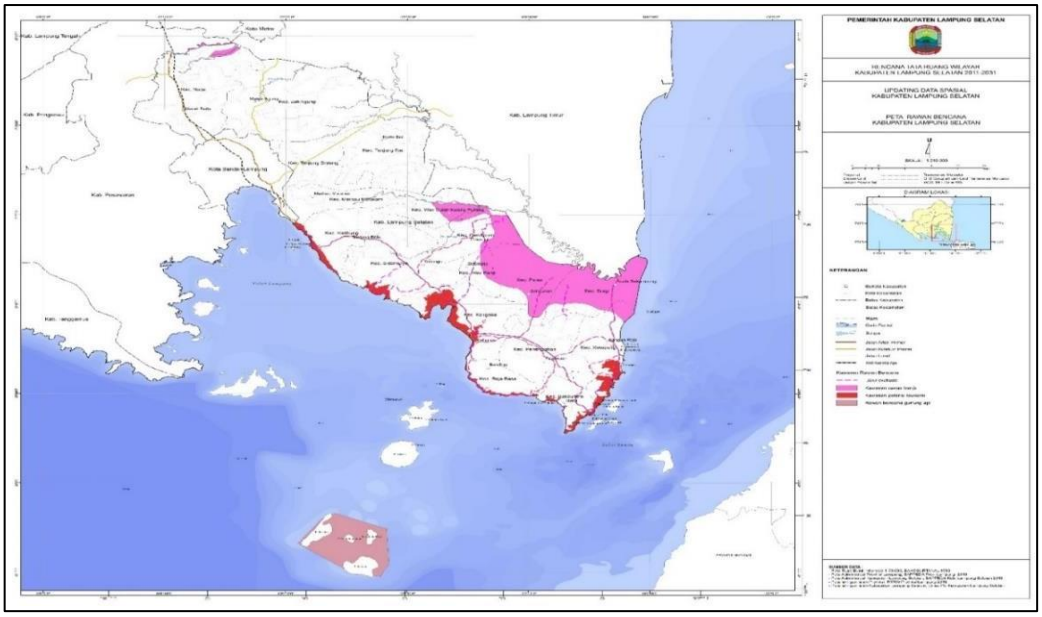
No	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN		BANJIR	TANAH LONGSOR	KEKERINGAN	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TSUNAMI
		7	Pematang Pasir	√		√		
		8	Legundi			√		√
		9	Sumur			√	√	
7	WAY PANJI	1	Balinuraga	√			√	
8	KATIBUNG	1	Tarahan	√	√	√		√
		2	Karya Tunggal	√	√	√		√
		3	Rangai Tri Tunggal	√	√	√		√
		4	Tanjung Ratu	√	√	√		
		5	Negla Sari	√	√	√		
		6	Babatan		√	√		
		7	Tanjung Agung		√	√		
9	PALAS	1	Sukaraja	√		√		
		2	Sukabakti	√		√		
		3	Palas Pasemah	√		√		
		4	Palas Jaya	√		√		
		5	Bandan Hurip	√		√		
		6	Mekar Mulya	√		√		
		7	Pematang Baru	√		√		
10	PENENGAHAN	1	Tanjung Heran		√	√	√	
		2	Way Kalam		√	√		
		3	Padan		√		√	
		4	Pisang	√	√	√		
		5	Sukabaru	√	√	√		
		6	Tetaan	√		√		
		7	Penengahan	√	√	√		
		8	Ruang Tengah	√	√	√		
		9	Kelau	√	√	√		
		10	Kekiling	√		√		
		11	Sukajaya		√	√		
		12	Gedung Harta		√	√		
		13	Kampung baru		√	√		
		14	Pasuruan		√	√		
11	WAY SULAN	1	Karang Pucung	√		√		
		2	Sumber Agung	√		√		
		3	Mekar Sari	√		√		
12	MERBAU MATARAM	1	Tanjung Baru		√	√		
		2	Suban	√		√		

No	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN		BANJIR	TANAH LONGSOR	KEKERINGAN	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TSUNAMI
		3	Baru Ranji		√	√		
13	BAKAUHENI	1	Bakauheni	√	√	√	√	
		2	Semanak		√	√	√	
		3	Toto Harjo		√	√		
		4	Kelawi		√	√		
		5	Hatta		√	√		
	J U M L A H	**153**	**Desa / Kelurahan**					

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lampung Selatan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan berpotensi bencana banjir. Dari data bencana yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan, pada Tahun 2025 telah terjadi sebanyak 16 kali bencana banjir, dan ini merupakan bencana yang paling sering terjadi di Lampung Selatan. Pada Tahun *2025,* bencana banjir berdampak pada 8 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bakauheni, Kalianda, Katibung, Sidomulyo, Rajabasa, Candipuro, Palas, sragi dan mengakibatkan 1.986 rumah terdampak banjir.

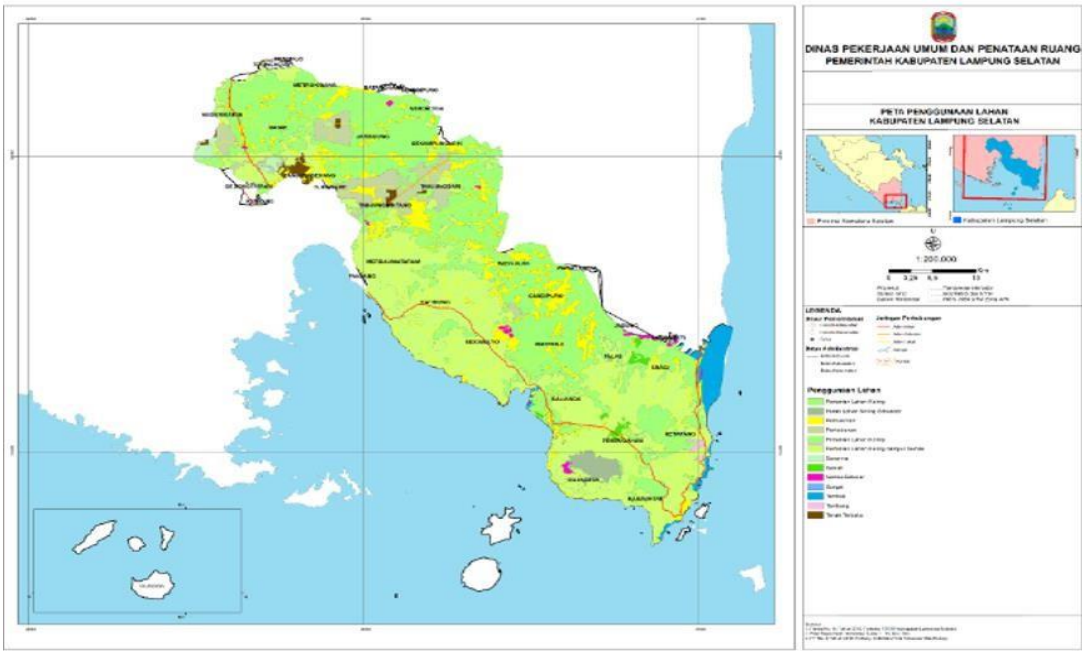
Gambar 1.6 Peta Rawan Bencana Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031

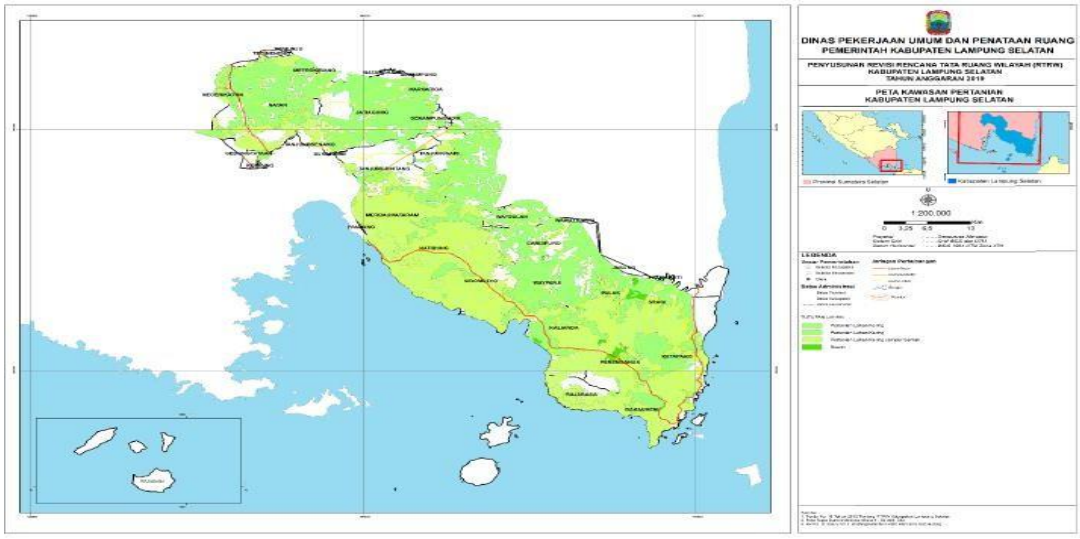
Wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran tropis yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Untuk lebih mengetahui kondisi penggunaan lahan dapat di lihat pada peta tutupan lahan yang merupakan hasil interpretasi liputan lahan citra lansat.

Gambar 1.7 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Selatan



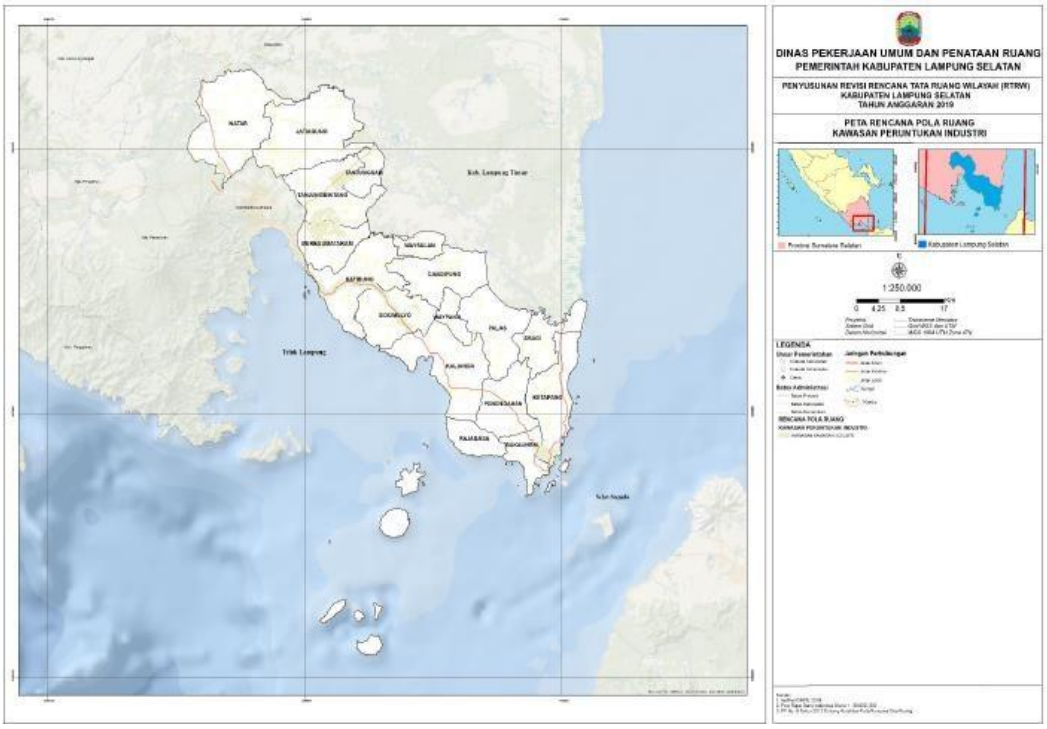
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031

Gambar 1.8 Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031

Gambar 1.9 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031

Kecamatan Natar merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Lampung Selatan dengan wilayah seluas 250,88 km^2. Sedangkan Kecamatan Way Panji sebagai kecamatan terkecil dengan wilayah seluas 38,45 km^2. Berikut luas Kabupaten Lampung Selatan dirinci per Kecamatan:

Tabel 1.2. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Nama Ibukota	Luas (km^2)	Desa	Kelurahan
1	Natar	Merak Batin	250,88	26	-
2	Tanjung Bintang	Jati Baru	129,72	16	-
3	Kalianda	Kalianda	179,82	25	4
4	Sidomulyo	Sidorejo	158,99	16	-
5	Katibung	Tanjung Ratu	188,62	12	-
6	Penengahan	Pasuruan	124,96	22	-
7	Palas	Bangunan	165,57	21	-
8	Jati Agung	Marga Agung	164,47	21	-
9	Ketapang	Bangun Rejo	108,60	17	-
10	Sragi	Kuala Sekampung	93,44	10	-
11	Rajabasa	Banding	100,39	16	-
12	Candipuro	Titiwangi	84,90	14	-
13	Merbau Mataram	Merbau Mataram	113,94	15	-
14	Bakauheni	Hatta	57,13	5	-
15	Tanjung Sari	Kerto Sari	103,32	8	-
16	Way Sulan	Karang Pucung	46,54	8	-
17	Way Panji	Sidoharjo	38,45	4	-
Jumlah			2.109,74	256	4

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lampung Selatan Tahun 2011-2031

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2025 menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan adalah 1.146.074 sebesar jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Natar yaitu sebesar 207.717 jiwa dan yang terkecil di Kecamatan Way Panji yaitu sebesar 19.392 jiwa. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Menurut Jenis Kelamin Semester II Tahun 2025

NO	NAMA KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1	NATAR	105,398	102,319	207,717
2	TANJUNG BINTANG	46,326	45,121	91,447
3	KALIANDA	51,687	50,232	101,919
4	SIDOMULYO	36,050	34,739	70,789
5	KATIBUNG	39,676	38,133	77,809
6	PENENGAHAN	23,352	22,288	45,640
7	PALAS	32,998	32,377	65,375
8	JATI AGUNG	67,653	65,244	132,897
9	KETAPANG	29,021	28,159	57,180
10	SRAGI	19,149	18,770	37,919
11	RAJABASA	13,583	12,720	26,303
12	CANDIPURO	31,615	30,555	62,170
13	MERBAU MATARAM	31,361	30,300	61,661
14	BAKAUHENI	13,086	12,912	25,998
15	TANJUNG SARI	17,952	17,349	35,301
16	WAY SULAN	13,673	12,884	26,557
17	WAY PANJI	9,711	9,681	19,392
JUMLAH		582,291	563,783	1,146,074

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, 20 Februari 2026

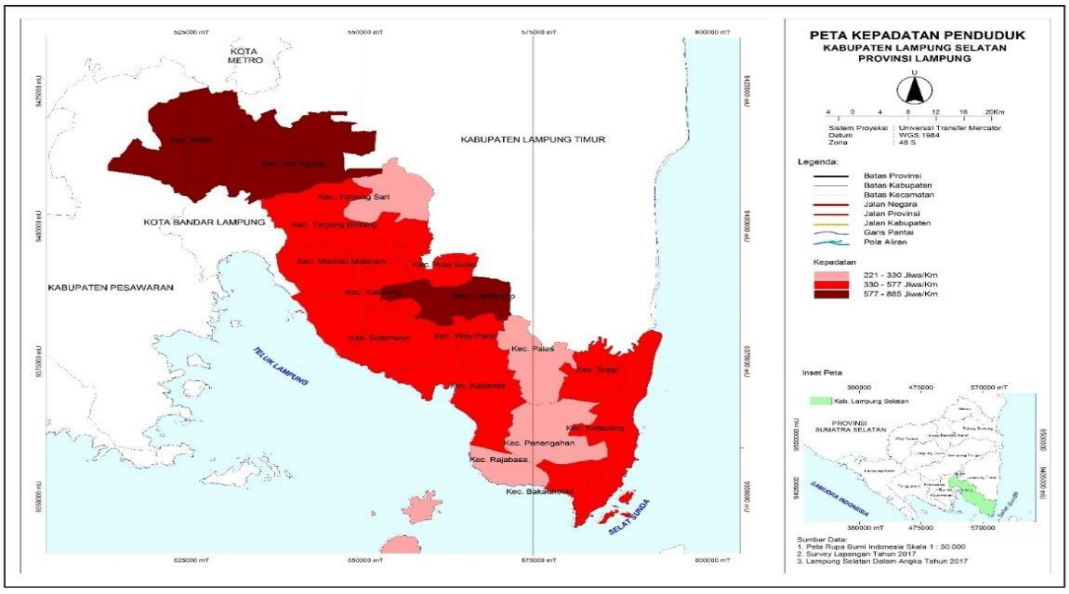
Penduduk Lampung Selatan cenderung lebih terkonsentrasi untuk menetap di daerah yang berbatasan dengan ibukota Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa daerah perbatasan mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hal ini juga berdampak pada kepadatan penduduk di daerah tersebut, Kecamatan Natar dan Jati Agung menjadi kecamatan terpadat di Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Kecamatan Candipuro.

Tabel 1.4. Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Lampung Selatan Semester II Tahun 2025

NO	WILAYAH	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5
	LAMPUNG SELATAN	304,104	62,707	366,811
2	TANJUNG BINTANG	24,610	4,662	29,272
3	KALIANDA	26,211	5,587	31,798
4	SIDOMULYO	18,874	4,177	23,051
5	KATIBUNG	19,992	4,375	24,367
6	PENENGAHAN	11,787	2,700	14,487
7	PALAS	17,702	4,068	21,770
8	JATI AGUNG	35,867	6,222	42,089
9	KETAPANG	15,198	3,353	18,551
10	SRAGI	10,303	2,533	12,836
11	RAJABASA	6,707	1,689	8,396
12	CANDIPURO	17,012	3,480	20,492
13	MERBAU MATARAM	16,338	3,399	19,737
14	BAKAUHENI	6,527	1,621	8,148
15	TANJUNG SARI	9,808	1,989	11,797
16	WAY SULAN	7,067	1,303	8,370
17	WAY PANJI	5,511	1,155	6,666

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, 20 Februari 2026

Gambar 1.10. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024



Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2025

Kawasan Selat Sunda merupakan jalur sibuk yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, berfungsi stategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi. Penetapan kawasan prioritas Nasional sebagaimana dimaksud berdasarkan pertimbangan: a) memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional karena menghubungkan transportasi laut Pulau Sumatera dan Pulau Jawa; dan b) memiliki potensi dikembangkan sebagai kawasan pariwisata terutama kawasan krakatau yang merupakan warisan dunia (*world heritage*).

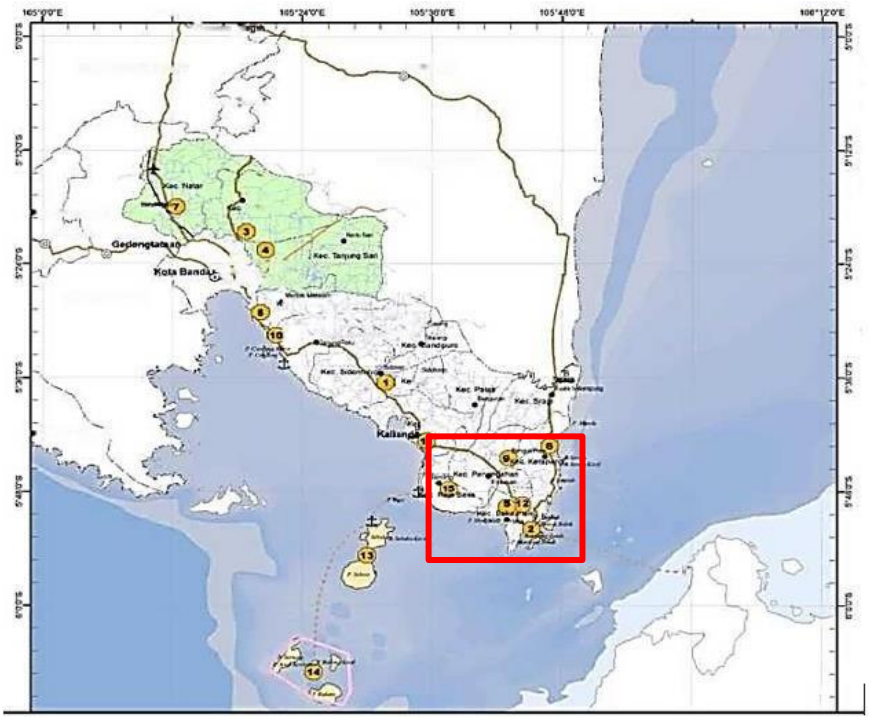
Selain Selat Sunda, di Kabupaten Lampung Selatan juga terdapat Kawasan Andalan Nasional, yaitu Kawasan Andalan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan kriteria pengembangan untuk perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

Dari tinjauan RT/RW Provinsi Lampung, dapat diketahui terdapat empat kawasan pengembangan Provinsi Lampung yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan.

Keempat kawasan strategis tersebut antara lain adalah:

1. Pembangunan Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni
   Pembangunan kawasan ini akan menjadi Hubungan Laut Utama menuju Kawasan Wisata Teluk Lampung (Gunung Anak Krakatau, Pulau Tegal Mas, Pahawang, Kiluan dan lain sebagainya) hingga Kawasan Pariwisata Pantai Barat Lampung. Telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Lampung, PT. ASDP, PT. Hutama Karya, dan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC pada Tanggal 19 Oktober 2019. Pembangunan ini akan mengintegrasikan lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung, ASDP dan Hutama Karya di wilayah Bakauheni dan bekerjasama dengan ITDC. Masterplan Kawasan dan *feasibility study* (FS) yang disusun oleh AECOM sedang diusulkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Gambar 1.11. Peta Kawasan dan Rencana Pola Ruang Kabupaten Lampung Selatan

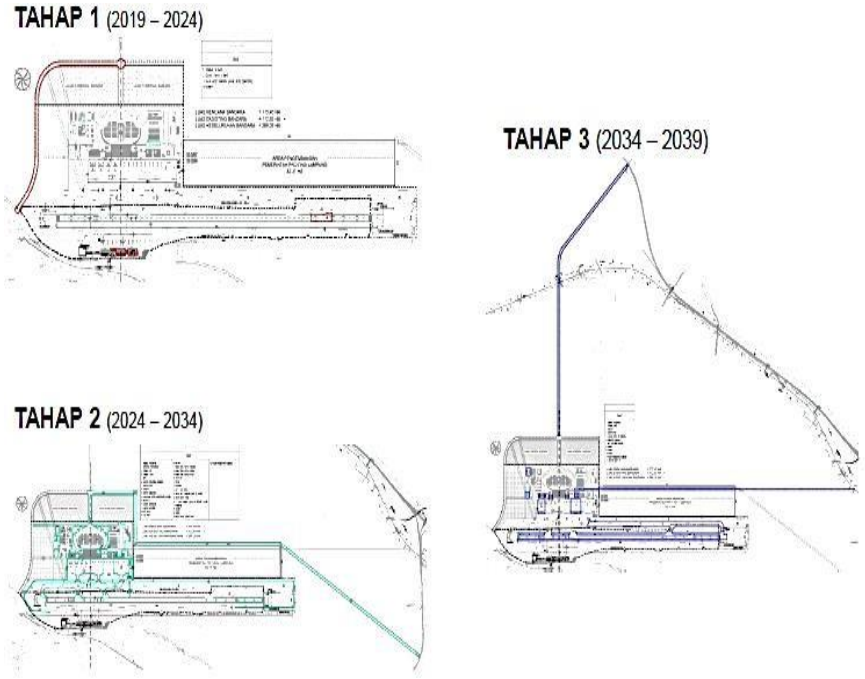


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan, 2023

2. Kawasan *Aerocity* Radin Inten II

Rencana Pengembangan kota bandara (*Aerocity*) untuk Bandara Radin Inten II terus dilakukan pembahasan bersama pihak terkait. Nantinya pengembangan *Aerocity* akan dikembangkan pada lahan seluas 2.000 Ha dengan konsep *Smart City* dan diharapkan menjadi bagian terintegrasi dari pengembangan Metropolitan Bandar Lampung. Untuk lokasi Bandara Radin Inten II masuk dalam kawasan strategis Metropolitan Bandar Lampung yang merupakan agenda Nasional dan akan diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dalam pengembangannya, Bandara Raden Inten II direncanakan akan dilaksanakan dalam tiga tahapan.

Gambar 1.12. Rencana Pentahapan Pengembangan Bandar Udara Radin Inten II



Sumber : Masterplan Bandar Udara Raden Inten II, 2023

3. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Lampung
   Pemerintah Provinsi Lampung akan mendirikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Nantinya, TPA akan mereduksi timbunan sampah sebanyak 1.000 ton perhari. TPA ini juga diharapkan bisa menjadi pusat pemusnahan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) diwilayah Sumatra.

4. Pembangunan *Sport Center* dan *Exhibition Center*
   Keinginan Lampung untuk menjadi Tuan Rumah PON 2024, yang harus diimbangi dengan penyiapan sarana dan prasarana olahraga baik yang sudah tersedia ataupun menyediakan area baru sebagai upaya pemenuhan fasilitas sekelas ajang olahraga tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Institut Teknologi Sumatera (ITERA) merencanakan pembangunan Pusat Kegiatan Olahraga (*Sport Centre*) di lingkungan kampus ITERA dengan luas lahan 50 Ha. Rancangan Prespektif Kawasan *Sport* dan *Convention Center* dibangun terpadu dengan berbagai fasilitas pendukung yang bertaraf internasional. ITERA juga membuat desain perencanaan pembangunan infrastruktur lain, seperti jembatan dan sistem mitigasi bencana yang akan dibangun di Provinsi Lampung.

Gambar 1.13. Rencana Pengembangan *Sport Center* dan *Exhibition Center*



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2021

5. Pembangunan Kereta Api Bandara Radin Inten II-Provinsi Lampung
   Dengan semakin tingginya intensitas pengguna Bandara Internasional Radin Inten II dibutuhkan infrastruktur penunjang guna mempermudah dan mempercepat akses menuju Bandara Radin Inten II berupa Kereta Bandara, saat ini sedang disusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Perhubungan, PT. Kereta Api Indonesia (KAI), Balai Teknik Perkeretaapian dan Pemerintah Provinsi Lampung.

6. Pembangunan *Shortcut* Tegineneng-Tarahan dan Jalur Bandar Lampung-Bakauheni
   Pemerintah Provinsi Lampung akan membangun *shortcut* jalur kereta api. Rencana tersebut untuk mengurangi kemacetan di Bandar Lampung serta mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya, khususnya mengatasi inefisiensi transportasi (kemacetan, kecelakaan, ekonomi biaya tinggi, kesemrawutan kota, dan lainnya) akibat aktivitas babaranjang. Hal tersebut dilakukan agar menghubungkan jalur kereta api eksisting menjadi jaringan jalur kereta api yang saling terhubung. Sehingga percepatan roda perekonomian, pembangunan bisa berpacu dengan cepat. Pembangunan *Shortcut* Tegineneng-Tarahan dan Jalur Bandar Lampung Bakauheni ini juga mendukung Program Nasional pembangunan jalur kereta api dari Tegineneng sampai Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dengan nama Kereta Api Trans Sumatera *Railways* atau Sumatera Trans Asia *Railways*.

Gambar 1.14. Rencana Pembangunan *Shortcut* Tegineneng-Tarahan dan Jalur Bandar Lampung-Bakauheni



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2023

7. Pembangunan *Double Track* (Ruas Batas Sumatera Selatan-Giham dan Kotabumi-Tarahan)

   Pembangunan *Double Track* (Ruas Batas Sumatera Selatan-Giham dan Kotabumi-Tarahan) Sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas lintas kereta api penumpang dan pengangkut batubara penyuplai energi listrik ke Pulau Jawa (Suralaya). Pengangkutan batubara melonjak pesat dari 11 juta ton/tahun (2014) menjadi ± 22 juta ton/tahun (2019) dan diperkirakan Tahun 2025 mencapai 45 juta ton/tahun (PT. KAI). Pembangunan *doubletrack* dapat menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi, *overload* kendaraan akibat angkutan batu bara, kemacetan lalu lintas akibat tingginya Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR).

Gambar 1.15. Rencana Pembangunan *Double Track* (Ruas Batas Sumatera Selatan-Giham dan Kotabumi-Tarahan)



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2024

8. Pembangunan Jalan Strategis dari *Exit* Tol Natar – Negeri Katon – Pringsewu

   Pembangunan jalan strategis ini bertujuan untuk mendukung konektivitas tol Trans Sumatera ke jalan Nasional Lintas Barat dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

9. Pengembangan Terminal Tipe A di Kotabaru

   Pengembangan ini mempertimbangkan semakin tingginya intensitas transportasi darat baik Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), sedangkan Terminal Tipe A Rajabasa sudah mulai jenuh dengan keterbatasan lahan, sehingga diperlukan pembangunan Terminal Tipe A baru dengan fasilitas berstandar bandar udara.

10. Kawasan Metropolitan Bandar Lampung

    Dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Lingkup dari kawasan metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Pengembangan kawasan metropolitan diarahkan sedemikian sehingga suatu pusat kegiatan dapat mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial ekonominya. Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan merupakan kecamatan yang akan dikembangkan menjadi kawasan Metropolitan Bandar Lampung. Dengan pengembangan Kawasan Metropolitan maka berbagai persoalan pembangunan dapat dieliminasi melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu, pengelolaan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan karena terciptanya ruang-ruang terbuka hijau lebih banyak, sementara di sisi lain berbagai aspek positif konsep metropolitan seperti, menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dari pada umumnya kawasan perkotaan serta ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang lebih efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi lainnya yang lebih baik dibandingkan kawasan perkotaan.

    Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Provinsi adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) prasarana perkotaan yang dikembangkan secara terpadu di Kota Metropolitan Bandar Lampung, pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.

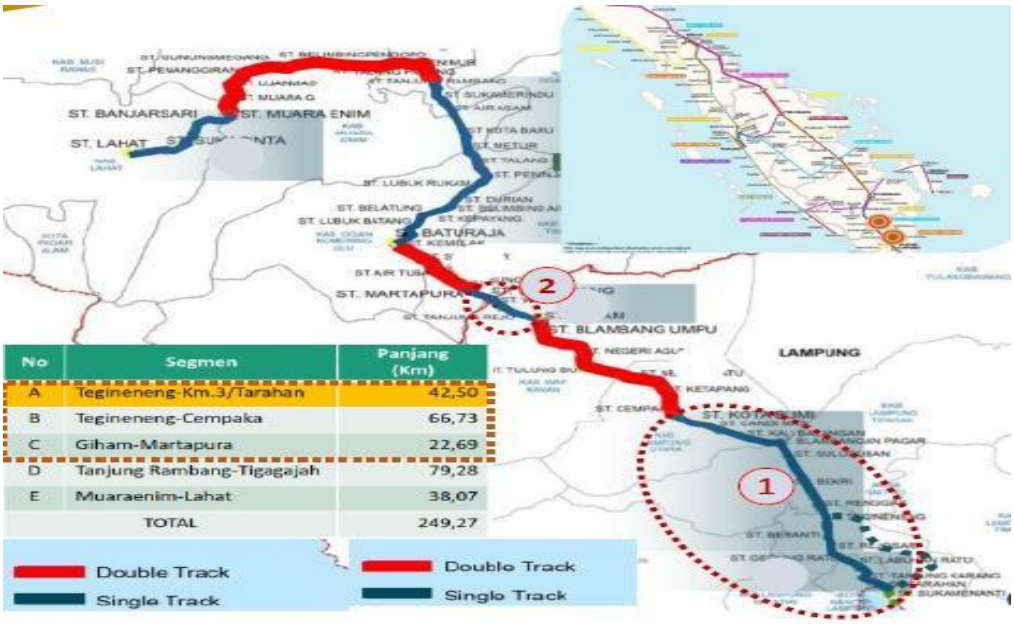
11. Kawasan Minapolitan

    Upaya pengembangan agribisnis yaitu usaha berbasis perikanan dalam arti luas, yang pada umumnya berlokus di kawasan perdesaan yang berbentuk Kawasan Minapolitan, sehingga pengembangan kawasan Minapolitan juga merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (perdesaan) yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Minapolitan pada prinsipnya merupakan suatu program kegiatan perikanan yang berupaya untuk mensinergikan kegiatan produksi bahan baku, pengolahan dan pemasaran dalam satu rangkaian kegiatan besar dalam satu kawasan atau wilayah yang terdiri dari sentra sentra produksi dan perdagangan, jasa, pemukiman dan kegiatan lainnya yang saling terkait. Salah satu Kabupaten yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi kawasan minapolitan adalah Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan 2011-2031, Kawasan minapolitan akan terpusat pada Kecamatan Ketapang yang termasuk dalam program Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP). Kawasan ini didorong untuk menjadi kawasan perikanan, minapolitan (perikanan air tawar dan udang) serta industri. Pengembangan kawasan ini juga didukung dengan pengembangan pelabuhan penangkapan ikan. Kecamatan Ketapang dalam rencana kegiatan minapolitan akan berfungsi sebagai pusat utama, dan beberapa kecamatan sentra penghasil lainnya seperti Kecamatan Sragi, Palas, Penengahan, Kalianda, Sidomulyo, Candipuro dan Kecamatan Bakauheni sebagai kawasan penyangga. Untuk mengoptimalkan fungsi kegiatan minapolitan, beberapa kawasan perlu di dukung dengan prasarana yang memadai.

12. Kawasan Industri Lampung di Kecamatan Tanjung Bintang

    Kawasan Industri Lampung (KAIL) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. Pengembangan kawasan ditujukan untuk membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah.

Gambar 1.16. Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan



No	Segmen	Panjang (Km)
A	Tegineneng-Km.3/Tarahan	42,50
B	Tegineneng-Cempaka	66,73
C	Giham-Martapura	22,69
D	Tanjung Rambang-Tigagajah	79,28
E	Muaraenim-Lahat	38,07
TOTAL		249,27

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan, 2024

13. Kawasan Pendidikan

Pada Tanggal 6 Oktober 2014, Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden telah meresmikan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. ITERA dirintis pendiriannya dan akan dikembangkan serta dibina oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan kualitas minimal setara dengan ITB. Program studi yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sumatera adalah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sarjana di Indonesia, khusunya di Sumatera. Dengan berdirinya ITERA di Kabupaten Lampung Selatan, menjadi salah satu wadah untuk mengakomodir masyarakat Lampung Selatan dalam rangka mendapatkan fasilitas pendidikan dengan standar Nasional serta sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Lampung Selatan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, kawasan pengembangan Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari beberapa kawasan sebagai berikut:

1. Kawasan dengan Sudut Kepentingan Ekonomi
   a. Kawasan Kalianda

      Kecamatan Kalianda memiliki hirarki fungsi perkotaan, dengan fungsi utama yaitu kawasan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, termasuk jasa pendukung pariwisata. Untuk menunjang ketiga fungsi utama tersebut maka disusun rencana pengembangan Kota

Kalianda. Diharapkan dengan pengembangan kota Kalianda, tentunya akan menjadi pemicu pertumbuhan kawasan perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan. Beberapa bentuk rencana pengembangan Kota Kalianda antara lain: i) Pelestarian Kota Tua Kalianda ii) Pembangunan dermaga bom sebagai wisata kuliner; iii) Pengembangan Kawasan Agrowisata dan iv) Pemanfaatan Lahan Kosong menjadi Kebun Edukasi, v) Pengembangan Kawasan Pantai Kalianda dari Dermaga Boom sampai dengan Kawasan Merak Belantung.

Gambar 1.17. Rencana Pengembangan Kawasan Agrowisata Way Handak



Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lampung Selatan, 2024

b. Kawasan Natar dan Jati Agung

Kecamatan Natar merupakan salah satu kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan bahwa Natar memiliki kelengkapan infrastruktur dan sarana yang dapat mendukung aktivitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Natar juga terlingkup sebagai salah satu wilayah yang berada dalam konstelasi Metropolitan Bandar Lampung. Pembangunan/ Pengembangan Bandara Branti (Bandara Radin Inten II) sebagai Bandara Embarkasi Haji dan Bandara Internasional Provinsi Lampung merupakan faktor lain yang dapat mendorong fungsi strategis Kecamatan Natar. Dengan demikian Natar ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dengan Kabupaten Lampung Selatan

dari sudut pandang kepentingan ekonomi dengan fungsi pengembangan fungsi perdagangan dan pengembangan bandara dengan fungsi sebagai Embarkasi Haji dan Bandara Internasional. Rencana pengembangan bandara dilakukan dengan menambah landasan pacu (*Run Way*), dan terminal tunggu baru. Selain itu pengembangan kawasan strategis natar ini juga didukung dengan rencana pengembangan Terminal Tipe A. Sehingga untuk menintegrasikan perkembangan kawasan Natar ini perlu disusun perencanaan kota dan kawasan dalam skala yang lebih detail sehingga pembangunan pada kawasan tersebut selaras dan terarah. Pengembangan kawasan Jati Agung direncanakan untuk Ibu Kota Daerah pengembangan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan.

c. Kawasan Industri Ketapang

Merupakan kawasan yang diharapkan menjadi pusat kegiatan perikanan serta menjadi daerah tujuan wisata. Perlu peningkatan aksesibilitas untuk pengembangan kawasan wisata pada masa mendatang berikut dengan fasilitas wisata di kawasan tersebut. Kawasan ini didorong untuk menjadi kawasan perikanan dan minapolitan. Pengembangan kawasan ini juga di dukung dengan pengembangan pelabuhan penagkapan ikan. Dengan demikian arahan pembangunan untuk Minapolitan Ketapang adalah perlunya disusun dokumen perencanaan dalam tingkat detail seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan, dan juga upaya penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman (RP4D) Kawasan Ketapang. Selain itu untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai kawasan minapolitan, perlu disusun kegiatan perencanaan dalam tingkat kebijakan maupun teknis sehingga Kawasan Minapolitan Ketapang, dapat memiliki pengaruh dan mendorong pertumbuhan kawasan sentra-sentra perikanan lainnya.

d. Kawasan Merbau Mataram

Untuk mengembangkan perekonomian Kabupaten Lampung Selatan, pada Kecamatan Merbau Mataram akan dibangun kawasan tracking batubara dari Kabupaten Muara Enim berupa Pelabuhan/Terminal Batubara. Kawasan ini merupakan terminal komoditas pertambangan terutama batu bara yang datang dari Sumatera Selatan untuk pemenuhan kebutuahan energi, baik di Provinsi Lampung maupun secara nasional. Disamping itu, terminal Batubara ini akan di dukung dengan pengembangan pelabuhan

khusus batubara di Katibung (Sebalang atau Tarahan) oleh PT. Bukit Asam, dengan jalur kereta api khusus. Dengan demikian untuk pertumbuhan kawasan ini, perlu dilakukan penataan kawasan agar sinergi dengan kawasan lainnya.

e. Kawasan Katibung

Katibung merupakan kawasan yang didorong untuk pertumbuhan kegiatan industri. Selain itu untuk mendukung pengembangan kegiatan industri pada kawasan ini direncanakan adanya terminal peti kemas. Pengembangan kawasan industri ini sangat dimungkinkan mengingat pada kawasan ini memiliki pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tarahan yang menjadi salah satu sumber energi utama bagi Provinsi Lampung. Selain itu pada kawasan ini juga akan dikembangkan pelabuhan tetes tebu. Untuk pengembangan lebih lanjut, pada kawasan ini perlu dipersiapkan rencana pengembangan yang terpadu dan dukungan pengembangan infrastruktur kawasan.

f. Kawasan Bakauheni

Bakauheni merupakan kawasan wisata, kawasan pelabuhan, pembangunan Pariwisata Terpadu Bakauheni *Harbour City*, Kawasan Wisata Teluk Lampung (Gunung Anak Krakatau, Pulau Tegal Mas, Pahawang, Kiluan dan lainnya) hingga Kawasan Pariwisata Pantai Barat Lampung, kawasan industri, serta pusat koleksi dan distribusi pengembangan pariwisata terutama wisata bahari. Kawasan Bakauheni memiliki peluang tumbuh yang sangat besar, karena menjadi penghubung antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sehingga mempermudah akses transportasi dan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dengan pesat. Selain itu kegiatan industri yang ada dapat mendorong pertumbuhan beberapa sektor lainnya seperti jasa dan permukiman. Adanya beberapa penetapan rencana tata ruang yang ada akan berpengaruh terhadap kawasan Bakauheni, terutama dengan adanya rencana penetapan Kecamatan Bakauheni sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), dapat meningkatkan kegiatan yang ada di dalam kawasan tersebut. Salah satunya ialah kegiatan ekonomi, yang akan memberikan dampak positif pada masyarakat dan pemasukan daerah. Oleh sebab itu, Bakauheni perlu dipersiapkan rencana dalam tingkat kedalaman rencana rinci sehingga kawasan ini dapat tumbuh secara optimal dan bersinergi dengan kawasan strategis provinsi.

g. Kawasan Agropolitan Sidomulyo dan Terminal Agribisnis Penengahan

Kawasan agropolitan merupakan satu kesatuan kawasan yang saling terkait dalam pengembangan kegiatan pertanian. Sidomulyo, ditetapkan sebagai kawasan agropolitan. Pada dasarnya agropolitan adalah suatu konsep pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat di perkotaan. Pengembangan agropolitan berarti mengembangkan kawasan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Mendorong penduduk untuk berusaha dan menanamkan modal di daerah perdesaan. Hal ini membuka peluang tumbuhnya penyediaan kebutuhan dasar seperti lapangan kerja, akses permodalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial-ekonomi dapat terpenuhi di desa. Pada dasarnya kawasan Agropolitan harus memenuhi kriteria yang antara lain mempunyai skala ekonomi yang besar, sehingga produktif untuk dikembangkan; mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang; memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah yang berbasis pertanian sebagai sumber bahan baku; memiliki produk-produk unggulan yang mempunyai pasar yang jelas dan prospektif; memenuhi prinsip-prinsip efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output yang maksimal. Dalam pengembangan kawasan agropolitan Sidomulyo ini, rencana pengembangan terminal agribisnis di Kecamatan Penengahan dapat melengkapi pengembangan kawasan agropolitan. Untuk itu perlu adanya upaya inventarisasi dan integrasi berupa penyusunan rencana strategis dan rencana induk sebelum melakukan pengembangan dan pembangunan kawasan agropolitan ini, sehingga kawasan ini dapat bersinergi secara dinamis.

h. Kawasan Pulau Sebesi dan Sebuku

Merupakan kawasan pulau dengan pemandangan alam pantai yang indah, sehingga dapat menarik para wisatawan dan menjadi daerah tujuan wisata Kedua pulau tersebut dapat menjadi kawasan wisata special interest yang bertujuan menjaring wisatawan dari golongan menengah keatas. Untuk mendukung rencana tersebut diperlukan prencanaan kawasan wisata Pulau Sibesi dan Pulau Sebuku. Pada kawasan ini juga dikembangkan aktivitas wisata yang terintegrasi dengan keberadaan Cagar Alam Laut (CAL) Krakatau. Untuk mendukung aktivitas tersebut, perlu disusun rencana induk pengembangan obyek wisata, serta upaya pemberdayaan

masyarakat sekitar. Pengembangan kawasan ini juga didukung dengan pengembangan pelabuhan Canti sebagai pelabuhan wisata.

i. Kawasan Pengembangan Exit Tol (Bakauheni Selatan, Bakauheni Utara, Kalianda, Sidomulyo, Tanjung Bintang, Kota Baru dan Natar)
Manfaat dari adanya Exit Tol di Kabupaten Lampung Selatan, secara keseluruhan memberikan kemudahan aksesibitas terhadap Infrastruktur dan Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Lampung Selatan seperti:
   - Optimlisasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur menuju Bandara Udara Raden Intan (exit tol Natar)
   - Dukungan Program Kegiatan terkait pembangunan Bakauheni *Harbour City* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni (exit tol Bakauheni)
   - Pengembangan Kawasan Pariwisata Merak Belantung dengan Optimalisasi daerah pesisir pantai Kalianda dan pembangunan Kawasan Agribisnis Kalianda (exit tol Sidomulyo atau Kalianda)
   - Kawasan Industri Tanjung Bintang (exit tol Lematang)
   - Optimalisasi Infrastruktur kawasan cepat tumbuh seperti Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Sidomulyo, dan Bakauheni, Kalianda.

2. Kawasan dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup
Kawasan Cagar Alam di kepulauan Krakatau di Selat Sunda Daerah Tingkat II Lampung Selatan, Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, sebagai Cagar Alam dan Cagar Alam Laut kawasan yang dilindungi. Cagar Alam Krakatau merupakan *World Heritage* (warisan dunia) yang patut di jaga kelestariannya. Sebagai Cagar Alam Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan, selain dikembangkan sebagai obyek wisata minat khusus (*special interest*).
Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah sumber air bersih. Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat penting karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah

tangga di daerah tersebut. Oleh sebab itu air yang diperlukan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit Kolera, tifus, disentri dan penyakit kulit. Sumber air yang masuk dalam kelompok air bersih adalah berasal dari, air kemasan, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung.

3. Kawasan dengan Sudut Kepentingan Teknologi Tinggi

Kawasan Gunung Rajabasa merupakan Cagar Alam Kepulauan Krakatau dan merupakan kawasan konservasi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 85/Kpts-II/1990 tanggal 26 Februari 1990, tentang Penunjukan Pulau Anak Krakatau Seluas ±130 ha beserta Perairan Pantai di sekitarnya seluas ±200 ha yang terletak adalah gunung berapi dengan kerucut vulkanik yang terdapat di Selat Sunda di bagian tenggara dari Sumatra, terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Memiliki puncak kawah dengan lebar 500x700 meter dengan bagian daratan berawa, gunung berapi diselimuti dengan berbagai vegetasi. Walaupun aktivitas fumarol terjadi di bagian kaki dan lereng gunung. Terjadi kenaikan aktivitas yang dilaporkan terjadi pada April 1863 dan Mei 1892 serta tidak diketahui kapan terjadi erupsi. gunung berapi dengan kerucut vulkanik yang terdapat di Selat Sunda di bagian tenggara dari Sumatra, terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Memiliki puncak kawah dengan lebar 500x700 meter dengan bagian daratan berawa, gunung berapi diselimuti dengan berbagai vegetasi. Walaupun aktivitas fumarol terjadi di bagian kaki dan lereng gunung. Terjadi kenaikan aktivitas yang dilaporkan terjadi pada April 1863 dan Mei 1892 serta tidak diketahui kapan terjadi erupsi.

Gunung Rajabasa kurang lebih berjarak 5 km dari Kota Kalianda ke arah selatan, terletak tidak jauh dari pantai sehingga gunung ini bisa terlihat dari laut pada penyeberangan Pelabuhan Merak - Pelabuhan Bakauheni. selain memiliki fungsi kawasan lindung juga memiliki potensi panas bumi yang dapat digunakan sebagai bahan pembangkit listrik panas bumi atau yang lebih dikenal dengan Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal (PLTG). Berdasarkan hal tersebut kawasan gunung rajabasa perlu perencanaan selain kawasan lindung juga sebagai kawasan sumber energi. Untuk ini perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian yang cukup intensif terkait eksploitasi panas bumi tersebut, sehingga fungsi

lindung Gunung Rajabasa tetap terjaga. Mekanisme pemanfaatan hutan lindung ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Peraturan pemerintah ini juga nantinya akan menjadi salah satu dasar untuk penyusunan rencana strategis pengelolaan kawasan Gunung Rajabasa.

2. Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Prubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Prubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe A;
d. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sumber Daya Aparatur;
e. Dinas Daerah, terdiri dari:
    1) Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
    2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
    3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang;

4) Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
5) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9) Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
10) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, dan Urusan Pemerintahan sub bidang Kehutanan;
11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
14) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan bidang Persandian;
15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan melekat Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat;
17) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;

19) Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan;
21) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
22) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
23) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
24) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan Urusan pelaksanaan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

e. Badan Daerah, terdiri dari:

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan;
2) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
4) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
5) Badan Kepegawaian dan Diklat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan; dan
6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dibidang perencanaan pembangunan.

f. Kecamatan, terdiri dari:

1) Kecamatan Natar dengan Tipe A;
2) Kecamatan Tanjung Bintang dengan Tipe A;
3) Kecamatan Kalianda dengan Tipe A;
4) Kecamatan Sidomulyo dengan Tipe A;
5) Kecamatan Katibung dengan Tipe A;
6) Kecamatan Penengahan dengan Tipe A;
7) Kecamatan Palas dengan Tipe A;
8) Kecamatan Jati Agung dengan Tipe A;

9) Kecamatan Ketapang dengan Tipe A;
10) Kecamatan Sragi dengan Tipe A;
11) Kecamatan Raja Basa dengan Tipe A;
12) Kecamatan Candi Puro dengan Tipe A;
13) Kecamatan Merbau Mataram dengan Tipe A;
14) Kecamatan Bakauheni dengan Tipe A;
15) Kecamatan Tanjung Sari dengan Tipe A;
16) Kecamatan Way Sulan dengan Tipe A; dan
17) Kecamatan Way Panji dengan Tipe A.

Selain perangkat daerah sebagaimana tersebut diatas, fungsi penunjang lain masih menunggu peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 1.5. Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Yang Menjadi Kewenangan Daerah

No.	Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)	Keterangan
1.	Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal
2.	Kesehatan	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
6.	Sosial	
No.	Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)	Keterangan
1.	Tenaga Kerja	
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3.	Pangan	
4.	Pertanahan	
5.	Lingkungan Hidup	
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9.	Perhubungan	
10.	Komunikasi dan Informatika	
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Koperasi dan Usaha Mikro
12.	Penanaman Modal	
13.	Kepemudaan dan Olahraga	
14.	Statistik	
15.	Persandian	
16.	Kebudayaan	

No.	Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)	Keterangan
17.	Perpustakaan	
18.	Kearsipan	
No.	Urusan Pilihan	Keterangan
1.	Kelautan dan Perikanan	Perikanan
2.	Pariwisata	
3.	Pertanian	
4.	Perdagangan	
5.	Kehutanan	Pengelolaan Taman hutan Raya (TAHURA) Kabupaten
6.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten
7.	Perindustrian	
8.	Transmigrasi	

3. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 12.111 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4556 orang dan perempuan sebanyak 7555 orang.

Tabel 1.6. Rekapitulasi ASN menurut Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

NO.	PANGKAT/GOL RUANG	CPNS		PNS		PPPK		PPPK PW		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	SEKOLAH DASAR			1	2	1		49	13	66
2	SLTP			6	1		1	59	29	96
3	SLTP KEJURUAN									0
4	SLTA			282	123	4		811	507	1,727
5	SLTA KEGURUAN			4				8	2	14
6	SLTA KEJURUAN			36	17	2		330	173	558
7	DIPLOMA I			3	5					8
8	DIPLOMA II			21	21			1		43
9	DIPLOMA III/SARJANA MUDA	3		88	423	6	28	162	351	1,061
10	DIPLOMA IV	1	3	28	267		5	3	60	367
11	S-1/SARJANA	24	18	1,107	2,309	140	539	975	2,223	7,335
12	S-2	2	2	376	400	5	1	10	20	816
13	S-3/DOKTOR			2	2					4
14	Profesi					4	8	2	2	16
	TOTAL	30	23	1,954	3,570	162	582	2,410	3,380	12,111

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 01 Januari 2026

Tabel 1.7. Rekapitulasi ASN menurut Golongan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

NO	PANGKAT/GOL RUANG	CPNS		PNS		PPPK		PPPK PW		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	I/c									0
2	I/d			2	1					3
3	II/a			13	1					14
4	II/b			17	9					26
5	II/c	3		56	33					92
6	II/d			132	140					272
7	III/a	25	21	165	348					559
8	III/b	2	2	376	896					1,276
9	III/c			281	449					730
10	III/d			456	830					1,286
11	IV/a			193	223					416
12	IV/b			155	323					478
13	IV/c			107	317					424
14	IV/d			1						1
15	I					1				1
16	III						1			1
17	V					6				6
18	VII					6	29			35
19	IX					141	545			686
20	X					7	7			14
21	XI					1				1
22	Paruh Waktu							2,410	3,380	5,790
	TOTAL	30	23	1,954	3570	162	582	2,410	3,380	12,111

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 01 Januari 2026

Tabel 1.8. Rekapitulasi ASN menurut Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

NO	INSTANSI	CPNS		PNS						PPPK					PPPK PW	JUMLAH
		II	III	I	II	III	IV	I	III	V	VII	IX	X	XI	L	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SEKRET. DPRD				2	20	7								37	66
2	SEKRETARIAT DAERAH		8		12	67	21								140	248
3	INSPEKTORAT		1		1	53	16								4	75
4	DINAS-DINAS	3	29	3	327	3,174	1,157	1	1	5	25	684	12		5,030	10,451
5	BADAN-BADAN		12		11	205	54			1		1			202	486
6	RUMAH SAKIT UMUM				19	144	39				10	1	2	1	198	414
7	KECAMATAN				29	138	25								179	371
	TOTAL	3	50	3	401	3,801	1,319	1	1	6	35	686	14	1	5,790	12,111

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 01 Januari 2026

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan Struktural di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil pendataan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2026 berjumlah 506 pegawai, Yang terdiri dari eselon dengan jumlah tertinggi yaitu Eselon IV.a sebesar 201 Pegawai, dan Eselon dengan jumlah terendah yaitu II.a sebesar 1 pegawai.

Tabel 1.9. Rekapitulasi ASN menduduki Jabatan Struktural

NO	JABATAN	CPNS		PNS		PPPK		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ESSELON II. a			1				1
2	ESSELON II. b			22	5			27
3	ESSELON III. a			54	15			69
4	ESSELON III. b			98	35			133
5	ESSELON IV. a			123	78			201
7	ESSELON II. a			48	27			75
	TOTAL	0	0	346	160	0	0	506

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 01 Januari 2026

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan JFU/JFT di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil pendataan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2026 berjumlah 5819 pegawai, Yang terdiri dari JFU sebesar 880 Pegawai, dan JFT sebesar 4939 pegawai.

Tabel 1.10. Rekapitulasi ASN menduduki Jabatan JFU/JFT

NO	JABATAN	CPNS		PNS		PPPK		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Jabatan Fungsional Umum	3	1	498	341	16	21	880
2	Jabatan Fungsional Tertentu	27	22	1,111	3,072	146	561	4,939
	TOTAL	30	23	1,609	3,413	162	582	5,819

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah pada 01 Januari 2026

Keterangan : terjadinya perubahan data pegawai

1. Menurunnya jumlah JFU disebabkan oleh berubahnya status CPNS menjadi PNS.
2. Bertambahnya JFT disebabkan alih status dari JFU menjadi JFT.

E. PERMASALAHAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

1. Permasalahan Strategis

Permasalahan utama (isu strategis) yang dihadapi oleh Kabupaten Lampung Selatan pada RPJMD 2021-2016 antara lain meliputi:

a. Rendahnya penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dari aspek pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial.
c. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan.
d. Belum berkembangnya ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi keunggulan daerah.
e. Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel.

Permasalahan utama (isu strategis) yang dihadapi oleh Kabupaten Lampung Selatan pada RPJMD 2025-2029 antara lain meliputi:

b. Degradasi Lingkungan yaitu adanya alih fungsi lahan pertanian, deforestasi, dan abrasi pantai.
c. Ekonomi lemah yaitu ketergantungan pada komoditas primer, nila tambah industri rendah.
d. Infrastruktur terbatas yaitu akses air bersih, listrik, dan jalan pedalaman beum merata.
e. SDM rendah yaitu angka kemiskinan dan stunting tinggi, akses Pendidikan terbatas.
f. Konflik lahan yaitu pertambangan versus lahan pertanian/permukiman.

2. Kebijakan strategis

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Selatan, maka ditetapkan 28 kebijakan pembangunan yang tertuang pada RPJMD 2021-2016 sebagai berikut:

1) Meningkatkan pengamalan dan penguatan nilai-nilai keberagamaan, ahlak mulia, moral, etika, budaya dan adab.
2) Peningkatan ketahanan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi keluarga.
3) Peningkatan cakupan pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat.
4) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat.
5) Memperluas lapangan pekerjaan.
6) Penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan pusat-pusat ekonomi strategis.
7) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

8) Penguatan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
9) Peningkatan Desa Siaga.
10) Penguatan Pemantauan Kawasan Kumuh dan Pola Ruang.
11) Peningkatan fungsi sistem jaringan irigasi.
12) Peningkatan akses sanitasi aman dan air minum.
13) Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan.
14) Mendorong perkembangan daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah.
15) Peningkatan pengawasan distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok.
16) Peningkatan produktivitas hasil pertanian.
17) Peningkatan penyuluhan dan pembinaan terhadap petani dan nelayan.
18) Mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja.
19) Mendorong terciptanya iklim perdagangan yang kondusif.
20) Mendorong perkembangan sektor pariwisata.
21) Mendorong perkembangan sektor industri.
22) Peningkatan kualitas pelayanan dan insentif penanaman modal.
23) meningkatkan ketahanan pangan daerah.
24) Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah.
25) Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah.
26) Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
27) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
28) Mendorong peningkatan inovasi daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Selatan, maka ditetapkan kebijakan pembangunan yang tertuang pada RPJMD 2025-2029 sebagai berikut:

1) Menumbuhkan dan memperkuat karakter Masyarakat Lampung Selatan yang berbasis nilai-nilai Pancasila, dan sadar akan pelestarian kebudayaan lokal.
2) Mewujudkan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan Masyarakat yang demokratis.
3) Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan Lampung Selatan yang digital, akuntabel, partisipatif, dan berbasis kinerja untuk mendukung pelayanan publik yang efisien dan responsive.
4) Mewujudkan Masyarakat Lampung Selatan yang sehat dan cerdas melalui peningkatan layanan Kesehatan dan Pendidikan dasar yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.
5) Meningkatkan aksesibilitas, kualitas infrastruktur dasar, dan pelayanan public secara adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

6) Mengoptimalkan potensi pamtai dan pegunungan Lampung Selatan secara berkelanjutan.
7) Meningkatkan peran strategis dan pengaruh Kabupaten Lampung Selatan dalam kemitraan Pembangunan lintas daerah, nasional dan internasional secara aktif, inovatif, dan berkelanjutan.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun 2024. Capaian kinerja Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif, menjelaskan secara ringkas pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2024.

Bab I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, ruang lingkup, gambaran umum, permasalahan dan kebijakan strategis.

Bab II. Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 meliputi RPJMD Tahun 2021-2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

(jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Bab IV. Penutup, menjelaskan simpulan umum dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Perencanaan Strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 ayat (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenLampung Selatan 2021-2026.

Kedudukan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 5 (lima) tahun pada tahap ke-18 dari RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025. Dokumen perencanaan ini dalam perkembangannya dapat mengalami perubahan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau

penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RPJMD dapat berubah jika adanya perubahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu pasal 282 ayat (1) huruf (c) bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar. Selanjutnya diperjelas pada ayat (2) bahwa perubahan yang mendasar sebagaimana disebut pada ayat (1) Huruf (c) mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

1. Visi

1.1. Visi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

Pengertian Visi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 harus dicapai pada tahun 2025. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan tidak sepenuhnya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah, namun juga menyesuaikan dengan RPJM Nasional dan Provinsi.

Visi Kabupaten Lampung Selatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

"*Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong*".

Uraian lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- Masyarakat Berintegritas: Masyarakat yang memiliki sikap konsistensi atau keteguhan yang tidak bisa tergoyahkan dalam menjunjung nilai-nilai keyakinan dan prinsip;
- Masyarakat Maju: ditandai dengan meningkatnya: kualitas sumberdaya manusia, pendapatan rata-rata masyarakat, ketersediaan infrastruktur, kehidupan demokrasi, serta keamanan dan ketertiban;

- Masyarakat Sejahtera: masyarakat yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, kemampuan pendayagunaan segenap sumberdaya alam, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, yang dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana. Kebutuhan rohani ditunjukkan oleh kondisi masyarakat yang memahami, menyadari dan melaksanakan ajaran agama masing-masing;
- Semangat Gotong Royong: pelaksanaan nilai-nilai kehidupan sehari-hari harus dilandasi semangat saling hormat-menghormati, toleransi, tolong-menolong, bermusyawarah untuk mufakat, serta solidaritas sosial.

1.2 Visi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.

Visi Kabupaten Lampung Selatan periode 2025-2029 adalah "Mewujudkan Lampung Selatan Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Secara filosofis, visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Lampung Selatan Maju
  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata "maju" merujuk pada membawa ke dalam keadaan yang lebih baik (sempurna dan sebagainya); menjadikan berkembang. Lampung Selatan Maju merujuk pada upaya peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat menuju kualitas kehidupan yang baik, berdaya saing, dan berkelanjutan. Indonesia Emas 2045 Indonesia Emas 2045 merujuk pada visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045.
- Indonesia Emas 2045
  menggambarkan cita-cita Indonesia pada usia 100 tahun kemerdekaannya untuk menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Makna utama diantaranya adalah:
  a) Negara Maju
     - Indonesia memiliki perekonomian yang kuat, masuk ke jajaran 5–6 besar dunia.
     - Pendapatan per kapita tinggi (kelas menengah ke atas secara global).
  b) Kesejahteraan Merata
     - Tingkat kemiskinan sangat rendah.
     - Kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok menurun.
     - Layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dapat diakses seluruh rakyat.

c) SDM Unggul
   - Generasi muda memiliki kompetensi, kreativitas, dan daya saing global.
   - Bonus demografi (2020-2035) dimanfaatkan maksimal sehingga tenaga kerja produktif mendominasi.

d) Berdaulat dan Mandiri
   - Mampu mengelola kekayaan alam sendiri dengan teknologi modern.
   - Pangan, energi, dan industri strategis tidak bergantung penuh pada negara lain.

e) Demokrasi Kuat dan Pemerintahan Bersih
   - Penegakan hukum adil, bebas korupsi, dan transparan.
   - Sistem politik stabil dan partisipasi masyarakat tinggi.

f) Lingkungan Berkelanjutan
   - Pembangunan tidak merusak ekosistem.
   - Energi terbarukan menjadi prioritas.

2. Misi

2.1 RPJMD Tahun 2021-2026.

Pengertian Misi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Lampung Selatan untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- Misi I "Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat".
  Misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kerukunan kehuidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kabupaten Lampung Selatan. Ada tiga point penting yang diangkat dalam misi ini yaitu nilai-nilai agama, budaya, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Keempat point tersebut menjadi proyeksikan menjadi pilar penting dalam kehidupan bermasayarakat.
- Misi 2 "Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial".
  Misi ini merupakan upaya untuk meingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

- Misi 3 “Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan”.
  Misi ini merupakan upaya untuk pembangunan infrastruktur dan menghubungkan pusat-pusat perekonomian wilayah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
- Misi 4 “Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah”.
  Misi ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif untuk memperkokoh fondasi ekonomi regional Kabupaten Lampung Selatan dimasa yang akan datang.
- Misi 5 “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel”.
  Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah, meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun agenda kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.
1. Peningkatan nilai toleransi beragama.
2. Pelestarian seni dan budaya daerah.
3. Peningkatan kesetaraan gender dan peran serta keluarga.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan social.
1. Peningkatan pelayanan dan pemerataan pendidikan.
2. Peningkatan pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Misi 3 : Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan.
1. Penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah dan pusat-pusat pertanian, industri dan pariwisata.
2. Peningkatan akses informasi dan komunikasi.

Misi 4 : Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah.
1. Pemantapan ketahanan pangan daerah.

2. Peningkatan nilai tambah produk unggulan kabupaten (padi, jagung, kelapa, pisang, udang, rumput laut, ikan air tawar, sapi dan ayam) guna meningkatkan daya saing daerah.
3. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel.

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia birokrasi untuk mendukung pelayanan publik.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan inovasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

2.2 Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Lebih lanjut penjabaran visi di atas dijabarkan kedalam tujuh misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan visi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah langkah, yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi disusun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi isu isu strategis, faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal, berupa variabel kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, termasuk didalamnya melakukan evaluasi interaksi antar dan antara berbagai faktor tersebut, untuk kemudian menetapkan Misi daerah.

Adapun Misi yang ditetapkan guna mewujudkan Visi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasarkan falsafah pancasila.

Misi 2 : Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan aman dan damai

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance

Misi 4 : Memajukan dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan

Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berkeadilan dan berkelanjutan

Misi 6 : Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju

Misi 7 : Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan antar Daerah, Nasional dan Internasional.

3. Tujuan

3.1 Tujuan RPJMD Tahun 2021-2026

Pengertian tujuan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Instansi Pemerintahan, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Berikut ini tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan antara lain:

a. Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan :
Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis.

b. Misi 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial dengan tujuan :
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

c. Misi 3 : Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan dengan tujuan :
Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah.

d. Misi 4 : Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah dengan tujuan :
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh.

e. Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel dengan tujuan :

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Responsif, dan Transparan.

3.2 Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berdasarkan visi, misi dan isu isu strategis yang ada.

Tujuan diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Tujuan dapat mencakup beberapa prioritas pembangunan untuk mendukung Asta Cita, dan tidak terbatas pada:

a. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan;
b. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan;
c. Peningkatan produktivitas daerah;
d. Penguatan daya saing SDM berkelanjutan;
e. Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju;
f. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
g. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasarkan falsafah pancasila.

Tujuan : Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab

Misi 2 : Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan aman dan damai

Tujuan : Masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan aman dan damai

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance

Tujuan : Tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance

Misi 4 : Memajukan dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan

Tujuan : Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju secara berkelanjutan

Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berkeadilan dan berkelanjutan

Tujuan : Pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan

Misi 6 : Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju

Tujuan : Wilayah pantai dan pegunungan Kabupaten Lampung Selatan semakin maju

Misi 7 : Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan antar Daerah, Nasional dan Internasional

Tujuan : Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan antar Daerah, Nasional dan Internasional

Tabel 2.1. Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET (2026)
							2021	2026	
Visi : Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong									
1	Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat	1	Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	73,40	74.50	75,00
				2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	77,47	79,00	80,00
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan social	1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,50	71,00	71,00
				2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,50	11.50	11,00
3	Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan	1	Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	1	Indeks Infrastruktur	Persen	73,03	76.50	77,00
				2	Indeks Konektivitas Antar Wilayah		72,61	74,80	75,00
4	Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah	1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,00	5,00	5,00
				2	PDRB ADHB	(Juta/Rp)	45,600	48,300	49.000
5	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel	1	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Demokratis, Responsif, dan Transparan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,00	74,00	75,00

Tabel 2.2. Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Kondisi Awal dan Target Jangka Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029

MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET (2030)
							2025	2029	
Visi : **MEWUJUDKAN LAMPUNG SELATAN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045**									
1	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	1	Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)	Angka	74,07	75,41	75,75
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan social Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	1	Indeks Demokrasi Indonesia (Angka)	Angka	79,36	81,37	81,88
3	Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan	1	Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	1	Nilai Survei Penilaian Integritas (Angka)	Angka	74,50	78,50	79,50
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*	1	Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*	1	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	Angka	72.55	74,17	74,58
5	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel Berkeadilan dan Berkelanjutan	1	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Demokratis, Responsif, dan Transparan	1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	4,89	6,12	6,47
				2	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	12,01	10,01	9,56
6	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Wilayah Pantai dan Pegunungan yang Maju	1	Wilayah Pantai dan Pegunungan Kabupaten Lampung Selatan Semakin Maju	1	Indeks Ekonomi Hijau (Angka)	Angka	59,19	61,11	61,60

MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET (2030)
							2025	2029	
Visi : **MEWUJUDKAN LAMPUNG SELATAN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045**									
7	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan Antar Daerah, Nasional dan Internasional	1	Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan antar Daerah, Nasional dan Internasional	1	Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	Angka	3,26	3,46	3,51

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yanglebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam Rencana Strategis/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Lampung Selatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

4.1 Sasaran Strategis RPJMD 2021-2026

a. Tujuan : Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis

Sasaran : 1) Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial.
2) Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat.
3) Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak.

b. Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan

Sasaran : 1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat.
2) Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat.
3) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.
4) Meningkatnya pendapatan masyarakat.
5) Menurunnya pengangguran.
6) Menurunya desa tertinggal.

c. Tujuan : Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah

Sasaran : 1) Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalulintas.
2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah.
3) Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh.
4) Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru.

d. Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh.

Sasaran : 1) Stabilitas inflasi daerah.
2) Meningkatnya nilai tukar petani (NTP).
3) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
4) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
5) Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
6) Meningkatnya investasi penanaman modal.
7) Meningkatnya kemandirian pangan daerah.

e. Tujuan : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Responsif, dan Transparan

Sasaran : 1) Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi.
2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP).
3) Meningkatnya kemandirian fiskal daerah.
4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
5) Meningkatnya Inovasi Daerah.

4.2 Sasaran Strategis RPJMD 2025-2029

a. Tujuan : Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab

Sasaran : 1) Peningkatan kehidupan masyarakat yang berkebudayaan maju
2). Peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama

b. Tujuan : Masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan aman dan damai

Sasaran : 1) Peningkatan penegakan hukum dan keamanan daerah
2) Peningkatan pelaksanaan penegakan demokrasi

c. Tujuan : Tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance*

Sasaran : Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital

d. Tujuan : Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju secara berkelanjutan

Sasaran : 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
2) Peningkatan akses dan mutu pendidikan
3) Peningkatan keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif

e. Tujuan : Pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan

Sasaran :
1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif
2) Perluasan lapangan pekerjaan
3) Peningkatan akses dan mutu infrastruktur daerah
4) Peningkatan desa mandiri, inklusif dan berkelanjutan

f. Tujuan : Wilayah pantai dan pegunungan Kabupaten Lampung Selatan semakin maju

Sasaran :
1) Peningkatan industry pengolahan yang sinergi, optimal dan berkelanjutan
2) Peningkatan daya tarik pariwisata
3) Peningkatan produktivitas UMKM, koperasi dan BUMD
4) Pelestarian lingkungan hidup
5) Peningkatan kesiagaan bencana

g. Tujuan : Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan antar Daerah, Nasional dan Internasional

Sasaran : Peningkatan daya saing daerah untuk mendukung perekonomian domestik dan global

Tabel 2.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

MISI/TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KONDISI AWAL		TARGET				
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat													
1	Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama				73,10	73,40	73,70	73,90	74,20	74,50	75,00
			1	Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	73,10	73,40	73,70	73,90	74,20	74,50	75,00
		2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya				77,47	77,47	78,00	78,50	78,70	79,00	80,00
			1	Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat	1	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (poin)	77,47	77,47	78,00	78,50	78,70	79,00	80,00
			2	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	1	Indeks Pembangunan Gender (poin)	89,60	89,72	89,90	90,00	90,20	90,70	91,00
					2	Indeks Pemberd ayaan Gender (poin)	59,40	59,52	59, 70	59,90	61,00	61,50	62,00
					3	Pencapaian Kabupaten Layak anak (level)	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan social													
2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				69,26	69,50	69,76	70,26	70,76	71,00	71,00
			1	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat	1	Angka rata rata lama sekolah (angka tahun)	7,69	7,79	7,89	8,00	8,10	8,20	8,30
					2	Angka Harapan Lama Sekolah (angka)	11,32	11,5	11,7	11,9	12	12,2	12,5
					3	Cab ang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	4	5	5	6	6	7	7
			2	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	1	Usia harapan hidup (tahun)	69,33	69,60	69,90	70,20	70,50	70,80	71,00
			3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (persen)	0,84	0,80	0,75	0,75	0,72	0,71	0,70

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KONDISI AWAL		TARGET				
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2	Persentase Penduduk Miskin					14,08	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00
				1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1	Persentase Penduduk Miskin (persen)	14,08	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00
						2	Indeks Gini (poin)	0,299	0,299	0,285	0,282	0,280	0,281	0,279
				2	Menurunnya pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (persen)	5,19	5,00	4,50	4,30	4,10	3,70	3,50
						2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	64,34	64,50	65,00	66,00	66,00	67,00	67,00
				3	Menurunya Desa tertinggal	1	Indeks Desa Membangun (poin)	0,684	0,701	0, 734	0,765	0,786	0,803	0,815
Misi 3 : Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan														
3	Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	1	Indeks Konektivitas Antar Wilayah					72,14	72,61	73,01	73,65	74,10	74,80	75,00
				1	Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunya angka kecelakaan lalu lintas	1	Persentase Jalan Mantap (persen)	81,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00
						2	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (poin)	27,71	25,00	24,00	24,00	23,00	23,00	22,00
		2	Indeks Infrastruktur					72,56	73,03	74,06	75,00	75,90	76,50	77,00
				1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	60,50	60,89	61,41	61,93	62,45	62,84	63,23
						2	Indeks Resiko Bencana (poin)	187,2	185,0	182,0	180,0	178,0	176,0	175,0
				2	Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	1	Luasan kawasan kumuh (55,63 ha)	37,00	30,83	28,83	27,83	26,83	26,25	26,11
						2	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik (persen)	51,72	52,00	53,00	54,00	56,20	57,90	60,00
						3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang aman (persen)	94,18	95,15	96,12	97,09	98,06	99,03	100,00

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KONDISI AWAL		TARGET				
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						4	Persentase Rumah tangga yang s ud ah terlayani ole h akses penyediaan air minum layak (persen)	81,30	81,68	82,00	82,31	82,62	82,93	83,00
						5	Persentase Rasio Elektrifikasi (Persen)	97	98	99	100	100	100	100
				3	Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru	1	Usulan pembentukan daerah otonomi Baru (usulan)	0	0	0	1	1	1	1
Misi 4 : Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah														
4	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	1	Pertumbuhan Ekonomi					-1,73	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00
				1	Stabilitas inflasi daerah	1	Laju Ting kat Inflasi (persen)	3,28	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)
				2	Me ning katnya Nilai Tukar Petani (NTP)	1	NTP (poin)	96	102	103	104	105	105	106
		2	PDRB ADHB					44.299	45.600	46.200	47.100	47.900	48.300	49.000
				1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1	Persentase ko ntribusi sektor perdag ang an terhadap PDRB (persen/proxy)	12,33	12,33	12,45	12,50	12,70	12,80	12,80
				2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1	Persentase ko ntribusi sektor pariwis ata terhad ap PDRB (perse n/Pro xy)	1,67	2,00	2,50	2,70	2,80	2,90	3,00
				3	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1	Persentase ko ntribusi sektor ind ustri terhadap PDRB (perse n/Pro xy)	24,00	24,00	24,00	25,00	25,00	25,50	25,70
				4	Meningkatnya investasi penanaman modal	1	Persentase peningkatan investasi penanaman modal (persen)	10	10	10	10	10	10	10
				5	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	1	Indeks Ketahanan Pangan (poin)	79,23	80,00	80,50	80,60	80,80	80,90	81,00

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KONDISI AWAL		TARGET				
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel													
5	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Responsif, dan Transparan	1	Indeks Reformasi Birokrasi				69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
				1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	1	Indeks Merit (kategori)	II (kurang)	II (kurang)	II (kurang)	II (kurang)	III (baik)	III (baik)	III (baik)
						2	Maturitas SPIP (nilai)	3,083	3,083	3,083	3,083	3,084	3,084	3,084
				2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	1	Nilai SAKIP (Predikat)	B	B	B	B	BB	BB	BB
						2	OPINI BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				3	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan (Persen)	12,56	12,66	12,79	13,00	13,20	13,50	13,50
				4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) (poin)	80,78	81,00	81,00	82,00	82,00	83,00	84,00
				5	Meningkatnya Inovasi Daerah	1	Indeks Inovasi Daerah (level)	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 2.4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	MEWUJUDKAN LAMPUNG SELATAN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045										
1.	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab		Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)	74,07	74,40	74,74	75,07	75,41	75,75	
			Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)	56,16	56,78	57,40	58,03	58,67	59,32	
			Peningkatan Kerukunan Hidup antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)	74,07	74,40	74,74	75,07	75,41	75,75	
2.	Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai		Indeks Demokrasi Indonesia (Angka)	79,36	79,86	80,36	80,86	81,37	81,88	
			Peningkatan Penegakan Hukum dan Keamanan Daerah	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (Angka)	79,36	79,86	80,36	80,86	81,37	81,88	
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*	Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*		Nilai Survei Penilaian Integritas (Angka)	74,50	75,50	76,50	77,50	78,50	79,50	
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	2,63	2,70	2,77	2,84	2,92	2,99	
				Terbentuknya Daerah Otonomi Baru (Angka)	1	1	1	1	1	1	
4.	Memajukan dan Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara Berkelanjutan	Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju secara Berkelanjutan		Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	72,55	72,95	73,36	73,76	74,17	74,58	
			Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,59	74,78	74,97	75,15	75,34	75,53	
				Prevalensi Stunting (%)	10	9,6	9,4	9,2	9	8,8	
			Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,81	7,83	7,85	7,87	7,89	7,91	
			Peningkatan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Angka)	64,38	65,02	65,67	66,33	66,99	67,66	
5.	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dengan	Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,89	5,17	5,47	5,78	6,12	6,47	
				Tingkat Kemiskinan (%)	12,01	11,47	10,96	10,47	10,01	9,56	
			Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif	Inflasi (%)	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2,5-3,5	

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Berkeadilan dan Berkelanjutan		Perluasan Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,65	4,56	4,41	4,32	4,11	4,00	
			Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi (%)	12,40	12,41	12,42	12,43	12,44	12,45	
			Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri (%)	8,20	8,59	8,98	9,38	9,77	10,16	
6.	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Wilayah Pantai dan Pegunungan yang Maju	Wilayah Pantai dan Pegunungan Kabupaten Lampung Selatan Semakin Maju		Indeks Ekonomi Hijau (Angka)	59,19	59,66	60,14	60,62	61,11	61,60	
			Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	23,59	23,69	23,78	23,88	23,97	24,07	
			Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,50	1,50	1,51	1,51	1,52	1,53	
			Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	11,81	12,07	12,34	12,61	12,88	13,17	
			Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	66,68	66,93	67,18	67,44	67,69	67,94	
			Peningkatan Kesiagaan Bencana	Indeks Risiko Bencana (Angka)	185,95	184,46	182,99	181,52	180,07	177,20	
7.	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan Antar Daerah, Nasional dan Internasional	Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan antar Daerah, Nasional dan Internasional		Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3,26	3,30	3,35	3,40	3,46	3,51	
			Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global	*Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) (Angka)	6,98	6,80	6,63	6,47	6,31	6,15	

5. Strategi

5.1 Sasaran Strategi RPJMD 2021-2026

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan Visi dan Misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang.

Dari hasil analisa, maka dapat dirumuskan strategi pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD 2021-2026

Visi: Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat					
1	Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis	1	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	1	Meningkatkan pengamalan dan penguatan nilai-nilai keberagamaan, ahlak mulia, moral, etika, budaya dan adab
		2	Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat	2	Peningkatan ketahanan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi keluarga
		3	Meningkatnya pembangunan gender dan pemenuhan hak anak		
Misi 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial					
2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	1	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat	1	Peningkatan cakupan pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat
		2	Meningkatnya kualitas Derajat kesehatan masyarakat	2	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat
		3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk		
		4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	3	Memperluas lapangan pekerjaan
		5	Menurunnya Pengangguran		
		6	Menurunya Desa tertinggal	4	Penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan pusat-pusat ekonomi strategis

Visi: Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong					
Misi 3 : Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan					
3	Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	1	Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunya angka kecelakaan lalu lintas	1	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan
		2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	2	penguatan pemantauan kualitas lingkungan hidup
				3	Peningkatan Desa Siaga
		3	Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	4	Penguatan Pemantauan Kawasan Kumuhdan Pola Ruang
				5	Peningkatan fungsi sistem jaringan irigasi
				6	Peningkatan akses sanitasi aman dan air minum
				7	Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan
		4	Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru	8	Mendorong perkembangan daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah
Misi 4 : Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah					
4	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	1	Stabilitas Inflasi daerah	1	Peningkatan pengawasan distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok
		2	Meningkatnya Nilai Tukar Petani	2	Peningkatan produktivitas hasil pertanian
				3	Peningkatan penyuluhan dan pembinaan terhadap petani dan nelayan
		3	Pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	4	mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja
		4	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	5	Mendorong terciptanya iklim perdagangan yang kondusif
		5	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	6	mendorong perkembangan sektor pariwisata
		6	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	7	mendorong perkembangan sektor industri
		7	Meningkatnya investasi penanaman modal	8	peningkatan kualitas pelayanan dan insentif penanaman modal
		8	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	9	meningkatkan ketahanan pangan daerah
Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel					
5	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Responsif, dan Transparan	1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	1	Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah
		2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	2	Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah
		3	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	3	Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah
		4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
		5	Meningkatnya Inovasi Daerah	5	Mendorong peningkatan inovasi daerah

5.2 Sasaran Strategi RPJMD 2025-2029

Tabel 2.6. Penahapan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Strategi Pembangunan				
				Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab	Menumbuhkan dan memperkuat karakter masyarakat Lampung Selatan yang berbasis nilai-nilai Pancasila, dan sadar akan pelestarian kebudayan lokal	Lampung Selatan Berbudaya	1. Mengembangkan kurikulum muatan lokal daerah bagi peserta didik 2. Menciptakan hubungan baik dengan forum kerukunan umat beragama, komunitas adat, sanggar seni dan UMKM budaya 3. Melestarikan warisan budaya Lampung Selatan 4. Menyelenggarakan festival budaya Lampung Selatan 5. Memetakan potensi unggulan kebudayaan daerah baru	1. Meningkatkan edukasi masyarakat khususnya peserta didik melalui implementasi muatan lokal 2. Mendorong peran aktif forum kerukunan umat beragama, komunitas adat, sanggar seni dan UMKM budaya 3. Melestarikan warisan budaya Lampung Selatan 4. Meneyelenggarakan festival budaya Lampung Selatan secara rutin 5. Mengembangkan potensi unggulan kebudayaan daerah baru	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan edukasi muatan lokal yang implementatif 2. Meningkatkan peran aktif forum kerukunan umat beragama, komunitas adat, sanggar seni dan UMKM budaya 3. Melestarikan warisan budaya Lampung Selatan 4. Meneyelenggarakan festival budaya Lampung Selatan secara rutin 5. Mengembangkan potensi unggulan kebudayaan daerah baru	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan edukasi muatan lokal yang implementatif 2. Meningkatkan peran aktif forum kerukunan umat beragama, komunitas adat, sanggar seni dan UMKM budaya 3. Melestarikan warisan budaya Lampung Selatan 4. Meneyelenggarakan festival budaya Lampung Selatan secara rutin 5. Mengembangkan potensi unggulan kebudayaan daerah baru	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan edukasi muatan lokal yang implementatif 2. Meningkatkan peran aktif forum kerukunan umat beragama, komunitas adat, sanggar seni dan UMKM budaya 3. Melestarikan warisan budaya Lampung Selatan 4. Meneyelenggarakan festival budaya Lampung Selatan secara rutin 5. Mengembangkan potensi unggulan kebudayaan daerah baru
Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	Mewujudkan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat yang demokratis	Lampung Selatan Damai	1. Meningkatkan forum komunikasi dengan pihak keamanan dan masyarakat 2. Mengoptimalkan forum kewaspadaan dini masyarakat 3. Meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang berlaku 4. Membentuk produk hukum daerah dalam upaya meningkatkan keamanan daerah 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi	1. Meningkatkan forum komunikasi dengan pihak keamanan dan masyarakat 2. Mengoptimalkan forum kewaspadaan dini masyarakat 3. Meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang berlaku 4. Membentuk produk hukum daerah dalam upaya meningkatkan keamanan daerah 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi	1. Meningkatkan forum komunikasi dengan pihak keamanan dan masyarakat 2. Mengoptimalkan forum kewaspadaan dini masyarakat 3. Meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang berlaku 4. Membentuk produk hukum daerah dalam upaya meningkatkan keamanan daerah 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi	1. Meningkatkan forum komunikasi dengan pihak keamanan dan masyarakat 2. Mengoptimalkan forum kewaspadaan dini masyarakat 3. Meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang berlaku 4. Membentuk produk hukum daerah dalam upaya meningkatkan keamanan daerah 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi	1. Meningkatkan forum komunikasi dengan pihak keamanan dan masyarakat 2. Mengoptimalkan forum kewaspadaan dini masyarakat 3. Meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang berlaku 4. Membentuk produk hukum daerah dalam upaya meningkatkan keamanan daerah 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Lampung Selatan yang digital,	Lampung Selatan Digital Melayani	1. Meningkatkan reformasi birokrasi yang adaptif	1. Meningkatkan implementasi dan evaluasi reformasi birokrasi	1. Meningkatkan implementasi dan evaluasi	1. Meningkatkan implementasi dan evaluasi	1. Meningkatkan implementasi dan evaluasi reformasi

Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Strategi Pembangunan				
				Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*	Prinsip *Good Governance*	akuntabel, partisipatif, dan berbasis kinerja untuk mendukung pelayanan publik yang efisien dan responsif		2. Meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Daerah 3. Meningkatkan kolaborasi antar unsur *pentahelix* 4. Mengembangkan digitalisasi layanan pemerintahan 5. Meningkatkan inovasi daerah 6. Mendukung administratif atas potensi pengembangan daerah otonomi baru	2. Meningkatkan implementasi atas nilai SAKIP Pemerintah Daerah 3. Meningkatkan kolaborasi unsur pentahelix plus 4. Meningkatkan digitalisasi layanan pemerintahan secara terpadu 5. Meningkatkan inovasi daerah yang berkelanjutan 6. Mendukung administratif atas potensi pengembangan daerah otonomi baru	reformasi birokrasi secara komprehensif 2. Meningkatkan implementasi atas nilai SAKIP Pemerintah Daerah 3. Meningkatkan kolaborasi unsur pentahelix plus 4. Meningkatkan digitalisasi layanan pemerintahan secara terpadu 5. Meningkatkan inovasi daerah yang berkelanjutan 6. Mendukung administratif atas potensi pengembangan daerah otonomi baru	reformasi birokrasi secara komprehensif 2. Meningkatkan implementasi atas nilai SAKIP Pemerintah Daerah 3. Meningkatkan kolaborasi unsur pentahelix plus 4. Meningkatkan digitalisasi layanan pemerintahan secara terpadu 5. Meningkatkan inovasi daerah yang berkelanjutan 6. Mendukung administratif atas potensi pengembangan daerah otonomi baru	birokrasi secara kompre hensif 2. Meningkatkan implementasi atas nilai SAKIP Pemerintah Daerah 3. Meningkatkan kolaborasi unsur pentahelix plus 4. Meningkatkan digitalisasi layanan pemerintahan secara terpadu 5. Meningkatkan inovasi daerah yang berkelanjutan 6. Mendukung administratif atas potensi pengembangan daerah otonomi baru

Memajukan dan Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara Berkelanjutan	Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju secara Berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat Lampung Selatan yang sehat dan cerdas melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan dasar yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan	Lampung Selatan Maju SDM	1. Pengembangan Sekolah Unggulan 2. Pengembangan Sekolah Rakyat 3. Mendorong Program Pendidikan Non Formal yang merupakan kewenangan Kabupaten 4. Wajib Belajar 13 Tahun 5. Penanganan anak tidak sekolah dengan memastikan keberlanjutan pendidikan dari tiap jenjangnya 6. Pengelolaan Organisasi Pemuda 7. Wirausaha Muda 8. Makan Bergizi Gratis 9. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan	1. Pengembangan Sekolah Unggulan 2. Pengembangan Sekolah Rakyat 3. Mendorong Program Pendidikan Non Formal yang merupakan kewenangan Kabupaten 4. Wajib Belajar 13 Tahun 5. Penanganan anak tidak sekolah dengan memastikan keberlanjutan pendidikan dari tiap jenjangnya 6. Pengelolaan Organisasi Pemuda 7. Wirausaha Muda 8. Makan Bergizi Gratis 9. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan	1. Pengembangan Sekolah Unggulan 2. Pengembangan Sekolah Rakyat 3. Mendorong Program Pendidikan Non Formal yang merupakan kewenangan Kabupaten 4. Wajib Belajar 13 Tahun 5. Penanganan anak tidak sekolah dengan memastikan keberlanjutan pendidikan dari tiap jenjangnya 6. Pengelolaan Organisasi Pemuda 7. Wirausaha Muda 8. Makan Bergizi Gratis 9. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan	1. Pengembangan Sekolah Unggulan 2. Pengembangan Sekolah Rakyat 3. Mendorong Program Pendidikan Non Formal yang merupakan kewenangan Kabupaten 4. Wajib Belajar 13 Tahun 5. Penanganan anak tidak sekolah dengan memastikan keberlanjutan pendidikan dari tiap jenjangnya 6. Pengelolaan Organisasi Pemuda 7. Wirausaha Muda 8. Makan Bergizi Gratis 9. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan	1. Pengembangan Sekolah Unggulan 2. Pengembangan Sekolah Rakyat 3. Mendorong Program Pendidikan Non Formal yang merupakan kewenangan Kabupaten 4. Wajib Belajar 13 Tahun 5. Penanganan anak tidak sekolah dengan memastikan keberlanjutan pendidikan dari tiap jenjangnya 6. Pengelolaan Organisasi Pemuda 7. Wirausaha Muda 8. Makan Bergizi Gratis 9. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada

Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Strategi Pembangunan				
				Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)

				Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan Peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C 10. Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat 11. Pemeriksaan kesehatan gratis 12. Melanjutkan program keluarga harapan dan memastikan hak kaum disabilitas 13. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar, Lembaga Kursus, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) 14. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan 15. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas 16. Revitalisasi Pendidikan Non Formal 17. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Stunting, peningkatan gizi	Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan Peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C 10. Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat 11. Pemeriksaan kesehatan gratis 12. Melanjutkan program keluarga harapan dan memastikan hak kaum disabilitas 13. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar, Lembaga Kursus, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) 14. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan 15. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas 16. Revitalisasi Pendidikan Non Formal 17. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Stunting, peningkatan gizi	Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan Peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C 10. Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat 11. Pemeriksaan kesehatan gratis 12. Melanjutkan program keluarga harapan dan memastikan hak kaum disabilitas 13. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar, Lembaga Kursus, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) 14. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan 15. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas 16. Revitalisasi Pendidikan Non Formal 17. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Stunting, peningkatan gizi	Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan Peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C 10. Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat 11. Pemeriksaan kesehatan gratis 12. Melanjutkan program keluarga harapan dan memastikan hak kaum disabilitas 13. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar, Lembaga Kursus, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) 14. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan 15. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas 16. Revitalisasi Pendidikan Non Formal 17. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Stunting, peningkatan gizi	RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan Peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C 10. Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat 11. Pemeriksaan kesehatan gratis 12. Melanjutkan program keluarga harapan dan memastikan hak kaum disabilitas 13. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar, Lembaga Kursus, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) 14. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan 15. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas 16. Revitalisasi Pendidikan Non Formal 17. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Stunting, peningkatan gizi usia sekolah, usia produktif, lansia serta Keluarga Berencana (KB) dan

Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Strategi Pembangunan				
				Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)

Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Strategi Pembangunan				
				Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
				usia sekolah, usia produktif, lansia serta Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Produksi, pemeriksaaan gratis, Penyakit Tidak Menular (PTM), Tuberkulosis (TBC), Kesehatan Jiwa	usia sekolah, usia produktif, lansia serta Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Produksi, pemeriksaaan gratis, Penyakit Tidak Menular (PTM), Tuberkulosis (TBC), Kesehatan Jiwa	usia sekolah, usia produktif, lansia serta Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Produksi, pemeriksaaan gratis, Penyakit Tidak Menular (PTM), Tuberkulosis (TBC), Kesehatan Jiwa	usia sekolah, usia produktif, lansia serta Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Produksi, pemeriksaaan gratis, Penyakit Tidak Menular (PTM), Tuberkulosis (TBC), Kesehatan Jiwa	Kesehatan Produksi, pemeriksaaan gratis, Penyakit Tidak Menular (PTM), Tuberkulosis (TBC), Kesehatan Jiwa
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Berkeadilan dan Berkelanjutan	Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas infrastruktur dasar, dan pelayanan publik secara adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan Membangun	1. Meningkatkan kualitas jalan kabupaten prioritas pendukung pariwisata 2. Percepatan penyelesaian RTRW 3. Verifikasi dan validasi luasan kawasan kumuh 4. Meningkatkan akses rumah layak huni 5. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa 6. Mengembangkan Koperasi Merah Putih 7. Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, penanganan kerawanan pangan, dan peningkatan pengolahan pangan lokal 8. Penguatan Dasar Sistem Cadangan dan Distribusi	1. Meningkatkan kualitas jalan kabupaten prioritas pendidikan dan kesehatan 2. Penyediakan fasilitasi umum di kawasan kumuh 3. Meningkatkan akses rumah layak huni 4. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa 5. Mengembangkan Koperasi Merah Putih 6. Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, penanganan kerawanan pangan, dan peningkatan pengolahan pangan lokal 7. Perluasan Aksesibilitas dan Ketersediaan Pangan	1. Meningkatkan kualitas jalan kabupaten prioritas pendidikan dan kesehatan 2. Penyediakan fasilitasi umum di kawasan kumuh 3. Meningkatkan akses rumah layak huni 4. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa 5. Mengembangkan Koperasi Merah Putih 6. Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, penanganan kerawanan pangan, dan peningkatan pengolahan pangan lokal 7. Penguatan Keamanan dan Kualitas Pangan	1. Meningkatkan kualitas jalan kabupaten prioritas pendidikan dan kesehatan 2. Penyediakan fasilitasi umum di kawasan kumuh 3. Meningkatkan akses rumah layak huni 4. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa 5. Mengembangkan Koperasi Merah Putih 6. Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, penanganan kerawanan pangan, dan peningkatan pengolahan pangan lokal 7. Peningkatan Nilai Tambah dan Pengolahan Pangan Lokal	1. Meningkatkan kualitas jalan kabupaten prioritas pendidikan dan kesehatan 2. Penyediakan fasilitasi umum di kawasan kumuh 3. Meningkatkan akses rumah layak huni 4. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa 5. Mengembangkan Koperasi Merah Putih 6. Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, penanganan kerawanan pangan, dan peningkatan pengolahan pangan lokal 7. Kemandirian dan Kesejahteraan Pangan Masyarakat

Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Strategi Pembangunan				
				Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Wilayah Pantai dan Pegunungan yang Maju	Wilayah Pantai dan Pegunungan Kabupaten Lampung Selatan Semakin Maju	Mengoptimalkan potensi pantai dan pegunungan Lampung Selatan secara berkelanjutan	Lampung Selatan Harmoni Wisata	1. Memetakan potensi pariwisata daerah (*existing* dan baru) 2. Mengembangkan konsep pariwisata terpadu (agroeduwisata) 3. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan 4. Membentuk Pertanian Anak Nusantara 5. Mengembangkan koperasi dan UMKM produktif 6. Akselerasi fasilitasi sertifikasi halal 7. Menyusun perencanaan pembangunan berbasis risiko bencana 8. Menguatkan peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan	1. Mengembangkan konsep pariwisata terpadu (agroeduwisata) 2. Membangun sarana dan prasarana dasar pendukung konsep agroeduwisata 3. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan 4. Mengembangkan Pertanian Anak Nusantara 5. Meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM produktif 6. Menguatkan lembaga dan SDM pendukung ekosistem halal 7. Membangun sarana mitigasi bencana 8. Menguatkan peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan	1. Mengembangkan konsep pariwisata terpadu (agroeduwisata) 2. Membangun fasilitas umum pendukung konsep agroeduwisata 3. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan 4. Meningkatkan Pertanian Anak Nusantara 5. Optimalisasi hilirisasi produk pertanian dan perikanan 6. Modernisasi pertanian 7. Meningkatkan produktivitas dan manajemen risiko pada koperasi dan UMKM produktif 8. Mengembangkan kebijakan ekosistem halal 9. Membangun sarana mitigasi dan penanganan bencana 10. Menguatkan peran masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam	1. Mengembangkan konsep pariwisata terpadu (agroeduwisata) 2. Membangun konsep agroeduwisata secara komprehensif 3. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan 4. Meningkatkan Pertanian Anak Nusantara 5. Optimalisasi hilirisasi produk pertanian dan perikanan 6. Modernisasi pertanian 7. Meningkatkan daya saing produk pada koperasi dan UMKM 8. Menguatkan kemitraan ekosistem halal 9. Membangun sarana mitigasi dan penanganan bencana 10. Menguatkan peran masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam	1. Mengembangkan konsep pariwisata terpadu (agroeduwisata) 2. Membangun konsep agroeduwisata secara komprehensif 3. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan 4. Meningkatkan Pertanian Anak Nusantara 5. Optimalisasi hilirisasi produk pertanian dan perikanan 6. Modernisasi pertanian 7. Meningkatkan daya saing produk pada koperasi dan UMKM 8. Mengembangkan riset pendukung ekosistem halal 9. Membangun sarana mitigasi dan penanganan bencana 10. Menguatkan peran masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam
Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan Antar Daerah, Nasional dan Internasional	Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan antar Daerah, Nasional dan Internasional	Meningkatkan peran strategis dan pengaruh Kabupaten Lampung Selatan dalam kemitraan pembangunan lintas daerah, Nasional dan Internasional secara aktif, inovatif, dan berkelanjutan	Lampung Selatan Aktif Bergaul	1. Mengembangkan kapasitas dan branding daerah 2. Meningkatkan kemitraan aktif dalam daerah 3. Meningkatkan peran serta daerah dalam event Nasional	1. Meningkatkan kapasitas dan branding daerah 2. Meningkatkan kemitraan aktif dalam dan luar daerah Provinsi Lampung 3. Meningkatkan peran serta daerah dalam event Nasional	1. Meningkatkan branding dan daya saing daerah 2. Meningkatkan kemitraan aktif dalam dan luar daerah secara Nasional 3. Meningkatkan peran serta daerah dalam event Nasional dan Internasional 4. Mengembangkan event Nasional	1. Meningkatkan branding dan daya saing daerah 2. Meningkatkan kemitraan aktif dalam dan luar daerah secara Nasional 3. Meningkatkan peran serta daerah dalam event Nasional dan Internasional 4. Meningkatkan event Nasional	1. Meningkatkan branding dan daya saing daerah 2. Meningkatkan kemitraan aktif secara Nasional dan Internasional 3. Meningkatkan peran serta daerah dalam event Nasional dan Internasional 4. Mengembangkan event berskala Internasional 5. Menjalin kerjasama berupa pertukaran pengetahuan dan teknologi melalui sister city

6. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk usaha tindak lanjut dari pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai arahan atau panduan bagi pemerintah daerah agar optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan arah Kebijakan tahunan pembangunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.7. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026 berdasarkan strategi

Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan pengamalan dan penguatan nilai-nilai keberagamaan, ahlak mulia, moral, etika, budaya dan adab.	Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka peningatan kualitas jati diri dalam pergaulan daerah, nasional dan internasional melalui penguatan dan peningkatan peran kelembagaan lintas agama
2	Peningkatan ketahanan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi keluarga	Memperkuat peran pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan keluarga serta penguatan ketahanan pangan
3	Peningkatan cakupan pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas cakupan pendidikan yang mencakup tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pendidikan dan pengembangan kemitraan pendidikan
4	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan fasilitas kesehatan, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, kesadaran kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan
5	Memperluas lapangan pekerjaan	Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja
6	Penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan pusat-pusat ekonomi strategis	Percepatan pengurangan angka kemiskinan melalui pengembangan pusat-pusat ekonomi strategis dan pengembangan ekonomi kreatif
7	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	Peningkatan kinerja pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terutama pada wilayah-wilayah agribisnis, pariwisata, dan industri
8	penguatan pemantauan kualitas lingkungan hidup	Pemantapan pembangunan berwawasan lingkungan
9	Peningkatan Desa Siaga	Pemantapan Kelembagaan Lokal
10	Penguatan Pemantauan Kawasan Kumuh dan Pola Ruang	Pemantapan kualitas penataan ruang
11	Peningkatan fungsi sistem jaringan irigasi	Peningkatan dan pemeliharaan fungsi jaringan irigasi serta menjaga kualitas lingkungan
12	Peningkatan akses sanitasi aman dan air minum	Pemantapan pengelolaan sumber daya air yang mampu menjaga keberlangsungan sumber daya air

Strategi		Arah Kebijakan
13	Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan	Pengembangan jaringan tenaga listrik yang efektif dan efisien
14	Mendorong perkembangan daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah	Pemantapan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan strategis
15	Peningkatan pengawasan distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok	pemerataan pembangunan infrastruktur penunjang
16	Peningkatan produktivitas hasil pertanian	Pemantapan dalam peningkatan produktivitas pertanian, kelautan, dan perikanan melalui pengembangan Kawasan agropolitan sebagai penunjang pengembangan sektor pertanian
17	Peningkatan penyuluhan dan pembinaan terhadap petani dan nelayan	Pemantauan kualitas produk
18	mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja	Pemantapan dan peningkatan usaha dan investasi
19	Mendorong terciptanya iklim perdagangan yang kondusif	Pengawasan persaingan usaha yang sehat
20	mendorong perkembangan sektor pariwisata	Pemantapan pengelolaan wilayah pantai
21	mendorong perkembangan sektor industri	Pemantapan industri kelautan dan industri kecil dan menengah
22	peningkatan kualitas pelayanan dan insentif penanaman modal	Pemantapan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien
23	meningkatkan ketahanan pangan daerah	Optimalisasi produksi sektor pertanian
24	Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah	Pemantapan kinerja aparatur
25	Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Pemantapan sumber daya manusia yang berkualitas
26	Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Optimalisasi potensi PAD
27	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Optimalisasi pelayanan publik
28	Mendorong peningkatan inovasi daerah	pengembangan inovasi dan penelitian yang implementatif

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan arah Kebijakan tahunan pembangunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.8. Arah Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029

No	Misi	Arah Pembangunan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila	Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar
2	Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Penguatan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial dan Stabilitas Makroekonomi Daerah	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*	Penguatan pondasi kelembagaan pemerintah, penerapan manajemen risiko kepemerintahan, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit.	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
4	Memajukan dan Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara Berkelanjutan	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan Pendidikan menengah)	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Penyelesaian Kemiskinan

No	Misi	Arah Pembangunan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Peningkatan dan Pemerataan SDM yang berkualitas	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Pemenuhan pelayanan dasar, bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.	Penyelesaian Kemiskinan
		Perluasan upaya promotif- preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, Kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan Kesehatan Universal	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana- prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Pencegahan dan pengendalian penyakit	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya	
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan Stunting	Pemenuhan Pelayanan Dasar

No	Misi	Arah Pembangunan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan Pendidikan bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan Rentan	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
5	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Berkeadilan dan Berkelanjutan	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	Penyelesaian Kemiski-nan
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Penguatan riset dan inovasi bidang pertanian dalam arti luas dan industri Penyempurnaan pondasi regulasi di bidang ekonomi	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
		Pengembangan produk unggulan pertanian, perikanan, dan Jasa Pariwisata	Penguatan Ekonomi Lokal
		Peningkatkan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk	Penguatan Ekonomi Lokal
		Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Penguatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Peningkatan konsumsi listrik per Kapita	Penyelesaian Kemiskinan

No	Misi	Arah Pembangunan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan intensitas energi/primer	Penyelesaian Kemiskinan
		Penurunan ketidakcukupan konsumsi pangan	Penyelesaian Kemiskinan
		Peningkatan kapasitas air baku	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
6	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Wilayah Pantai dan Pegunungan yang Maju	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Pengembangan produk unggulan pertanian, perikanan, dan Jasa Pariwisata	Penguatan Ekonomi Lokal
7	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan Antar Daerah dan Nasional	Peningkatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/ teknologi Terapan	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri lokal	Penguatan Ekonomi Lokal
		Pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global.	Penguatan Ekonomi Lokal
		Pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
		Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

No	Misi	Arah Pembangunan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pembangunan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative Advantage	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
		Pemenuhan Kebutuhan pangan secara sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	Penguatan Ekonomi Lokal
		Pembangunan pusat-pusat Pertumbuhan ekonomi baru Melalui Peningkatan investasi dan Perluasan kesempatan kerja Dengan memperhatikan keberlanjutan Lingkungan	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
		Pembangunan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
		Pemenuhan Kebutuhan pangan secara sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	Penyelesaian Kemiskinan
		Peningkatan aksesibilitas dan Konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi local	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Pembangunan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.	Penyelesaian Kemiskinan
		Pengembangan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

7. Kebijakan dan Program

7.1 Kebijakan dan Program RPJMD 2021-2026

Kebijakan umum merupakan sarana untuk mencapai tujuan disertai target yang hendak dicapai. Kebijakan umum yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan guna mempertajam Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ke dalam pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/terstruktur.

Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 disusun sebagai tahap operasional dari upaya untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun ke depan yang menggambarkanketerkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan:

Tabel 2.9. Program Prioritas RPJMD Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/ Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
MISI 1 : MENINGKATKAN PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA DAN KELUARGA DALAM KEHIDUPAN	TUJUAN 1 : Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis	SASARAN 1 : Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA (%)	Satuan Polisi Pamong Praja
				2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Natar
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Tanjung Bintang
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Kalianda

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Sidomulyo
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Katibung
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Penengahan
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Palas
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Jati Agung
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Ketapang
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Sragi
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Rajabasa
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Candipuro

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Merbau Mataram
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Bakauheni
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Tanjung Sari
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Way Sulan
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kecamatan Way Panji
				3	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase pendidikan, sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan dalam satu tahun (orang)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	porsentase partisipasi partai politik dalam pemilu kada (orang)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		SASARAN 2 : Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (poin)	1	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase keberfungsian sosial penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (%)	Dinas Sosial
				2	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola secara terpadu (%)	Dinas Sosial
				3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS dan LSM dan OKP yang difasilitasi peningkatan kapasitas organisasi (bulan)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan umat beragama (kelompok)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	porsentase pemantauan pelaporan dan evaluasi pelaporan perkembangan politik (orang)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		SASARAN 3 : Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	- Indeks Pembangunan Gender (poin)	1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Perlindungan Anak
			- Indeks Pemberdayaan Gender (poin)	2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan bantuan hukum (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			- Pencapaian Kabupaten Layak Anak (level)	3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase meningkatnya ekonomi keluarga dan menurunnya jumlah desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Penggunaan Program Sistem Data Gender dan Anak (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (Indeks)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus anak oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BAIK SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL	TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	SASARAN 1 : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat	- Angka rata rata lama sekolah (angka tahun)	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Pertisipasi Sekolah (APS) PAUD, SD, SMP	Dinas Pendidikan
			- Angka Harapan Lama Sekolah (angka)	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD, SMP, Angka Kelulusan SD, SMP	Dinas Pendidikan
			- Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemerataan Tenaga pendidik di Kabupaten Lampung Selatan (%)	Dinas Pendidikan
				4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Penerbitan Izin Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan (%)	Dinas Pendidikan
				5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase pemerataan Tenaga pendidik di Kabupaten Lampung Selatan (%)	Dinas Pendidikan
				6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda (%)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga (%)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka aktif (%)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				9	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan mutu perpustakaan desa dan sekolah (%)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				10	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan (%)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				11	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan penataan arsip daerah (%)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				12	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terjaga dan terpelihara (%)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				13	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota (%)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat di Kab. Lampung Selatan (Indeks)	Dinas Kesehatan
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata lama perawatan di Rumah Sakit (AvLOS = Average Length Of Stay) (hari)	RSUD Bob Bazar
				2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi (%	Dinas Kesehatan
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM bidang kesehatan yang memiliki kompetensi (%)	RSUD Bob Bazar
				3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan
				4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga	Dinas Kesehatan
		SASARAN 3 : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (%)	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Peserta Keluarga Berencana Aktif (%)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB Aktif (%)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/ Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		SASARAN 4 : Meningkatnya pendapatan masyarakat	- Persentase penduduk miskin (%)	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang menerima pemberdayaan sosial dengan memanfaatkan sumber dana sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Dinas Sosial
			- Indeks Gini (poin)	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	Dinas Sosial
				3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak-Anak Terlantar, Fakir Miskin, Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang telah menerima jaminan sosial (%)	Dinas Sosial
				4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang ditata dan penyelesaian permasalahan administrasi dan kelembagaan (%)	Sekretariat Daerah
		SASARAN 5 : Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka /TPT (%)	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang menjalani pelatihan kerja berbasis kompetensi (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota(%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		SASARAN 6 : Menurunnya Desa tertinggal	Indeks Desa Membangun (poin)	1	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa melalui kerjasama dengan BUMDes (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah desa yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Adat Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional yang Terlatih (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Natar
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Tanjung Bintang
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Kalianda
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Sidomulyo
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Katibung
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Penengahan
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Palas
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Jati Agung
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Ketapang
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Sragi
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Rajabasa
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Candipuro
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Merbau Mataram

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Bakauheni
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Tanjung Sari
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Way Sulan
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	Kecamatan Way Panji
				6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina	Kecamatan Tanjung Bintang
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	Kecamatan Kalianda
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	Kecamatan Sidomulyo
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	Kecamatan Penengahan
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	Kecamatan Palas
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina	Kecamatan Jati Agung
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	Kecamatan Ketapang
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	Kecamatan Rajabasa
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	Kecamatan Candipuro
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	Kecamatan Merbau Mataram
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	Kecamatan Bakauheni
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	Kecamatan Way Sulan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	Kecamatan Way Panji
MISI 3 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN	TUJUAN 1 : Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	SASARAN 1 : Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunya angka kecelakaan lalu lintas	- Persentase Jalan Mantap (%)	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya kualitas layanan jalan (aksesabilitas) antar pusat kegiatan dan konektivitas jaringan jalan kabupaten (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			- Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (poin)	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	▪ VC Ratio (Rasio) ▪ Rasio Konektivitas Kabupaten (Rasio) ▪ Persentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (%) ▪ Persentase fasilitas perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang tersedia (%)	Dinas Perhubungan
				3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Level Transportasi Pelayaran (%)	Dinas Perhubungan
				4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Level Keselamatan Tamsportasi Perkeretaapian (%)	Dinas Perhubungan
		SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	▪ Jumlah desa yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (desa) ▪ Presentase kecapatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat bencana (jam)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			- Indeks Resiko Bencana (poin)	2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	Dinas Sosial
				4	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kab/Kota (dokumen)	Dinas Lingkungan Hidup
				5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sungai yang dipantau untuk IKA (sungai)	Dinas Lingkungan Hidup

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH di perkotaan (%)	Dinas Lingkungan Hidup
				7	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase pengendalian limbah B3 dan Limbah B3 (%)	Dinas Lingkungan Hidup
				8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap PUU Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				9	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah MHA yang diakui (lembaga)	Dinas Lingkungan Hidup
				10	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan (kali)	Dinas Lingkungan Hidup
				11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada lembaga masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
				12	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase tindak lanjut penangan pengaduan LH sesuai perundang-undangan	Dinas Lingkungan Hidup
				13	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah Perusahaan Pengelola Energi Baru Terbarukan yang memiliki izin	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		SASARAN 3 : Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	- Luasan kawasan kumuh (55,63 ha)	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan sumber daya air dan persentase wilayah pantai dan sungai yang terlindungi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			- Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik (%)	2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Komunal dan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			- Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang aman (%)	3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya Rumah Tangga yang sampahnya terkelola (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			- Persentase rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak (%)	4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Rumah Tangga yang bersanitasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			- Persentase Rasio Elektrifikasi (%)	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (jumlah bangunan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Terwujudnya Bangunan Gedung Yang Laik Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan dan kualitas hasil jasa konstruksi (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Ketaatan Terhadap RTRW (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Masyarakat korban bencana dan relokasi yang memperoleh pelayanan rumah layak huni (%)	Dinas Perumahan dan Permukiman
				11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Dinas Perumahan dan Permukiman
				12	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman
				13	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	Dinas Perumahan dan Permukiman
				14	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang tersertifikasi dan teregistrasi (%)	Dinas Perumahan dan Permukiman
				15	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				16	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sampah yang terkelola dalam penanganan sampah (ton)	Dinas Lingkungan Hidup
		SASARAN 4 : Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru	Usulan pembentukan daerah otonomi Baru (usulan)	1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan (%)	Sekretariat Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
MISI 4 : MENGEMBANGKAN EKONOMI KREATIF DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI UNGGULAN DAERAH	TUJUAN 1 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	SASARAN 1 : Stabilitas Inflasi daerah	Laju tingkat inflasi (%)	1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaksanaan operasi pasar dan kegiatan lain untuk stabilitas harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		SASARAN 2 : Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani (NTP) (poin)	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	Dinas Perikanan
				2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (ton)	Dinas Perikanan
				3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (lokasi)	Dinas Perikanan
				4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan (ton)	Dinas Perikanan
				5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang tersedia (%)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia (%)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia dan dikembangkan (%)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia (%)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				6	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				7	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang berhasil ditanggulangi (%)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				8	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase PenerbitanTanda Daftar Izin Usaha Pertanian yang sesuai dengan peruntukannya (%)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian (%)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan (%)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		SASARAN 3 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%/proxy)	1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki Izin Usaha (%)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa (%)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase USP/KSP oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan (%)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (%)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan (%)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan (%)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang layak dikelola (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	kawasan peruntukan sentra IKM yang dikembangkan penyerepan tenaga kerja IKM dan fasilitasi dan promosi pameran	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase penanganan pengaduan konsumen, pengawasan barang yg beredar dipasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				11	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		SASARAN 4 : Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%/Proxy)	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah (%)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan pengunjung destinasi pariwisata (%)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan jumlah wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		SASARAN 5 : Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%/Proxy)	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		SASARAN 6 : Meningkatnya investasi penanaman modal	Persentase peningkatan investasi Penanaman modal (%)	1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi berskala nasional (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
				2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor di Kabupaten Lampung Selatan (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
				3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase dokumen perizinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Lampung Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
				4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase penyediaan data dan informasi perizinan yang akurat (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		SASARAN 7 : Meningkatnya kemandirian pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (poin)	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase kelompok lumbung pangan masyarakat yang mengelola cadangan pangan (%)	Dinas Ketahanan Pangan
				2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (angka)	Dinas Ketahanan Pangan
				3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan yang ditangani Dinas Ketahanan Pangan (%)	Dinas Ketahanan Pangan
				4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase penurunan jumlah kasus keracunan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) (%	Dinas Ketahanan Pangan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL	TUJUAN 1 : Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, taat hukum, responsif, dan transparan	SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Indeks Merit (kategori)	1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ketersediaan data dan informasi kepegawaian (%)	Badan Kepegawaian dan Diklat
			Maturitas SPIP (nilai)	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan di lingkungan inspektorat daerah (%)	Inspektorat
				3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya	Inspektorat
		SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	- Nilai SAKIP (Predikat)	1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan RPJMD, dan RKPD, Persentase PD mengumpulkan hasil evaluasi renja tepat format dan waktu, Presentase PD yang capaian realisasi kinerja triwulanya dalam kategori tinggi (PD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			- Opini BPK (Opini)	2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase sinkronisasi Dokumen Perencanaan SKPD dan Pemerintah Daerah (%)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				4	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset tanah Kabupaten Lampung Selatan yang tersertifikasi, Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan dan Inventarisasi aset tanah (%)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		SASARAN 3: Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Proporsi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		SASARAN 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) (poin)	1	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase penyelesaian izin lokasi (%)	Dinas Perumahan dan Permukiman
				2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Kasus sengketa pertanahan (%)	Dinas Perumahan dan Permukiman

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				3	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase KK yg menerima ganti rugi	Dinas Perumahan dan Permukiman
				4	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase penyelenggaraan Redistribusi Tanah (%)	Dinas Perumahan dan Permukiman
				5	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tanah ulayat yang telah dilegalkan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				6	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Laporan pengelolaan tanah kosong	Dinas Perumahan dan Permukiman
				7	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin membuka tanah yang diterbitkan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Laporan penatagunaan tanah	Dinas Perumahan dan Permukiman
				9	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	▪ Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)▪ Perekaman KTP Elektronik (%)▪ Cakupan penerbitan KIA (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				10	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				11	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi dan penyajian database kependudukan (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				12	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				13	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	▪ Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (%) ▪ Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%) ▪ Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				14	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan/mereplikasi inovasi dan Aplikasi Informatika yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika
				15	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di loket pelayanan (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
				16	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penyelenggaraan Statistik dan Persandian daerah (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika
				17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan pengamanan informasi (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika
				18	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan Fungsi DPRD (%)	Sekretariat DPRD
				19	0	Persentase terlaksananya kegiatan koordinasi sinergi dan kegiatan yang dilaksanakan (%)	Kecamatan Natar
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik/IPP (Indeks)	Kecamatan Sidomulyo
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik/IPP (Indeks) (kali)	Kecamatan Penengahan
				20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Pendidikan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Kesehatan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	RSUD Bob Bazar
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Perumahan dan Permukiman
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Satuan Polisi Pamong Praja

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Sosial
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Ketahanan Pangan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Lingkungan Hidup
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Perhubungan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Perikanan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Sekretariat Daerah
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Sekretariat DPRD
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Badan Kepegawaian dan Diklat
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Badan Penelitian dan Pengembangan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Inspektorat
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Natar
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Tanjung Bintang
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Kalianda

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Sidomulyo
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Katibung
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Penengahan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Palas
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Jati Agung
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Ketapang
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Sragi
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Rajabasa
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Candipuro
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Merbau Mataram
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Bakauheni
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Tanjung Sari
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Way Sulan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Kecamatan Way Panji
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan (%)	Kecamatan Kalianda
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan (%)	Kecamatan Sragi

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/ *Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		SASARAN 5 : Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (level)	1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan

7.2 Kebijakan dan Program RPJMD 2025-2029

Kebijakan umum merupakan sarana untuk mencapai tujuan disertai target yang hendak dicapai. Kebijakan umum yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan guna mempertajam Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ke dalam pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/terstruktur.

Tabel 2.10. Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
	MEWUJUDKAN LAMPUNG SELATAN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045						
1.	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab			Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)		
			Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Berkebudayaan Maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)		
				Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					- Persentase Cagar Budaya dan Warisan	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Meningkatnya Warisan budaya yang Dilestarikan	Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					- Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (%)		
				Meningkatnya tata Kelola taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial
			Peningkatan Kerukunan Hidup antar Umat Beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)		
				Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pendidikan, sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan umat beragama (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai			Indeks Demokrasi Indonesia (Angka)		
			Peningkatan Penegakan Hukum dan Keamanan		Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)		

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Daerah				
				Meningkatnya kualitas layanan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kabupaten lampung selatan	- Peningkatan Capaian Mutu Pelayanan Dasar Wajib Urusan Trantibum (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
					- Peningkatan Capaian Warga Negara yang Menerima Pelayanan Dasar Wajib Urusan Trantibum (%)		
				Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17 Kecamatan
				Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17 Kecamatan
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
			Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Demokrasi		Indeks Demokrasi Indonesia (Angka)		
				Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase partisipasi partai politik dalam pemilukada dan Persentase pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ORMAS dan LSM dan OKP yang difasilitasi peningkatan kapasitas organisasi (%)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase pemantauan pelaporan dan evaluasi pelaporan perkembangan politik (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good Governance	Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip- Prinsip Good Governance			Nilai Survei Penilaian Integritas (Angka)		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital		Indeks Pelayanan Publik (Angka)		
					Terbentuknya Daerah Otonomi Baru (Angka)		
				Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Pelayanan (%)	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Seluruh Perangkat Daerah
				Meningkatnya jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Daerah	pemerintah daerah (%)	PUBLIK	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
				-Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan;	- Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%);	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
				-Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	- Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%);	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					- Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)		
				Meningkatnya kualitas perencanaan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN	Badan Perencanaan

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pembangunan Daerah
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)		
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang perekonomian dan SDA (%)		
				Meningkatnya Tata kelola Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Meningkatnya Tata Kelola Aset dan Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
				Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Pelayanan Kepegawaian (Indeks)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan DIklat
				Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Produk Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan (%)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah
				Meningkatnya Pemanfataan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Riset dan Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				dalam Pembangunan			
				Menurunnya terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
				Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan terhadap Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17 Kecamatan
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Diberdayakan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17 Kecamatan
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
				Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaiaan Kasus Sengketa Pertanahan yang difasilitasi dan dilakukan melalui mediasi (%)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Meningkatnya Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian pembebasan lahan dan penerima santunan terhadap hasil ganti kerugian tanah untuk pembangunan (%)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase proses pentapan subjek dan objek redistribusi tanah yang telah diinventarisasi dan di identifikasi (%)	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%)	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (%)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	- Perekaman KTP elektronik (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					- Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%)		
					- Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)		
					- Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)		
				Menigkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	- Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					- Kepemilikan akta kelahiran (%)		
					- Kepemilikan Akta Kematian (Akta) (%)		
					- Kepemilikan Akta Perceraian (Akta) (%)		
				Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip	Persentase SOP Penggunaan Arsip yang diterapkan (%)	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
				Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
4.	Memajukan dan Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara Berkelanjutan	Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju secara Berkelanjutan			Indeks Pembangunan Manusia (Angka)		
			Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (Tahun)		
					Prevalensi Stunting (%)		
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)		
					Persentase Kematian Ibu yang ditolong Persalinannya (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	RSUD Bob Bazar

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						MASYARAKAT	
				Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
					Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Bob Bazar
				Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
				Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
				Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	- Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
					- Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)		

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					- Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)		
					- Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)		
				Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	- Indeks Pemerataan Guru (Rasio);	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
					- Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)		
				Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Peningkatan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Angka)		
				Terkendalinya Pertambahan jumlah Penduduk	- Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					- Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)		
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	- Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					- Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)		
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	- Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%);	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)		
				Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (%)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak	- Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					- Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)		
				Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Berkeadilan dan Berkelanjutan	Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan			Pertumbuhan Ekonomi (%)		
					Tingkat Kemiskinan (%)		
			Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif		Inflasi (%)		
				Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	- Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
					- Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)		

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Layanan Penanganan Warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (Orang)	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial
					- Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%)		
				Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	- Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
					- Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (%)		
					- Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		
					- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan		

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Dasarnya di Dalam Panti (%)		
					- Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		
				Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
					Pendataan Data Fakir Miskin (%)		
					- Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)		
					- Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)		
					- Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)		
				Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan
				Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
				Meningkatnya Pengawasan mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
				Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi barang yang efisien, Merata dan Terintegerasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Perluasan Lapangan Pekerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
				Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Dokumen Rencana Tenaga Kerja (Dokumen)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayang Kabupaten/kota (%)		
				Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigrasi yang diberangkatkan sesuai dengan kuota yang	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					ditetapkan oleh Kementerian (%)		
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (%)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah		Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi (%)		
				Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Irigasi	- Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					- Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Pemukiman Rawan Banjir (%)		

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak dan Aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					(Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)		
				Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Banginan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran dan Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	- Konektivitas Darat (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
					- Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (%)		
				Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (Unit)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
				Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Perkeretaapian	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Dinas Perhubungan
				Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah	- Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Permukiman
					- Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi		

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)		
				Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Meningkatnya perumahan dan permukiman yang layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Tertangani (Unit Rumah)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan		Persentase Desa Mandiri (%)		
				Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Meningkatnya Fasilitasi Kerja sama antar desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan	- Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				pemerintahan desa	Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	DESA	dan Desa
					- Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)		
				Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	- Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					- Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)		
6.	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Wilayah Pantai dan Pegunungan yang Maju	Wilayah Pantai dan Pegunungan Kabupaten Lampung Selatan Semakin Maju			Indeks Ekonomi Hijau (Angka)		
			Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
				Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						INDUSTRI	
				Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Meningkatnya distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton) - Peningkatan Produksi Hortikultura (Kuintal)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
					- Peningkatan Produksi Perkebunan (Ton)		
					- Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Meningkatnya distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	- Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
					- Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan	- Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Kesehatan Masyarakat Veteriner	(PHMS) (%) - Persentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV	MASYARAKAT VETERINER	
				Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Meningkatnya distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	- Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
					- Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%) - Persentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	- Persentase Penanganan bencana Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
					- Persentase Penanganan dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)		
				Rekomendasi izin usaha pertanian	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang Diterbitkan (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Rekomendasi izin usaha peternakan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan yang Diterbitkan (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Penyuluh Pertanian	- Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
					- Persentase Kelembagaan Koperasi tani yang Dibentuk dan Beroperasi (%)		
				Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
				Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya pelaku usaha yang diawasi dan terstandarisasi baik	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi dan terstardarisasi baik (Pelaku Usaha)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan
				Meningkatnya konsumsi Ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan
			Peningkatan Daya Tarik Pariwisata		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
				Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian pada Level Kabupaten (%)		
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Meningkatnya Produktiviitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan Mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Pelestarian Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)		
				Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	Banyaknya dokumen kajian LH yang dibuat	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					-Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Lombah	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	
				Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Pendamping/Pengawas Lingkungan Hidup Yang ditingkatkan Kompetensinya (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatnya tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (Rumah Tangga)	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	
			Peningkatan Kesiagaan Bencana		Indeks Risiko Bencana (Angka)		
				Meningkatnya Kulitas Layanan Pencegahan dan	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Edukasi Rawan Bencana (%)		

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	- Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					- Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)		
					- Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)		

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
7.	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan Antar Daerah, Nasional dan Internasional	Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan antar Daerah, Nasional dan Internasional			Indeks Daya Saing Daerah (Angka)		
			Peningkatan Daya Saing		Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (Angka)		
			Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global				
				Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase Alat, Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah serta kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025 yang kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.11. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	74,50
2	Meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,80
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,2
		Rata-rata lama Sekolah (RLS) (tahun)	8,20
		Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	10.576
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11,50
		Indeks Gini (poin)	0,281
4	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3,70

No	Sasaran strategis	Indikator	Target
5	Meningkatnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	Indeks Infrastruktur (persen)	76,50
6	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB (persen / proxy)	29,87
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen / proxy)	12,80
		Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen / proxy)	2,90
		Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen / proxy)	25,50
7	Stabilitas inflasi daerah	Laju Tingkat Inflasi (persen)	3(+-1)
8	Meningkatnya nilai tukar petani	NTP (poin)	105
9	Meningkatnya kualitas SDM dan tata Kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM/Indeks Merit (kategori)	III (Baik)
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP (predikat)	BB
11	Meningkatnya nilai opini BPK	Opini BPK (opini)	WTP
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)	83,00

Tabel 2.12. Program dan Anggaran Data Anggaran Per Program Pada APBD Tahun Anggaran 2025

No	Program	Pagu anggaran
1	Program administrasi pemerintahan desa	1,835,559,500.00
2	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	44,653,762,350.00
3	Program hubungan industrial	1,264,665,650.00
4	Program kawasan permukiman	1,327,194,000.00
5	Program kepegawaian daerah	5,018,308,650.00
6	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	2,547,608,300.00
7	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1,931,426,450.00
8	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	926,324,450.00

No	Program	Pagu anggaran
9	Program pelayanan penanaman modal	478,645,500.00
10	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	92,200,000.00
11	Program pemasaran pariwisata	610,950,950.00
12	Program pembangunan kawasan transmigrasi	320,091,600.00
13	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1,076,541,350.00
14	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	919,617,300.00
15	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	86,999,600.00
16	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1,547,000,000.00
17	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1,455,201,800.00
18	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	5,413,994,250.00
19	Program pemberdayaan sosial	623,000,600.00
20	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	403,983,200.00
21	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	430,149,850.00
22	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	80,000,000.00
23	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	900,000,000.00
24	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	12,039,754,800.00
25	Program pembinaan perpustakaan	1,732,650,000.00
26	Program pembinaan sejarah	126,870,000.00
27	Program Pemenuhan HakAnak (PHA)	255,845,250.00
28	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	132,916,245,989.00
29	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	18,063,196,050.00
30	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	13,551,214,000.00
31	Program penanganan bencana	734,889,700.00
32	Program penanganan kerawanan pangan	314,500,000.00
33	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	71,000,000.00
34	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	26,573,700.00
35	Program penanggulangan bencana	3,062,886,700.00

No	Program	Pagu anggaran
36	Program penataan bangunan dan lingkungannya	2,073,917,162.00
37	Program penataan bangunan gedung	39,734,748,166.00
38	Program penataan desa	521,060,000.00
39	Program penatagunaan tanah	344,520,000.00
40	Program pencatatan sipil	131,269,750.00
41	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	3,149,433,900.00
42	Program pendaftaran penduduk	790,505,600.00
43	Program pendidik dan tenaga kependidikan	46,704,400.00
44	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	196,899,350.00
45	Program penelitian dan pengembangan daerah	4,699,088,350.00
46	Program penempatan tenaga kerja	425,773,800.00
47	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	489,549,300.00
48	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	91,507,350.00
49	Program pengawasan keamanan pangan	224,907,300.00
50	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	223,277,000.00
51	Program pengelolaan aplikasi informatika	2,218,717,450.00
52	Program pengelolaan arsip	202,100,000.00
53	Program pengelolaan barang milik daerah	1,038,522,700.00
54	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	14,603,453,300.00
55	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	6,502,706,229.00
56	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	20,298,329,850.00
57	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	69,569,400.00
58	Program pengelolaan energi baru terbarukan	136,143,800.00
59	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	251,620,500.00
60	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	5,804,429,350.00
61	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	250,000,000.00
62	Program pengelolaan keuangan daerah	443,004,209,075.00
63	Program pengelolaan pelayaran	78,000,000.00
64	Program pengelolaan pendapatan daerah	5,864,565,350.00
65	Program pengelolaan pendidikan	198,398,599,009.00

No	Program	Pagu anggaran
66	Program pengelolaan perikanan budidaya	1,558,595,650.00
67	Program pengelolaan perikanan tangkap	1,341,239,950.00
68	Program pengelolaan persampahan	516,906,900.00
69	Program pengelolaan profil kependudukan	24,989,000.00
70	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	135,000,000.00
71	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	18,882,167,942.00
72	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	70,000,000.00
73	Program pengelolaan taman makam pahlawan	134,458,000.00
74	Program pengembangan iklim penanaman modal	67,422,600.00
75	Program pengembangan jasa konstruksi	2,725,799,350.00
76	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2,933,205,000.00
77	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	337,566,000.00
78	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	100,000,000.00
79	Program pengembangan kebudayaan	1,061,289,200.00
80	Program pengembangan kesenian tradisional	525,000,000.00
81	Program pengembangan kurikulum	77,111,800.00
82	Program pengembangan perumahan	536,500,000.00
83	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	1,559,032,150.00
84	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	366,195,000.00
85	PROGRAM pengembangan umkm	695,618,300.00
86	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)	40,000,000.00
87	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	735,700,150.00
88	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	507,286,150.00
89	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	745,982,500.00
90	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1,510,000,000.00
91	Program pengendalian penduduk	231,686,900.00
92	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	1,008,456,650.00
93	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	479,710,400.00

No	Program	Pagu anggaran
94	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1,400,000,000.00
95	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	119,214,200.00
96	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1,977,495,700.00
97	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1,129,701,200.00
98	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	2,336,733,150.00
99	Program peningkatan kerja sama desa	39,000,000.00
100	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	3,096,408,550.00
101	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	2,989,988,100.00
102	Program peningkatan kualitas keluarga	232,363,350.00
103	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	120,000,000.00
104	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	2,224,907,000.00
105	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	10,570,214,000.00
106	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	600,470,800.00
107	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1,135,796,042,450.00
108	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	13,846,129,975.00
109	Program penyelenggaraan jalan	138,017,924,308.00
110	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	24,059,331,500.00
111	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	67,484,200.00
112	Program penyelenggaraan penataan ruang	3,480,500,000.00
113	Program penyelenggaraan pengawasan	2,569,670,450.00
114	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	254,176,800.00
115	Program penyelenggaraan statistik sektoral	316,543,700.00
116	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	113,743,050.00
117	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	50,480,000.00
118	Program penyuluhan pertanian	1,404,993,942.00
119	Program perekonomian dan pembangunan	2,497,838,450.00

No	Program	Pagu anggaran
120	Program perencanaan dan pembangunan industri	1,433,369,000.00
121	Program perencanaan lingkungan hidup	430,000,150.00
122	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1,814,999,900.00
123	Program perizinan penggunaan arsip	18,000,000.00
124	Program perizinan usaha pertanian	113,527,700.00
125	Program perlindungan dan jaminan sosial	705,247,200.00
126	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	82,000,000.00
127	Program perlindungan khusus anak	534,695,000.00
128	Program perlindungan perempuan	310,013,250.00
129	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	9,306,375,300.00
130	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	1,241,859,100.00
131	Program promosi penanaman modal	270,361,200.00
132	Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	40,000,000.00
133	Program rehabilitasi sosial	2,447,743,600.00
134	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	721,910,950.00
135	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	306,495,850.00
136	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	284,046,900.00
JUMLAH		**2,416,981,898,547.00**

Tabel 2.13. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

No	Sasaran strategis	Indikator	Target
1	Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,16
2	Peningkatan Kerukunan Hidup antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,07
3	Peningkatan Penegakan Hukum dan Keamanan Daerah	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100,00
4	Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36
5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	2,63
6	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,59
		Prevalensi Stunting	10

No	Sasaran strategis	Indikator	Target
		(pendek dan sangat pendek)	
7	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,81
8	Peningkatan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	64,38
9	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Secara Inklusif	Inflasi (%)	2-3
10	Perluasan Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,65
11	Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten Terhadap Provinsi	12,40
12	Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri (%)	8,20
13	Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	23,59
14	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,5
15	Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	11,81
16	Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	66,68
17	Peningkatan Kesiagaan Bencana	Indeks Risiko Bencana (Angka)	185,95
18	Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (Angka)	6,98

Tabel 2.14. Program dan Anggaran

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.102.243.333.359,08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	589.865.531.922,35
DINAS PENDIDIKAN	589.865.531.922,35
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	429.209.693.387,35
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	160.532.022.335,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	77.111.800,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	46.704.400,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	390.064.747.736,63
DINAS KESEHATAN	199.917.936.964,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.209.216.183,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90.751.373.431,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.588.112.150,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	491.807.300,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	877.427.900,00
UPT PUSKESMAS NATAR	3.443.586.389,20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.480.226.389,20
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	953.360.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.000.000,00
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SUKADAMAI	2.373.658.511,53
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.567.165.511,53
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	797.548.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.945.000,00
UPT PUSKESMAS HAJIMENA	1.807.170.298,10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.208.295.998,10
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	598.874.300,00
UPT PUSKESMAS BRANTI RAYA	2.433.354.414,73
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.573.460.414,73
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	843.624.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.270.000,00
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BANJAR AGUNG	1.895.365.111,26
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.186.534.111,26
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	696.431.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.400.000,00
UPT PUSKESMAS KARANG ANYAR	4.055.743.958,32
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.915.073.958,32
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.117.554.000,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.116.000,00
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG BINTANG	4.116.640.679,52
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.170.744.679,52
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	925.001.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	20.895.000,00
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG SARI	2.646.374.890,48
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.869.108.890,48
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	727.206.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	50.060.000,00
UPT PUSKESMAS TANJUNG AGUNG	2.170.571.673,68
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.446.787.423,68
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	707.831.750,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.952.500,00
UPT PUSKESMAS MERBAU MATARAM	2.576.948.012,36
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.695.368.262,36
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	869.981.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.598.750,00
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TALANG JAWA	1.954.520.506,38
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.374.342.506,38
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	577.049.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.129.000,00
UPT PUSKESMAS WAY SULAN	1.862.428.778,73
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.197.400.678,73
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	657.726.300,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.301.800,00
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIDOMULYO	5.185.261.778,17

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.703.183.828,17
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.474.167.950,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.910.000,00
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP CANDIPURO	4.018.619.259,82
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.846.877.059,82
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.143.197.200,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	28.545.000,00
UPT PUSKESMAS WAY PANJI	1.333.910.666,38
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	766.055.666,38
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	554.672.600,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.182.400,00
UPT PUSKESMAS KALIANDA	3.853.743.209,47
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.910.105.209,47
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	943.638.000,00
UPT PUSKESMAS WAY URANG	4.099.068.117,19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.799.585.117,19
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.262.887.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36.596.000,00
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP RAJABASA	2.230.414.134,65
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.454.111.434,65
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	776.302.700,00
UPT PUSKESMAS PALAS	3.068.721.753,08
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.097.625.003,08
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	949.858.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	21.238.750,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BUMI DAYA	2.275.066.939,60
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.566.819.939,60
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	702.727.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.520.000,00
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SRAGI	3.066.250.678,91
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.185.728.178,91
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	867.482.500,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.040.000,00
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PENENGAHAN	3.464.637.716,42
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.335.502.816,42
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.109.391.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.743.900,00
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KETAPANG	3.813.335.199,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.692.626.199,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.120.709.000,00
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BAKAUHENI	2.137.775.051,98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.410.189.301,98
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	718.104.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.481.750,00
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KATIBUNG	3.027.335.301,83
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.242.774.301,83
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	771.661.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.900.000,00
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG SARI NATAR	3.295.420.490,62
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.566.988.490,62
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	719.432.000,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.000.000,00
UPT PUSKESMAS KALIASIN	1.641.261.738,89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	846.488.938,89
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	783.474.800,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.298.000,00
UPT PUSKESMAS SINAR REJEKI	1.280.336.050,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	774.000.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	505.756.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	580.050,00
UPT LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT	18.185.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.185.000,00
UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM	111.001.104.462,33
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.816.071.512,33
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	160.491.650,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	24.541.300,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	66.029.419.116,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	66.029.419.116,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.852.786.154,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	878.231.150,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	20.299.538.966,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.855.000.699,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.401.010.606,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	118.979.950,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.554.743.091,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	954.417.950,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.363.753.700,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.678.194.850,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.072.762.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.347.102.200,00
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	15.347.102.200,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.501.485.850,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	454.745.900,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	517.666.400,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	9.546.307.800,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	326.896.250,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33.019.396.700,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.155.383.300,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.480.613.200,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.674.770.100,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.002.861.350,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.084.934.400,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.917.926.950,00
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	7.861.152.050,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.438.079.300,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.278.750,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.420.794.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.917.135.684,10
DINAS SOSIAL	7.917.135.684,10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.052.110.384,10
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	559.020.600,00
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	11.352.700,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.927.325.100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	495.178.200,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	751.802.700,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	120.346.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	134.819.722.533,06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.836.044.750,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.836.044.750,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.356.871.450,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	926.324.450,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	315.758.600,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.237.090.250,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.149.693.300,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.149.693.300,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.199.674.700,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	460.225.200,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	388.389.250,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	207.883.100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	83.705.300,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	268.981.950,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	540.833.800,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.741.981.800,00
DINAS KETAHANAN PANGAN	4.741.981.800,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.313.613.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	66.745.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	925.277.900,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	285.154.950,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	151.190.950,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	176.565.600,00
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	176.565.600,00
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	24.442.000,00
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	18.171.600,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	133.952.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12.959.038.140,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.959.038.140,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.969.572.250,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	389.588.000,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.100.145.900,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	228.200.140,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	20.035.400,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	56.520.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	3.300.400.000,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	41.441.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	853.134.950,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.702.436.325,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.702.436.325,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.319.354.675,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.098.194.950,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	71.598.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	200.793.200,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	12.495.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.392.742.500,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.392.742.500,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.470.558.800,00
PROGRAM PENATAAN DESA	347.484.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	21.810.000,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.308.563.700,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.244.326.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.001.120.970,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.001.120.970,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.530.685.770,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	145.036.400,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	11.806.526.850,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	518.871.950,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	29.404.720.080,00
DINAS PERHUBUNGAN	29.404.720.080,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.057.442.080,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	22.317.906.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	29.372.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.120.147.950,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.120.147.950,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.300.148.150,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.271.681.200,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.548.318.600,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.157.857.943,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.157.857.943,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.687.259.543,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	46.860.500,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	727.572.750,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	810.519.700,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	41.465.950,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	185.317.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	658.862.500,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.572.244.388,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	8.572.244.388,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.596.617.188,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	592.122.500,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	509.751.700,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	337.550.500,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	475.627.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	60.575.500,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.686.000.037,06
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.686.000.037,06

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.273.979.037,06
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	717.666.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.594.355.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	248.119.700,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	248.119.700,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	248.119.700,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	173.833.800,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	173.833.800,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	173.833.800,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.493.357.200,00
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2.493.357.200,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.711.787.200,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	562.500.000,00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	126.870.000,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	92.200.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.854.109.250,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.854.109.250,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.468.559.250,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.385.550.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	149.708.800,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	149.708.800,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	101.308.100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	39.478.400,00
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	8.922.300,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	63.658.554.312,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.560.262.200,00
DINAS PERIKANAN	7.560.262.200,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.677.422.700,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	903.560.450,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.452.909.050,00
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	156.121.300,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	370.248.700,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.456.985.150,00
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8.456.985.150,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.949.845.400,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	289.795.000,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.158.365.750,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	58.979.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	37.777.420.106,00
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	26.580.858.075,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.389.047.666,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.315.399.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.807.860.509,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	668.088.000,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.400.462.900,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	11.196.562.031,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.027.631.506,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.005.067.250,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.601.811.775,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	445.665.100,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	103.906.400,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	12.480.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	77.514.900,00
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	77.514.900,00
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	77.514.900,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	8.502.546.956,00
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	8.502.546.956,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.021.744.406,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	655.851.600,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	621.664.100,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	152.395.650,00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.050.891.200,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.111.373.400,00
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.111.373.400,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.111.373.400,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	172.451.600,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	172.451.600,00
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	172.451.600,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	143.676.632.459,00
SEKRETARIAT DAERAH	65.380.655.626,00
SEKRETARIAT DAERAH	65.380.655.626,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.818.497.876,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.852.714.650,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.709.443.100,00
SEKRETARIAT DPRD	78.295.976.833,00
SEKRETARIAT DPRD	78.295.976.833,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.534.412.683,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	39.761.564.150,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	117.964.589.699,00
PERENCANAAN	12.326.805.050,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.326.805.050,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.355.474.800,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.260.575.800,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.710.754.450,00
KEUANGAN	88.041.823.349,00
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	30.753.217.138,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.031.095.388,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.722.121.750,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	57.288.606.211,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.511.699.411,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.702.484.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.074.422.800,00
KEPEGAWAIAN	11.639.775.500,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	11.639.775.500,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.901.797.150,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.737.978.350,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.956.185.800,00
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	5.956.185.800,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.433.577.250,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.522.608.550,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	16.030.534.900,00
INSPEKTORAT DAERAH	16.030.534.900,00
INSPEKTORAT	16.030.534.900,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.925.113.450,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.438.304.650,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	667.116.800,00
UNSUR KEWILAYAHAN	43.430.214.571,00
KECAMATAN	43.405.214.571,00
	25.000.000,00
KECAMATAN NATAR	2.850.075.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.394.927.400,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.235.600,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	268.310.600,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	171.239.400,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.362.000,00
KECAMATAN TANJUNG BINTANG	2.296.193.502,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.929.070.102,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	190.404.800,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	143.073.850,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.644.750,00
KECAMATAN KALIANDA	8.522.462.600,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.914.095.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.975.736.300,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	525.976.750,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	88.508.550,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.146.000,00
KECAMATAN SIDOMULYO	2.533.276.550,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.178.490.900,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.016.600,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	139.585.250,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	148.835.300,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.348.500,00
KECAMATAN KATIBUNG	2.346.574.050,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.925.027.350,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	154.411.100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	261.884.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.251.600,00
KECAMATAN PENENGAHAN	1.953.980.900,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.685.884.150,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136.051.900,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	121.725.850,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.319.000,00
KECAMATAN PALAS	1.609.126.400,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.426.820.400,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.187.900,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	104.400.300,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.717.800,00
KECAMATAN JATI AGUNG	2.883.015.575,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.401.059.825,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	286.339.350,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	179.340.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.276.400,00
KECAMATAN KETAPANG	1.851.893.762,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.586.848.762,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	119.997.150,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	138.315.350,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.732.500,00
KECAMATAN SRAGI	1.841.994.850,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.513.424.650,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.232.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	139.119.650,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	120.164.150,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.054.400,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
KECAMATAN RAJABASA	2.063.584.518,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	172.859.200,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	192.454.200,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.500.100,00
KECAMATAN CANDIPURO	2.059.901.900,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.723.885.200,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	132.827.700,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	121.678.800,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	81.510.200,00
KECAMATAN MERBAU MATARAM	2.139.823.700,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.737.072.150,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	239.092.600,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	150.184.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.474.950,00
KECAMATAN BAKAUHENI	1.989.838.375,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.598.196.225,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	251.590.600,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	113.402.400,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.649.150,00
KECAMATAN TANJUNG SARI	2.200.833.950,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.888.038.050,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	158.320.100,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	154.475.800,00
KECAMATAN WAY SULAN	1.924.890.713,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.628.562.363,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	128.472.100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	121.465.600,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46.390.650,00
KECAMATAN WAY PANJI	2.337.748.226,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.960.376,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	137.182.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	132.915.700,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.234.500,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	41.455.650,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	11.224.300.374,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.224.300.374,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.224.300.374,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.427.136.474,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	810.604.050,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.090.959.700,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	940.399.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	596.553.200,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.358.647.950,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.572.431.754.695,80

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	140.385.407.783,06
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	65.136.414.704,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	162.827.131.872,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	545.420.754.741,40
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	26.994.442.200,00
UNSUR KEWILAYAHAN	44.933.573.457,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	11.347.614.574,00
JUMLAH	2.569.477.094.027,26

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan formulir isian data kinerja Target dan Realisasi Tahun 2025, yang diisi oleh Perangkat Daerah berdasarkan kewenangannya.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dapat dihitung dan diukur.

Pengumpulan data kinerja merupakan tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki fungsi pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing.

Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mendukung kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran Capaian Kinerja dilaksanakan pada setiap akhir periode instansi dengan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja berupa laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk:

a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja merupakan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja

sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya yaitu Rencana Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target/rencana masing-masing misi Kabupaten Lampung Selatan dengan cara mencapainya melalui sasaran, Indikator Kinerja Utama, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan. Selanjutnya dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian	=	Realisasi / Rencana	X	100%

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase pencapaian rencana tingkat capian	=	Rencana-(Realisasi-Rencana) / Rencana	X	100%

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/381.1/I.10/HK/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026. Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana berikut:

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

<table>
<tr><th>Tujuan</th><th>Sasaran Strategis</th><th>Indikator Tujuan/Sasaran</th><th>Definisi Operasional/Penjelasan</th><th>Formulasi</th><th>Sumber Data</th><th>Penanggung Jawab</th></tr>
<tr>
<td>Indeks Kerukunan Umat Beragama</td>
<td>Meningkatnya kerukunan umat beragama</td>
<td>Indeks Kerukunan Umat Beragama
(poin)</td>
<td>Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah sebuah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kondisi kerukunan antarumat beragama. Nilai indeks ini diukur melalui tiga dimensi utama yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Toleransi: Mengukur sejauh mana kesediaan masyarakat untuk menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan serta keyakinan orang lain yang berbeda agama.
Kesetaraan: Mengukur sejauh mana pandangan masyarakat terhadap perlakuan yang adil dan hak yang sama bagi setiap pemeluk agama, tanpa adanya diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Kerja Sama: Mengukur sejauh mana kesediaan masyarakat untuk bergotong royong, saling membantu, dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain demi mencapai tujuan bersama.</td>
<td>Dimensi yang diukur:
• Toleransi
• Kesetaraan
• Kerjasama
Kategori Kerukunan:
<table>
<tr><td>0 – 20</td><td>Sangat Rendah</td></tr>
<tr><td>21 – 40</td><td>Rendah</td></tr>
<tr><td>41 – 60</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td>61 – 80</td><td>Tinggi</td></tr>
<tr><td>81 – 100</td><td>Sangat Tinggi</td></tr>
</table>
</td>
<td>Hasil survey. Survey dilakukan melalui kerja sama dengan BPS, memanfaatkan forum data daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (KUB).</td>
<td>Satpol PP, Kecamatan, Kesbangpol, Dinas PP dan PA, Dinas Sosial.</td>
</tr>
</table>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Penjelasan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola kematian pada suatu wilayah tidak berubah di masa depan	AHH dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur $\frac{Jumlah\ umur\ penduduk\ yang\ meninggal}{Jumlah\ penduduk\ yang\ meninggal} \times 100\%$	Penghitungan diperoleh dari publikasi BPS.	Din Kes, RSUD, Dinas PP dan KB, Kecamatan.
		Harapan Lama Sekola (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya waktu bersekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa depan. Indikator makro yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik ini mengukur potensi rata-rata masa pendidikan formal yang akan ditempuh anak-anak usia sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Dimana: HLS^t_a = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E^t_i = Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a+ 1, ... , n) FK = Faktor koreksi pesantren	Penghitungan diperoleh dari publikasi BPS.	Dinas Pendidikan, Kecamatan.
		Rata-rata lama Sekolah (RLS) (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah angka yang menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan penduduk untuk menempuh pendidikan formal	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$ Dimana: RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun keatas	Penghitungan diperoleh dari publikasi BPS.	Dinas Pendidikan, Kecamatan.
		Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	Pengeluaran per kapita adalah rata-rata biaya yang dihabiskan oleh setiap individu atau anggota dalam sebuah rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup–baik berupa makanan maupun nonmakanan–dalam periode tertentu, seperti sebulan atau setahun	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga	Penghitungan diperoleh dari publikasi BPS.	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Penjelasan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	Persentase penduduk miskin adalah proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dibandingkan dengan total jumlah penduduk, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. [1]	$\frac{\text{jumlah penduduk miskin}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$	Penghitungan diperoleh dari publikasi BPS.	Dinas Sosial, Sekretariat Daerah.
		Indeks Gini (poin)	Indeks Gini **(atau** Rasio Gini**)** adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu wilayah atau negara	Angka indeks gini diperoleh dari hasil perhitungan BPS. $G = 1 - \sum_{i=1}^{k} P_i (Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-*i* Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai *gini ratio* berkisaran antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi	Indeks gini diperoleh dari publikasi BPS.	Dinas Sosial, Sekretariat Daerah.
	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran dibandingkan dengan total angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar pekerjaan	$\frac{\text{jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	TPT diperoleh dari publikasi BPS.	Disnakertrans.
Indeks Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah.	Indeks Infrastruktur (persen)	Indeks infrastruktur adalah alat ukur komposit yang digunakan untuk menilai ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas fasilitas publik di suatu wilayah atau Negara	Indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik. • Proporsi panjang jaringan jalan dengan kondisi mantap = jumlah panjang jalan kondisi baik/hotmik (km) dibagi 100% panjang jalan keseluruhan (km) dikali 100% • Persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak = jumlah rumah tangga pengguna air minum layak dibagi jumlah seluruh rumah tangga	Diperoleh dari hasil penghitungan data PD.	Dinas PU & PR, Dinas Kominfo, DLH, Dinas Perkim.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Penjelasan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
				dikali 100% • Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak = jumlah rumah tangga dengan sanitasi layak dibagi jumlah seluruh rumah tangga dikali 100% • Persentase keluarga pengguna listrik = jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikali 100%		
PDRB ADHB	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB (persen / proxy)	Kontribusi sektor pertanian (termasuk perkebunan di dalamnya) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 12,67% dari total perekonomian. Sektor ini menjadi penyumbang terbesar ketiga setelah industri pengolahan dan perdagangan, di mana subsektor perkebunan mendominasi porsi terbesar di dalam sektor pertanian itu sendiri	$\frac{Jumlah\ kontribusi\ sektor\ pertanian}{Jumlah\ PDRB} \times 100\%$	Diperoleh dari hasil publikasi BPS.	Dinas TPH & Bun, DKP, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan & Keswan.
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen / proxy)	Persentase kontribusi sektor perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran) terhadap PDRB sangat bervariasi tergantung pada wilayah dan kondisi struktur ekonomi daerah tersebut. Secara nasional, sektor ini secara konsisten menjadi salah satu penyumbang utama atau terbesar kedua/ketiga terhadap total PDB/PDRB Indonesia, dengan rata-rata kontribusi sekitar (12\% - 13\%\)	$\frac{Jumlah\ kontribusi\ sektor\ perdagangan}{Jumlah\ PDRB} \times 100\%$	Diperoleh dari hasil publikasi BPS.	Disperindag.
		Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen / proxy)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat sebesar 4,82 persen, atau bernilai sekitar Rp 1.067,28 triliun. Sektor ini berperan krusial sebagai mesin penggerak ekonomi, penyerap tenaga kerja, dan penyumbang devisa negara melalui kedatangan wisatawan domestik maupun	$\frac{Jumlah\ kontribusi\ sektor\ pariwisata}{Jumlah\ PDRB} \times 100\%$	Diperoleh dari hasil publikasi BPS.	Dinas Pariwisata.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Penjelasan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
			mancanegara			
		Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen / proxy)	Kontribusi sektor industri pengolahan (manufaktur) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional saat ini mencapai 18,98%. Angka ini menjadikan sektor manufaktur sebagai penyumbang terbesar (lapangan usaha) dalam perekonomian Indonesia, mengungguli sektor-sektor lainnya	$\frac{Jumlah\ kontribusi\ sektor\ industri}{Jumlah\ PDRB} \times 100\%$	Diperoleh dari hasil publikasi BPS.	Disperindag.
Pertumbuhan Ekonomi	Stabilitas inflasi daerah	Laju Tingkat Inflasi (persen)	**Laju tingkat inflasi** adalah persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu (biasanya bulanan atau tahunan). Angka ini menjadi acuan utama untuk mengukur seberapa cepat nilai mata uang menurun dan seberapa besar penurunan daya beli masyarakat	$[\{(1+\Delta Inf_1)(1+\Delta Inf_2)(1+\Delta Inf_t)\}^{1/t}]-1$ dimana: ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. edangkan ΔInf di hitung dengan rumus sebagai berikut: $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - inf_{(n)}}{Int_{(n)}} x\ 100\%$ dimana: Inf_n = nilai inflasi pada tahun n $Inf_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya N = tahun ...	Diperoleh dari hasil publikasi BPS.	Bagian Perekonomian Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
	Meningkatnya nilai tukar petani	NTP (poin)	NTP paling umum adalah singkatan dari Network Time Protocol, yaitu protokol jaringan yang digunakan untuk menyinkronkan waktu pada komputer dan perangkat lain melalui jaringan internet atau LAN (Local Area Network)	$\frac{\text{indeks yang diterima petani (It)}}{\text{indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$	Diperoleh dari hasil publikasi BPS.	Dinas TPH & Bun, DKP, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan & Keswan.

<table>
<tr><th>Tujuan</th><th>Sasaran Strategis</th><th>Indikator Tujuan/Sasaran</th><th>Definisi Operasional/Penjelasan</th><th>Formulasi</th><th>Sumber Data</th><th>Penanggung Jawab</th></tr>
<tr>
<td>Indeks Reformasi Birokrasi</td>
<td>Meningkatnya kualitas SDM dan tata Kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern</td>
<td>Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM/Indeks Merit</td>
<td>Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM/Indeks Merit adalah ukuran yang menilai sejauh mana sebuah instansi pemerintah menerapkan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara adil, wajar, dan bebas dari intervensi politik. Penilaian ini didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai</td>
<td>Kategori Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM:
<table>
<tr><th>No</th><th>Komponen Penilaian</th><th>Bobot</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Komponen Pengungkit</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>I Pemenuhan</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>II Hasil Antara Area Perubahan</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>III Reform</td><td>30</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Komponen Pengungkit</td><td>60</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Komponen Hasil</td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Akintabilitas Kinerja dan Keuangan</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN</td><td>10</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Kinerja Organisasi</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Komponen Hasil</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</td><td>100</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>No</th><th>Hasil Antara</th><th>Skala</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kualitas Pengelolaan Arsip</td><td>0-100</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</td><td>0-100</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Proesionalitas ASN</td><td>0-100</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Maturitas SPIP</td><td>0-5</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Kapabilitas APIP</td><td>0-5</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>KepatuhanTerhadap Standar Pelayanan Penyelenggaran Pelayanan</td><td>0-100</td></tr>
</table>
</td>
<td>Hasil diperoleh dari penilaian KEMENPAN dan RB.</td>
<td>SeluruhPD.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>Tujuan</th><th>Sasaran Strategis</th><th>Indikator Tujuan/Sasaran</th><th>Definisi Operasional/Penjelasan</th><th>Formulasi</th><th>Sumber Data</th><th>Penanggung Jawab</th></tr>
<tr><td></td><td>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah</td><td>Nilai SAKIP (predikat)</td><td>Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah angka atau predikat yang diberikan oleh Kementerian PANRB untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</td><td>Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP
Komponen Penilaian:
<table>
<tr><th>Komponen yang Dinilai</th><th>Bobot</th></tr>
<tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Nilai Hasil Evaluasi</td><td>100</td></tr>
</table>
Kategori Nilai SAKIP:
<table>
<tr><th>Predikat</th><th>Nilai Absolut</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>AA</td><td>>85-100</td><td>Memuaskan</td></tr>
<tr><td>A</td><td>>75-85</td><td>Sangat baik</td></tr>
<tr><td>B</td><td>>65-75</td><td>Baik, dan perlu sedikit perbaikan</td></tr>
<tr><td>CC</td><td>>50-65</td><td>Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar</td></tr>
<tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar</td></tr>
<tr><td>D</td><td>0-30</td><td>Kurang, dan perlu banyak sekali perbaikan dan perlu perubahan yang sangat mendasar</td></tr>
</table></td><td>Penilaian SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi KEMENPANRB.</td><td>Seluruh PD.</td></tr>
<tr><td></td><td>Meningkatnya nilai opini BPK</td><td>Opini BPK (opini)</td><td>Opini BPK adalah pernyataan atau kesimpulan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan</td><td>Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah.</td><td>Hasil audit BPK atas Laporan Keuangan.</td><td>Seluruh PD.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Tujuan</th><th>Sasaran Strategis</th><th>Indikator Tujuan/Sasaran</th><th>Definisi Operasional/Penjelasan</th><th>Formulasi</th><th>Sumber Data</th><th>Penanggung Jawab</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>suatu instansi pemerintah</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</td><td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)</td><td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai ini diperoleh dengan membandingkan harapan masyarakat dengan kualitas pelayanan yang sebenarnya mereka terima</td><td>$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$
Dimana:
$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0{,}071$
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM, yaitu antara 25 – 100, makahasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:
IKM Unit Pelayanan x 25
<table><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL IKM</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43,76 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table></td><td>Hasil survey PD berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017.</td><td>Seluruh PD.</td></tr>
</table>

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/396.1/I.10/HK/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029. Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana berikut:

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Penjelasan	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab		Indeks Kerukunan Umat Beragama	**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)** adalah sebuah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kondisi kerukunan antarumat beragama. Nilai indeks ini diukur melalui tiga dimensi utama yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. **Toleransi:** Mengukur sejauh mana kesediaan masyarakat untuk menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan serta keyakinan orang lain yang berbeda agama. **Kesetaraan:** Mengukur sejauh mana pandangan masyarakat terhadap perlakuan yang adil dan hak yang sama bagi setiap pemeluk agama, tanpa adanya diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. **Kerja Sama:** Mengukur sejauh mana kesediaan masyarakat untuk bergotong royong, saling membantu, dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain demi mencapai tujuan bersama.	$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^{3} Indeks\ D_j}{3}$ Keterangan: IPK = Indeks Kerukunan Umat Beragama D_j = Dimensi ke-j	Bappeda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Penjelasan	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	**Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)** adalah ukuran komprehensif yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengevaluasi dan memetakan capaian kinerja pembangunan kebudayaan di suatu wilayah.	$IPK = \sum_{j=1}^{7}(W_j \times indeks\ D_j)$ Keterangan: IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan W_j = Bobot dimensi ke-j D_j = Dimensi ke-j	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten	-Dinas Pendidikan -Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Dinas Sosial
	Peningkatan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)** adalah sebuah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kondisi kerukunan antarumat beragama. Nilai indeks ini diukur melalui tiga dimensi utama yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. **Toleransi:** Mengukur sejauh mana kesediaan masyarakat untuk menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan serta keyakinan orang lain yang berbeda agama. **Kesetaraan:** Mengukur sejauh mana pandangan masyarakat terhadap perlakuan yang adil dan hak yang sama bagi setiap pemeluk agama, tanpa adanya diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. **Kerja Sama:** Mengukur sejauh mana kesediaan masyarakat untuk bergotong royong, saling membantu, dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain demi mencapai tujuan bersama.	$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^{3} Indeks\ D_j}{3}$ Keterangan: IPK = Indeks Kerukunan Umat Beragama D_j = Dimensi ke-j	Bappeda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

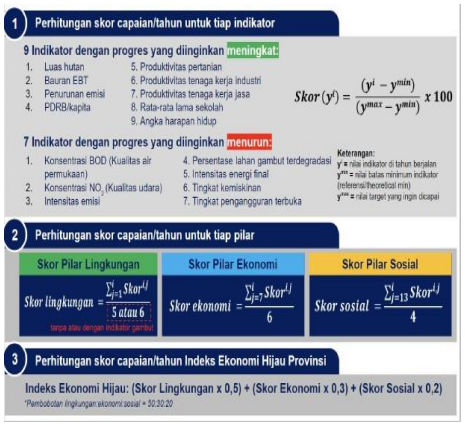
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Penjelasan	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai		Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah instrumen pengukuran kuantitatif yang dirancang untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana perkembangan serta penerapan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat provinsi dan nasional. IDI disusun menggunakan metodologi komposit yang secara obyektif memotret kinerja demokrasi di Indonesia.	Metode penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Aspek yang dinilai adalah: - Aspek kebebasan (7 indikator); - Aspek kesetaraan (7 indikator); - Aspek kapasitas lembaga demokrasi (8 indikator).	**review media massa/surat kabar, review dokumen/peraturan daerah,** dan **Focus Group Discussion (FGD)** bersama para ahli dan pemangku kepentingan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Peningkatan Penegakan Hukum dan Keamanan Daerah	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	**persentase penegakan hukum peraturan daerah** adalah suatu indikator statistik yang mengukur tingkat keberhasilan atau sejauh mana Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang memuat sanksi telah berhasil ditegakkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Yang dirselesaikan}}{\text{Jumlah Total Pelanggaran Perda/Perkada Yang Terjadi}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	-Satuan Polisi Pamong Praja -17 Kecamatan - Sekretariat Daerah
	Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah instrumen pengukuran kuantitatif yang dirancang untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana perkembangan serta penerapan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat provinsi dan nasional. IDI disusun menggunakan metodologi komposit yang secara obyektif memotret kinerja demokrasi di Indonesia.	Metode penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Aspek yang dinilai adalah: - Aspek kebebasan (7 indikator); - Aspek kesetaraan (7 indikator); - Aspek kapasitas lembaga demokrasi (8 indikator).	**review media massa/surat kabar, review dokumen/peraturan daerah,** dan **Focus Group Discussion (FGD)** bersama para ahli dan pemangku kepentingan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*		Nilai Survei Penilaian Integritas	**Survei Penilaian Integritas (SPI)** adalah survei nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (KLPD).	$\text{Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)} = w_1X_1 + w_2X_2 + w_3X_3 - w_c(c_1X_4 + c_2X_5)$ Keterangan: • X_1: Indeks Penilaian Internal • X_2: Indeks Penilaian Eksternal • X_3: Indeks Penilaian Ahli/Eksper • X_4, X_5: Faktor koreksi (prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI) • w_1, w_2, w_3: Bobot masing-masing indeks • w_c: Bobot faktor koreksi • c_1, c_2: Komponen dalam faktor koreksi	KPK	Inspektorat

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Penjelasan	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah. Indeks ini menilai efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan berdasarkan berbagai aspek operasional untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak masyarakat sesuai.	$\text{Indeks Pelayanan Publik (IPP)} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(N_i \times B_i)}{\sum_{i=1}^{n} B_i}$ Keterangan: • N_i: Nilai rata-rata unsur ke-i (berdasarkan hasil survei atau penilaian responden) • B_i: Bobot unsur ke-i • n: Jumlah unsur pelayanan yang dinilai	-Ombusmand -Kemenpan RB	- Seluruh Perangkat Daerah
		Terbentuknya Daerah Otonomi Baru	Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah pemekaran suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, dan mendekatkan rentang kendali pemerintahan kepada masyarakat	Untuk menentukan sebuah daerah layak dimekarkan atau tidak, tim independen menggunakan rumus bobot kumulatif: $Total\ Nilai = (W_1 \times K_e) + (W_2 \times P_d) + (W_3 \times S_p) + (W_4 \times L_w) + (W_5 \times K_p)$ Keterangan variabel pembentuk rumus: • W_n: Bobot nilai (persentase kepentingan) yang ditentukan oleh pemerintah pusat. • K_e: Skor kemampuan ekonomi (PDRB, pendapatan asli daerah, potensi pajak). • P_d: Skor jumlah dan kepadatan penduduk. • S_p: Skor ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan serta publik.	lembaga-lembaga resmi pemerintah	-Bappeda -BPKAD -Bagian Pemerintahan -Disdukcapil
Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju secara Berkelanjutan		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia secara makro melalui tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak	$\text{IPM} = \frac{I_{Kesehatan} + I_{Pendidikan} + I_{Pendapatan}}{3}$	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten	
	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun hidup yang akan dijalani seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola angka kematian pada saat itu tidak berubah	$UHH = \sum_{x} \left(\frac{L_x}{l_0}\right)$ Keterangan: • UHH: Umur Harapan Hidup saat lahir (tahun) • x: umur (interval umur, misalnya 0–4, 5–9, dst.) • L_x: jumlah tahun yang diharapkan dijalani oleh kohort pada interval umur x • l_0: jumlah penduduk yang hidup pada umur 0 (kelahiran) • ω: batas akhir umur (biasanya 85+ tahun)	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Penjelasan	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	**Prevalensi stunting** adalah proporsi balita yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang diukur berdasarkan **indeks Tinggi Badan menurut Umur (TB/U).**	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{JAB(5)} X\ 100\%$ Keterangan PAB(5) P *stunting* : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (*stunting*) JAB(5)P *stunting* : Jumlah anak balita pendek (*stunting*) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP\ stunting = \frac{JAB(5)SP\ stunting}{JAB(5)} X\ 100\%$ Keterangan PAB(5) SP *stunting* : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (*stunting*) JAB(5) SP *stunting* : Jumlah anak balita sangat pendek (*stunting*) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) Prevalensi *stunting* = PAB(5) P + PAB(5) SP	Kemenkes	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	**Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** adalah jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan penduduk untuk menempuh pendidikan formal. Angka ini mengukur tingkat pencapaian pendidikan penduduk dan menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	$RLS = \frac{\sum(P_i \times T_i)}{\sum P_i}$ Keterangan: • P_i: Jumlah penduduk pada kelompok pendidikan ke-i • T_i: Lama sekolah (tahun pendidikan formal yang ditamatkan) untuk kelompok pendidikan ke-i	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten	-Dinas Pendidikan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Peningkatan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga** (sering dikaitkan dengan Indeks Kualitas Keluarga/IKK oleh Kementerian PPPA, atau Indeks Pembangunan Keluarga/iBangga oleh BKKBN) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan memetakan tingkat kesejahteraan serta kualitas hidup keluarga di suatu wilayah berdasarkan dimensi-dimensi vital	$IPKK = \frac{I_{Ketahanan\ Sosial} + I_{Ketahanan\ Ekonomi} + I_{Ketahanan\ Psikologis}}{3}$	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	-Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Penjelasan	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan		Tingkat Kemiskinan	**Tingkat Kemiskinan** secara operasional didefinisikan sebagai persentase atau jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang berada di bawah **Garis Kemiskinan (GK).** Seseorang dikategorikan miskin apabila memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi **kebutuhan dasar** minimum (makanan dan non-makanan), yang diukur melalui tingkat pengeluaran per kapita per bulan.	$P_0 = \frac{q}{n} \times 100\%$ Keterangan: • P_0: Persentase penduduk miskin • q: Jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan • n: Jumlah seluruh penduduk • Satuan hasil: persen (%)	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten	
		Pertumbuhan Ekonomi	pertumbuhan ekonomi adalah spesifikasi langkah dan indikator konkret untuk mengukur tingkat perkembangan kapasitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Variabel ini umumnya diukur menggunakan persentase perubahan tahunan **Produk Domestik Bruto (PDB)** untuk tingkat nasional, atau **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** untuk tingkat daerah.	$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDB tahun ini} - \text{PDB tahun lalu})}{\text{PDB tahun lalu}} \times 100\%$ atau bisa juga ditulis sebagai: $r = \frac{(\text{PDB}_t - \text{PDB}_{t-1})}{\text{PDB}_{t-1}} \times 100\%$ **Keterangan** • r: Tingkat pertumbuhan ekonomi (dalam persen). • PDB_t: Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun sekarang atau tahun berjalan. • PDB_{t-1}: Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun sebelumnya. • **PDB**: Nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya satu tahun. • **Tahun berjalan**: Periode waktu yang sedang dihitung pertumbuhan ekonominya. • **Tahun lalu**: Periode waktu satu tahun sebelumnya.	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten	
	Peningkatan kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif	Tingkat Inflasi	**inflasi** adalah persentase perubahan harga barang dan jasa secara umum serta terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Nilai ini diukur menggunakan **Indeks Harga Konsumen (IHK)** atau CONSUMER PRICE INDEX (CPI), dan dinyatakan dalam satuan **persentase (%)**	$\text{Inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan: • IHK_t: Indeks Harga Konsumen pada periode sekarang • IHK_{t-1}: Indeks Harga Konsumen pada periode sebelumnya • Satuan hasil: persen (%)	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten	-Dinas Sosial - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Perdagangan dan Perindustrian -

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Penjelasan	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Perluasan Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah persentase jumlah penduduk yang sedang mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha, atau tidak memiliki pekerjaan namun siap bekerja, terhadap jumlah total angkatan kerja.	$TPT = \frac{J_{Penganggur}}{J_{Angkatan\ Kerja}} \times 100\%$ Keterangan: • $J_{Penganggur}$: Jumlah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru • $J_{Angkatan\ Kerja}$: Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja + penganggur • Satuan hasil: persen (%)	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi	Proporsi kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi adalah **persentase nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan total PDRB seluruh kabupaten/kota di tingkat provinsi dalam periode tertentu.** Indikator ini mengukur besarnya peran ekonomi suatu daerah terhadap perekonomian regional yang lebih luas.	$K_{PDRB} = \frac{PDRB_{Kabupaten}}{PDRB_{Provinsi}} \times 100\%$ Keterangan: • $PDRB_{Kabupaten}$: Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku atau konstan di tingkat kabupaten/kota • $PDRB_{Provinsi}$: Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku atau konstan di tingkat provinsi • Satuan hasil: persen (%)	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten	-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan - Dinas Perumahan dan Permukiman
	Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri	**Persentase Desa Mandiri** adalah proporsi jumlah desa yang telah mencapai status kemandirian tertinggi, dibandingkan dengan total jumlah desa di suatu wilayah (kabupaten/provinsi/nasional). Status ini diukur menggunakan instrumen **Indeks Desa Membangun (IDM).**	$\text{Persentase Desa Mandiri} = \frac{J_{Desa\ Mandiri}}{J_{Desa\ Total}} \times 100\%$ Keterangan: • $J_{Desa\ Mandiri}$: Jumlah desa dengan status **Mandiri** berdasarkan hasil Indeks Desa Membangun (IDM) • $J_{Desa\ Total}$: Jumlah seluruh desa di wilayah yang sama (kabupaten, provinsi, atau nasional) • Satuan hasil: persen (%)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Penjelasan	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
Wilayah Pantai dan Pegunungan Kabupaten Lampung Selatan Semakin Maju		Indeks Ekonomi Hijau	**Definisi Operasional Indeks Ekonomi Hijau Daerah** adalah ukuran kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas transformasi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan rendah karbon di tingkat daerah.		Kementerian PPN/Bappenas	
	Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan berkelanjutan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	**Rasio PDRB Industri Pengolahan** adalah indikator statistik untuk mengukur persentase atau proporsi sumbangan nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan pada suatu wilayah dalam periode tertentu.	$R_{Industri} = \frac{PDRB_{Industri\ Pengolahan}}{PDRB_{Total}} \times 100\%$ Keterangan: • $PDRB_{Industri\ Pengolahan}$: Nilai Produk Domestik Regional Bruto dari lapangan usaha industri pengolahan • $PDRB_{Total}$: Total PDRB seluruh lapangan usaha • Satuan hasil: persen (%)	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten	-Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan; -Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Dinas Perikanan
	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	**Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum** adalah persentase yang menunjukkan kontribusi atau porsi nilai tambah bruto dari sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah	$R_{MakanMinum} = \frac{PDRB_{Penyediaan\ Makan\ dan\ Minum}}{PDRB_{Total}} \times 100\%$ Keterangan: • $PDRB_{Penyediaan\ Makan\ dan\ Minum}$: Nilai PDRB sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum • $PDRB_{Total}$: Total PDRB seluruh sektor ekonomi • Satuan hasil: persen (%)	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Penjelasan	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian pada Level Kabupaten	**Definisi Operasional Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non-Pertanian** adalah perbandingan (persentase) antara jumlah unit usaha kecil dan usaha menengah pada sektor non-pertanian dengan total seluruh unit usaha yang ada pada sektor non-pertanian dalam wilayah dan tahun yang sama	$P_{UKM\_NonPertanian} = \frac{J_{UKM\_NonPertanian}}{J_{UKM\_Total}} \times 100\%$ Keterangan: • $J_{UKM\_NonPertanian}$: Jumlah usaha kecil dan menengah di sektor non-pertanian (industri, perdagangan, jasa, dll.) • J_{UKM_Total}: Total jumlah usaha kecil dan menengah di kabupaten • Satuan hasil: persen (%)	Kementerian UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** adalah ukuran atau indikator komposit yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada periode tertentu. Nilainya ditetapkan pada skala 0 hingga 100, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan kondisi lingkungan yang semakin baik dan ideal.	$IKLH = \frac{IQA + IKTL + ICH}{3}$ Keterangan: • IQA: Indeks Kualitas Air • $IKTL$: Indeks Kualitas Tutupan Lahan • ICH: Indeks Kualitas Udara • Satuan hasil: skor 0–100	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	-Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Peningkatan Kesiagaan Bencana	Indeks Resiko Bencana	**Indeks Risiko Bencana (IRB)** adalah ukuran atau angka yang menggambarkan tingkat potensi kerugian (seperti korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan harta benda) di suatu wilayah akibat ancaman bencana dalam kurun waktu tertentu.	$IRB = \frac{I_{Ancaman} + I_{Kerentanan} + (100 - I_{Kapasitas})}{3}$ Keterangan: • $I_{Ancaman}$: Indeks potensi ancaman bencana (hazard) • $I_{Kerentanan}$: Indeks tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, fisik, lingkungan) • $I_{Kapasitas}$: Indeks kapasitas penanggulangan bencana • Satuan hasil: skor 0–100	BNPB	-Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan -Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Penjelasan	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan antar Daerah Nasional dan Internasional		Indeks Daya Saing Daerah	**Definisi Operasional Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)** adalah ukuran yang menggambarkan kondisi, posisi relatif, dan kemampuan suatu daerah dalam mendayagunakan seluruh potensi yang dimilikinya. Instrumen ini merefleksikan tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian ekonomi suatu wilayah	$IDD = \frac{\sum_{i=1}^{n}(S_i \times B_i)}{\sum_{i=1}^{n} B_i}$ Keterangan: • S_i: Skor indikator ke-i hasil normalisasi atau penilaian (0–100) • B_i: Bobot indikator ke-i sesuai pilar daya saing • n: Jumlah indikator dalam seluruh pilar Struktur umum IDD disusun dari tiga pilar utama: 1. **Kapasitas dasar (basic enablers)** — infrastruktur, SDM, kesehatan, institusi. 2. **Efisiensi ekonomi (economic efficiency)** — produktivitas, pasar tenaga kerja, keuangan. 3. **Inovasi dan dinamika bisnis (innovation)** — teknologi, riset, dan kewirausahaan. Setiap pilar biasanya dihitung sebagai rata-rata tertimbang indikator-induk, lalu digabungkan: $IDD = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{3}$	Badan Riset dan Inovasi N;asional (BRIN)	
	Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global	*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*	**Incremental Capital Output Ratio (ICOR)** adalah metrik makroekonomi yang mengukur jumlah tambahan modal atau investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan OUTPUT (Produk Domestik Bruto/PDB). ICOR adalah indikator utama untuk mengukur tingkat efisiensi investasi suatu negara atau wilayah	$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I_t}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$ Keterangan: ΔK = penambahan kapital/barang modal baru/kapasitas terpasang ΔY = penambahan output	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten	-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perdagangan dan Perindustrian

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

   Perbandingan target dan realisasi Kinerja IKU tahun 2025 berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026.

Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2021-2026

No	Sasaran strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama,	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	74.50	74.03	99.37
2	Meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	70.80	74.84	105.71
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.2	12.79	104.84
		Rata-rata lama Sekolah (RLS) (tahun)	8.20	7.98	97.32
		Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	10,576	11,540	109.11
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11.50	12.05	95,21
		Indeks Gini (poin)	0.281	0.239	85.05
4	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3.70	4.67	73,78
5	Meningkatnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	Indeks Infrastruktur (persen)	76.50	76.50	100.00
6	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB (persen / proxy)	29.87	26.23	87.81
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen / proxy)	12.80	15.82	123.59
		Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen / proxy)	2.90	0.75	25.86

No	Sasaran strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
		Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen / proxy)	25.50	23.88	93.65
7	Stabilitas inflasi daerah	Laju Tingkat Inflasi (persen)	3(+-1)	1.25	1.25
8	Meningkatnya nilai tukar petani	NTP (poin)	105	129.34	123.18
9	Meningkatnya kualitas SDM dan tata Kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM/ Indeks Merit	III (baik)	I (buruk)	I (buruk)
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP (predikat)	BB	B (67.07)	B (67.07)
11	Meningkatnya nilai opini BPK	Opini BPK (opini)	WTP	WTP	WTP
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)	83.00	80.51	97.00

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 menunjukkan performa makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tumbuh positif, namun memiliki tantangan besar pada reformasi birokrasi dan tata kelola internal pemerintahan:

1. Kesejahteraan Masyarakat dan Kualitas SDM

   Sektor sosial ekonomi dan kualitas hidup masyarakat menunjukkan tren yang sangat memuaskan, ditandai dengan peningkatan daya beli dan kesehatan:

   - Kesehatan dan Daya Beli: Angka Harapan Hidup (AHH) melampaui target secara signifikan mencapai 74,84 tahun (105,71%), diiringi lonjakan Pengeluaran per Kapita sebesar Rp11.540.000 per tahun (109,11%).
   - Pendidikan**:** Harapan Lama Sekolah (HLS) berhasil melampaui target di angka 12,79 tahun. Namun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sedikit di bawah target dengan realisasi 7,98 tahun (97,32%), yang berarti rata-rata pendidikan penduduk masih tertahan di tingkat SMP kelas 2.

- Sosial Keagamaan**:** Indeks Kerukunan Umat Beragama terjaga dengan sangat baik pada angka 74,03 poin (99,37%) dari target 74,50.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur PDRB

   Struktur ekonomi daerah mengalami pergeseran pencapaian hasil antar sektor:

   - Sektor Unggulan Melampaui Target: Nilai Tukar Petani (NTP) tumbuh luar biasa mencapai 129,34 poin (123,18%), menunjukkan kesejahteraan produsen pertanian meningkat tajam. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB juga melesat hingga 15,82% (123,59%).
   - Sektor Di Bawah Target: Kontribusi sektor pertanian (26,23%) dan industri (23,88%) belum memenuhi target awal. Penurunan paling drastis terjadi pada sektor pariwisata yang hanya menyumbang 0,75% dari target 2,90% (capaian hanya 25,86%).

     Faktor-faktor yang mepengaruhi belum tercapainya persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB antara lain:

     - Kualitas infrastruktur: Kualitas infrastruktur pariwisata yang belum memadai, seperti jalan, akomodasi, dan fasilitas lainnya;
     - Keterampilan sumber daya manusia: Keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia di sektor pariwisata yang belum memadai;
     - Kualitas produk pariwisata: Kualitas produk pariwisata yang belum memadai, seperti kurangnya variasi atraksi wisata dan kurangnya kualitas jasa;
     - Keterlibatan masyarakat: Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata yang belum optimal;
     - Perubahan iklim: Perubahan iklim dapat mempengaruhi kualitas lingkungan dan mengurangi daya tarik wisata;
     - Persaingan dengan destinasi lain: Persaingan dengan destinasi lain dapat mempengaruhi pilihan wisatawan.

   - Stabilitas Makro: Laju inflasi daerah sangat terkendali pada angka 1,25%**,** jauh di bawah batas atas target makro 3(+-1%).

3. Kemiskinan, Pengangguran, dan Infrastruktur

   Ketimpangan membaik, namun penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah:

   - Indeks Gini: Realisasi berada di angka 0,239 dari target 0,281. Angka koefisien gini yang lebih rendah ini menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata (capaian positif).
   - Tantangan Tenaga Kerja: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) membengkak ke angka 4,67%, gagal memenuhi target ambisius sebesar 3,70%. Hal ini sejalan dengan persentase penduduk miskin yang sedikit meleset di angka 12,05% (target 11,50%).
   - Konektivitas Wilayah: Pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana dengan Indeks Infrastruktur mencapai 76,50% (100% dari target).

4. Akuntabilitas, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik

   Sektor ini menjadi area yang paling membutuhkan evaluasi mendasar dan intervensi:

   - Kemunduran Tata Kelola Aparatur: Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM/Indeks Merit jatuh ke Kategori I (Buruk) dari target Kategori III (Baik). Ini menandakan sistem

promosi, mutasi, dan manajemen ASN belum berbasis kualifikasi dan kompetensi secara optimal.

Faktor-faktor yang mepengaruhi belum tercapainnya Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM/Indeks Merit antara lain:

- Kurangnya Komitmen Pimpinan: Pimpinan instansi yang kurang mendukung penerapan sistem merit dapat menghambat perubahan;
- Budaya Organisasi yang Belum Berorientasi pada Kinerja: Masih adanya praktik nepotisme dan kolusi dalam proses rekrutmen, promosi, dan rotasi pegawai. Kinerja individu dan kompetensi belum menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan SDM.
- Keterbatasan Kapasitas dan Kompetensi SDM: Kurangnya pemahaman tentang sistem merit di kalangan pegawai dan pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan SDM.
- Sistem dan Regulasi yang Belum Optimal: Regulasi terkait sistem merit belum sepenuhnya diterapkan atau masih memiliki celah yang memungkinkan intervensi non-meritokratis.
- Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi Pendukung: Sistem informasi manajemen kepegawaian yang belum terintegrasi dengan baik. Keterbatasan teknologi dalam mendukung transparansi dan objektivitas proses seleksi, promosi, dan evaluasi kinerja.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lemah: Mekanisme pengawasan dan evaluasi belum berjalan efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip sistem merit. Sanksi bagi pelanggaran sistem merit belum diterapkan dengan tegas.

Untuk mengatasi anjloknya Indeks Merit ke Kategori I (Buruk), Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu merombak manajemen SDM ASN dengan menerapkan regulasi terbaru sesuai PermenPANRB 19/2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit ASN.

Langkah mendesak yang wajib dilakukan meliputi:

- Evaluasi Mutasi dan Promosi: Menghentikan praktik penempatan berbasis subyektivitas dengan mewajibkan seleksi terbuka (lelang jabatan) dan uji kompetensi.
- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ): Menyelesaikan dokumen SKJ untuk seluruh level jabatan struktural dan fungsional sebagai dasar penempatan pegawai yang tepat (*right man on the right place*).
- Penilaian Kinerja Objektif: Mengimplementasikan aplikasi manajemen kinerja terintegrasi yang memantau output dan perilaku ASN secara berkala.
- Pengembangan Kompetensi: Merancang program diklat dan bimbingan teknis berbasis analisis kesenjangan kompetensi (gap analysis).
- Penilaian Mandiri: Mengaktifkan kembali instrumen evaluasi internal untuk mengukur Indeks Merit secara teratur sebelum diverifikasi ulang oleh instansi berwenang.

- Penerapan *Talent Pool* dan *Succession Planning*: Membangun pusat data kompetensi ASN terintegrasi. Janji jabatan dan promosi wajib menggunakan sistem *computer assisted test* (CAT) dan rekam jejak, bukan subjektivitas.
- Akselerasi Sistem Informasi Kepegawaian**:** Mempercepat integrasi data kepegawaian daerah dengan aplikasi BKN (SIASN) untuk memastikan transparansi mutasi, diklat, dan kenaikan pangkat.

- Akuntabilitas Kinerja: Nilai SAKIP tertahan di predikat B (67,07), meleset dari target predikat BB. Hal ini mengindikasikan efektivitas penggunaan anggaran terhadap hasil kinerja berorientasi sasaran masih perlu ditingkatkan. Adapun tindak lanjutnya sebagai berikut:
  - Cascading dan Penyelarasan Pohon Kinerja: Melakukan reviu ulang *cascading* (penjabaran) kinerja dari tingkat Kepala Daerah hingga staf eselon bawah. Pastikan tidak ada program/kegiatan yang tidak mendukung indikator makro RPJMD.
  - Penerapan *Performance-Based Budgeting* secara Ketat: Memotong anggaran kegiatan yang bersifat rutin atau serimonial. Mengalihkan alokasi dana hanya pada program yang berdampak langsung pada masyarakat (*outcome-oriented*).
  - Penguatan Peran Inspektorat (APIP): Meningkatkan kapasitas reviu laporan kinerja berkala (triwulanan) oleh Inspektorat, sehingga perbedaan/hasil target dapat dideteksi dan diperbaiki sebelum akhir tahun anggaran.
- Aspek Positif: Pemerintah daerah berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK, Instansi berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut selama 5 tahun penuh (2021-2025) dengan tingkat capaian mutlak 100%. sementara Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada di zona hijau dengan hasil 80,51 poin (97,00%).

Perbandingan target dan realisasi Kinerja IKU tahun 2025 (berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029).

Tabel 3.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2025-2029

No	Sasaran strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56.16	56.16	100
2	Peningkatan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74.07	74.03	99.95
3	Peningkatan Penegakan Hukum dan Keamanan Daerah	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	100	100
4	Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	79.36	80.18	101.03
5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	2.63	3.89	147.91

No	Sasaran strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
		Terbentuknya Daerah Otonomi Baru	1		
6	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74.59	74.84	100.34
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	10	10.4	96
7	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7.81	7.98	102.18
8	Peningkatan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	64.38	64.38	100
9	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif	Tingkat Inflasi	,2-3	1.25	1.25
10	Perluasan Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.65	4.67	99.67
11	Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi	12.4	12.43	100.24
12	Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri	8.2	15.6	190.24
13	Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	23.59	23.88	101.23
14	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1.5	1.53	102
15	Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian	11.81	11.81	100
17	Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.68	70.45	105.65
18	Peningkatan kesiagaan Bencana	Indeks Resiko Bencana	185.95	205.36	89.56
19	Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Gelobal	Incremental Capital Outpot Ratio (ICOR)	6.98	6.1	87.39

Tahun 2025 merupakan tahun pertama penentu (*baseline*) pelaksanaan target kinerja strategis instansi dalam periode perencanaan 2025-2029. Evaluasi kinerja tahun ini

difokuskan pada pemenuhan target tahun awal, komparasi efisiensi operasional, serta pemetaan area strategis yang memerlukan penguatan kebijakan pada empat tahun mendatang.

1. Aspek Sosial, Kebudayaan, Kerukunan, dan Demokrasi (Sasaran 1, 2, 4, 8)
   Pondasi kehidupan sosial kemasyarakatan pada tahun pertama ini mencatatkan kestabilan performa yang sangat kokoh.
   - Kebudayaan dan Kualitas Keluarga**:** Indeks Pembangunan Kebudayaan (56.16 poin) dan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (64.38 poin) berhasil diselesaikan dengan tingkat pemenuhan target tepat 100.00%.
   - Kerukunan dan Penegakan Demokrasi: Indeks Kerukunan Umat Beragama terealisasi sebesar 74.03 dari target 74.07, menunjukkan tingkat capaian yang sangat prima sebesar 99.95%. Keberhasilan ini diperkuat oleh lompatan performa Indeks Demokrasi Indonesia yang berhasil melampaui target awal dari 79.36 menjadi 80.18 (101.03%).
2. Hukum, Keamanan, dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital (Sasaran 3, 5)
   Akselerasi transformasi digital dan penegakan regulasi daerah menjadi salah satu pencapaian paling menonjol pada tahun berjalan.
   - Pelayanan Publik Digital: Indeks Pelayanan Publik mencatatkan lompatan kinerja luar biasa sebesar 147.91%, dengan realisasi indeks mencapai 3.89 dari target awal yang dipatok sebesar 2.63. Hal ini mencerminkan keberhasilan masif dalam integrasi sistem digitalisasi birokrasi.
   - Penegakan Hukum: Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah berhasil dipenuhi secara mutlak sebesar 100.00%.
   - Catatan Agenda DOB: Terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), target 1 dokumen/tahapan pada tahun ini belum merealisasikan angka capaian fisik (*blank data*), yang menuntut penjadwalan ulang koordinasi lintas sektor pada tahun 2026.
3. Derajat Kesehatan dan Akses Mutu Pendidikan (Sasaran 6, 7)
   Investasi pada modal manusia (*human capital*) menunjukkan sinyal positif dengan beberapa catatan evaluasi mendalam.
   - Usia Harapan Hidup & Pendidikan: Usia Harapan Hidup (UHH) berhasil melampaui target tahun pertama menjadi 74.84 tahun (100.34%). Sektor pendidikan juga mencatatkan hasil positif di mana Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merangkak naik ke angka 7.98 tahun dari target 7.81 tahun, atau mencapai 102.18%.
   - Intervensi Stunting (*Indikator Minimize*): Realisasi prevalensi stunting berada pada angka 10.4% dari target maksimal 10%. Ditinjau dari target efektivitas, capaian berada di angka 96.00%, menandakan program intervensi gizi spesifik dan sensitif di posyandu harus lebih agresif ditekan ke bawah angka dua digit pada tahun depan.
4. Makro Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Kemandirian Desa (Sasaran 9, 10, 11, 12)
   Sektor makro ekonomi daerah menunjukkan daya tahan (*resilience*) yang tinggi dengan pertumbuhan yang inklusif.
   - Kemandirian Desa**:** Persentase Desa Mandiri mengalami akselerasi luar biasa di atas ekspektasi perencanaan, melompat hingga 15.6% dari target yang hanya 8.2%, menghasilkan tingkat capaian fantastis sebesar 190.24%.

- PDRB Wilayah, Inflasi, dan Pengangguran: Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi stabil pada angka 12.43% (100.24%). Inflasi daerah terjaga sangat rendah dan aman di angka 1.25%, berada dalam koridor target daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terealisasi sebesar 4.67% dari target 4.65% (capaian kedekatan target 99.57%), menunjukkan pasar kerja lokal bergerak sangat stabil.

5. Sektor Sektoral: Industri, Pariwisata, UMKM, dan Investasi (Sasaran 13, 14, 15, 19)
   Kinerja sektor-sektor penopang ekonomi domestik berhasil memenuhi ruang target yang telah direncanakan di awal periode.
   - Sektor Penopang PDRB: Rasio PDRB Industri Pengolahan kokoh di angka 23.88% (capaian 101.23%), disusul oleh Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Pariwisata) yang mencapai 1.53% (capaian 102.00%). Proporsi UKM Non-Pertanian juga berhasil memenuhi target kesetaraan di angka 100.00% (Realisasi 11.81%).
   - Efisiensi Investasi (ICOR - *Indikator Minimize*): Angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) berhasil ditekan turun ke angka 6.1 dari target pembatas 6.98. Karena semakin rendah nilai ICOR berarti investasi semakin efisien, maka penurunan ini merupakan capaian positif yang menunjukkan bahwa perekonomian daerah semakin produktif dalam memanfaatkan modal kerja.
6. Kelestarian Lingkungan dan Kesiagaan Bencana (Sasaran 17, 18)
   Dua indikator pada klaster ini menunjukkan hasil yang bertolak belakang dan memerlukan rekayasa strategi mitigasi.
   - Kualitas Lingkungan**:** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) melampaui target dengan realisasi 70.45 poin dari target 66.68 poin (105.65%), mengindikasikan program perlindungan hutan dan mutu air berjalan baik.
   - Risiko Bencana (*Indikator Minimize***):** Nilai Indeks Risiko Bencana justru mengalami kenaikan menjadi 205.36 dari ambang batas target yang diharapkan turun di angka 185.95 (capaian efektivitas pengelolaan risiko hanya 89.56%). Kenaikan indeks risiko ini memberikan sinyal kedaruratan bagi instansi untuk memperkuat infrastruktur kebencanaan serta sistem peringatan dini (*early warning system*) di wilayah rawan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir berdasarkan IKU Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021-2026.

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini, tahun lalu dan beberapa tahun terakhir berdasarkan IKU Tahun 2021-2026

No	Sasaran strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			2021			2022			2023			2024			2025		
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	73.4	72.44	98.69	73.70	72.70	98.64	73.90	73.35	99.26	74.20	74.03	99.77	74.50	74.03	99.37
2	Meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	70	69.42	99.17	69.90	69.69	99.70	70.20	74.22	105.73	70.50	74.46	105.62	70.80	74.84	105.71
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	11.5	12.52	108.87	11.7	12.54	107.18	11.9	12.64	106.22	12	12.65	105.42	12.2	12.79	104.84
		Rata-rata lama Sekolah (RLS) (tahun)	7.79	7.70	98.84	7.89	7.72	97.85	8.00	7.77	97.13	8.10	7.78	96.05	8.20	7.98	97.32
		Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	9.931	10.266	103.37	10.088	10.266	101.76	10.248	10,617	103600.70	10.411	11,133.00	106935	10.576	11.540	109.11
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	13.5	14.19	105.11	13.00	13.14	101.08	12.50	12.79	102.32	12.00	12.57	104.75	11.50	12.05	95.21
		Indeks Gini (poin)	0.299	0.268	89.63	0.285	0.260	91.23	0.282	0.257	91.13	0.280	0.253	90.36	0.281	0.239	85.05
4	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5	5.27	105.40	4.50	5.31	118.00	4.30	4.95	115.12	4.10	4.84	118.05	3.70	4.67	73.78

No	Sasaran strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			2021			2022			2023			2024			2025		
5	Meningkatnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	Indeks Infrastruktur (persen)	73.03	104.04	142.46	74.06	86.00	116.12	75.00	87.96	117.28	75.90	88.93	117.17	76.50	76.50	100.00
6	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB (persen / proxy)	30	28.99	96.63	28.99	28.96	99.90	29.28	28.72	98.09	29.57	25.97	87.83	29.87	26.23	87.81
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen / proxy)	12.33	12.48	101.22	12.45	13.74	110.36	12.50	17.84	142.72	12.70	15.64	123.15	12.80	15.82	123.59
		Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen / proxy)	2.00	1.41	70.50	2.50	1.44	57.60	2.70	0.69	25.56	2.80	0.73	26.07	2.90	0.75	25.86
		Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen / proxy)	24	24.3	101.25	24.00	23.05	96.04	25.00	23.41	93.64	25.00	23.50	94.00	25.50	23.88	93.65
7	Stabilitas inflasi daerah	Laju Tingkat Inflasi (persen)	3 (+-1)	2.13	100.00	3 (+-1)	5.52	5.52	3 (+-1)	3.52	3.52	3(+-1)	1.67	1.67	3(+-1)	1.25	1.25
8	Meningkatnya nilai tukar petani	NTP (poin)	102	101.23	99.25	103	105.22	102.16	104	119.35	114.76	105	129.01	0.70	105	129.34	123.18

No	Sasaran strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			2021			2022			2023			2024			2025		
9	Meningkatnya kualitas SDM dan tata Kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM/Indeks Merit	II (kurang)	I (kurang)	I (kurang)	II (kurang)	I (kurang)	I (kurang)	II (kurang)	I (buruk)	I (buruk)	III (baik)	I (buruk)	I (buruk)	III (baik)	I (buruk)	I (buruk)
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP (predikat)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BB	B	B	BB	B (67.07)	B (67.07)
11	Meningkatnya nilai opini BPK	Opini BPK (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)	81	6.80	8.40	81.00	85.96	106.12	82.00	87.79	107.06	82.00	90.58	110.46	83.00	80.51	97.00

Analisis tren kinerja IKU periode 2021-2025 menunjukkan dinamika yang bergeser dari pemulihan pasca pandemi menuju penguatan daya beli, namun terjebak dalam stagnasi tata kelola birokrasi internal.

Berikut adalah perkembangan performa tahun 2025 (tahun ini) jika dibandingkan dengan tahun 2024 (tahun lalu) dan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023):

1. Tren Positif dan Akseleratif (Meningkat Konsisten)

   Indikator-indikator ini menunjukkan perbaikan performa yang stabil dan kuat dari tahun ke tahun:

   - Pengeluaran per Kapita (Daya Beli): Tumbuh progresif dari Rp9,93 juta (2021) → Rp11,13 juta (2024) → Rp11,54 juta (2025). Sektor ini konsisten melampaui target.
   - Kesejahteraan Petani (NTP): Mengalami lompatan besar dari 101,23 (2021) menjadi 129,01 (2024), dan mencapai puncaknya di angka 129,34 pada tahun 2025.

- Angka Harapan Hidup (AHH): Sempat berada di angka 69,42 (2021), melesat sejak 2023 (>74 tahun) hingga mencapai 74,84 tahun pada 2025.

2. Tren Perbaikan Kemiskinan dan Ketimpangan (Positif)
   - Persentase Penduduk Miskin: Mengalami penurunan konsisten dari 14,19% (2021) → 12,57% (2024) → 12,05% (2025). Tahun ini menjadi tahun pertama realisasi mendekati target (capaian 95,21%) setelah bertahun-tahun melesat di atas target persentase minimal.
   - Indeks Gini: Pemerataan pendapatan membaik secara konsisten dari 0,268 (2021) hingga menyentuh angka terendah 0,239 pada tahun 2025, jauh lebih baik dari batas target kelonggaran 0,281.
3. Tren Fluktuatif dan Mengalami Penurunan (Perlu Evaluasi)
   Beberapa sektor strategis justru kehilangan momentum pertumbuhan pada tahun ini:
   - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT**):** Realisasi TPT tahun ini (4,67%) sebenarnya membaik dibanding tahun 2024 (4,84%) dan tahun 2022 (5,31%). Namun, capaian persentase menurun tajam ke 73,78% karena penetapan target 2025 yang terlalu optimis/ambisius (3,70%).
   - Indeks Infrastruktur: Setelah berada di level performa tinggi pada 2021–2024 (kisaran 86%–104%), nilai infrastruktur merosot ke angka 76,50% pada tahun 2025 (pas tepat 100% dari target).
   - Sektor Pariwisata: Mengalami stagnasi akut pasca-2022. Kontribusi terhadap PDRB anjlok dari 1,41% (2021) ke kisaran 0,69% - 0,75% pada periode 2023–2025, membuat capaian tahunan mandeg di angka ±25% saja.
4. Tren Stagnan dan Buruk pada Reformasi Birokrasi
   Tata kelola internal menjadi catatan paling merah karena gagal berkembang selama 5 tahun berturut-turut:
   - Indeks Merit: Terjebak di Kategori I (Buruk/Kurang) sejak tahun 2021 hingga 2025, padahal target RPJMD menuntut kenaikan kelas ke Kategori III (Baik) sejak tahun 2024.
   - Nilai SAKIP: Selama setengah dekade (2021–2025) tidak mampu beranjak dari Predikat B. Target peningkatan ke predikat BB pada tahun 2024 dan 2025 gagal total terwujud.
   - Opini BPK: Menjadi satu-satunya indikator birokrasi yang konsisten positif dengan mempertahankan predikat WTP selama 5 tahun berturut-turut.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir berdasarkan IKU Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025-2029.

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini, Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir berdasarkan IKU Tahun 2025-2029

No	Sasaran strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capian
1	Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56.16	56.16	100
2	Peningkatan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74.07	74.03	99.95
3	Peningkatan Penegakan Hukum dan Keamanan Daerah	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	100	100
4	Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	79.36	80.18	101.03
5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	2.63	3.89	147.91
		Terbentuknya Daerah Otonomi Baru	1		
6	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74.59	74.84	100.34
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	10	10.4	96
7	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7.81	7.98	102.18
8	Peningkatan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	64.38	64.38	100
9	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif	Tingkat Inflasi	,2-3	1.25	1.25
10	Perluasan Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.65	4.67	99.67
11	Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi	12.4	12.43	100.24
12	Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri	8.2	15.6	190.24
13	Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	23.59	23.88	101.23
14	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Rasio PDRB penyediaan si Makan dan Minum	1.5	1.53	102

No	Sasaran strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capian
15	Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian	11.81	11.81	100
17	Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.68	70.45	105.65
18	Peningkatan kesiagaan Bencana	Indeks Resiko Bencana	185.95	205.36	89.56
19	Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Gelobal	Incremental Capital Outpot Ratio (ICOR)	6.98	6.1	87.39

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode baru menunjukkan bahwa realisasi IKU tahun 2025 sebagai tahun dasar (*baseline*) berjalan sangat sukses dengan sebagian besar indikator mencapai atau melampaui target awal secara signifikan.

Analisis capaian tahun dasar 2025 yang dikelompokkan secara terstruktur berdasarkan klaster urusan pelayanan sebagai berikut:

1. Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan dan Desa (Capaian Tertinggi)
   Sektor digitalisasi pelayanan dan kemandirian wilayah menunjukkan lompatan performa paling masif pada awal periode RPJMD ini:
   - Persentase Desa Mandiri**:** Mengalami lonjakan performa luar biasa dengan realisasi mencapai 15,6% dari target awal yang hanya ditetapkan sebesar 8,2% (Capaian efektivitas: 190,24%**).**
   - Indeks Pelayanan Publik: Digitalisasi birokrasi sukses mendorong kualitas pelayanan melesat ke angka 3,89 dari target awal minimal 2,63 (Capaian efektivitas: 147,91%**).**
   - Penegakan Hukum & Demokrasi: Target persentase penegakan hukum Perda terealisasi sempurna di angka 100%**,** disusul oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tumbuh positif di angka 80,18 (101,03%).
   - Catatan Khusus DOB: Indikator Terbentuknya Daerah Otonomi Baru belum memiliki angka realisasi di tahun pertama (Target: 1), mencerminkan proses regulasi yang masih berjalan di tingkat pusat.
2. Perekonomian, Infrastruktur, dan Sektor Unggulan (Stabil & On-Track)
   Seluruh indikator makro ekonomi daerah menunjukkan sinergisitas yang kokoh dan berhasil memenuhi ekspektasi target tahun pertama:
   - Sektor Industri & Pariwisata: Rasio PDRB Industri Pengolahan tercapai 23,88% (101,23%) dan Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum (pariwisata) mencapai 1.53% (102,00%), mengindikasikan struktur ekonomi daerah yang mulai bergerak produktif.

- Konektivitas & Kesejahteraan: Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi sukses memenuhi target di angka 12,43%**,** ditopang stabilitas makro berupa Tingkat Inflasi yang sangat aman terkendali di angka 1,25%**.**
- UMKM & Kebudayaan: Proporsi jumlah UKM non-pertanian **(**11,81%**)** serta Indeks Pembangunan Kebudayaan **(**56,16**)** berhasil terealisasi pas dengan target penetapan awal (Capaian tepat 100%).

3. Pembangunan Sosial, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan (Perlu Pengawalan)
   Klaster pelayanan dasar masyarakat ini berhasil memenuhi target persentase minimal, namun margin capaiannya sangat tipis sehingga memerlukan penguatan program di tahun berikutnya:
   - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Realisasi pengangguran berada di angka 4,67%**,** sedikit di atas batas toleransi target maksimal yang dipatok 4,65% (Capaian makro: 99,67%).
   - Prevalensi Stunting: Penanganan balita pendek masih menghadapi hambatan dengan realisasi angka stunting berada di 10,4%**,** meleset tipis dari target intervensi yang seharusnya menekan ke angka maksimal 10% (Capaian: 96,00%).
   - Kualitas SDM: Usia Harapan Hidup (UHH) berhasil mencapai 74,84 tahun (100,34%) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh baik mencapai 7,98 tahun (102,18%), yang mengindikasikan ketahanan sosial penduduk terus meningkat.
   - Kerukunan Beragama: Kerukunan antar umat beragama terjaga sangat kondusif di angka 74,03 dari target 74,07 (Capaian: 99,95%).
4. Lingkungan Hidup dan Daya Saing Investasi (Tantangan Risiko)
   Aspek ketahanan lingkungan hidup dan investasi menunjukkan dua sisi capaian yang kontras:
   - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): Menunjukkan hasil yang sangat hijau dengan realisasi 70,45 melampaui target awal 66,68 (Capaian: 105,65%).
   - Daya Saing Investasi (ICOR): Realisasi ICOR berada di angka 6,1**,** lebih rendah dari target anggaran sebesar 6,98. Nilai ICOR yang semakin rendah ini justru menunjukkan capaian positif, yang berarti investasi di daerah menjadi lebih efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
   - Indeks Risiko Bencana (IRB): Menjadi perhatian utama karena realisasi indeks kerentanan membengkak hingga 205,36 dari batas target aman 185,95 (Capaian hanya 89,56%**).** Ini menandakan daerah semakin rentan terhadap ancaman bencana ekologis.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi berdasarkan IKU tahun 2021-2026.

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Jangka Menengah RPJMD Tahun 2021-2026

No	Sasaran strategis	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akhir Tahun 2025	Tingkat kemajuan
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	75.00	74.03	98.71
2	Meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71.00	74.84	105.41
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.5	12.79	102.32
		Rata-rata lama Sekolah (RLS) (tahun)	8.30	7.98	96.14
		Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	10.743	11.540	107.42
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11.00	12.05	109.55
		Indeks Gini (poin)	0.279	0.239	85.66
4	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3.50	4.67	133.43
5	Meningkatnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	Indeks Infrastruktur (persen)	77.00	76.87	99.83
6	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB (persen / proxy)	30.16	26.23	86.97
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen / proxy)	12.80	15.82	123.59
		Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen / proxy)	3.00	0.75	25.00
		Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen / proxy)	25.70	23.88	92.92

No	Sasaran strategis	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akhir Tahun 2025	Tingkat kemajuan
7	Stabilitas inflasi daerah	Laju Tingkat Inflasi (persen)	3(+-1) =100	1.25	1.25
8	Meningkatnya nilai tukar petani	NTP (poin)	106	129.34	122.02
9	Meningkatnya kualitas SDM dan tata Kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM/Indeks Merit	III (baik)	I (buruk)	I (buruk)
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP (predikat)	BB	B	B
11	Meningkatnya nilai opini BPK	Opini BPK (opini)	WTP	WTP	WTP
12	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)	84.00	80.51	95.85

Evaluasi tingkat kemajuan realisasi kinerja akhir tahun 2025 terhadap Target Akhir RPJMD Periode 2021-2026 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator makro kesejahteraan dan ekonomi telah berhasil melampaui sasaran jangka menengah. Namun, deviasi negatif yang cukup besar masih membayangi sektor ketenagakerjaan, pariwisata, dan reformasi birokrasi internal.

Berikut adalah analisis tingkat kemajuan sasaran jangka menengah RPJMD:

1. Sasaran Jangka Menengah yang Telah Berhasil Dilampaui

   Beberapa indikator utama menunjukkan akselerasi yang luar biasa dan berhasil mencapai target akhir dokumen perencanaan lebih cepat dari jadwal:

   - Kualitas Hidup & Kesehatan: Angka Harapan Hidup (AHH) melonjak ke 74,84 tahun dari target akhir 71,00 tahun (Tingkat kemajuan: 105,41%).
   - Daya Beli Masyarakat: Pengeluaran per Kapita menyentuh Rp11.540.000 per tahun, melampaui batas akhir jangka menengah sebesar Rp10.743.000 (Tingkat kemajuan: 107,42%).
   - Akses Pendidikan Dasar: Harapan Lama Sekolah (HLS) melaju di angka 12,79 tahun dari target akhir sebesar 12,5 tahun (Tingkat kemajuan: 102,32%).
   - Ekonomi Pertanian & Perdagangan: Nilai Tukar Petani (NTP) berhasil menembus 129,34 poin (Target akhir: 106) dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB melesat di angka 15,82% (Target akhir: 12,80%).

2. Sasaran dengan Kemajuan Positif (Mendekati Target Akhir)

   Indikator-indikator ini berada pada jalur yang tepat (*on track*) dan diproyeksikan tuntas 100% pada sisa masa pelaksanaan RPJMD:

- Infrastruktur & Pelayanan Publik: Indeks Infrastruktur wilayah berjalan sangat optimal mencapai 76,87% dari target akhir 77,00% (Tingkat kemajuan: 99,83%). Sementara Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada pada tingkat kemajuan 95,85% dengan raihan 80,51 poin.
- Kondusivitas Sosial & Inflasi**:** Indeks Kerukunan Umat Beragama terjaga kokoh di angka 74,03 poin (Tingkat kemajuan: 98,71%). Laju inflasi daerah juga sangat aman terkendali di angka 1,25% dari rentang target jangka menengah (3 ± 1%).
- Indeks Gini (Pemerataan): Realisasi sebesar 0,239 jauh di bawah batas atas ketimpangan jangka menengah (0,279), menandakan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata (kemajuan sangat positif).

3. Sasaran Makro yang Mengalami Ketertinggalan dan Deviasi
   Dua indikator kesejahteraan masyarakat masih mencatatkan rapor merah karena realisasinya gagal mendekati target akhir yang ditetapkan:
   - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Realisasi TPT mandek di angka 4,67%, gagal memenuhi target penekanan jangka menengah yang ambisius sebesar 3,50% (Angka deviasi membengkak hingga 133,43% dari batas maksimal pengangguran).
   - Kemiskinan: Persentase Penduduk Miskin masih tertahan di angka 12,05%, belum mampu menembus target satu digit di akhir RPJMD yaitu sebesar 11,00% (Tingkat kemajuan berdasarkan angka minimal: 109,55%).
4. Hambatan Akut pada Sektor Pariwisata dan Reformasi Birokrasi
   Sektor pariwisata daerah dan tata kelola pemerintahan internal menjadi titik lemah terbesar dalam pencapaian dokumen jangka menengah ini:
   - Stagnasi Sektor Pariwisata: Kontribusi pariwisata terhadap PDRB lumpuh dan hanya mampu menyumbang 0,75% dari target akhir jangka menengah sebesar 3,00% (Tingkat kemajuan sangat rendah, hanya 25,00%).
   - Kegagalan Reformasi Birokrasi: Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM/Indeks Merit hancur di Kategori I (Buruk) dari target akhir Kategori III (Baik). Sejalan dengan itu, Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) tertahan di Predikat B, gagal naik kelas ke predikat BB di akhir periode.
   - Pengecualian Positif: Hanya indikator Opini BPK yang berhasil memenuhi target jangka menengah dengan konsisten mempertahankan predikat WTP.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi berdasarkan IKU tahun 2025-2029.

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah RPJMD Tahun 2025-2029

No	Sasaran strategis	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akhir Tahun 2025	Tingkat kemajuan
1	Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	59.32	56.16	94.67
2	Peningkatan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75.75	74.03	97.73
3	Peningkatan Penegakan Hukum dan Keamanan Daerah	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	100	100
4	Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	81.88	80.18	97.92
5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	2.99	3.89	130.10
		Terbentuknya Daerah Otonomi Baru	1		
6	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75.53	74.84	99.09
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	8.8	10.4	118.18
7	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7.91	7.98	100.88
8	Peningkatan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	67.66	67.1	99.17
9	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif	Tingkat Inflasi	2.5-3.5	1.25	1.25
10	Perluasan Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	4	4.67	116.75

No	Sasaran strategis	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi Akhir Tahun 2025	Tingkat kemajuan
11	Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi	12.45	12.43	99.84
12	Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri	10.16	15.6	153.54
13	Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	24.07	23.88	99.21
14	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1.53	1.53	100
15	Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian	13.17	11.81	89.67
17	Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.94	70.45	103.69
18	Peningkatan kesiagaan Bencana	Indeks Resiko Bencana	177.2	205.36	115.89
19	Peningkatan Daya Saing Daerah untuk mendukung Perekonomian Domestik dan Gelobal	Incremental Capital Outpot Ratio (ICOR)	6.15	6.1	99.19

Pada awal tahun periode RPJMD 2025-2029 ini ditujukan untuk mengukur tingkat kemajuan (*progress rate*) yang telah dicapai pada tahun pertama terhadap target akhir tahun 2029. Pemetaan ini membagi indikator ke dalam tiga klaster utama untuk mempermudah pengendalian kinerja:

1. Klaster Indikator Melampaui Target Akhir Jangka Menengah (Sangat Tinggi)
   Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD, daerah telah berhasil melampaui target akhir tahun 2029 pada beberapa indikator strategis:
   - Digitalisasi Tata Kelola: Indeks Pelayanan Publik mencapai 3.89 dari target akhir 2.99 (130.10%). Hal ini menunjukkan lompatan besar pada efisiensi birokrasi digital daerah.
   - Kemandirian Desa: Persentase Desa Mandiri melonjak signifikan hingga 15.6% dari target akhir tahun 2029 yang sebesar 10.16% (153.54%).

- Pendidikan dan Lingkungan: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menyentuh 7.98 tahun dari target akhir 7.91 tahun (100.88%). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga melampaui target jangka menengah dengan nilai 70.45 dari target akhir 67.94 (103.69%).
- Penegakan Hukum**:** Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah sukses dipenuhi secara mutlak sebesar 100.00%.

2. Klaster Indikator On-Track dan Mendekati Target Akhir (Baik)
   Mayoritas indikator makro sosial dan ekonomi berada pada jalur yang tepat (*on-track*) dengan tingkat kemajuan di atas 90%–99% pada tahun pertama:
   - Sosial, Kerukunan, dan Demokrasi: Indeks Kerukunan Umat Beragama telah mencapai 97.73% (Realisasi 74.03 dari target 75.75). Indeks Demokrasi Indonesia menyusul dengan kemajuan 97.92% (Realisasi 80.18). Indeks Pembangunan Kebudayaan berada pada posisi 94.67%, dan Indeks Kualitas Keluarga mencapai 99.17%.
   - Ekonomi, Infrastruktur, dan Investasi**:** Sektor Pariwisata (Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum) sukses mengunci target akhir lebih cepat di angka 100.00% (Realisasi 1.53%). Kontribusi PDRB Industri Pengolahan berada di angka 99.21%, dan Kontribusi PDRB Wilayah terhadap Provinsi mencapai 99.84%. Efisiensi modal investasi (ICOR) bergerak sangat baik di angka 6.1 dari ambang batas akhir 6.15 (99.19%). Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat juga kokoh pada tingkat kemajuan 99.09%.
3. Klaster Indikator Kritis dan Mengalami Deviasi (*Indikator Minimize*)
   Klaster ini merupakan indikator dengan sifat khusus (*minimize*) di mana angka realisasi yang melebihi target menunjukkan adanya tekanan atau penurunan kinerja yang harus segera dikendalikan:
   - Prevalensi Stunting: Realisasi tahun 2025 berada pada angka 10.4%, sedangkan target akhir tahun 2029 adalah menurunkannya hingga 8.8%. Angka kemajuan tertulis 118.18% yang berarti realisasi saat ini masih berstatus *over-target* dari ambang maksimal yang ditetapkan.
   - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Realisasi pengangguran berada di angka 4.67%, masih berjarak dari target penurunan akhir RPJMD yaitu 4.00% (Tingkat batas deviasi 116.75%).
   - Indeks Risiko Bencana: Realisasi indeks kedaruratan bencana daerah berada di angka 205.36, masih jauh di atas ambang batas aman akhir yang ditargetkan turun ke 177.2 (115.89%). Ketiadaan realisasi fisik pada indikator pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) juga memerlukan perhatian koordinasi strategis.
   - Produktivitas UMKM: Berbeda dengan yang lain, indikator Proporsi UKM Non-Pertanian bersifat *maximize*, namun realisasinya baru menyentuh 11.81% dari target akhir 13.17%. Sektor ini mencatatkan kemajuan terendah pada klaster ekonomi sebesar 89.67%.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional IKU Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021-2026.

Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional IKU Tahun 2021-2026

No	Sasaran strategis	Indikator	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama,	Indeks Kerukunan Umat beragama (poin)	74.03	-
2	Meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74.84	74.5
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.79	13.3
		Rata-rata lama Sekolah (RLS) (tahun)	7.98	9.07
		Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	11.540	12.802
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	12.05	8.5
		Indeks Gini (poin)	0.239	0.363
4	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4.67	4.9
5	Meningkatnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	Indeks Infrastruktur (persen)	76.50	-
6	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB (persen / proxy)	26.23	13.1
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen / proxy)	15.82	13.17
		Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen / proxy)	0.75	2.14
		Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen / proxy)	23.88	19.07
7	Stabilitas inflasi daerah	Laju Tingkat Inflasi (persen)	1.25	2.9
8	Meningkatnya nilai tukar petani	NTP (poin)	129.34	123.26
9	Meningkatnya kualitas SDM dan tata Kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM/Indeks Merit	I (buruk)	-
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP (predikat)	B (67.07)	-
11	Meningkatnya nilai opini BPK	Opini BPK (opini)	WTP	-
12	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)	80.51	-

Realisasi indikator makro ekonomi daerah secara umum berhasil unggul dan kompetitif di tingkat nasional, ditandai dengan struktur ketenagakerjaan, tingkat pemerataan pendapatan, kekuatan sektor agraria-industri, serta stabilitas harga yang jauh lebih baik dibandingkan rata-rata performa Indonesia. Namun, daerah masih tertinggal dalam pemenuhan standar indeks pelayanan dasar manusia seperti pendidikan, daya beli, dan penuntasan kemiskinan ekstrem. Berikut adalah realisasi kinerja daerah tahun 2025 terhadap Standar Nasional:

1. Performa Daerah Unggul terhadap Standar Nasional
   Daerah mencatatkan lompatan performa yang sangat kompetitif dan berada di atas rata-rata capaian nasional pada indikator berikut:
   - Kesejahteraan Petani & Agribisnis: Nilai Tukar Petani (NTP) daerah mencapai 129,34 poin, unggul signifikan dari standar nasional sebesar 123,26. Hal ini linear dengan porsi Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB daerah (26,23%) yang dua kali lipat lebih besar dari kontribusi nasional (13,1%).
   - Pemerataan Pendapatan: Indeks Gini daerah sangat impresif di angka 0,239, jauh lebih merata dibanding ketimpangan nasional yang berada di angka 0,363.
   - Pasar Tenaga Kerja: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah berhasil ditekan hingga 4,67%, lebih rendah (lebih baik) dibandingkan rata-rata pengangguran nasional sebesar 4,9%.
   - Stabilitas Makro & Sektor Riil: Laju Inflasi daerah sangat tangguh dan terkendali di angka 1,25% (Nasional: 2,9%). Industrialisasi daerah juga kokoh dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB mencapai 23,88%, mengungguli porsi nasional sebesar 19,07%. Kontribusi sektor perdagangan (15,82%) juga melampaui rata-rata nasional (13,17%).
   - Kesehatan Makro: Angka Harapan Hidup (AHH) daerah sedikit di atas standar nasional, yaitu 74,84 tahun berbanding 74,5 tahun.
2. Performa Daerah Tertinggal dari Standar Nasional
   Beberapa indikator krusial menunjukkan celah (*gap*) pembangunan yang cukup lebar dan membutuhkan intervensi anggaran yang lebih agresif:
   - Kemiskinan Wilayah: Persentase Penduduk Miskin daerah masih berada di angka dua digit yaitu 12,05%, tertinggal cukup jauh dari rata-rata kemiskinan nasional yang sudah berhasil ditekan hingga 8,5%.
   - Daya Beli Masyarakat: Pengeluaran per Kapita daerah sebesar Rp11.540.000 per tahun, masih berada di bawah kemampuan belanja nasional yang mencapai Rp12.802.000.
   - Akses & Mutu Pendidikan: Harapan Lama Sekolah (HLS) daerah tertahan di angka 12,79 tahun (Nasional: 13,3 tahun), sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 7,98 tahun, tertinggal dari standar nasional yang sudah menyentuh 9,07 tahun (setara tamat SMP/kelas 9).
   - Sektor Pariwisata: Kontribusi pariwisata daerah terhadap PDRB sangat minim, hanya 0,75%, tertinggal jauh dari rata-rata kontribusi pariwisata nasional sebesar 2,14%.

3. Indikator Sektoral Tanpa Pembanding Nasional (*Local Context Only*)
   Beberapa indikator tata kelola internal dan sosial tetap menjadi catatan evaluasi mandiri daerah karena standar baku nasionalnya bersifat situasional atau tidak diperbandingkan secara agregat:
   - Kondusivitas Sosial: Indeks Kerukunan Umat Beragama daerah berada pada level aman sebesar 74,03 poin.
   - Infrastruktur & Pelayanan: Indeks Infrastruktur tercatat sebesar 76,50% dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada di angka 80,51 poin.
   - Reformasi Birokrasi Intern: Nilai SAKIP B (67,07) dan Opini BPK WTP menunjukkan kepatuhan keuangan yang baik, namun hancurnya Indeks Merit ke Kategori I (Buruk) menjadi sinyal bahwa tata kelola ASN daerah belum memenuhi prinsip *good governance* yang diharapkan secara nasional.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional IKU Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025-2029.

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional IKU Tahun 2025-2029

No	Sasaran strategis	Indikator	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional
1	Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56.16	-
2	Peningkatan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74.03	-
3	Peningkatan Penegakan Hukum dan Keamanan Daerah	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	1
4	Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	80.18	-
5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	3.89	-
		Terbentuknya Daerah Otonomi Baru	1	-
6	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74.84	74.5
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	10.4	-
7	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7.98	9.07
8	Peningkatan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	64.38	-
9	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif	Tingkat Inflasi	1.25	2.9
10	Perluasan Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.67	4.9
11	Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi	12.43	12.53

No	Sasaran strategis	Indikator	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional
12	Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri	15.6	-
13	Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	23.88	19.07
14	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1.53	2.68
15	Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian	11.81	-
17	Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.45	-
18	Peningkatan kesiagaan Bencana	Indeks Resiko Bencana	205.36	-
19	Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global	Incremental Capital Outpot Ratio (ICOR)	6.1	-

Realisasi indikator makro ekonomi, sektor industri pengolahan, dan stabilitas pasar tenaga kerja daerah pada tahun pertama periode RPJMD baru ini secara umum berhasil unggul dan kompetitif di tingkat nasional. Namun, daerah masih menghadapi tantangan besar untuk mengejar ketertinggalan pada sektor pelayanan dasar pendidikan, kontribusi pariwisata daerah, serta ketepatan proporsi output wilayah terhadap provinsi.

Berikut adalah analisis komparatif realisasi kinerja tahun dasar 2025 terhadap Standar Nasional:

1. Performa Daerah Unggul Terhadap Standar Nasional

   Daerah mencatatkan capaian yang sangat positif dan berhasil melampaui rata-rata performa nasional pada beberapa sektor penggerak utama:

   - Struktur Industri Makro: Rasio PDRB Industri Pengolahan daerah tumbuh kuat mencapai 23,88%, unggul signifikan di atas standar nasional yang berada di angka 19,07%.
   - Pasar Tenaga Kerja: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah berhasil ditekan hingga 4,67%, lebih rendah (lebih baik) dibandingkan rata-rata pengangguran nasional sebesar 4,9%.
   - Stabilitas Harga (Moneter): Tingkat Inflasi daerah sangat tangguh dan terkendali di angka 1,25%, jauh lebih stabil dibandingkan inflasi nasional yang menyentuh angka 2,9%.
   - Kesehatan Masyarakat: Usia Harapan Hidup (UHH) daerah tercatat sebesar 74,84 tahun, sedikit berada di atas rata-rata jaminan kesehatan nasional sebesar 74,5 tahun.

2. Performa Daerah Tertinggal dari Standar Nasional

   Celah (*gap*) pembangunan yang masih di bawah standar nasional ini menjadi prioritas intervensi program pada sisa tahun perencanaan:

   - Mutu Pendidikan Dasar: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) daerah baru mencapai 7,98 tahun, tertinggal cukup jauh dari standar nasional yang sudah menyentuh angka 9,07 tahun (setara tamat SMP/kelas 9).

- Daya Tarik Pariwisata: Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum daerah sangat minim di angka 1,53%, belum mampu mengejar rata-rata kontribusi sektor pariwisata nasional sebesar 2,68%.
- Konektivitas Makro Wilayah: Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi tercatat sebesar 12,43%, meleset tipis dari target proporsi standar nasional sebesar 12,53%.

3. Indikator Kinerja Kontekstual Daerah (*Local Context Indicators*)
   Beberapa indikator yang tidak memiliki pembanding standar nasional baku tetap menunjukkan performa internal yang sangat dinamis pada tahun 2025:
   - Akselerasi Desa & Digitalisasi: Persentase Desa Mandiri melonjak tinggi ke angka 15,6% didukung oleh Indeks Pelayanan Publik berbasis digital yang impresif di angka 3,89.
   - Sosial, Budaya & Demokrasi: Kondusivitas wilayah terjaga dengan Indeks Demokrasi Indonesia (80,18), Indeks Pembangunan Kebudayaan (56,16), serta Indeks Kerukunan Umat Beragama (74,03).
   - Lingkungan & Kerentanan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bernilai hijau di angka 70,45, namun Indeks Risiko Bencana (IRB) yang membengkak ke angka 205,36 menuntut sistem mitigasi bencana yang jauh lebih siaga.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta realisasi kinerja tahun alternative solusi yang telah dilakukan.
   a. Indeks Kerukunan Umat Beragam
      Selama Tahun 2022-2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis melalui penguatan nilai-nilai agama, budaya, dan keluarga sebagai fondasi sosial. Misi pertama ini bertujuan untuk meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat serta memperkuat ketahanan sosial budaya, yang tercermin dalam dua indikator utama, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama.
      Indeks Kerukunan Umat Beragama menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 72,2 poin pada 2022 menjadi 74,03 poin pada 2024, mendekati target yang ditetapkan sebesar 74,20 poin, untuk Tahun 2025 meningkat menjadi 74.03. Peningkatan ini menggambarkan bahwa upaya pemerintah dalam mempromosikan toleransi dan dialog antaragama telah memberikan dampak yang signifikan. Program-program seperti forum kerukunan umat beragama, sosialisasi nilai-nilai multikultural, dan kolaborasi dengan tokoh agama telah berkontribusi pada terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Adapun rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 99.37% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 99.77%, dikategorikan baik.

   b. Angka Harapan Hidup (AHH)
      Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan,

kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka harapan hidup Kabupaten Lampung Selatan menunjukan peningkatan sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini menunjukan bahwa di Kabupaten Lampung Selatan terus terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hingga tahun 2025, angka harapan hidup Kabupaten Lampung Selatan mencapai 74,84 tahun.

Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 105.71% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 105.62%, dikategorikan baik sekali.

c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan dari sebesar 12,50 pada tahun 2020 menjadi 12,65 pada tahun 2024, untuk Tahun 2025 sebesar mencapai (12.79).

Adapun rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 104.84% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 105.42%, dikategorikan baik sekali.

d. Rata-rata lama Sekolah (RLS) (tahun)

Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator tingkat pendidikan masyarakat pada suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah dapat diartikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Kabupaten Lampung Selatan memiliki angka rata-rata lama sekolah yang terus meningkat. Hal ini menunjukan adanya peningkatan jenjang pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas. Hingga tahun 2025, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lampung Selatan mencapai 7.98 Tahun yang memiliki arti bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan hingga SMP kelas VIII. Lebih jauh, jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024/2025 menempati urutan ke-12. Sementara di atasnya adalah Kabupaten Pesawaran dan Lampung Timur dengan angka rata-rata lama sekolah 8 dan 8,2 Tahun. Adapun rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 97.32% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024

sebesar 96.05%, dikategorikan baik.

e. Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian, hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping sebagai konsumen akhir produk barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor industri lain.

Trend pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami peningkatan dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024 setelah sebelumnya mengalami penurunan di Tahun 2020. Pada Tahun 2019 pengeluaran per kapita sebesar 9.978 ribu rupiah/orang/tahun, menurun pada Tahun 2020 menjadi sebesar 9.875 ribu rupiah/orang/tahun. Penurunan yang relatif kecil merupakan akibat dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian secara global menurun yang tentunya juga berdampak pada Kabupaten Lampung Selatan dan mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan pada Tahun 2021, rata-rata pengeluaran kembali meningkat sebagai dampak dari upaya pemulihan ekonomi menjadi sebesar 9.931 ribu rupiah/orang/tahun. Dan pada Tahun 2024 kembali meningkat hingga mencapai angka 11.133 ribu rupiah/orang/tahun, sampai dengan Tahun 2025 naik menjadi 11.540 ribu rupiah/orang/Tahun.

Adapun rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 109.11% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 105.42%, dikategorikan baik sekali.

f. Persentase Penduduk Miskin (persen)

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Secara umum

presentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan masih di atas rata-rata Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir. Namun demikian, presentase ini masih lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten lainnya, seperti Lampung Utara, Lampung Timur dan Pesisir Barat.

Di sisi lain, upaya pengentasan kemiskinan juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Persentase penduduk miskin berhasil diturunkan dari 13,14% pada 2022 menjadi 12,57% pada 2024, mendekati target 12,28%, Persentase penduduk miskin pada Tahun 2025 (12.05). Penurunan ini mencerminkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, angka kemiskinan yang masih di atas 12% menunjukkan bahwa upaya penguatan ekonomi inklusif dan perluasan lapangan kerja perlu terus ditingkatkan.

Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 95.21% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 104.75%, dikategorikan baik.

g. Indeks Gini (poin)

Rasio Gini atau Koefisien Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini (Gini Rasio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Kabupaten Lampung Selatan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan selama periode 2020-2024. Berdasarkan data Gini Ratio, wilayah ini berhasil menurunkan angka ketimpangan dari 0,299 pada tahun 2020 menjadi 0,255 di tahun 2024, (0.239) pada Tahun 2025, penurunan sebesar 0,016 poin yang menjadikannya salah satu wilayah dengan perbaikan terbaik di Provinsi Lampung. Prestasi ini tidak terlepas dari efektivitas beberapa program pembangunan seperti optimalisasi sektor pertanian dan perikanan yang merata, program padat karya infrastruktur pedesaan, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Namun demikian, beberapa tantangan masih perlu menjadi perhatian khusus. Ketimpangan spasial antara wilayah pesisir dan pedalaman masih terlihat, dengan desa-desa di kawasan pesisir seperti Candipuro dan Kalianda menunjukkan perkembangan yang lebih lambat dibanding wilayah lain. Selain itu, kesenjangan akses ekonomi bagi UMKM di sektor informal dan keterbatasan diversifikasi ekonomi di luar sektor pertanian menjadi hambatan

yang perlu segera diatasi.

Untuk mempertahankan momentum positif ini, pemerintah daerah perlu memperkuat tiga strategi utama: pertama, meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah tertinggal melalui program padat karya berbasis komunitas; kedua, memperluas akses permodalan dan pelatihan bagi UMKM lokal; dan ketiga, mendorong investasi di sektor non-pertanian seperti pariwisata bahari dan industri pengolahan hasil perikanan. Dengan fokus pada pemerataan yang inklusif, Lampung Selatan berpotensi menjadi contoh sukses pengurangan ketimpangan di tingkat regional.

Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 85.05% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 90.36%, dikategorikan baik.

h. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Data Lampung Selatan menunjukkan variasi nilai yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024, dengan kisaran antara 4,19 persen hingga 5,31 persen. Nilai tertinggi tercapai pada tahun 2024 sebesar (5,31) persen, sementara terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar (4,19) persen. Secara umum, tren cenderung meningkat, terutama setelah 2021, meskipun sempat mengalami penurunan pada 2025 sebesar (4,67) persen.

Faktor yang mungkin memengaruhi fluktuasi ini meliputi dinamika sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, atau pariwisata, serta dampak kebijakan daerah dan program pembangunan. Puncak nilai pada 2024 mengindikasikan potensi pemulihan ekonomi atau keberhasilan intervensi tertentu. Namun, diperlukan analisis lebih mendalam terhada variabel spesifik (misalnya: inflasi, investasi, atau produktivitas sektoral) untuk memastikan penyebab perubahan ini. Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 73.78% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 118.05%, dikategorikan baik.

i. Indeks Infrastruktur (persen)

Kabupaten Lampung Selatan telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun infrastruktur wilayah melalui pelaksanaan Misi III, dengan fokus pada peningkatan konektivitas dan pelayanan sarana prasarana. Selama periode 2022-2025, capaian di bidang infrastruktur menunjukkan hasil yang

beragam. Indeks Infrastruktur mengalami peningkatan signifikan dari 85,99 poin ditahun (2022) menjadi 88,93 poin ditahun (2024), jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 75,90 poin pada Tahun 2024. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, serta sarana publik lainnya.

Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 117.17%, dikategorikan baik.

j. Persentase kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB (persen /proxy)Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2023 menjadi penghasil padi nomor 4 se-Provinsi Lampung. Kenaikan produksi padi sebesar 7,9% pada tahun 2024 dengan jumlah produksi sebesar 317.834 ton. Produksi jagung mengalami penurunan sebesar 1,3% pada tahun 2024. Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2024 menjadi penghasil jagung nomor 2 se-Provinsi Lampung. Produksi cabai besar menurun sebesar 32% di Tahun 2024 dan merupakan komoditas penghasil cabai besar nomor 2 se-Provinsi Lampung. Produksi bawang merah turun sebesar 28% di tahun 2024 dan merupakan penghasil komoditas nomor 1 se-Provinsi Lampung pada tahun 2023. Pisang adalah komoditas pertanian dengan jumlah produksi sebesar 516.112 ton pada Tahun 2024 terbesar se-Provinsi Lampung dan merupakan komoditas unggulan di bidang hortikultura Produksi komoditas Kelapa dalam sebesar 20.340 ton pada Tahun 2024 yang merupakan penghasil terbesar se-Provinsi Lampung. Komoditas Kelapa sawit merupakan komoditas di bidang perkebunan dengan produksi sebesar 9.569 ton di Tahun 2024, untuk Tahun 2025 bidang perkebunan dengan produksi sebesar 38.245 ton. Persentase kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB Tahun 2025 sebesar (26.23).
Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 87.81% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 87.83%, dikategorikan baik.

k. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen/proxy)
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menunjukkan kinerja positif, meski fluktuatif, dengan capaian 15,64% ditahun (2024) di atas tar- get 12,7%. Namun, sektor pariwisata masih belum optimal dengan kontribusi 1,49% ditahun (2024), jauh di bawah target 2,8%, mengindikasikan perlunya strategi pemulihan yang lebih agresif pasca pandemi. Realisasi Tahun 2025 sebesar (15.82)%.
Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 123.59% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 123.15%, dikategorikan baik sekali.

l. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen/proxy)
Menurut *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO), wisatawan mancanegara adalah setiap orang yang berkunjung ke suatu negara di luar

tempat tinggalnya untuk beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 bulan. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara yaitu:

- Wisatawan (*tourist*) adalah setiap pengunjung yang datang ke suatu tempat dan tinggal di tempat tersebut tidak lebih dari dua belas 12 bulan dengan maksud kunjungan antara lain: berlibur, rekreasi dan olahraga bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, dan keagamaan.
- Pelancong (*excursionist*) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal ditempat tersebut kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu tempat dengan menggunakan kapal atau kereta api, dan mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Tabel 3.12. Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	213	135	629	64	17	109	219
2.	Jumlah Wisatawan Nusantara	462.800	236.038	443.250	616.728	730.251	1.216.734	1.647.497
TOTAL		463.013	236.173	443.879	616.792	730.268	1.216.843	1.647.716

* Sampai dengan Bulan Oktober 2025

Sumber: Lampung Selatan dalam Angka, 2025

Tabel di atas menunjukan data kunjungan wisatawan di Kabupaten Lampung Selatan sempat mengalami penurunan drastis pada Tahun 2020, di mana Pandemi Covid terjadi, pada Tahun 2020, kunjungan wisatawan hanya mencapai angka 236.173 orang. Setelah Tahun 2020, dapat dilihat juga bahwa, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan sampai dengan Bulan Oktober 2024 telah mencapai 1.216.843 orang, Tahun 2025 mencapai 1.647.716.

Jumlah kunjungan yang meningkat, tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan *stakeholders* terkait. Upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata menjadi prioritas. Sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Lampung Selatan mempunyai 92 objek wisata, yang terdiri dari 14 objek wisata terpadu, 8 objek wisata sejarah, 20 objek wisata alam, dan 50 objek wisata bahari. Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Lampung Selatan mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya yang tidak terwujud, seperti seni tari, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, dan praktik budaya lainnya yang diwariskan dari generasi ke

generasi. Beberapa contoh WBTB di Lampung Selatan antara lain adalah Tari Selapanan, kain tenun ikat Inuh, dan Prasasti Palas Pasemah.
Adapun rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 25.86% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 26.07%, dikategorikan kurang.

m. Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen/proxy)

Kabupaten Lampung Selatan menghadapi beberapa tantangan strategis dalam pembangunan ekonomi yang memerlukan penanganan khusus. Pertama, ketergantungan berlebihan pada sektor primer (pertanian dan perikanan) yang menyumbang lebih dari 35% PDRB, namun rentan terhadap fluktuasi harga dan dampak perubahan iklim. Kedua, industri pengolahan yang belum berkembang optimal, ditunjukkan oleh kontribusi sektor industri pengolahan yang masih di bawah 15% terhadap PDRB, padahal wilayah ini memiliki potensi bahan baku pertanian dan perikanan melimpah.

PDRB Kabupaten Lampung Selatan dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Lampung. pada 2019, ketiga sektor tersebut menempati urutan ketiga sebagai sektor penghasil pendapatan terbesar. Sektor penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Lampung Selatan adalah sektor pertanian, industri pengolahan dan sektor perdagangan yang berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga sektor ini merupakan sektor unggulan bagi Kabupaten Lampung Selatan. Sementara itu, sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi, mencapai 23,50% pada tahun (2024) dari target 25%, menandakan perlunya penguatan rantai pasok dan nilai tambah industri lokal. Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB realisasi Tahun 2025 (23.88)%.

Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 93.65% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 94.00%, dikategorikan baik.

n. Laju Tingkat Inflasi (persen)

Pada tahun 2025, di mana inflasi diperkirakan tetap terkendali, mencerminkan pemulihan ekonomi yang lebih stabil. Secara keseluruhan, perbedaan angka inflasi antara tingkat nasional dan regional menunjukkan bahwa faktor lokal seperti kebijakan pemerintah daerah dan ketersediaan komoditas turut berperan penting dalam mengendalikan kenaikan harga. Data ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter nasional dan strategi daerah untuk menjaga stabilitas harga di masa depan. Laju inflasi daerah berhasil dikendalikan dari 5,52% (2022) menjadi 3,52% (2023-2024), mendekati kisaran target 3±1%, menunjukkan efektivitas kebijakan pengendalian harga dan stabilisasi pasokan komoditas. Laju Tingkat Inflasi Tahun 2025 dengan realisasi 1.25.

Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 1.25% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 1.67%, dikategorikan baik.

o. NTP (poin)

Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2023 menjadi penghasil padi nomor 4 se-Provinsi Lampung. Kenaikan produksi padi sebesar 7,9% pada tahun 2024 dengan jumlah produksi sebesar 317.834 ton. Produksi jagung mengalami penurunan sebesar 1,3% pada tahun 2024. Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2024 menjadi penghasil jagung nomor 2 se-Provinsi Lampung. Produksi cabai besar menurun sebesar 32% di Tahun 2024 dan merupakan komoditas penghasil cabai besar nomor 2 se-Provinsi Lampung. Produksi bawang merah turun sebesar 28% di tahun 2024 dan merupakan penghasil komoditas nomor 1 se-Provinsi Lampung pada tahun 2023. Pisang adalah komoditas pertanian dengan jumlah produksi sebesar 516.112 ton pada Tahun 2024 terbesar se-Provinsi Lampung dan merupakan komoditas unggulan di bidang hortikultura Produksi komoditas Kelapa dalam sebesar 20.340 ton pada Tahun 2024 yang merupakan penghasil terbesar se-Provinsi Lampung. Komoditas Kelapa sawit merupakan komoditas di bidang perkebunan dengan produksi sebesar 9.569 ton di Tahun 2024.

Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan signifikan dari 105,22 (2022) menjadi 129,34 (2025), jauh melampaui target 105, yang mencerminkan membaiknya kesejahteraan petani melalui peningkatan harga produk pertanian dan efisiensi biaya produksi.

Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 123.18% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 122.87%, dikategorikan baik sekali.

p. Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM/Indeks Merit (kategori)

Secara Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan sistem merit sudah dilaksanakan dengan baik yang meliputi: Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN; Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dan Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, maka mencabut Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem Dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), maka tugas dari KASN termasuk penilaian Sistem Merit diserahkan seluruhnya ke BKN Pusat Jakarta, Kabupaten Lampung Selatan melalui BKD Kabupaten Lampung Selatan, telah melakukan penilaian mandiri Sistem Merit melalui aplikasi Sipinter yang siap di verifikasi oleh BKN, sampai dengan 31 Desember 2024 tidak ada penilaian atas indikator sistem merit melalui aplikasi Sipinter, capaian indeks merit yang tersaji level I dengan kategori buruk yang merupakan penilaian dari BKN tahun 2023.

q. Nilai SAKIP (predikat)

Evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, diantaranya:

a. Melakukan reviu dan perbaikan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (PD) dengan melengkapi definisi operasional serta sumber data;
b. Menyajikan data capaian atas target kinerja pada pelaporan kinerja PD.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa nilai sebesar 67,07 dengan predikat "B" meski belum mencapai target predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada tingkat pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen pada manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13. Rincian hasil evaluasi Nilai SAKIP

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai		
			2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	22,51	22,52	22,70
2	Pengukuran Kinerja	30	19,35	19,37	19,53
3	Pelaporan Kinerja	15	10,85	10,87	11,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,72	13,77	13,84
	Nilai Hasil Evaluasi	100	66,43	66,53	67,07
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B

r. Opini BPK (opini)

Keberhasilan memperoleh opini WTP tidak hanya ditentukan oleh penyusunan laporan keuangan semata, tetapi merupakan asil sinergi antara kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, pengelolaan aset yang tertib, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, tindak lanjut temuan BPK, kompetensi SDM, pemanfaatan system informasi, serta komitmen pimpinan daerah.

Secara umum, kinerja BPKAD menunjukkan realisasi kinerja yang relatif baik. Peningkatan kinerja didorong oleh perencanaan dan pelaksanaan yang efektif, terbukti dengan dapat dipertahankannya capaian WTP. Opini atas audit BPK terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan pemerintah Daerah tahun Anggaran 2024 adalah

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat WTP kesepuluh dari pertama diraih pada tahun 2011 dan 9 (sembilan) kali berturut-turut yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Predikat WTP tersebut dapat terus dapat dipertahankan dengan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

Adapun strategi untuk mempertahankan opini BPK pada tahun berjalan, antara lain:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
2. Peningkatan kualitas, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran;
3. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah untuk mendukung peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan pengelolaan Barang Milik daerah dengan tertib jumlah, tertib administrasi dalam pencatatan dan tertib hokum;
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
6. Meningkatkan kualitas SDM untuk penataan system prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Meningkatkan kinerja para pejabat dalam mengampu kegiatan yang dilaksanakan sesuai program dan kegiatan serta tatakelola yang telah ditetapkan.

s. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 6 OPP telah menyampaikan laporannya. Kecenderungan *(trend)* Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2024 hingga 2025 dilingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 91.14 (A Sangat Baik) Nilai IKM di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebelumnya;
2. Dari seluruh OPP yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

t. Penghargaan Tahun 2025-2026

Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025 mendapatkan beberapa apresiasi kinerja/penghargaan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.14. Penghargaan Tahun 2025

No	Nama Penghargaan	Diterima	Diserahkan	Tempat/Tanggal Penyerahan	LINK
1	Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 uk Ke 9 Kali berturut – turut dari Tahun 2016.	Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama	Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo.	Aula Krakatau Provinsi Lampung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar lampung, Senin (26-5-2025)	https://lampungselatankab.go.id/web/2025/05/26/pemkab-lampung-selatan-9-tahun-berturut-turut-raih-opini-wtp-dari-bpk
2	Penghargaan dinilai berhasil mendukung implementasi Program *Strengthening of Social Forestry* (SSF)	Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama	apresiasi datang dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan diserahkan langsung oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni.	Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.	https://lampungselatankab.go.id/web/2025/06/24/lampung-selatan-masuk-daftar-elit-6-daerah-terbaik-se-indonesia-bupati-egi-bawa-pulang-penghargaan-bergengsi-dari-jakarta
3	Penghargaan bergengsi bertajuk adi praja Satwa Sewaka Madya meraih juara ke dua di kancah Nasional dalam ajang Indolivestock Innovation Awards 2025	Bupati Lampung selatan yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Lampung selatan, Rini Ariasih, pada pembukaan Indolivestock Expo & Forum 2025.	Direktur Hilirisasi hasil perternakan Ditjen Perternakan dan kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI, Dr,drh. Makmun, M.Sc.,	Grand City Convex, Surabaya (2 Juli 2025)	https://lampungselatankab.go.id/web/2025/07/02/peternakan-lampung-selatan-juara-nasional-bukti-kerja-nyata-bismillah-bisa
4	Lampung Selatan masuk tiga besar terbaik se-Lampung , raih Grarede A dalam Survei Kepuasan Publik 2025	Bupati Raditiyo Egi Pratama dan Wakil Bupati M.Syaiful Anwar yang dinilai sukses membawa perubahan positif, terutama di sektor pelayanan publik.	Litbang Radar Lampung Media Grup (RLMG)	Litbang Radar Lampung Media Grup (RLMG)	https://lampungselatankab.go.id/web/2025/07/07/lampung-selatan-masuk-tiga-besar-terbaik-se-lampung-raih-grade-a-dalam-survei-kepuasan-publik-2025

No	Nama Penghargaan	Diterima	Diserahkan	Tempat/Tanggal Penyerahan	LINK
5	Penghargaan Prestisius pada ajang Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025 Adapun penghargaan yang di raih antara lain : 1. Peringkat 1 Kategori Kader IMP Bangga Kencana 2. Peringkat 1 Kategori Pasang KB Lestari 20 Tahun 3. Peringkat 2 Kategori PKB/PLKB Terbaik 4. Peringkat Kategori Kader Tim Pendamping Keluarga.	Sejumlah Tenaga Kabupaten Lampung selatan yang di dampingi Kepala Dinas PPKB, Rika Wati.	BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung dalam puncak Harganas.	Kantor BKKBN Provinsi Lampung, Jumat, 25 Juli 2025	https://lampungselatankab.go.id/web/2025/07/25/bangga-tenaga-lini-lapangan-lampung-selatan-borong-penghargaan-di-harganas-2025-tingkat-provinsi
6	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025 peringkat Kategori Nindya	Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA Veronica Tan.	Auditorium KH.M. Rasjidi, Kementrian Agama RI Jakarta Pusat Jumat (8/8/2025)	https://lampungselatankab.go.id/web/2025/08/08/bangga-lampung-selatan-pertahankan-predikat-kla-nindya-2025-buktikan-konsistensi-kabupaten-ramah-anak
7	Penghargaan Nasional dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2025 diberikan atas dedikasinya sebagai pemimpin muda yang terbuka terhadap kritik serta menolak adanya batasan sosial dalam pelayanan publik.	Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.,	Jakarta Concert Hall, iNews Tower, MNC Center, Jakarta Pusat Kamis Malam (28/8/2025)	https://lampungselatankab.go.id/web/2025/08/28/bupati-muda-tanpa-batas-sosial-egi-raih-penghargaan-nasional-inews-tv
8	Penghargaan Tingkat Nasional Stand Terinovatif di Apkasi Otonomi Expo 2025, sebagai stand terbaik kategori Inovatif dengan tema “Produk Lokal Menglobal”	Bupati Lampung Selatan di wakili oleh Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Lampung Selatan, Muhammad Ali	Apkasi Otonomi Expo (AOE)	Nusantara Hail, ice BSD, Tanggerang Sabtu (30/8/2025)	https://lampungselatankab.go.id/web/2025/08/30/bangga-lampung-selatan-raih-stand-terinovatif-di-apkasi-otonomi-expo-2025
9	Penghargaan Excellence In Tourism and Food Sustainability Intergration dalam ajang bergengsi Indonesia Kita Awards 2025 yang di gelar Garuda TV	Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama sebagai bentuk apresiasi kepada Pemkab Lampung Selatan yang dinilai Sukses mengintegrasikan Sektor Pariwisata dan Ketahanan Pangan dalam kebijakan Pembangunan berkelanjutan.	Garuda TV	Patra Jasa Office Tower Jakarta, Senin (10/11/2025)	https://lampungselatankab.go.id/web/2025/11/10/bangga-bupati-radityo-egi-pratama-terima-penghargaan-nasional-lewat-inovasi-wisata-dan-pangan-berkelanjutan

No	Nama Penghargaan	Diterima	Diserahkan	Tempat/Tanggal Penyerahan	LINK
10	Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 dengan Kategori Kabupaten Sangat Inovatif	Wakil Bupati Lampung selatan, M Syaiful Anwar.	Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Naudy R.P. Tendean.	Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa Malam (9/12/2025)	https://lampungselatankab.go.id/web/2025/12/09/bersaing-ketat-di-level-nasional-lampung-selatan-raih-predikat-kabupaten-sangat-inovatif-pada-iga-2025

Tabel 3.15. Penghargaan Tahun 2026

No	Nama Penghargaan	Diterima	Diserahkan	Tempat/Tanggal Penyerahan	LINK
1	Penghargaan Juara Favorit Lomba Desa Wisata NusantaraTahu n 2025Tematik ramah Lingkungan Kategoro II: Desa Maju / Mandiri Pada Puncak peringatan Hari desa Nasional 2026.	Diterima Langsung oleh Ke[pala Desa Suak, Juli wahyudin di dampingi Wakil Bupati Lampung Selatan M.syaipul Anwar serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Darmawan.	Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinngal (Mendes PDT) Yandri Susanto.	Lapangan desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali , Jawa tengah, Kamis (15/1/2025)	https://lampungselatankab.go.id/web/2026/01/15/berangkat-dari-kepedulian-lingkungan-desa-suak-raih-juara-favorit-desa-wisata-nusantara-2025-tingkat-nasional2025-tingkat-nasional
2	Raih apresiasi Gubernur atas penyelesaian 100 persen Tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraa n pemerintah daerah tahun 2024.	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Badruzzaman.	Wakil Gubernu r Lampung, Jihan Nurlela.	Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis, (15/1/2026)	https://lampungsel atankab.go.id/web/2026/01/15/lampu ng-selatan-raih-apresiasi-gubernur-atas-penyelesaian-100-persen-tindak-lanjut-pengawasan
3	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Pratama, sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat secara merata Dan berkelanjutan		Wakil Bupati Lampung Selatan, M.Syaiful Anwar.	Dalam acara penganugrahan UHC di Ballroom JIEXPO Convention Centre and Theatre, Kemayangan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026)	https://lampungselatankab.go.id/web/2026/01/27/lampung-selatan-raih-uhc-award-2026-kategori-pratama-komitmen-egi-syaiful-perluas-akses-kesehatan-masyarakat
4	Penghargaan Opini katagori Kualitas Tinggi dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2025.	Bupati lampung selatan yg diwakili Plt. Asisten Administrasi UmumSetdakab Lampung selatan Edy Firnandi	Diberikan oleh Ombusmen RI Perwakilan Provinsi Lampung yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.	Gedung balai keratun Lantai III Komplek kantor Gubernur Lampung Senin (9/2/2026)	https://lampungselatankab.go.id/web/2026/02/09/pr estasi-beruntun-lampung-selatan-raih-opini-kualitas-tinggi-penilaian-maladministrasi-pelayanan-publik-2025
5	-Lampung Selatan Raih TOP BUMD Awards 2026 bintang 4	Bupati Lampung Selatan , Radityo Egi Pratama, serta TOP CEO BUMD 2026 yang diberikan kepada Direktur Perumda Air Minum Tirta Jasa, Julianto	Diserahkan dalam acara puncak TOP BUMD Awards 2026 Penghargaan Tingkat Nasional yg diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerjasama dg Institut Otonomi Daerah (I-OTDA)	Dian Ballroom, Hotel Rafles, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026)	https://lampungselatankab.go.id/web/2026/04/13/b orong-penghargaan-nasional-prumda-tirta-jasa-lampung-selatan-raih-top-bumd - awards-2026 - bintang-4-bupati-egi-dinobatkan-pembina-terbaik

6	Lampung Selatan Raih Lampung Post Awards 2026	Kepada staf Ahli Bupati Bitang Pemerintahan, Hukum Dan Politik Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah, dalam ajang Lampung Poat Executive Forum di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).	Diserahkan langsung oleh pemimpin perusahaan Lampung Post, Iskandar Zulkarnain, kepada staf Ahli bupati bidang pemerintahan, hukum, dan politik Kabupaten Lampung Selatan	Di hotel emersia, Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026)	https://lampungselatankab.go.id/web/2026/04/14/ lampung-selatan-raih-lampung-post-award-2026-bukti-keseriusan-kembangkan - kawasan-ekonomi-strategis
7	Creative Financing 2026 Lampung Selatan Raih Peringkat Kedua Nasional, Kantongi Insentif Rp2 Miliar dari Inovasi Pembiayaan Daerah	Kepada Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dalam acara yang di gelar diWindham Opi Hotel, Palembang, Sabtu malam (25/4/2026).	Wakil Mentri Dalam Negri, Akhmad Wiyagus, kepada Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama,.	Wyndhan Opi Hotel, Palembang, Sabtu malam (25/4/2026).	https://lampungselatankab.go.id/web/2026/04/25/ creative-financing-2026-lampung-selatan-raih-peringkat-kedua-nasional-kantongi-insentif-rp2-miliar-dari-inovasi-pembiayaan-daerah
8	Konsistensi Satu Dekade, Lampung Selatan Kembali Pertahankan Opini WTP ke-10 dari BPK	Kepada Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama	diserahkan langsung oleh kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung , Nugroho Heru Wibowo, kepada wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar	Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026)	https://lampungselatankab.go.id/web/2026/05.29/ konsistensi-satu-dekade-lampung-selatan-kembali-pertahankan-opini-wtp-ke-10-dari-bpk
9	Sukses Dongkrak Pariwisata Jadi Penggerak Ekonomi, Bupati Radityo Egi Raih Top Regional Leader Awards 2026	Diterima bupati lampung selatan Radityo Egi Pratama	Diserahkan langsung oleh founder Disway National Network, Dahlan Iskan, di JW Mariot Hotel, Jakart, Kamis (11/6/2026)	founder Disway National Network, Dahlan Iskan, di JW Mariot Hotel, Jakart, Kamis (11/6/2026)	https://lampungselatankab.go.id/web/2026/06/11 /sukses-dongkrak-pariwisata-jadi-penggerak-ekonomi-bupati-radityo-egi-raih-top-regional-leader-awards-2026

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tabel 3.16. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran strategis	Indikator	Anggaran (Rp)	Anggaran %
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	7,597,481,300	0.37
2	Meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	150,533,053,256	7.26
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	225,318,581,149	10.87
		Rata-rata lama Sekolah (RLS) (tahun)		
		Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	0.00	0.00
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	15,834,238,550	0.76
		Indeks Gini (poin)		
4	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	2,479,173,300	0.12
5	Meningkatnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	Indeks Infrastruktur (persen)	0	0
6	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB (persen / proxy)	0.00	0.00
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen / proxy)	4,417,836,850	0.21
		Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen / proxy)	7,000,496,950	0.34
		Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen / proxy)	1,111,373,400	0.05
7	Stabilitas inflasi daerah	Laju Tingkat Inflasi (persen)	621,664,100	0.03
8	Meningkatnya nilai tukar petani	NTP (poin)	24,665,597,106	1.19
9	Meningkatnya kualitas SDM dan tata Kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM	4,737,978,350	0.23

No	Sasaran strategis	Indikator	Anggaran (Rp)	Anggaran %
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP (predikat)	2,971,330,250	0.14
11	Meningkatnya nilai opini BPK	Opini BPK (opini)	434,727,504,438	20.97
12	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)	1,191,076,010,692	57.45
Jumlah			2,073,092,319,692	100.00

Ket:

$$\%\text{Anggaran} = \frac{\text{Anggaran}}{\text{Jumlah Anggaran X 100}}$$

Untuk meningkatkan nilai efisiensi pemanfaatan anggaran pada tahun anggaran berikutnya, beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Memperketat pengawasan agar alokasi pada Sasaran 12 (Pelayanan Publik - 57,45%) didominasi oleh *belanja publik/belanja modal* yang langsung menyentuh masyarakat, serta membatasi porsi *belanja aparatur/operasional kantor*.
- Melakukan penyempurnaan arsitektur kinerja pada aplikasi perencanaan dan penganggaran (E-Budgeting) agar di tahun mendatang, indikator infrastruktur dapat dimunculkan pagunya secara mandiri tanpa bias pemaknaan.
- Mempertahankan efisiensi tata kelola keuangan pada Sasaran 11 (Opini BPK) dengan menggeser fokus anggaran dari yang bersifat perbaikan administratif menjadi sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi.

Tabel. 3.17. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capian
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama,	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	74.50	74.03	99.37	7,597,481,300.00	6,535,698,033.00	86.02
2	Meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	70.80	74.84	105.71	150,533,053,256.00	147,106,771,835.00	97.72
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.2	12.79	104.84	225,318,581,149.00	221,774,476,485.00	98.43
		Rata-rata lama Sekolah (RLS) (tahun)	8.20	7.98	97.32			
		Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	10.576	11.540	109.11	0	0	0
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11.50	12.05	104.78	15,834,238,550.00	15,067,464,930.00	95.16
		Indeks Gini (poin)	0.281	0.239	85.05			
4	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3.70	4.67	126.22	2479173300	2306798207	93.05
5	Meningkatnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	Indeks Infrastruktur (persen)	76.50	76.50	100.00	0	0	0

No	Sasaran strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capian
6	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB (persen / proxy)	29.87	26.23	87.81	0	0	0
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen / proxy)	12.80	15.82	123.59	4,417,836,850.00	4,082,041,549.00	92.40
		Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen / proxy)	2.90	0.75	25.86	7,000,496,950.00	4,234,759,085.00	60.49
		Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen / proxy)	25.50	23.88	93.65	1,111,373,400	821,407,001	73.91
7	Stabilitas inflasi daerah	Laju Tingkat Inflasi (persen)	3(+-1)	1.25		621,664,100	583,833,100	93.91
8	Meningkatnya nilai tukar petani	NTP (poin)	105	129.34	123.18	24,665,597,106.00	23647601529	95.87

No	Sasaran strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capian
9	Meningkatnya kualitas SDM dan tata Kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM	III (baik)	I (buruk)	I (buruk)	4,737,978,350	2,350,622,163	49.61
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP (predikat)	BB	B (67.07)	B (67.07)	2,971,330,250.00	2869065726.00	96.56
11	Meningkatnya nilai opini BPK	Opini BPK (opini)	WTP	WTP	WTP	434,727,504,438.40	332,674,754,823.00	76.52
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)	83.00	80.51	97.00	1,191,076,010,692.14	1,101,570,740,447.65	92.49

Analisis perbandingan di atas, ditarik beberapa rekomendasi formal LKjIP untuk tahun anggaran berikutnya:

1. Akselerasi Sektor Pariwisata (Sasaran 6): Diperlukan peninjauan ulang (*review*) terhadap dokumen perencanaan Dinas Pariwisata untuk mengurai sumbatan penyerapan anggaran (60,49%) agar target kontribusi PDRB tidak merosot kembali.
2. Reformasi Manajemen SDM Aparatur (Sasaran 9): Penyerapan anggaran yang rendah (49,61%) wajib diatasi dengan mempercepat pelaksanaan lelang kompetensi, digitalisasi manajemen ASN, dan diklat aparatur guna mendongkrak status indeks dari buruk ke baik.

3. Penguatan SAKIP (Sasaran 10): Realisasi anggaran SAKIP yang tinggi (96,56%) dengan capaian predikat "B" (Target BB) mengindikasikan perlunya perbaikan kualitas substansi pelaporan kinerja pada tingkat komponen perencanaan, pengukuran, dan evaluasi internal di setiap OPD, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif.

Tabel 3.18. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran strategis	Indikator	Capian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	99.37	86.02	86.57
2	Meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	105.71	97.72	92.45
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	104.84	98.43	48.69
		Rata-rata lama Sekolah (RLS) (tahun)	97.32		
		Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	109.11	0.00	0.00
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	104.78	95.16	50.13
		Indeks Gini (poin)	85.05		
4	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	126.22	93.05	73.72
5	Meningkatnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	Indeks Infrastruktur (persen)	100.00	0.00	0.00
6	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB (persen / proxy)	87.81	0.00	0.00
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen / proxy)	123.59	92.40	74.76
		Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen / proxy)	25.86	60.49	233.90
		Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen / proxy)	93.65	73.91	78.92
7	Stabilitas inflasi daerah	Laju Tingkat Inflasi (persen)	1.25	93.91	7513.16
8	Meningkatnya nilai tukar petani	NTP (poin)	123.18	95.87	77.83
9	Meningkatnya kualitas SDM dan tata Kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM	I (buruk)	49.61	69.39
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP (predikat)	B (66,53)	96.56	145.03
11	Meningkatnya nilai opini BPK	Opini BPK (opini)	WTP	76.52	95.51
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)	97.00	92.49	95.35

Adapun langkah korektif/perbaikan efisiensi sebagai berikut:

1. Optimalisasi Sektor Pendidikan dan Kemiskinan: Diperlukan penerapan prinsip *value for money* pada Sasaran 2 (HLS) dan Sasaran 3 (Kemiskinan) agar penyerapan anggaran yang mendekati 100% dapat menghasilkan lompatan kinerja yang jauh lebih tinggi dan efisien di tahun depan.
2. Asistensi Khusus Dinas Pariwisata dan BKPSDM: Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap OPD pengampu Sasaran 6 (Pariwisata) dan Sasaran 9 (SDM Aparatur) untuk membenahi manajemen pelaksanaan program yang menyebabkan kegagalan serapan anggaran dan penurunan mutu capaian kinerja.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

a. Sasaran meningkatnya kerukunan umat beragama dengan indikator sasaran Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin) ada 4 program Misi 1.

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP).
Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, program tersebut merupakan program yang mendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). dengan outcome program yaitu meningkatnya kualitas layanan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kabupaten lampung Selatan, dengan indikator outcome program yaitu persentase peningkatan capaian mutu pelayanan dasar wajib urusan trantibum dengan target 92% dan terealisasi sebesar 100% dan persentase peningkatan capaian warga negara yang menerima pelayanan dasar wajib urusan trantibum dengan target 92% dan terealisasi 100%
Program tersebut terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, antara lain:
- kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dengan output kegiatan yaitu meningkatnya penanganan gangguan trantibum dan terealisasi 100%
- kegiatan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/walikota, dengan output kegiatan yaitu meningkatnya kepatuhan Masyarakat terhadap perda dan perkada dan terealisasi 100%
- kegiatan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota, dengan output kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan terealisasi 100%.

Berdasarkan hasil capaian outcome program ini yang sudah mencapai target kinerja sebesar 100%, maka Keberhasilan pencapaian kinerja program ini yaitu:
- Adanya fasilitasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan satuan polisi pamong praja;
- Penindakan oleh anggota Satuan polisi pamong praja menggunakan metode persuasif dan humanis;
- Pelaksanaan penegakan perda dan perkada secara kuratif dan preventif serta ekstensif;

- Adanya kolaborasi (SK Tim terpadu) dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada;
- Bertambahnya kuantitas anggota dalam setiap unit satgas trantibum sehingga jangkauan lokasi pelaksanaan trantibum semakin luas;
- Adanya pengadaan kendaraan dinas lapangan yaitu mobil patrol;
- Adanya fasilitasi peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia Satuan polisi pamong praja.

Tidak tercapainya target anggaran program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum disebabkan karena:

- Belum tersusunnya peta gangguan trantibum dan peta pelanggaran perda dan perkada yang menyebabkan kesulitan satpolpp dalam pemetaan dan penyelesaian permasalahan di wilayah prioritas yang tingkat pelanggarannya tinggi;
- Keterbatasan jumlah dan peran PPNS dalam penindakan pelanggar perda dan perkada, mengingat PPNS diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan yang berdampak pada penyelidikan serta pemberian sanksi atas pelanggaran perda dan perkada masih besifat non yustisi Kuantitas dan Kualitas sarpras pendukung masih kurang untuk menjangkau luas wilayah kabupaten lampung selatan dengan kondisi rusak sedang serta Kondisi gedung kantor yang belum lengkap sesuai standar minimal seperti belum tersedianya pos jaga, ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan,ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil dan ruang sidang majelis kode etik.

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (17 Kecamatan).
   Berdasarkan analisis atas realisasi anggaran Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2025, diperoleh gambaran bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara akuntabel dan selaras dengan perencanaan. Indikasi keberhasilan ini tercermin dari capaian kinerja sebesar 84.07%, yang menandakan bahwa program berjalan secara optimal dan efisien.
   Dengan terealisasinya alokasi anggaran, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17 Kecamatan telah mencapai target yang diharapkan. Capaian kinerja program ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran sebesar 84.07%, yang digunakan untuk mendukung kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, serta Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat melalui forum pengajian yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.
   Sosialisasi dan pembinaan yang melibatkan Instansi Vertikal dan Tokoh Agama perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) dalam

pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah secara terencana dan terpadu. Dengan terciptanya kondisi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang mantap di masyarakat, hal tersebut pada gilirannya akan mendorong terwujudnya Stabilitas Nasional, serta menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah.

3. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Kesbangpol).

   Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan:

   - Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
   - Terlaksananya upacara peringatan HUT Ri yang ke 80 yang dilaksanakan di lapangan Menara siger pada tanggal 17 agustus 2025 yang diikuti oleh seluruh PD, forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, adat, dan peserta didik;
   - Terlaksananya upacara peringatan hari kebangkitan nasional yang dilaksanakan di lapangan korpri lampung selatan. Yang diikuti oleh seluruh PD, forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, adat, dan peserta didik;
   - Terlaksananya upacara peringatan hari lahirnya Pancasila yang dilaksanakan di lapangan korpri pada tanggal 2 juni 2025 yang diikuti oleh seluruh PD, forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, adat, dan peserta didik, tingginya heterogenitas masyarakat yang memicu potensi konflik, rendahnya partisipasi politik, serta kerentanan wilayah terhadap infiltrasi budaya asing.

4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (Kesbangpol).

   Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan kegiatan:

   - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

   Bantuan Partai Politik ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/99/V.06/HK/2025 tanggal 6 Januari 2025, adapun tujuan kegiatan ini adalah : bantuan keuangan partai politik prioritas digunakan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan

masyarakat dan sebagai dana penunjang kegiatan operasional sekretariat sehingga terwujudnya sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan intra struktur politik di daerah.

Kegagalan dalam program ini umumnya disebabkan oleh rendahnya partisipasi partai politik, kurangnya jangkauan pendidikan politik ke akar rumput, serta lemahnya internalisasi etika politik. Faktor pendukung kegagalan mencakup terbatasnya anggaran, metode sosialisasi yang monoton, serta belum optimalnya sinergi antara lembaga pendidikan dan partai politik dalam membangun budaya politik yang demokratis dan beretika.

b. Sasaran meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat dengan indikator sasaran Angka Harapan Hidup (AHH) ada 4 Program Misi 2.

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinkes).

   Program ini untuk memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa hambatan finansial dan Indikator UHC adalah puncak dari upaya ini, menunjukkan proporsi penduduk yang terdaftar dan terlindungi oleh skema jaminan kesehatan (misalnya PBI JK, mandiri, atau perusahaan). Fokus Indikator nya adalah UHC yaitu indikator makro yang sangat strategis dengan capaian 100%.

   Keberhasilan ditandai dengan tercapainya Cakupan UHC 100% (atau mendekati). Hal ini dapat dicapai melalui:

   - Validasi Data PBI yang Akurat: Kerjasama erat dengan Dinas Sosial dan Disdukcapil untuk memastikan data penerima bantuan iuran selalu by name by address dan tepat sasaran;
   - Edukasi dan Sosialisasi Massif: Meningkatkan kesadaran masyarakat non-PBI untuk mendaftar mandiri atau melalui perusahaan;
   - Kemudahan Akses Layanan: Memastikan peserta dapat mengakses layanan di FKTP dan FKRTL dengan mudah dan cepat;
   - Komitmen Politik: Adanya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mewajibkan universal coverage dan dukungan anggaran untuk membiayai peserta PBI daerah.

   Kegagalan ditandai dengan rendahnya Cakupan UHC. Penyebabnya antara lain:

   - Data PBI Tidak Valid: Banyak penduduk miskin yang tidak terdata, atau sebaliknya, data diisi oleh pihak yang tidak berhak;

- Minimnya Sosialisasi: Masyarakat tidak memahami pentingnya jaminan kesehatan atau cara mendaftar;
- Keterbatasan Faskes: Jumlah fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, tidak sebanding dengan jumlah peserta, menyebabkan antrean panjang;
- Kendala Anggaran: Pemerintah daerah tidak memiliki cukup anggaran untuk membiayai seluruh penduduk yang tidak mampu.

RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM

Pada tahun 2025 capaian kinerja pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar 97,93% , ada beberapa kegiatan yang telah di cover antara lain Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan (Dinkes).

   Program ini berfokus pada peningkatan kualitas tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, tenaga teknis kefarmasian, dll.) agar selalu update dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran terkini, Indikator ini mengukur proporsi SDM Kesehatan yang telah dinyatakan kompeten, baik melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan teknis, atau uji kompetensi berkala.

   Keberhasilan ditandai dengan tingginya Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi. Hal ini dapat dicapai melalui:

   - Perencanaan Pelatihan Tepat Sasaran: Analisis kebutuhan pelatihan (Training Need Analysis/TNA) yang baik, sehingga pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
   - Pendanaan yang Memadai: Tersedianya anggaran yang cukup untuk pelatihan berkala bagi seluruh tenaga kesehatan;
   - Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan platform online untuk pelatihan jarak jauh, sehingga menjangkau tenaga kesehatan di daerah terpencil;
   - Kerjasama dengan Institusi Pendidikan/Profesi: Memudahkan akses terhadap pelatihan-pelatihan bersertifikat.

   Kegagalan ditandai dengan rendahnya Cakupan SDMK yang kompeten. Penyebabnya antara lain:

   - Keterbatasan Anggaran: Anggaran pelatihan terbatas, sehingga hanya sebagian kecil tenaga kesehatan yang bisa mengikuti pelatihan;

- Beban Kerja Tinggi: Tenaga kesehatan kesulitan meninggalkan tugas untuk mengikuti pelatihan karena tingginya beban kerja;
- Distribusi Pelatihan Tidak Merata: Pelatihan hanya terpusat di kota, sementara tenaga kesehatan di pelosok sulit mengaksesnya;
- Tidak Ada Tindak Lanjut: Pengetahuan dari pelatihan tidak diimplementasikan di tempat kerja karena kurangnya dukungan atau sarana prasarana.

Pada tahun 2025 capaian kinerja pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 94,87%, kegiatan yang telah dicover antara lain Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah

Kebupaten/Kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Dinkes).

   Menjamin ketersediaan, keamanan, mutu, dan khasiat obat serta alat kesehatan yang digunakan di masyarakat terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas). Indikator ini melihat sejauh mana Puskesmas menjalankan praktik kefarmasian yang baik, seperti pengelolaan obat yang tepat (perencanaan, penyimpanan, distribusi), pelayanan informasi obat, dan konseling kepada pasien.

   Keberhasilan ditandai dengan tingginya Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Hal ini dapat dicapai melalui:

   - Ketersediaan Tenaga Apoteker: Setiap Puskesmas memiliki apoteker yang kompeten dan penuh waktu;
   - Sistem Informasi Manajemen Farmasi: Penggunaan sistem digital untuk perencanaan, pengadaan, dan pelacakan stok obat, sehingga meminimalkan risiko kadaluarsa dan kekosongan;
   - Supervisi dan Pembinaan Rutin: Adanya pengawasan berkala dari Dinas Kesehatan dan Balai POM untuk memastikan kepatuhan terhadap standar;
   - Ketersediaan Pedoman: Tersedianya buku pedoman pengelolaan sediaan farmasi yang mudah dipahami dan diakses.

   Kegagalan ditandai dengan rendahnya Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Penyebabnya antara lain:

- Kekurangan Tenaga Apoteker: Banyak Puskesmas yang tidak memiliki apoteker, sehingga pengelolaan obat dilakukan oleh tenaga non-kompeten;
- Sistem Pengelolaan Manual: Pengelolaan stok obat masih manual, rawan kesalahan, dan sulit memantau masa berlaku obat, menyebabkan banyak obat kadaluarsa;
- Gudang Obat Tidak Layak: Fasilitas penyimpanan obat (gudang/lemari) tidak memenuhi standar (suhu, kelembaban), sehingga mutu obat cepat turun;
- Lemahnya Pengawasan: Supervisi dari dinas kesehatan jarang dilakukan atau tidak komprehensif.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Dinkes).
   Memberdayakan masyarakat dan desa untuk mampu mengenali, mencegah, dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. Ini adalah wujud nyata dari upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM). Desa Siaga Aktif adalah desa yang penduduknya memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar, memiliki sistem surveilans berbasis masyarakat, serta menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Indikatornya adalah berapa banyak desa yang telah mencapai status tersebut.
   Keberhasilan ditandai dengan tingginya jumlah Desa Siaga Aktif. Hal ini dapat dicapai melalui:
   - Kader Kesehatan yang Aktif: Adanya kader posyandu yang terlatih, termotivasi, dan mendapatkan insentif/apresiasi;
   - Dukungan Pemerintah Desa: Kepala desa dan perangkatnya berkomitmen mengalokasikan dana desa untuk kegiatan kesehatan (PMT, jambanisasi, operasional posyandu);
   - Kemitraan Lintas Sektor: Bekerjasama dengan dinas pendidikan (UKS), dinas PU (air bersih), dan lainnya untuk mewujudkan desa sehat;
   - Inovasi Masyarakat: Adanya inovasi lokal seperti taman obat keluarga, tabungan ibu bersalin, atau ambulance desa.

   Kegagalan ditandai dengan rendahnya jumlah Desa Siaga Aktif atau banyak desa yang hanya "siaga" di atas kertas. Penyebabnya antara lain:
   - Kader Pasif/Tidak Terlatih: Kader kurang pengetahuan, tidak aktif, dan tidak mendapatkan dukungan (insentif);
   - Tidak Ada Dukungan Dana Desa: Kesehatan tidak menjadi prioritas dalam musyawarah desa, sehingga alokasi dana minim;

- Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Masyarakat masih menganggap kesehatan hanya urusan Puskesmas, bukan tanggung jawab bersama;
- Pembinaan Tidak Berkelanjutan: Pendampingan dari Puskesmas hanya sesaat, tidak rutin, sehingga semangat masyarakat meredup.

c. Sasaran meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat dengan indikator sasaran Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata lama Sekolah (RLS) (tahun) ada 3 Program Misi 2.

1. Program Pengembangan Kurikulum (Disdik).

Alokasi Anggaran untuk Program Pengembangan Kurikulum sebesar Rp. 77.111.800,00 Dana yang terealisasi sebesar Rp. 28.487.493,00 atau 36,94% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
  Beberapa program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:
  a. Pelatihan dan Penguatan Kompetensi Guru;
  b. Pengembangan Perangkat Pembelajaran;
  c. Pendampingan Implementasi Kurikulum.
- Faktor Penyebab Kegagalan atau Hambatan Pencapaian Kinerja
  Beberapa faktor yang menghambat pencapaian kinerja program antara lain:
  a. Keterbatasan Kompetensi SDM;
  b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Disdik)

Alokasi Anggaran untuk Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 46.704.400,00 Dana yang terealisasi sebesar Rp. 39.127.780,00 atau 83,78% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
  Beberapa program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja antara lain:
  a. Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme
  b. Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi
  c. Pembinaan Karier dan Kesejahteraan
  d. Penataan dan Pemerataan PTK
  e. Penguatan Komunitas dan Jejaring Profesional
- Faktor Penyebab Kegagalan atau Hambatan
  Beberapa faktor yang menghambat pencapaian kinerja program antara lain:
  a. Keterbatasan Akses Pengembangan Kompetensi
  b. Kesenjangan Kompetensi

c. Beban Administrasi Tinggi

3. Program Pengelolaan Pendidikan (Disdik).

Alokasi Anggaran untuk Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp225.194.764.949,00 Dana yang terealisasi sebesar Rp221.706.861.212,00 atau 98,45% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
  Beberapa program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja antara lain:
  a. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran
  b. Digitalisasi Sistem Manajemen Pendidikan
  c. Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan
  d. Penguatan Monitoring dan Evaluasi
  e. Peningkatan Pelayanan Administrasi Pendidikan
  f. Penguatan Partisipasi dan Kemitraan
- Faktor Penyebab Kegagalan atau Hambatan
  Beberapa faktor yang menghambat pencapaian kinerja program antara lain:
  a. Keterbatasan Kapasitas SDM Pengelola
  b. Kualitas Data yang Belum Optimal
  c. Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor
  d. Resistensi terhadap Sistem Baru
  e. Pengawasan yang Belum Konsisten

d. Sasaran meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat dengan indikator sasaran Pengeluaran (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun).

e. Sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator sasaran Persentase Penduduk Miskin (persen) ada Indeks Gini (poin) 4 Program Misi 2.

1. Program Pemberdayaan Sosial (Dinsos).

Program Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu program pendukung ketercapaian indikator Kinerja Utama Dinas Sosial. Indikator kinerja Program Pemberdayaan Sosial dapat diukur dengan jumlah Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PPKS. Pada tahun 2025, dari jumlah PSKS sebanyak 140 orang/lembaga dengan kinerja sebesar 100%. Untuk mencapai hal tersebut, dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan pendukung dengan serapan anggaran sebesar 98,91%. Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta kelembagaan sosial yang cukup aktif dalam

penanganan yang dihadapi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Program Rehabilitasi Sosial (Dinsos).
   Program Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu program pendukung ketercapaian indikator Kinerja Utama Dinas Sosial. Indikator kinerja Program Rehabilitasi Sosial dapat diukur dengan jumlah Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2025, dari sasaran sebanyak 2.000 PPKS terlayani semua dengan kinerja sebesar 100%. Untuk mencapai hal tersebut, dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan pendukung dengan serapan anggaran sebesar 97,07%.
   Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:
   - Adanya organisasi seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan organisasi lain yang turut andil dalam penanganan terhadap PPKS;
   - Disamping dukungan anggaran dari APBD, ada bantuan ATENSi dari Kemenetrian Sosial dalam penanganan PPKS
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinsos).
   Program Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan salah satu program pendukung ketercapaian indikator Kinerja Utama Dinas Sosial. Indikator kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat diukur dengan jumlah Jumlah masyarakat kategori Miskin, Fakir Miskin, dan Kelompok Rentan lain yang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial. Pada tahun 2025, dari sasaran sebanyak 95.000 KK terlayani semua dengan kinerja sebesar 100%. Untuk mencapai hal tersebut, dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan pendukung dengan serapan anggaran sebesar 84,08%.
   Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:
   - Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non (tunai) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial;
   - Pembinaan sasaran melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dipandu oleh pendamping sosial PKH secara berkelanjutan.
4. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (4 bagian).
   Jumlah Perangkat Daerah yang ditata dan penyelesaian permasalahan administrasi dan kelembagaan yang diampu oleh 4 bagian antara lain: Bagian Tata Pemerintahan yang mempunyai 3 (tiga) kegiatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai 3 (tiga) kegiatan, Bagian Hukum yang mempunyai 3 (tiga) kegiatan, Bagian Kerjasama yang mempunyai 3 (tiga) kegiatan dengan capaian serapan anggaran sebesar 96.95%.

f. Sasaran menurunnya pengangguran dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) ada 3 Program Misi 2.

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (Disnakertrans).

   Pelaksanaan Prog. Pelatihan dapat direalisasikan sesuai dengan waktu yang pelaksanaan dan telah mencapai target yang ditetapkan.

   Penyebab Kegagalan:

   - Pada Kegiatan Pemagangan, dari target 10 orang, hanya 7 Orang yang menyelesaikan pemagangan, dari 7 orang tersebut, 1 orang diterima bekerja ditempat pemangangan, dan 3 Orang melanjutkan pemagangan di Kemenaker RI.
   - Waktu Pencairan Dana DAU-SG yang cukup lama, yakni sekitar bulan Juli

   Analisis program/kegiatan:

   - Program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RAK yang telah ditetapkan;
   - Proses seleksi calon peserta pelatihan dilakukan sesuai prosedur;
   - Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan pihak BLK/LKP yang menyelenggarakan Pelatihan.

2. Program penempatan tenaga kerja (Disnakertrans).

   Keberhasilan Program penempatan tenaga kerja:

   - Adanya kerjasama yang baik dengan perusahaan dengan adanya lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja, seperti pelaksanaan Job Fair /Bursa Kerja yang melibatkan 45 perusahaan yang membuka lowomgan pekerjaan dalam dan luar negeri;
   - Adanya kegiatan pelatihan yang berbasis kompetensi, memaksimalkan peran Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dalam rangka membantu alumninya untuk mendapatkan pekerjaan;
   - Kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang semakin baik dan berintegrasi antara Kementerian Tenaga Kerja, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

   Analisis program/kegiatan:

   - Melalui kegiatan Job Fair/Bursa Kerja, akan terjalin pertemuan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga /kerja (perusahaan) dalam 1 (satu) lokasi, pengguna tenaga kerja (perusahaan) menyediakan menginformasikan lowongan pekerjaan, serta melaksanakan seleksi awal untuk mencari calon tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan perusahaan. Sedangkan pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

- Adanya kegiatan pembinaan dan koordinasi dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dalam rangka membantu alumninya mendapatkan pekerjaan;
- Kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang semakin baik dan terintegrasi antara Kementerian Tenaga Kerja Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Penyebab Kegagalan:

- Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia sering tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh perusahaan;
- Kurangnya Informasi terkait dengan lowongan pekerjaan yang tersedia.

3. Program hubungan industrial (Disnakertrans).

   Perencanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara baik dan benar, adanya dukungan anggaran yang cukup dan konsistensi pelaksanaan program/ kegiatan sesuai perencanaan yang telah dilakukan.

   Analisis program/kegiatan:

   Harus adanya keseimbangan antara program dan penggunaan anggaran, Penyerapan anggaran yang lambat karena banyaknya program, penyerapan sementara anggaran bertumpu/tergantung pada pencairan dana Ganti Uang (GU).

g. Sasaran meningkatnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur (persen) Misi 3.
h. Sasaran meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB dengan indikator sasaran Persentase kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB/NTP (persen/proxy).
i. Sasaran meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB dengan indikator sasaran Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen/proxy) ada 11 Program Misi 4.
   1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (Diskop UKM).
      tidak ada anggaran dan kegiatannya.
   2. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi (Diskop UKM).

      Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi merupakan salah satu program pendukung ketercapaian Indikator Utama yaitu meningkatnya kinerja koperasi dalam memajukan perekonomian rakyat. Melalui program ini Dinas Koperasi UKM tahun 2025 telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 50 Unit Usaha dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dan serapan anggaran sebesar 94,06%. Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

- Adanya Pengawasan dan pemeeriksaan koperasi di 17 Kecamatan;
- Pendampingan dan pembinaan terhadap koperasi aktif.

3. Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi (Diskop UKM).
   Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi merupakan salah satu program pendukung ketercapaian Indikator kinerja utama yaitu meningktnya kinerja koperasi dalam memajukan perekonomian rakyat . Melalui program ini Dinas Koperasi UKM melaksanakan penilaian kesehatan terhadap 25 Unit Usaha/koperasi dan pembuatan Akt a Notaris untuk 260 KDMP dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dan serapan anggaran 97,75%. Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:
   - Pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi dalam proses penilaian kesehatan koperasi;
   - Koperasi yang dinilai kesehatannya akan mendapatkan penghargaan.
4. Program pendidikan dan latihan perkoperasian (Diskop UKM).
   Program Pendidikan dan latihan perkoperasian merupakan salah satu program pendukung ketercapaiannya Indikator Kinerja Utama yaitu meningkatnya kinerka koperasi dalam memajukan perekonomian rakyat. Melalui program ini Dinas Koperasi UKM melaksanakna pelatihan terhadap pengurus koperais sebanyak 350 Orang dengan pencapaian kinerja 100% dan serapan anggaran 90,68%, Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja adannya Bimtek Penguatan usaha melalui Digital kiperasi dan sosialisasi perkoperasian bagi pengurus koperasi.
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (Diskop UKM).
   Proram pemberdayaan dan perlindungan koperasi merupaka salah pendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama yaitu meningkatnya kinerja koperasi memajukan perekonomian rakyat. Melalui program ini Dinas Koperasi UKM melaksanankan pelatihan untuk pengurus koperasi dalam rangka sosialisasi terkait pembiayaan untuk koperasi /permodalan sebayak 45 orang dengan pencapaian kinerja 100% dan serapan anggaran sebesar 99,95%. Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja adanya sosialisasi untuk pengurus koperasi terkait pembiayaan untuk koperasi
6. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) (Diskop UKM).
   Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro merupukan salah satu program yang mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama yaitu menumbuhkembangkan UMKM dalam meningkatkan Perekonomian Rakyat. Melalui program ini Dinas Koperasi UKM melaksanakan sosialisasi terkait pemberdayaan UMKM sebayak 100

Orang dengan pencapaian kinerja 100% dan serapan anggaran sebesar 93,11%.

Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

- Adanya pelatihan dan sosialisasi bagi pelaku usaha;
- Adanya bantuan barang untuk pelaku usaha yang mengikuti pelatihan dan sosialisasi.

7. Program pengembangan UMKM (Diskop UKM).

   Program pengembangan UMKM merupakan salah satu program yang mendukung Indikator Kinerja Utama yaitu menumbuhkembangkan UMKM dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Melalui program ini Dinas Koperasi UKM melaksanakan sosialisasi terkait pengembangan UMKM sebanyak 240 Orang dengan capaian kinerja 100% dan serapan anggaran 88,74%.

   Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

   - Adanya pelatihan dan sosialisasi bagi pelaku usaha.
   - Adanya bantuan barang untuk pelaku usaha yang mengikuti pelatihan dan sosialisasi.

8. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan (Disdagprint).

   Secara administratif dan realisasi anggaran, kegiatan telah mencapai target output 87% atau mendekati target. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan fisik.

   Dengan adanya Rehab Pasar Membuat Pedagang Merasa Lebih nyaman dari sebelumnya, Pedagang tertata rapi, Pasar terlihat rapid an bersih, pasar kembali Ramai di kunjungi Konsumen sehingga Merasakan dampak Peningkatan Ekonominya.

   Program menunjukkan capaian baik pada sisi fisik, antara lain:

   - Pembangunan/rehabilitasi pasar rakyat terealisasi sesuai target;
   - Tersedianya fasilitas pendukung (los, kios, drainase, MCK, area parkir);
   - Penataan area perdagangan lebih tertib.

9. Program pengembangan ekspor (Disdagprint).

   Tidak ada anggaran

10. Program standardisasi dan perlindungan konsumen (Disdagprint).

    Program strandardisasi dan perlindungan konsumen akan menciptakan iklim perdagangan yang stabil tidak terjadi kecurangan dalam aktifitas perdagangan dan konsumen tidak akan dirugikan.

    Tercapainya persentase UTTP yang telah di tera ulang sebanyak 70-80%. Belum dapat terlaksananya sidang tera diseluruh pasar di lampung selatan dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga sulit untuk tercapainya daerah tertib ukur.

11. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (Disdagprint).

    Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri merupakan suatu program pedukung program pemerintah pusat dalam upaaya meningkatkan penggunaan produk produk dalam negeri melalui upaya peningkatan kualitas produk, pengembangan infrastruktur dan kapasistas Sumberdaya manusia nya.

    Meningkatnya belanja pemerintah dalam menggunakan produk dalam negeri dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing PD, BUMN, BUMD maupun pihak swasta. Kendala program ini masih adanya kebutuhan pembelian barang yang belum tercukupi produk dalam negeri.

j. Sasaran meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB dengan indikator sasaran Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen/proxy) ada 7 Program Misi 4.

   1. Program pengembangan kebudayaan (Disparbud).

      Program Pengembangan Kebudayaan, terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan program pendukung ketercapaian indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu tercapainya Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu. Melalui program ini diharapkan menghasilkan pagelaran pentas seni budaya di dalam daerah, Pelaksanaan Festival Lampung Selatan (Karnaval Festival Krakatau), Perekat Adat Budaya Lampung Selatan (Haul Radin Inten II).

      Bertambahnya Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan perlindungan, Pengembangan, pemanfaatan. Bertambahnya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan. Lestarinya Tradisi Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Lampung Selatan.

      Tidak tercapainya target Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota karena tidak terlaksananya kegiatan Perekat Adat Budaya Lampung Selatan (Haul raden Intan II).

   2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional (Disparbud).

      Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan program pendukung ketercapaian indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu tercapainya Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi. Melalui program ini diharapkan menghasilkan jumlah penduduk yang

pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas).

Jumlah penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas). Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya.

Tidak tercapainya target peningkatan kapasitas tatakelola lembaga kesenian tradisional karena tidak terlaksannya kegiatan Festival Budaya Pesisir Berkelanjutan dan kegiatan pembentukan desa budaya di desa kuripan.

3. Program pembinaan sejarah (Disparbud).

   Program Pembinaan Sejarah, Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota merupakan program pendukung ketercapaian indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu tercapainya Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah. Melalui program ini diharapkan menghasilkan Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota yang dibina.

   bertambahnya Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota yang dibina. Pemberian Bantuan Hibah Berupa Alat Musik Tradisional kepada Sanggar-Sanggar blnaan Disparbud.

4. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (Disparbud).

   Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota merupakan program pendukung ketercapaian indikator kinerja utama Dinas Pariwisata, yaitu tercapainya Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan. Melalui program ini diharapkan menghasilkan Jumlah cagar budaya yang telah didaftarkan dan ditetapkan sebagai Warisan Budaya (Cagar Budaya). jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan.

   Pengiriman Peserta Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya untuk mengikuti Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya Di Kementerian Kebudayaan.

5. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata (Disparbud).

   Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota merupakan salah satu program pendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Melalui program ini bisa menjaga dan memelihara Pemandian Air Panas Way Belerang dan Mess Pemda Pulau Sebesi pengelolan wisata dengan baik, Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan

Kabupaten/Kota dalam memberikan barang-barang dalam peningkatan dan kelayakan pengelolaan destinasi wisata pada Desa Wisata Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Lampung Selatan.

Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

- Terpeliharanya sarana prasarana pengelolaan wisata dengan baik;
- Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota.

Tidak tercapainya target Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata disebabkan:

- Anggaran yang tersedia masih belum cukup pada pengelolaan pemandian air panas way belerang dan mess pemda pulau sebesi;
- Perlunya revitalisasi di objek wisata pemandian air panas way belerang dan mess pemda pulau sebesi pada bidang SKPD/PD yang menanganinya seperti PUPR;
- Masih banyak destinasi wisata dan Desa Wisata yang harus dikembangkan mengingat potensi wisata Lampung Selatan yang cukup banyak.

6. Program Pengembangan pemasaran pariwisata (Disparbud).

Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri merupakan salah satu program pendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu:

- Jumlah Kunjungan Wisatawan: Mengukur total kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Pada tahun 2025, tercatat lonjakan signifikan mencapai 1.647.716 orang.
- Lama Menginap Wisatawan (Length of Stay): Menjadi target krusial pemerintah untuk ditingkatkan dari rata-rata 3 jam menjadi target 3 hari melalui pembangunan ekosistem terintegrasi.
- Peningkatan Jumlah Objek Wisata: Hingga 2025, terdapat pengembangan 92 objek wisata yang terdiri dari wisata bahari, alam, dan terpadu.
- Penguatan Desa Wisata: Keberhasilan desa wisata dalam ajang nasional (seperti Desa Wisata Kelawi sebagai Juara 2 Nasional 2023) menjadi parameter kemajuan kategori Desa Wisata Maju.

Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

- Terjalinnya Kerjasama dengan Pihak Bandara Radin Inten II untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Lampung Selatan melalui Media Informasi Pariwisata
- Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan: Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten/Kota meningkat sebesar 5,62% dibandingkan tahun sebelumnya.

- Peningkatan Kapasitas SDM: Telah dilaksanakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang pariwisata.
- Keberhasilan pencapaian kinerja program ini yaitu kinerja semua kegiatan mencapai 100 % dan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Tidak tercapainya target Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri disebabkan:

- Kurangnya Sumber Daya Manusia: Jumlah sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang pemasaran pariwisata masih kurang, sehingga mempengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan.
- Kurangnya Infrastruktur: Infrastruktur pariwisata seperti akomodasi, transportasi, dan fasilitas umum masih perlu ditingkatkan, sehingga mempengaruhi kenyamanan wisatawan.
- Kurangnya Promosi: Promosi pariwisata Kabupaten/Kota masih belum maksimal, sehingga mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang potensi pariwisata daerah.

7. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (Disparbud).

   Program Pengembangan Sumber Daya Pariwistaa dan Ekonomi Kreatif memerlukan pematauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaku ekonomi kreatif membantu menganalisis efektivitas program, mengidentifikasi capaian dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengembangan program ke depan. tahun 2025 pelasksanaan monitoring dan evaluasi terhadap para pelaku ekonomi kreatif dilaksanakan selama 3 bulan dengan serapan anggaran sebesar 94,05%.

   Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

   - Adanya pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku ekonomi kreatif;
   - Pengembangan produk ekonomi kreatif.
   - Tidak tercapainya target program ini disebabkan:
   - Kurangnya promosi dan pemasaran;
   - Kurangnya infrastruktur yang memadai;
   - Kurangnya kolaborasi dengan pihak lain.

k. Sasaran meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB dengan indikator sasaran Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen / proxy) ada 1 Program Misi 4.

   1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (Disdagprint)

      Program perencanaan dan pembangunan industri merupakan salah satu

program utama dinas perdagangan dan perindustrian dalam upaya melihat potensi, pengembangan strategi, peningkatan produktifitas, pengembangan infrastruktur dan kualitas produk melalui kegiatan perkuat kerjasama dengan investor, memperluas akses ke pasar internasional, meningkatkan daya saing produk dan meninglatkan kemampuan SDM melalui pelatihan keterampilan. Adanya hibah barang berupa bantuan sarana dan prasarana kepada para pelaku industri kecil menengah dalam upaya peningkatan kapsitas produksi para pelaku usaha, adanya beberapa potensi sumberdaya lokal yang beragam. Masih terkendalanya pelaksanaan waktu kegiatan pemasaran karena adanya hal hal teknis di luar kegiatan.

l. Sasaran stabilitas inflasi daerah dengan indikator sasaran Laju Tingkat Inflasi (persen) ada 1 Program Misi 4.

Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bertujuan menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan kelancaran disrtibusi barang kebutuhan pokok dan barang penting agar inflasi terkendali serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Keberhasilan pencapaian kinerja program ini yaitu:

- Anggaran subsidi/pengendalian harga;
- Data harga dan stok dalam rentang wajar/HET;
- Masyarakat berpenghasilan rendah terbantu;
- Kerjasama dengan Distributor, Bulog dan Pelaku Usaha;
- Tidak terjadi kelangkaan saat hari besar.

Adapun kendalanya:

- Masih adanya distribusi tidak merata;
- Harga tetap melonjak tinggi meskipun sudah ada operasi pasar;
- Pengawasan lemah (penimbunan masih tidak terdeteksi).

m. Sasaran meningkatnya nilai tukar petani dengan indikator sasaran Nilai Tukar Petani (NTP) (poin) ada 10 Program Misi 4.

1. Program pengelolaan perikanan tangkap (Dinas Perikanan).

   Program Pengelolaan Perikanan Tangkap merupakan salah satu program pendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan yaitu peningkatan produksi perikanan.Melalui program ini produksi perikanan tangkap tahun 2024 mencapai 32.708,21 ton. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100% dan serapan anggaran 96,14 %. Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja yaitu:

   - Adanya hibah/ bantuan kepada masyarakat nelayan untuk peningkatan produksi;

- Pembinaan dan pendampingan nelayan dalam peningkatan SDM Nelayan.

Tidak tercapainya target program perikanan tangkap disebabkan:

- Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap belum optimal karena struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional;
- Kurangnya sarana dan prasarana nelayan sehingga hasil tangkapan belum optimal;
- Aktivitas nelayan dipengaruhi oleh keadaan cuaca.

2. Program pengelolaan perikanan budidaya (Dinas Perikanan).

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya merupakan salah satu program pendukung ketercapaian indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan. Indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dapat diukur dengan jumlah produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2024, Produksi Perikanan Budidaya sejumlah 33.990,22 ton dengan capaian kinerja sebesar 101,96% atau naik sebesar 456,46 Ton dibanding tahun lalu (Tahun 2023) yaitu hanya sebesar 33.533,76 Ton. Untuk mencapai hal tersebut, telah dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan pendukung dengan serapan anggaran sebesar 99,32% dan capaian kinerja kegiatan rata-rata 101,96%.

Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja yaitu:

- Pengembangan teknologi budidaya secara intensifikasi dengan pengembangan budidaya udang air tawar, pengembangan budidaya kolam bundar dan dengan adanya usaha pembinaan pakan mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi;
- Bantuan pemerintah berupa pengadaan excavator untuk pengembangan lahan tambak, normalisasi saluran tambak rakyat melalui program PITAP (program pengelolaan tambak partisipatif);
- Bantuan benih, pakan ikan, Sarana perikanan, pengembangan kolam bundar, budikdamber dan alat produksi budidaya lainnya.

3. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Dinas

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan program dalam pengawasan usaha perikanan baik perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan serta pemasaran. pada tahun 2024 ini, capaian program pengawasan melebihi target yang ditetapkan hal ini menunjukkan usaha peningkatan pengawasan Dinas Perikanan terhadap kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam pengembangan usahanya. capaian realisasi program pengawasan ini 73 dokumen atau sebesar 117,74% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,83%.

- pelaku usaha perikanan sudah mengetahui kelengkapan dokumen usaha yang harus dipenuhi;

- pembinaan dari penyuluh dilapangan untuk menerapkan standar-standar operasional yang telah disyaratkan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

4. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Dinas Perikanan).
   Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan merupakan hilir dari produk perikanan, dimana kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditi perikanan dan pemasaran perikanan serta dimaksudkan untuk memfasilitasi permintaan produk perikanan dengan produsen perikanan. Terdapat tiga kegiatan yang mendukung program ini di Tahun 2024. Indikator kinerja program ini Tahun 2024 adalah jumlah produksi hasil pengolahan perikanan sebesar 1.527,04 Ton olahan perikanan. Dengan serapan anggaran 98,89% dan Capaian kinerja kegiatan sebesar 100,68%.
   Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja yaitu:
   - Bantuan pemerintah berupa bedah UMKM UPI, peralatan pengolahan, pabrik es portable dan bangunan sarana pasca panen ikan;
   - Pendampingan dan pembinaan kelompok dalam pemenuhan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
   - Pengembangan produk perikanan melalui pelatihan dan sosialisasi teknologi.
5. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Dinas TPH Bun).
   Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian merupakan salah satu program pendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Indikator kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dapat diukur dengan Persentase Sarana Pertanian yang tersedia. Pada tahun 2025, capaian kinerja program sebesar 100%. Untuk mencapai hal tersebut, telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pendukung dengan serapan anggaran sebesar 93,85%.
   Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja yaitu:
   - Adanya bantuan hibah sarana pertanian berupa bibit/benih, pupuk, pestisida untuk peningkatan produksi pertanian;
   - Adanya bantuan hibah alsintan pra panen dan pasca panen;
   - Pembinaan dan pendampingan petani dalam pengembangan usaha tani.

   (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)
   Realisasi anggaran sangat tinggi, menunjukkan kegiatan penyediaan sarana (bibit/ternak, pakan, obat hewan, dan sarana pendukung lainnya) terlaksana sesuai perencanaan. Efisiensi terjadi pada beberapa komponen belanja tanpa mengurangi output kegiatan. Target pengadaan

dan distribusi hibah ternak tercapai tepat waktu dan tepat sasaran sehingga mendukung peningkatan produksi dan populasi ternak.
Tidak terdapat kegagalan signifikan, hanya sisa anggaran kecil akibat efisiensi belanja.

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dinas TPH Bun).
   Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian bertujuan meningkatkan produktivitas, pendapatan petani melalui pembangunan infrastuktur seperti jaringan irigasi tersier. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dan pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 94,85%.
   Adapun capiannya:
   - Adanya bantuan hibah prasarana pertanian berupa jalan usaha tani, sumur bor, rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani untuk peningkatan produksi pertanian;
   - Pembinaan dan pendampingan petani dalam pengembangan usaha tani.

   (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)
   Realisasi tinggi menunjukkan pembangunan/rehabilitasi prasarana (kandang, UPT, jalan usaha tani, fasilitas pendukung lainnya) berjalan baik. Selisih anggaran disebabkan efisiensi dan penyesuaian volume pekerjaan. Sebagian besar prasarana strategis selesai sesuai target sehingga menunjang kelancaran usaha peternakan. Beberapa pekerjaan mengalami penyesuaian volume atau waktu pelaksanaan, namun tidak berdampak signifikan pada capaian output.
7. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Disnakeswan).
   Kegiatan vaksinasi, pemeriksaan kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas ternak, dan pengendalian penyakit strategis terlaksana dengan baik. Sisa anggaran berasal dari efisiensi belanja operasional dan pengadaan. Tidak terjadi peningkatan kasus penyakit hewan menular strategis, pengawasan produk hewan berjalan efektif sehingga keamanan pangan asal hewan terjaga. Tidak terdapat kegagalan signifikan, hanya penyesuaian kebutuhan lapangan.
8. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dinas TPH Bun).
   Program Pengendalian dan penaggulangan bencana pertanian berfokus pada mitigasi dan pemulihan dampak kekeringan, banjir, dan serangan hama (OPT). Kegiatan yang dilakukan meliputi bantuan benih, pengendalian OPT dan dan dampak perubahan iklim (DPI) untuk memastikan ketahanan pangan berkelanjutan. Terdapat 1 (satu) kegiatan

yang mendukung program ini di Tahun 2025 dengan serapan anggaran 96,93% dan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.
Ketercapian kinerja program ini:
- Pendampingan dan pembinaan kelompok tani;
- Pelatihan dan sosialisasi teknologi;
- Bantuan hibah sarana prasarana pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

9. Program perizinan usaha pertanian (Disnakeswan).
   Pelayanan rekomendasi perizinan usaha peternakan berjalan sesuai standar pelayanan minimal. Realisasi tinggi menunjukkan pelayanan administrasi efektif. Proses rekomendasi perizinan tepat waktu dan sesuai ketentuan, mendukung kemudahan berusaha di sektor peternakan.
10. Program penyuluhan pertanian.
    (Dinas TPH Bun)
    Program Penyuluhan Pertanian berfokus pada pendampingan dan pelatihan bagi petani dan petugas dalam upaya meningkatkan produksi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang mendukung program ini di Tahun 2025 dengan serapan anggaran 86,51% dan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.
    Keberhasilan kinerjanya yaitu:
    - Pendampingan dan pembinaan petani dan petugas;
    - Pelatihan dan sosialisasi teknologi pertanian.

    (Disnakeswan)
    Terjadi perubahan kebijakan dan regulasi dimana tugas dan fungsi penyuluhan pertanian ditarik dan menjadi kewenangan pemerintah pusat/Kementerian terkait. Proses pengalihan kewenangan berjalan tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - Tidak terjadi tumpang tindih program antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
    - Koordinasi tetap dilakukan sehingga pembinaan kepada peternak tetap berjalan melalui skema kementerian.

n. Sasaran meningkatnya kualitas SDM dan tata Kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern dengan indikator sasaran Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM/Indeks Merit ada 1 Program Misi 5.
   1. Program Kepegawaian Daerah (BKD)
      Program Kepegawaian Daerah merupakan program utama pendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan yaitu Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Bidang SDM dan Aparatur. Melalui program ini tahun 2025 realisasi capaian kinerja

terhadap IKU sebesar 2,70 poin dari target kinerja sebesar 2,64 poin. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 86% dengan serapan anggaran 49,61%.

Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerjanya:

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian baik diinternal organisasi maupun kepada masyarakat ASN guna memudahkan dalam memperoleh pelayanan secara efektif dan efisien;
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral secara intensif dalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan maupun pengadaan pegawai untuk memenuhi kebutuhan ASN serta dalam rangka penyelesaian Pegawai yang tidak diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu;
- Dukungan program zoom "BKD Menyapa" dalam memberikan informasi terkait penyelesaian E-Kinerja ASN.

Tidak tercapainya target program perikanan tangkap disebabkan:

- Terkait penyelenggaraan dan peningkatan kompetensi dan pengembangan karier ASN dari sisi penyerapan anggaran masih belum optimal, hal ini disebabkan karena masih ada beberapa OPD yang tidak mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi yang anggarannya sudah tersedia di BKD;
- Masih banyak pegawai belum menyelesaikan E-Kinerja tahun 2025. terutama ASN guru, hal ini terjadi karena penginputan SKP melalui aplikasi Ruang Guru tidak dapat sinkron dengan E-Kinerja BKN. Hal ini menghambat dalam perekaman nilai SKP bagi masing-masing pegawai yang berdampak pada capaian kinerja secara keseluruhan;
- Pelaksanakan kegiatan seleksi JPTP, promosi dan rotasi untuk jabatan Administrator dan Pengawas bersifat tentatif, sehingga dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran sering tidak sesuai rencana awal.

o. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP) dengan indikator sasaran Nilai SAKIP (predikat) ada 2 Program Misi 5.

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

   Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan salah satu program pendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Bappeda yaitu meningkatnya kualitas perencanaan. Persentase pencapaian kualitas perencanaan pada tahun 2025 dengan target 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini

sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 95% dan serapan anggaran 89,97%.

Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

- Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang tersedia sudah memenuhi target yang ditentukan.

Tidak tercapainya target program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah disebabkan:

- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah belum memenuhi target yang ditentukan.

2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA).

   Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu program pendukung ketercapaian indikator Kinerja Utama Bappeda. Indikator kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diukur dengan tercapainya koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi dan sinergitas dan harmonisasi. Pada tahun 2025, tingkat ketercapaian dengan target kinerja sebesar 100%. Untuk mencapai hal tersebut, telah dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan pendukung dengan serapan anggaran sebesar 125% dan capaian kinerja kegiatan rata-rata 95%.

   Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

   - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sudah melebihi dari target yang ditentukan;
   - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) hampir memenuhi target yang ditentukan;
   - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan masih perlu ditingkatkan pencapaian realisasi kinerja.

p. Sasaran meningkatnya nilai opini BPK dengan indikator sasaran Opini BPK (opini) ada 2 Program Misi 5.

1. Program pengelolaan keuangan daerah (BPKAD).

   Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu program pendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mencakup pelaksanaan tata kelola keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Target indikator kinerjanya yaitu 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 82,89%.

Sasaran program telah berjalan sesuai dengan ketentuan, tranparan dan akuntabel. Sasaran program dapat dicapai dengan maksimal dengan upaya antara lain sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian penganggaran daerah;
- Meningkatkan pengendalian belanja daerah dan dana transfer;
- Mengelola pembiayaan dan penyusunan laporan keuangan dalam pelaksanaan APBD;
- Asistensi dan verifikasi atas Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
- Rekonsiliasi bulanan penyerapan anggaran dengan Perangkat daerah;
- Rekonsiliasi penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
- Penerapan Inovasi strategi percepatan realisasi belanja daerah melalui implementasi si-dodi cair pada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Program pengelolaan barang milik daerah (BPKAD).

Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu program pendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu tercapainya Tertib Penatausahaan Pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, serta penatausahaan dan pengawasan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Target indikator kinerjanya yaitu 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 85,20%.

Capaian sasaran program dengan hasil yang memuaskan diraih dengan beberapa upaya yang dilakukan, antara lain :

- Meningkatkan pemahaman pengelola BMD mengenai perubahan peraturan yang dinamis;
- Penguatan Tim Pengelolaan BMD;
- Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi BMD;
- Penelusuran dan sinkronisasi antara keberadaan BMD dan dokumen hasil rekonsiliasi;
- Pembuatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
- Mengamankan BMD daerah dengan memasang tanda batas barang milik Daerah berupa tanah milik pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Kerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk penilaian terhadap Barang Milik Daerah;
- Koordinasi dan melakukan kerjasama dengan BPN terkait percepatan proses sertifikasi tanah;

- Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah baik pada lingkup pengguna maupun pengelola barang.

q. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin) ada 17 Program di misi 5.

1. Program penyelesaian sengketa tanah garapan (Disperkim).
   Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mediasi sengketa tanah garapan yang merupakan konflik yang terjadi antara pemilik tanah dan pihak yang menggarap tanah tanpa memiliki hak kepemilikan resmi, Dinas Perumahan Permukiman akan memfasilitasi perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak, tanpa memiliki wewenang untuk memutus atau memaksakan penyelesaian, sebelum sengketa pertanahan ini harus diselesaikan melalui ranah pengadilan Tahun 2025 Dinas Perumahan Permukiman Lampung Selatan memfasilitas 5 (Lima) kasus sengketa tanah dan sudah terealisasi 100% dengan Capaian Kinerjanya 100%.
   Keberhasilan pencapaian kinerja program ini yaitu kinerja seluruh kegiatan mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan.
2. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Disperkim).
   Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian bertujuan memberikan akses tanah kepada masyarakat yang membutuhkan serta kompensasi bagi pemilik tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. Berdasarkan indikator kinerja Persentase penyelenggaraan Redistribusi Tanah, program tahun ini mencapai 100%, dengan seluruh tahapan distribusi terlaksana sesuai target dan penerima manfaat memperoleh hak atas tanah.
   Keberhasilan pencapaian kinerja program ini yaitu kinerja semua kegiatan mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan.
3. Program penetapan tanah ulayat (Disperkim),
   Sub kegiatan Tanah Ulayat belum dapat diakomodir karena terbentur ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur kewenangan dan pengelolaannya. Selain itu, khusus di wilayah Lapung Selatan, keberadaan tanah ulayat baru sebatas bentuk pengakuan dan belum memiliki dasar Perda yang mengatur secara khusus.
   Dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap regulasi dan kepastian hukum, sub kegiatan ini untuk sementara belum dapat dilaksanakan dan akan dikaji kembali apabila telah tersedia payung hukum yang memadai.
4. Program Penatagunaan Tanah (Disperkim).
   Program Penatagunaan Tanah bertujuan untuk menertibkan dan mengatur pemanfaatan tanah secara efektif serta sesuai peraturan,

sehingga mendukung pengelolaan lahan yang terencana dan berkelanjutan. Berdasarkan indikator kinerja Dokumen Penatagunaan Tanah, program tahun ini mencapai 100%, dengan seluruh dokumen penatagunaan tersusun dan direalisasikan sesuai target. Capaian ini menunjukkan program berjalan optimal, memastikan pemanfaatan tanah terkontrol, transparan, dan mendukung kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak terkait.

Keberhasilan pencapaian kinerja program ini yaitu kinerja semua kegiatan mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan.

5. Program Pendaftaran Penduduk (Disdukcapil).

   Program Pendaftaran Penduduk merupakan salah satu program pendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan yaitu Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator Kinerja Program dapat diukur dengan Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Capaian Kinerja Kepemilikan Kepemilikan Dokumen Kependudukan sampai dengan tahun 2025 mencapai 63,13%, untuk mencapai hal tersebut telah dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan pendukung dengan serapan anggaran sebesar 96,01%.

   Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

   - Pelayanan berbasis teknologi Penggunaan aplikasi, situs web, dan layanan WhatsApp untuk pengurusan dokumen kependudukan seperti KK, KIA, dan KTP-el, memudahkan masyarakat tanpa harus antre memudahkan akses untuk mendapatkan dokumen kependudukan;
   - Program Jemput Bola (Aktif): Petugas Dukcapil mendatangi langsung masyarakat, seperti di sekolah, panti jompo, desa terpencil, hingga rumah sakit, untuk perekaman KTP-el dan KIA;
   - Adanya dukungan logistik (blangko, formulir) untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
   - Sosialisasi aktif tentang kepemilikan administrasi Kependudukan.

   Tidak Tercapainya target program Pendaftaran Penduduk disebabkan: bertambahnya persentase pemilih pemula setiap tahun, mempengaruhi capaian perekaman, pemilih pemula sebagian besar merupakan bestatus pelajar SMA, seringkali pengaturan waktu perekaman berbenturan dengan jadwal Pelajaran, Disdukcapil terus berupaya Bekrjasama dengan pihak sekolah untuk menjadwalkan kegiatan agar lebih fleksibel tanpa mengganggu jadwal pelajaran siswa.

   Masih belum terpenuhi kepemilikan Identitas Kependudukan, dikarenakan:

   - Tidak semua masyarakat memiliki Handphone yang kompatibel dengan aplikasi IKD;

- Masih banyak penduduk yang belum mengetahui tata cara dan manfaat penggunaan IKD;
- Tidak semua wilayah terkoneksi jaringan internet.

6. Program pencatatan sipil (Disdukcapil);

   Program Pencatatan Sipil merupakan salah satu program pendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan yaitu Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator Kinerja Program dapat diukur dengan Jumlah Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil. Pada Tahun 2025 capaian Kinerja Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil mencapai 73,04%. Untuk mencapai hal tersebut telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pendukung dengan serapan anggaran sebesar 92,79%.

   Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

   - Program Jemput Bola (Aktif): Petugas Dukcapil mendatangi langsung masyarakat, seperti di sekolah, panti jompo, desa terpencil, hingga rumah sakit, untuk penerbitan Akta Kelahiran;
   - Program Jemput Bola (Aktif): Petugas Dukcapil mendatangi langsung tempat perkawinan untuk penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim;
   - Adanya dukungan logistik (blangko, formulir) untuk meningkatkan pelayanan administrasi Pencatatan Sipil;
   - Sosialisasi aktif tentang pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan Sipil untuk kebutuhan layanan dasar (seperti pendidikan, kesehatan dll).

   Tidak Tercapainya target program Pencatatan Sipil disebabkan: Kepemilikan Akta Kelahiran Baka /Akta Lama belum terupdate kedalam aplikasi SIAK, sehingga mempengaruhi ketercapaian penerbitan/ kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.

7. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan (Disdukcapil).

   Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan merupakan salah satu program pendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama yaitu pemanfaatan Data Kependudukan. Pada tahu 2025 capaian Pemanfaatan Data Kependudukan mencapai 64,16% memenuhi target 2025 yaitu 63,63%. Untuk mencapai hal tersebut telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pendukung dengan serapan anggaran sebesar 84,89%.

   Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

   - Perjanjian Kerjasama pelayanan Administrasi kependudukan terenuhi diberbagai stakeholder, PKS dengan desa (229 desa), dengan klinik, bidan mandiri dan dengan stakeholder lainnya/pihak swasta (39 PKS);
   - Data kependudukan terkelola, terpemelihara, dan terperbarui (kelahiran, kematian, perpindahan) secara cepat.

   Tidak Tercapainya target program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan disebabkan : Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan

melalui kerjasama dengan PD (belum semua PD mendapatkan persetujuan akses oleh Ditjen Adminduk) dari jumlah PD terusulkan untuk 20 PD dan telah disetujui sebanyak 8 PD.

8. Program pengelolaan profil kependudukan (Capil)
   Program Pengelolaan Profil Kependudukan merupakan program untuk pengelolaan Profil Proyeksi Perkembangan Penduduk Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahu 2025 capaian Pengelolaan Profil Kependudukan mencapai 100%. Untuk mencapai hal tersebut telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan pendukung dengan serapan anggaran sebesar 99,96%.
   Keberhasilan pencapaian kinerja program ini yaitu kinerja semua kegiatan mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan.
9. Program informasi dan komunikasi publik (Diskominfo).
   Program Informasi Dan Komunikasi Publik memiliki Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan serapan anggaran sebesar 99,49% menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang sangat efektif dan efisian dalam proses perencanaan serta pelaksanaan kegiatan sehingga mendukung transparansi dan peningkatan kualitas layanan informasi publik pemerintah daerah.
   Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:
   - Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara efektif melalui publikasi program/kebijakan pemerintah daerah, sehingga meningkatkan keterbukaan informasi dan citra positif pemerintah;
   - Tingginya realisasi anggaran dan tercapainya target kinerja menunjukkan perencanaan yang tepat serta pelaksanaan kegiatan yang optimal dalam mendukung transparansi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
10. Program aplikasi informatika (Diskominfo).
    Program Aplikasi Informatika memiliki Kegiatan Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan serapan anggaran 98,50% Capaian tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai Indeks SPBE Tahun 2025 dari target 3,20 menjadi 3,34, yang mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital, efektivitas layanan publik, serta kematangan sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah.
    Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:
    - Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan e-Government secara optimal, sehingga mendukung integrasi sistem, peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital, dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif;

- Tercapainya target kinerja, termasuk peningkatan nilai Indeks SPBE melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan keberhasilan implementasi program serta kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

11. Program penyelenggaraan statistik sektoral (Diskominfo).

    Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan serapan 97,59% menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang optimal. Kegiatan ini diantaranya didukung oleh Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Data Statistik Sektoral yang memastikan ketersediaan data yang akurat dan terpadu, serta Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral yang memperkuat standar dan kualitas antar perangkat daerah.

    Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

    - Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral secara terpadu sehingga meningkatkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
    - Terbangunnya metadata statistik sektoral yang terstandar mendukung kualitas, konsistensi, dan integrasi data antar perangkat daerah sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

12. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi (Diskominfo).

    Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi memiliki kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan serapan anggaran 79,58% menunjukkan pelaksanaan kegiatan telah berjalan cukup baik. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh adanya dinamika pelaksanaan di lapangan. Secara keseluruhan, program ini tetap memberikan kontribusi penting dalam mendukung sistem keamanan informasi dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang lebih andal dan terlindungi.

    Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

    - Terlaksananya penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi secara terkoordinasi, sehingga meningkatkan perlindungan data dan keamanan informasi strategis pemerintah daerah;
    - Terbentuknya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah yang lebih tertib dan terstandar, mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan andal.

13. Program pelayanan penanaman modal (DPMPPTSP).
    Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode 2025, DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan secara konsisten berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan indeks mencapai 88,36 atau dengan capaian 100,11% dari target sebesar 88,26 dan masuk dalam kategori "Sangat Baik".
    Analisis akhir tahun menunjukkan bahwa seluruh unsur kritis telah tertangani: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan tuntas 100% dan Penanganan Pengaduan menunjukkan kualitas respons yang tinggi. Kinerja yang solid ini membuktikan bahwa pelayanan prima telah terwujud secara menyeluruh. Hasil ini menjadi acuan penting bagi DPMPPTSP untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi kepuasan investor dan masyarakat luas.
14. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
    Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan Program pendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD yaitu persentase ranperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu. Melalui Program ini target Indikator Kinerja jumlah perda yang telah disahkan tepat waktu sebanyak 6 perda pada Tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini sebanyak 7 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 92% dan serapan anggaran 98%.
    Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja:
    - Adanya kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD serta instansi terkait;
    - Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran kinerja.

    Tidak tercapainya target program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD disebabkan:
    - Pembahasan dan pengesahan Perda belum optimal, karena jumlah Ranperda yang masuk kepada DPRD untuk dibahas oleh Bappemperda tidak seluruh Ranperda yang terdaftar di Propemperda;
    - Ranperda tidak diusulkan untuk dibahas oleh Bapemperda dikarenakan masih belum seluruhnya selesai dari OPD usulan Ranperda.
15. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
    Program ini merupakan dukungan layanan terhadap kegiatan perkantoran, yaitu melalui perencanaan, pengaturan keuangan, dan administrasi kepegawaian. Seluruh Perangkat Daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, mengatur dan mengelola kebutuhan perkantorannya melalui program ini. Dampak yang diharapkan adalah kenyamanan

pekerja dalam melaksanakan segala aktivitasnya, dengan realisasi anggran 92,22%

16. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kec. Natar, Sidomulyo, Penengahan)
    Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik kegiatan ini sangat bermaaf dalam rangka meningkatkan koordinasi desa, kecamatan dan forkopimda di wilayah kecamatan kegiatan ini indikatornya reformasi birokasi mencapai 71.34%. Melalui koordinasi desa dan kecamatan setara lintas sektoral meningkatkan persamaam arah pembangunan di wilayah kecamatan.
17. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kec. Kalianda).
    Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertujuan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan menciptakan kondisi yang kondusif. didalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, kecamatan telah menjalin kerjasama dengan instansi-isntansi sektoral. Dalam pelaksanaan kegiatannya meliputi sosialisasi bahaya narkoba dan pembinaan aparatur. Indikator kinerja program ini adalah Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan Dengan serapan anggaran 60.14%, Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan dengan terciptanya kondisi wilayah yang kondusif dan bebas narkoba.

B. REALISASI ANGGARAN

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan lebih banyak didominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang masing- masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.19. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
PENDAPATAN DAERAH	**2,437,997,419,594.00**	**2,367,043,944,669.85**	**97.08**	**2,453,782,904,557.94**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**425,926,232,813.00**	**460,399,064,115.85**	**108.09**	**362,885,675,432.94**
Pajak Daerah	250,708,473,800.00	266,625,891,477.45	106.34	190,399,953,185.30
Pajak Reklame	2,650,000,000.00	2,731,466,499.00	103.07	2,791,218,392.50
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2,540,000,000.00	2,555,939,718.00	100.62	2,612,181,560.50
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2,540,000,000.00	2,555,939,718.00	100.62	2,612,181,560.50
Pajak Reklame Kain	110,000,000.00	175,526,781.00	159.56	179,036,832.00
Pajak Reklame Kain	110,000,000.00	175,526,781.00	159.56	179,036,832.00
Pajak Air Tanah	1,600,000,000.00	1,733,908,938.00	108.36	1,368,044,701.00
Pajak Air Tanah	1,600,000,000.00	1,733,908,938.00	108.36	1,368,044,701.00
Pajak Air Tanah	1,600,000,000.00	1,733,908,938.00	108.36	1,368,044,701.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3,800,000,000.00	3,970,480,740.00	104.48	4,114,471,252.00
Pajak Granit/Andesit	3,800,000,000.00	3,970,480,740.00	104.48	4,114,471,252.00
Pajak Granit/Andesit	3,800,000,000.00	3,970,480,740.00	104.48	4,114,471,252.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	62,450,000,000.00	62,672,369,064.45	100.35	61,026,983,312.80
PBBP2	62,450,000,000.00	62,672,369,064.45	100.35	61,026,983,312.80
PBBP2	62,450,000,000.00	62,672,369,064.45	100.35	61,026,983,312.80
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	26,500,000,000.00	37,707,884,144.00	142.29	32,094,765,625.00
BPHTB-Pemindahan Hak	26,500,000,000.00	37,707,884,144.00	142.29	32,094,765,625.00
BPHTB-Pemindahan Hak	26,500,000,000.00	37,707,884,144.00	142.29	32,094,765,625.00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	86,190,000,000.00	88,505,166,019.00	102.68	89,004,469,902.00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	7,600,000,000.00	8,277,583,129.00	108.91	8,286,170,670.00
PBJT-Restoran	5,000,000,000.00	5,083,786,931.00	101.67	4,708,412,239.00
PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	2,600,000,000.00	3,193,796,198.00	122.83	3,577,758,431.00
PBJT-Tenaga Listrik	71,900,000,000.00	73,231,744,009.00	101.85	75,111,988,580.00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	71,750,000,000.00	73,074,999,294.00	101.84	74,948,123,389.00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	150,000,000.00	156,744,715.00	104.49	163,865,191.00
PBJT-Jasa Perhotelan	1,940,000,000.00	2,039,710,661.00	105.13	1,707,275,725.00
PBJT-Hotel	1,900,000,000.00	1,997,956,261.00	105.15	1,670,523,100.00
PBJT-Losmen	40,000,000.00	41,754,400.00	104.38	36,752,625.00
PBJT-Jasa Parkir	1,850,000,000.00	2,056,859,466.00	111.18	1,966,699,203.00
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1,850,000,000.00	2,056,859,466.00	111.18	1,966,699,203.00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2,900,000,000.00	2,899,268,754.00	99.97	1,932,335,724.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	2,900,000,000.00	2,899,268,754.00	99.97	1,932,335,724.00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	36,500,000,000.00	38,278,981,488.00	104.87	0.00
Opsen PKB	36,500,000,000.00	38,278,981,488.00	104.87	0.00
Opsen PKB	36,500,000,000.00	38,278,981,488.00	104.87	0.00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	31,018,473,800.00	31,025,634,585.00	100.02	0.00
Opsen BBNKB	31,018,473,800.00	31,025,634,585.00	100.02	0.00
Opsen BBNKB	31,018,473,800.00	31,025,634,585.00	100.02	0.00
Retribusi Daerah	18,795,924,140.00	18,398,951,675.00	97.88	19,037,260,164.39
Retribusi Jasa Umum	12,299,383,840.00	10,862,178,641.00	88.31	11,800,548,313.88
Retribusi Pelayanan Kesehatan	7,334,383,840.00	7,713,517,141.00	105.16	8,267,388,208.88
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	903,585,000.00	1,200,642,082.00	132.87	996,047,638.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	6,330,998,840.00	6,419,290,059.00	101.39	7,215,730,570.88
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	99,800,000.00	93,585,000.00	93.77	55,610,000.00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	255,000,000.00	251,950,000.00	98.80	231,260,000.00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	255,000,000.00	251,950,000.00	98.80	231,260,000.00
Retribusi Pelayanan Pasar	1,475,000,000.00	774,115,500.00	52.48	1,057,302,955.00
Retribusi Pelataran	241,356,000.00	122,356,500.00	50.69	158,532,782.00
Retribusi Los	427,284,000.00	406,786,000.00	95.20	448,621,854.00
Retribusi Kios	806,360,000.00	244,973,000.00	30.38	450,148,319.00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.00	0.00	0.00	21,480,350.00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.00	0.00	0.00	21,480,350.00
Retribusi Pelayanan Kebersihan	3,235,000,000.00	2,122,596,000.00	65.61	2,223,116,800.00
Retribusi Pelayanan Persampahan	3,000,000,000.00	2,093,195,000.00	69.77	2,178,960,800.00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	235,000,000.00	29,401,000.00	12.51	44,156,000.00
Retribusi Jasa Usaha	962,960,150.00	503,258,250.00	52.26	542,695,440.00
Retribusi Tempat Pelelangan	0.00	0.00	0.00	7,633,020.00
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	0.00	0.00	0.00	7,633,020.00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	18,640,000.00	18,640,000.00	100.00	0.00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	18,640,000.00	18,640,000.00	100.00	0.00
Retribusi Rumah Potong Hewan	0.00	0.00	0.00	21,425,000.00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	0.00	0.00	0.00	21,425,000.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0.00	0.00	0.00	111,369,000.00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0.00	0.00	0.00	111,369,000.00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0.00	0.00	0.00	49,878,000.00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0.00	0.00	0.00	49,878,000.00
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	12,000,000.00	11,299,350.00	94.16	4,515,420.00
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	12,000,000.00	11,299,350.00	94.16	4,515,420.00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	20,000,000.00	4,200,000.00	21.00	0.00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	20,000,000.00	4,200,000.00	21.00	0.00
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	50,000,000.00	50,050,000.00	100.10	25,500,000.00
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	50,000,000.00	50,050,000.00	100.10	25,500,000.00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	359,460,150.00	192,902,000.00	53.66	134,825,000.00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	359,460,150.00	192,902,000.00	53.66	134,825,000.00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	502,860,000.00	226,166,900.00	44.97	187,550,000.00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	502,860,000.00	226,166,900.00	44.97	187,550,000.00
Retribusi Perizinan Tertentu	5,533,580,150.00	7,033,514,784.00	127.10	6,694,016,410.51
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4,933,580,150.00	6,679,638,027.00	135.39	6,215,789,814.51
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4,933,580,150.00	6,679,638,027.00	135.39	6,215,789,814.51
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	600,000,000.00	353,876,757.00	58.97	478,226,596.00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	600,000,000.00	353,876,757.00	58.97	478,226,596.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,869,021,661.41	3,869,021,661.41	100.00	7,341,474,786.85
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3,869,021,661.41	3,869,021,661.41	100.00	7,341,474,786.85
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3,869,021,661.41	3,869,021,661.41	100.00	7,341,474,786.85

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3,869,021,661.41	3,869,021,661.41	100.00	7,341,474,786.85
Lain-lain PAD yang Sah	152,552,813,211.59	171,505,199,301.99	112.42	146,106,987,296.40
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500,000,000.00	593,812,100.00	118.76	102,411,100.00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	40,900,000.00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00	40,900,000.00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	500,000,000.00	593,812,100.00	118.76	61,511,100.00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	500,000,000.00	593,812,100.00	118.76	61,511,100.00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0.00	15,404,400.00	0.00	209,081,400.00
Hasil Sewa BMD	0.00	15,404,400.00	0.00	209,081,400.00
Hasil Sewa BMD	0.00	15,404,400.00	0.00	209,081,400.00
Jasa Giro	4,590,591,170.08	11,594,590,712.56	252.57	7,237,984,572.25
Jasa Giro pada Kas Daerah	4,590,591,170.08	11,594,590,712.56	252.57	7,237,984,572.25
Jasa Giro pada Kas Daerah	4,590,591,170.08	11,594,590,712.56	252.57	7,237,984,572.25
Pendapatan Bunga	0.00	5,951,905.00	0.00	71,088,165.00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0.00	5,951,905.00	0.00	71,088,165.00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0.00	5,951,905.00	0.00	71,088,165.00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	25,671,212.53	0.00	38,691,794.77
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	25,671,212.53	0.00	38,691,794.77
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	25,671,212.53	0.00	38,691,794.77
Pendapatan Denda Pajak Daerah	175,487,251.51	619,646,021.91	353.10	335,866,338.00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	1,739,157.00	2,305,560.40	132.56	0.00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1,628,657.00	2,159,935.40	132.62	0.00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	110,500.00	145,625.00	131.78	0.00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1,560,360.11	17,309,976.11	1,109.35	0.00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1,560,360.11	17,309,976.11	1,109.35	0.00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38,323,916.00	153,423,108.00	400.33	0.00
Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit	38,323,916.00	153,423,108.00	400.33	0.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	98,568,317.00	343,686,352.00	348.67	335,866,338.00
Pendapatan Denda PBBP2	98,568,317.00	343,686,352.00	348.67	335,866,338.00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	54,240.00	54,240.00	100.00	0.00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	54,240.00	54,240.00	100.00	0.00
Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	11,082,316.40	63,434,910.40	572.39	0.00
Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	2,336,840.00	14,755,554.00	631.43	0.00
Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	5,391,885.38	36,049,216.38	668.58	0.00
Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	232,438.02	860,309.02	370.12	0.00
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	825,924.00	1,219,381.00	147.63	0.00
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen	570,420.00	657,490.00	115.26	0.00
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	691,198.00	8,147,142.00	1,178.69	0.00
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	1,033,611.00	1,745,818.00	168.90	0.00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23,156,273.00	36,510,869.00	157.67	0.00
Pendapatan Denda Opsen PKB	23,156,273.00	36,510,869.00	157.67	0.00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1,002,672.00	2,921,006.00	291.32	0.00
Pendapatan Denda Opsen BBNKB	1,002,672.00	2,921,006.00	291.32	0.00
Pendapatan dari Pengembalian	7,412,971,118.00	7,572,342,865.00	102.14	153,595,167.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	110,971,118.00	270,080,703.00	243.37	140,665,167.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	110,971,118.00	270,080,703.00	243.37	140,665,167.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7,302,000,000.00	7,302,262,162.00	100.00	0.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	7,302,000,000.00	7,302,262,162.00	100.00	0.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0.00	0.00	0.00	12,930,000.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0.00	0.00	0.00	12,930,000.00
Pendapatan BLUD	136,673,763,672.00	140,661,257,543.07	102.91	133,668,845,117.77
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	136,594,727,672.00	140,637,929,194.00	102.95	133,635,458,226.00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	136,594,727,672.00	140,637,929,194.00	102.95	133,635,458,226.00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	79,036,000.00	23,328,349.07	29.51	33,386,891.77
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	79,036,000.00	23,328,349.07	29.51	33,386,891.77
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3,200,000,000.00	10,416,522,541.92	325.51	4,285,973,641.61
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3,200,000,000.00	10,416,522,541.92	325.51	4,285,973,641.61
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3,200,000,000.00	10,416,522,541.92	325.51	4,285,973,641.61
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**425,926,232,813.00**	**460,399,064,115.85**	**108.09**	**362,885,675,432.94**
PENDAPATAN TRANSFER	**2,012,071,186,781.00**	**1,906,644,880,554.00**	**94.76**	**2,090,897,229,125.00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,889,557,576,800.00	1,825,978,742,075.00	96.63	1,947,054,471,086.00
Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	1,662,148,956,086.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0.00	0.00	0.00	38,618,514,450.00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	9,707,608,000.00
DBH PPh Pasal 21	0.00	0.00	0.00	14,060,879,000.00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0.00	0.00	0.00	217,337,000.00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0.00	0.00	0.00	139,339,450.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	6,125,930,000.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0.00	0.00	0.00	2,003,665,950.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0.00	0.00	0.00	14,861,000.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0.00	0.00	0.00	63,204,000.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0.00	0.00	0.00	2,096,060,050.00
DBH Sawit	0.00	0.00	0.00	4,189,630,000.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0.00	0.00	0.00	1,134,196,170,156.00
DAU	0.00	0.00	0.00	941,493,882,000.00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0.00	0.00	0.00	800,000,000.00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0.00	0.00	0.00	4,009,357,156.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0.00	0.00	0.00	108,356,968,000.00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0.00	0.00	0.00	66,698,291,000.00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0.00	0.00	0.00	12,837,672,000.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0.00	0.00	0.00	151,055,180,896.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0.00	0.00	0.00	1,994,825,803.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0.00	0.00	0.00	57,442,984,410.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0.00	0.00	0.00	15,119,256,301.00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0.00	0.00	0.00	14,498,705,950.00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0.00	0.00	0.00	4,681,057,630.00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0.00	0.00	0.00	39,078,531,918.00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0.00	0.00	0.00	3,569,291,993.00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0.00	0.00	0.00	14,670,526,891.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0.00	0.00	0.00	338,279,090,584.00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	0.00	0.00	0.00	127,758,000,000.00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0.00	0.00	0.00	3,717,500,000.00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	0.00	0.00	0.00	130,509,955,000.00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0.00	0.00	0.00	2,313,643,000.00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0.00	0.00	0.00	15,853,749,000.00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0.00	0.00	0.00	5,941,050,000.00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0.00	0.00	0.00	13,847,643,784.00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0.00	0.00	0.00	8,956,894,600.00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0.00	0.00	0.00	380,284,000.00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0.00	0.00	0.00	395,916,100.00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0.00	0.00	0.00	2,454,424,850.00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0.00	0.00	0.00	26,150,030,250.00
Dana Bagi Hasil (DBH)	37,755,454,800.00	35,430,312,800.00	93.84	0.00
DBH Pajak	26,100,652,800.00	23,699,072,800.00	90.79	0.00
DBH PBB	10,433,551,000.00	9,907,914,800.00	94.96	0.00
DBH PPh Pasal 21	15,313,635,000.00	13,158,855,400.00	85.92	0.00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	227,942,800.00	506,778,600.00	222.32	0.00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	125,524,000.00	125,524,000.00	100.00	0.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	9,655,049,000.00	9,731,487,000.00	100.79	0.00
DBH SDA Minyak Bumi	7,040,871,000.00	7,040,871,000.00	100.00	0.00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	693,106,000.00	761,522,000.00	109.87	0.00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	8,349,000.00	12,367,000.00	148.12	0.00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	38,664,000.00	42,668,000.00	110.35	0.00
DBH SDA Perikanan	1,874,059,000.00	1,874,059,000.00	100.00	0.00
DBH Lainnya	1,999,753,000.00	1,999,753,000.00	100.00	0.00
DBH Sawit	1,999,753,000.00	1,999,753,000.00	100.00	0.00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1,181,760,066,000.00	1,207,152,921,122.00	102.14	0.00
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1,038,317,634,000.00	1,038,060,838,551.00	99.97	0.00
DAU	1,038,317,634,000.00	1,038,060,838,551.00	99.97	0.00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	143,442,432,000.00	169,092,082,571.00	117.88	0.00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	800,000,000.00	800,000,000.00	100.00	0.00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3,717,020,000.00	3,716,553,571.00	99.98	0.00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	114,749,900,000.00	140,400,017,000.00	122.35	0.00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	24,175,512,000.00	24,175,512,000.00	100.00	0.00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	396,090,635,000.00	394,031,473,153.00	99.48	0.00
DAK Fisik	47,744,503,000.00	47,388,571,996.00	99.25	0.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	4,199,637,000.00	4,130,233,000.00	98.34	0.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	905,525,000.00	896,699,050.00	99.02	0.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	357,680,000.00	355,536,130.00	99.40	0.00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	19,469,004,000.00	19,324,755,557.00	99.25	0.00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	12,701,909,000.00	12,608,014,932.00	99.26	0.00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	10,110,748,000.00	10,073,333,327.00	99.62	0.00
DAK Non Fisik	348,346,132,000.00	346,642,901,157.00	99.51	0.00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	128,030,400,000.00	128,019,600,000.00	99.99	0.00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3,794,000,000.00	3,794,000,000.00	100.00	0.00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	143,889,762,000.00	144,345,241,000.00	100.31	0.00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	561,000,000.00	277,500,000.00	49.46	0.00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	15,523,200,000.00	15,490,326,000.00	99.78	0.00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	6,593,600,000.00	6,560,600,000.00	99.49	0.00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	363,347,000.00	363,347,000.00	100.00	0.00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	10,708,303,000.00	10,414,486,350.00	97.25	0.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400,660,000.00	338,133,259.00	84.39	0.00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	736,764,000.00	736,764,000.00	100.00	0.00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	180,000,000.00	180,000,000.00	100.00	0.00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	270,000,000.00	270,000,000.00	100.00	0.00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	12,300,745,000.00	11,114,510,978.00	90.35	0.00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	24,244,351,000.00	23,988,392,570.00	98.94	0.00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750,000,000.00	750,000,000.00	100.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**1,615,606,155,800.00**	**1,636,614,707,075.00**	**101.30**	**1,662,148,956,086.00**
Dana Desa	258,778,628,000.00	174,191,242,000.00	67.31	260,644,885,000.00
Dana Desa	258,778,628,000.00	174,191,242,000.00	67.31	260,644,885,000.00
Dana Desa	258,778,628,000.00	174,191,242,000.00	67.31	260,644,885,000.00
Insentif Fiskal	15,172,793,000.00	15,172,793,000.00	100.00	24,260,630,000.00
Insentif Fiskal	0.00	0.00	0.00	24,260,630,000.00
Insentif Fiskal	0.00	0.00	0.00	24,260,630,000.00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	15,172,793,000.00	15,172,793,000.00	100.00	0.00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	15,172,793,000.00	15,172,793,000.00	100.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**273,951,421,000.00**	**189,364,035,000.00**	**69.12**	**284,905,515,000.00**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	122,513,609,981.00	80,666,138,479.00	65.84	143,842,758,039.00
Pendapatan Bagi Hasil	122,513,609,981.00	80,666,138,479.00	65.84	143,842,758,039.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	122,513,609,981.00	80,666,138,479.00	65.84	143,842,758,039.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1,500,000,000.00	662,433,082.00	44.16	25,823,215,204.00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15,132,299,000.00	4,748,212,644.00	31.37	12,796,218,198.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	56,818,457,106.00	28,255,022,990.00	49.72	59,497,693,828.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	214,158,092.00	41,998,400.00	19.61	194,688,099.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	48,848,695,783.00	46,958,471,363.00	96.13	45,530,942,710.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**122,513,609,981.00**	**80,666,138,479.00**	**65.84**	**143,842,758,039.00**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2,012,071,186,781.00**	**1,906,644,880,554.00**	**94.76**	**2,090,897,229,125.00**
JUMLAH PENDAPATAN	**2,437,997,419,594.00**	**2,367,043,944,669.85**	**97.08**	**2,453,782,904,557.94**

b. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga, Belanja Transfer dan Surplus/(Defisit) yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.20. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
BELANJA DAERAH	**2,569,477,094,027.26**	**2,307,947,530,745.93**	**89.82**	**2,377,197,871,425.94**
BELANJA OPERASI	**1,633,047,882,207.14**	**1,530,675,206,524.02**	**93.73**	**1,626,774,552,877.00**
Belanja Pegawai	844,776,131,179.51	790,148,718,817.28	93.53	844,549,352,930.73
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	504,762,448,829.39	482,747,104,313.00	95.63	517,982,008,268.00
Belanja Gaji Pokok ASN	374,763,596,874.96	365,151,203,368.00	97.43	388,832,622,901.00
Belanja Gaji Pokok PNS	339,994,926,246.96	333,270,667,818.00	98.02	363,604,344,297.00
Belanja Gaji Pokok PPPK	34,768,670,628.00	31,880,535,550.00	91.69	25,228,278,604.00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	35,235,074,548.00	33,960,326,358.00	96.38	35,624,787,775.00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	31,788,210,118.00	30,688,092,696.00	96.53	33,070,442,975.00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3,446,864,430.00	3,272,233,662.00	94.93	2,554,344,800.00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6,507,573,000.00	6,114,850,000.00	93.96	6,473,686,000.00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6,507,573,000.00	6,114,850,000.00	93.96	6,473,686,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28,680,679,010.00	27,619,686,240.00	96.30	31,621,761,289.00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28,680,679,010.00	27,619,686,240.00	96.30	31,621,761,289.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4,869,308,624.00	4,065,390,000.00	83.49	3,793,360,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2,576,429,620.00	2,249,015,000.00	87.29	2,356,345,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,292,879,004.00	1,816,375,000.00	79.21	1,437,015,000.00
Belanja Tunjangan Beras ASN	19,950,985,936.00	18,879,431,465.00	94.62	19,823,088,776.00
Belanja Tunjangan Beras PNS	17,437,607,094.00	16,721,695,670.00	95.89	18,141,930,896.00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,513,378,842.00	2,157,735,795.00	85.85	1,681,157,880.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1,076,309,900.00	953,023,677.00	88.54	854,565,727.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,074,097,900.00	953,023,677.00	88.72	854,565,727.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2,212,000.00	0.00	0.00	0.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Pembulatan Gaji ASN	8,938,245.43	4,664,935.00	52.19	5,109,741.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	7,728,353.59	4,116,376.00	53.26	4,640,732.00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,209,891.84	548,559.00	45.33	469,009.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	27,306,684,500.00	23,006,592,280.00	84.25	27,854,527,560.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	24,970,307,375.00	20,944,076,444.00	83.87	27,455,587,836.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2,336,377,125.00	2,062,515,836.00	88.27	398,939,724.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	952,709,300.00	747,983,996.00	78.51	774,624,626.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	804,039,500.00	682,166,017.00	84.84	774,624,626.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	148,669,800.00	65,817,979.00	44.27	0.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2,858,127,891.00	2,243,951,994.00	78.51	2,323,873,873.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2,462,119,491.00	2,046,498,056.00	83.11	2,323,873,873.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	396,008,400.00	197,453,938.00	49.86	0.00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2,552,461,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2,552,461,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	274,502,022,946.12	245,198,968,314.00	89.32	92,120,154,478.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	91,137,008,631.12	84,075,697,933.00	92.25	87,121,654,478.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	91,137,008,631.12	84,075,697,933.00	92.25	87,121,654,478.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	108,000,000.00	54,000,000.00	50.00	52,000,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	108,000,000.00	54,000,000.00	50.00	52,000,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4,914,000,000.00	4,368,000,000.00	88.88	4,946,500,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4,914,000,000.00	4,368,000,000.00	88.88	4,946,500,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	178,343,014,315.00	156,701,270,381.00	87.86	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	87,450,000.00	82,200,100.00	93.99	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	52,800,000.00	49,393,900.00	93.54	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	125,400,000.00	88,083,900.00	70.24	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1,686,150,000.00	1,573,889,100.00	93.34	0.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	874,500,000.00	819,960,300.00	93.76	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2,844,270,000.00	2,676,852,000.00	94.11	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1,204,500,000.00	1,132,673,400.00	94.03	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1,023,609,635.00	961,559,800.00	93.93	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	141,750,000.00	75,000,000.00	52.91	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	13,750,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	81,750,000.00	27,218,667.00	33.29	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	510,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	13,507,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	25,500,000.00	10,200,000.00	40.00	0.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	13,250,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	164,521,834,680.00	144,345,241,000.00	87.73	0.00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	561,000,000.00	277,500,000.00	49.46	0.00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4,704,733,000.00	4,578,498,214.00	97.31	0.00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	0.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	0.00	166,036,370,772.00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	139,865,762.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0.00	0.00	0.00	47,865,762.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0.00	0.00	0.00	142,854,022,800.00
Belanja TPG PNSD	0.00	0.00	0.00	142,854,022,800.00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0.00	0.00	0.00	2,253,752,500.00
Belanja Tamsil Guru PNSD	0.00	0.00	0.00	2,253,752,500.00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0.00	0.00	0.00	4,510,124,570.00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0.00	0.00	0.00	4,510,124,570.00
Belanja Honorarium	0.00	0.00	0.00	14,951,222,500.00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0.00	0.00	0.00	14,302,422,500.00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0.00	0.00	0.00	585,050,000.00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0.00	0.00	0.00	63,750,000.00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0.00	0.00	0.00	1,327,382,640.00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0.00	0.00	0.00	22,800,000.00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0.00	0.00	0.00	1,304,582,640.00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28,264,584,439.00	26,190,224,530.00	92.66	29,243,739,266.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Uang Representasi DPRD	1,114,260,539.00	1,109,535,000.00	99.57	1,112,580,000.00
Belanja Uang Representasi DPRD	1,114,260,539.00	1,109,535,000.00	99.57	1,112,580,000.00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155,988,000.00	146,724,900.00	94.06	146,538,000.00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155,988,000.00	146,724,900.00	94.06	146,538,000.00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	173,808,000.00	158,310,120.00	91.08	160,772,400.00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	173,808,000.00	158,310,120.00	91.08	160,772,400.00
Belanja Uang Paket DPRD	111,426,000.00	95,035,500.00	85.29	95,340,000.00
Belanja Uang Paket DPRD	111,426,000.00	95,035,500.00	85.29	95,340,000.00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,615,677,000.00	1,608,825,750.00	99.57	1,613,241,000.00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,615,677,000.00	1,608,825,750.00	99.57	1,613,241,000.00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	139,034,700.00	133,717,200.00	96.17	107,365,125.00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	139,034,700.00	133,717,200.00	96.17	107,365,125.00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20,279,700.00	19,996,050.00	98.60	14,289,078.00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20,279,700.00	19,996,050.00	98.60	14,289,078.00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8,820,000,000.00	8,775,900,000.00	99.50	8,820,000,000.00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8,820,000,000.00	8,775,900,000.00	99.50	8,820,000,000.00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	2,205,000,000.00	2,175,600,000.00	98.66	1,470,000,000.00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	2,205,000,000.00	2,175,600,000.00	98.66	1,470,000,000.00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	167,463,716.00	0.00	0.00	162,324,783.00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	167,463,716.00	0.00	0.00	162,324,783.00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4,444,106,552.00	4,304,435,010.00	96.85	7,258,328,880.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	121,809,656.00	98,161,602.00	80.58	97,176,240.00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3,820,320.00	2,280,852.00	59.70	2,288,160.00
Belanja Jaminan Kematian DPRD	6,876,576.00	6,842,556.00	99.50	6,864,480.00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4,311,600,000.00	4,197,150,000.00	97.34	7,152,000,000.00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8,820,000,000.00	7,641,670,000.00	86.64	7,844,900,000.00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8,820,000,000.00	7,641,670,000.00	86.64	7,844,900,000.00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477,540,232.00	20,475,000.00	4.28	438,060,000.00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477,540,232.00	20,475,000.00	4.28	438,060,000.00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1,457,498,729.00	1,424,605,834.00	97.74	1,286,027,717.00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	63,000,000.00	54,600,000.00	86.66	54,600,000.00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	63,000,000.00	54,600,000.00	86.66	54,600,000.00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7,700,000.00	7,392,000.00	96.00	6,468,000.00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7,700,000.00	7,392,000.00	96.00	6,468,000.00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98,280,000.00	98,280,000.00	100.00	98,280,000.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98,280,000.00	98,280,000.00	100.00	98,280,000.00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8,400,000.00	7,676,520.00	91.38	6,083,280.00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8,400,000.00	7,676,520.00	91.38	6,083,280.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	353,000.00	318,034.00	90.09	656,417.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	353,000.00	318,034.00	90.09	656,417.00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	29,000.00	980.00	3.37	880.00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	29,000.00	980.00	3.37	880.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	14,089,360.00	5,497,020.00	39.01	5,463,360.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	14,089,360.00	5,497,020.00	39.01	5,463,360.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120,000.00	112,320.00	93.60	112,320.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120,000.00	112,320.00	93.60	112,320.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340,000.00	336,960.00	99.10	336,960.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340,000.00	336,960.00	99.10	336,960.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1,253,542,369.00	1,248,592,000.00	99.60	1,111,026,500.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	0.00	0.00	0.00	27,299,000.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	0.00	0.00	0.00	3,748,000.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	13,250,000.00	13,250,000.00	100.00	18,749,000.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0.00	0.00	0.00	230,400,000.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	0.00	0.00	0.00	3,093,000.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	2,250,000.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	19,000,000.00	14,250,000.00	75.00	6,750,000.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	312,250,000.00	312,250,000.00	100.00	365,625,000.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	132,500,000.00	132,500,000.00	100.00	208,125,000.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	430,950,000.00	430,750,000.00	99.95	240,187,500.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(],PKB],	182,500,000.00	182,500,000.00	100.00	0.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [(],BBNKB],	155,092,369.00	155,092,000.00	99.99	0.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	11,645,000.00	1,800,000.00	15.45	3,000,000.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	90,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	4,500,000.00	1,800,000.00	40.00	3,000,000.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	7,055,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1,053,600,000.00	993,120,000.00	94.25	897,600,000.00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	453,600,000.00	393,120,000.00	86.66	327,600,000.00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	453,600,000.00	393,120,000.00	86.66	327,600,000.00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600,000,000.00	600,000,000.00	100.00	570,000,000.00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600,000,000.00	600,000,000.00	100.00	570,000,000.00
Belanja Pegawai BLUD	34,735,976,236.00	33,594,695,826.28	96.71	36,983,452,429.73
Belanja Pegawai BLUD	34,735,976,236.00	33,594,695,826.28	96.71	36,983,452,429.73
Belanja Pegawai BLUD	34,735,976,236.00	33,594,695,826.28	96.71	36,983,452,429.73
Belanja Barang dan Jasa	666,753,462,553.63	626,492,277,093.74	93.96	646,811,366,654.27
Belanja Barang	85,738,756,674.00	78,544,234,175.00	91.60	90,749,446,929.00
Belanja Barang Pakai Habis	85,385,482,824.00	78,221,431,848.00	91.60	89,785,196,139.00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	644,435,500.00	585,163,286.00	90.80	582,245,494.00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	638,126,800.00	634,051,048.00	99.36	235,955,250.00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	728,940,600.00	606,250,085.00	83.16	435,789,591.00
Belanja Bahan-Bahan Baku	139,918,300.00	139,072,171.00	99.39	238,391,950.00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	287,904,040.00	286,933,740.00	99.66	202,964,100.00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	17,700,000.00	17,699,998.00	99.99	27,109,400.00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	51,040,000.00	47,652,489.00	93.36	51,768,600.00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	110,590,000.00	105,920,009.00	95.77	217,725,000.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11,122,074,579.00	10,980,566,810.00	98.72	8,458,332,188.00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	721,627,325.00	24,590,000.00	3.40	1,698,297,968.00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	7,629,000.00	7,629,000.00	100.00	0.00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	26,949,000.00	26,949,000.00	100.00	21,946,500.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14,380,421,800.00	13,614,025,126.00	94.67	19,292,922,845.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,107,736,750.00	2,009,307,231.00	95.33	3,303,084,145.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0.00	0.00	0.00	60,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	291,360,000.00	264,600,000.00	90.81	289,950,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3,236,543,900.00	3,082,506,306.00	95.24	3,732,066,855.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1,580,724,750.00	1,541,754,963.00	97.53	1,360,902,223.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,748,889,500.00	1,577,718,279.00	90.21	1,419,210,709.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2,320,812,000.00	2,072,726,307.00	89.31	2,023,043,200.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	104,665,000.00	68,758,600.00	65.69	77,301,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1,054,148,500.00	892,605,172.00	84.67	621,378,700.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	292,631,600.00	269,071,927.00	91.94	240,753,100.00
Belanja Obat-Obatan-Obat	1,405,588,905.00	1,385,106,840.00	98.54	5,614,261,516.00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	363,138,800.00	353,985,170.00	97.47	768,741,000.00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6,027,413,925.00	5,810,546,105.00	96.40	6,885,878,354.00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	105,000,000.00	30,000,000.00	28.57	0.00
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	315,785,000.00	290,598,035.00	92.02	11,113,200.00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	2,845,456,200.00	2,651,374,551.00	93.17	2,875,317,480.00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	149,028,000.00	145,953,777.00	97.93	140,110,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,335,820,000.00	6,407,896,750.00	87.35	9,194,446,816.00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5,006,030,000.00	4,829,997,600.00	96.48	7,041,123,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15,172,255,000.00	13,542,478,458.00	89.25	10,215,189,355.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	97,500,000.00	0.00	0.00	50,250,000.00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	306,625,000.00	155,500,000.00	50.71	162,025,000.00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	552,100,000.00	317,676,600.00	57.53	259,400,000.00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	434,900,750.00	296,481,300.00	68.17	206,875,000.00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	744,154,000.00	602,192,696.00	80.92	355,616,500.00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	364,950,000.00	206,689,500.00	56.63	194,350,000.00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	54,600,000.00	27,296,800.00	49.99	10,300,000.00
Belanja Pakaian Penyelamatan	145,380,000.00	143,000,000.00	98.36	12,000,000.00
Belanja Pakaian Siaga	16,500,000.00	16,317,000.00	98.89	51,970,000.00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	10,300,000.00	10,291,500.00	99.91	0.00
Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	405,350,000.00	405,350,000.00	100.00	4,950,000.00
Belanja Pakaian Adat Daerah	39,000,000.00	38,999,850.00	99.99	312,742,500.00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	999,900,000.00	850,034,034.00	85.01	445,283,000.00
Belanja Pakaian Olahraga	610,275,000.00	598,912,135.00	98.13	275,715,000.00
Belanja Pakaian Paskibraka	128,563,300.00	116,834,100.00	90.87	70,339,600.00
Belanja Pakaian Jas/Safari	135,000,000.00	132,367,500.00	98.05	96,000,000.00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	328,964,350.00	298,492,827.00	90.73	911,654,790.00
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	324,094,350.00	297,952,827.00	91.93	902,522,790.00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3,250,000.00	0.00	0.00	7,512,000.00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	1,620,000.00	540,000.00	33.33	1,620,000.00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	24,309,500.00	24,309,500.00	100.00	52,596,000.00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	0.00	0.00	0.00	18,096,000.00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20,240,000.00	20,240,000.00	100.00	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2,404,500.00	2,404,500.00	100.00	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1,665,000.00	1,665,000.00	100.00	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
Belanja Jasa	275,844,670,749.00	256,722,278,850.00	93.06	221,079,106,980.00
Belanja Jasa Kantor	187,022,103,566.00	172,220,626,971.00	92.08	147,639,405,012.00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,443,850,000.00	1,378,020,000.00	95.44	0.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,670,650,000.00	3,575,486,000.00	76.55	3,964,875,000.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2,018,925,000.00	1,812,015,000.00	89.75	2,174,795,000.00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	79,200,000.00	27,000,000.00	34.09	36,000,000.00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3,928,800,000.00	3,824,175,000.00	97.33	3,404,200,000.00
Honorarium Rohaniwan	20,800,000.00	8,500,000.00	40.86	2,000,500,000.00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	118,200,000.00	89,200,000.00	75.46	8,400,000.00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1,091,500,000.00	1,083,700,000.00	99.28	997,100,000.00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	22,197,400,000.00	21,347,400,000.00	96.17	15,082,500,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4,585,190,000.00	3,672,800,000.00	80.10	3,674,935,000.00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	132,375,500.00	122,347,550.00	92.42	90,664,150.00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	314,000,000.00	289,200,000.00	92.10	179,400,000.00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	124,080,000.00	0.00	0.00	124,080,000.00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	537,000,000.00	507,500,000.00	94.50	484,250,000.00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	864,700,000.00	718,700,000.00	83.11	0.00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	740,880,000.00	730,440,000.00	98.59	1,627,450,000.00
Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	33,800,000.00	33,800,000.00	100.00	62,400,000.00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	496,320,000.00	485,225,000.00	97.76	536,640,000.00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	619,080,000.00	589,820,000.00	95.27	59,160,000.00
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	92,400,000.00	92,400,000.00	100.00	92,400,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	315,500,000.00	244,065,000.00	77.35	85,500,000.00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	42,447,840,000.00	39,911,443,000.00	94.02	39,512,050,400.00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2,962,550,000.00	2,890,105,000.00	97.55	2,679,550,000.00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8,913,700,000.00	8,590,300,000.00	96.37	6,548,350,000.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,761,350,000.00	3,419,091,600.00	90.90	3,749,986,800.00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8,356,700,000.00	8,155,068,000.00	97.58	8,131,910,000.00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2,102,500,000.00	1,995,800,000.00	94.92	1,901,300,000.00
Belanja Jasa Tenaga Supir	1,596,300,000.00	1,511,800,000.00	94.70	1,426,900,000.00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	29,000,000.00	10,500,000.00	36.20	5,000,000.00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	112,000,000.00	103,288,744.00	92.22	219,305,275.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	285,800,000.00	268,400,000.00	93.91	189,000,000.00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	909,800,000.00	846,495,000.00	93.04	935,334,000.00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	132,100,000.00	129,167,001.00	97.77	65,885,500.00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	150,000,000.00	102,825,463.00	68.55	143,955,638.00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	20,000,000.00	0.00	0.00	178,278,100.00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2,535,200,000.00	2,483,010,000.00	97.94	1,962,072,500.00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	892,170,000.00	810,380,000.00	90.83	69,280,000.00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	278,000,000.00	262,200,500.00	94.31	320,385,000.00
Belanja Jasa Kalibrasi	315,868,500.00	301,454,442.00	95.43	269,624,266.00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9,450,816,000.00	9,149,124,339.00	96.80	7,845,300,000.00
Belanja Jasa Operator Kapal	112,300,000.00	109,050,000.00	97.10	114,500,000.00
Belanja Tagihan Telepon	252,100,000.00	110,474,130.00	43.82	140,551,247.00
Belanja Tagihan Air	576,400,000.00	362,699,827.00	62.92	384,997,996.00
Belanja Tagihan Listrik	6,719,700,000.00	5,131,212,093.00	76.36	5,006,689,758.00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2,352,338,000.00	2,213,171,000.00	94.08	2,326,311,480.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5,665,650,000.00	5,167,779,215.00	91.21	5,248,908,941.00
Belanja Paket/Pengiriman	568,320,566.00	544,018,305.00	95.72	412,251,092.00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,011,650,000.00	526,819,940.00	52.07	444,047,290.00
Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	19,692,000,000.00	17,501,170,412.00	88.87	17,816,476,079.00
Belanja Lembur	4,758,920,000.00	4,512,090,750.00	94.81	4,895,219,500.00
Belanja Medical Check Up	37,000,000.00	4,659,160.00	12.59	8,035,000.00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14,102,180,000.00	13,119,887,500.00	93.03	0.00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,443,200,000.00	1,291,348,000.00	89.47	0.00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	54,000,000.00	54,000,000.00	100.00	0.00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	63,728,661,401.00	62,744,231,155.00	98.45	56,802,962,868.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	57,428,261,400.00	57,422,089,200.00	99.98	50,935,874,600.00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1,008,000,001.00	719,629,600.00	71.39	1,125,280,800.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4,092,144,000.00	3,473,614,010.00	84.88	3,771,400,238.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	265,198,500.00	263,592,008.00	99.39	231,035,971.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	329,994,500.00	328,427,337.00	99.52	288,719,200.00
Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	80,250,000.00	37,079,000.00	46.20	46,343,259.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	312,350,000.00	297,500,000.00	95.24	240,660,000.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	212,463,000.00	202,300,000.00	95.21	163,648,800.00
Belanja Sewa Tanah	0.00	0.00	0.00	4,788,800.00
Belanja Sewa Tanah Perkebunan	0.00	0.00	0.00	4,788,800.00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5,905,314,000.00	4,769,900,986.00	80.77	4,794,213,000.00
Belanja Sewa Electric Generating Set	190,200,000.00	123,034,800.00	64.68	138,996,000.00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	589,000,000.00	477,037,500.00	80.99	425,799,800.00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	123,000,000.00	84,718,000.00	68.87	40,990,000.00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7,500,000.00	2,500,000.00	33.33	15,000,000.00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2,702,200,000.00	2,166,645,242.00	80.18	2,038,379,000.00
Belanja Sewa Mebel	958,714,000.00	826,706,855.00	86.23	732,399,200.00
Belanja Sewa Alat Pendingin	65,500,000.00	35,500,000.00	54.19	51,242,000.00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,500,000.00	0.00	0.00	29,525,000.00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1,197,200,000.00	988,956,089.00	82.60	1,204,782,000.00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	39,500,000.00	35,900,000.00	90.88	64,900,000.00
Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	10,200,000.00
Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	14,000,000.00	13,902,500.00	99.30	42,000,000.00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	886,360,000.00	735,625,018.00	82.99	684,467,132.00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100,000,000.00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	352,000,000.00	263,929,501.00	74.97	261,372,132.00
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	377,360,000.00	314,695,517.00	83.39	186,095,000.00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	57,000,000.00	57,000,000.00	100.00	137,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4,161,278,096.00	3,796,370,038.00	91.23	658,573,053.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	142,500,000.00	91,451,853.00	64.17	71,966,578.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	158,778,096.00	157,606,680.00	99.26	0.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0.00	0.00	0.00	68,746,740.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00	198,662,071.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	200,000,000.00	198,298,725.00	99.14	0.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0.00	0.00	0.00	197,597,094.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0.00	0.00	0.00	99,403,830.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	3,570,000,000.00	3,259,012,780.00	91.28	0.00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0.00	0.00	0.00	22,196,740.00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4,770,000,000.00	4,318,642,339.00	90.53	5,266,077,625.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0.00	0.00	0.00	98,869,400.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1,400,000,000.00	1,091,196,476.00	77.94	1,488,228,725.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1,745,000,000.00	1,703,503,552.00	97.62	3,678,979,500.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	75,000,000.00	73,959,411.00	98.61	0.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1,450,000,000.00	1,449,982,900.00	99.99	0.00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5,977,202,000.00	4,843,466,400.00	81.03	3,875,522,490.00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3,201,402,000.00	2,101,498,400.00	65.64	1,703,857,490.00
Belanja Bimbingan Teknis	2,734,000,000.00	2,714,575,000.00	99.28	1,977,775,000.00
Belanja Diklat Kepemimpinan	41,800,000.00	27,393,000.00	65.53	193,890,000.00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3,383,201,686.00	3,289,768,600.00	97.23	1,353,097,000.00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00	4,607,100.00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0.00	0.00	0.00	26,201,400.00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0.00	0.00	0.00	3,598,950.00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	31,800,000.00	31,516,300.00	99.10	17,882,800.00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0.00	0.00	0.00	218,491,000.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0.00	0.00	0.00	2,969,850.00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	19,200,000.00	19,043,600.00	99.18	2,160,000.00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	45,600,000.00	34,058,600.00	74.68	6,480,000.00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1,124,100,000.00	1,123,345,200.00	99.93	640,337,900.00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	318,000,000.00	315,772,200.00	99.29	199,788,000.00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(),PBJT],	1,034,280,000.00	958,844,600.00	92.70	230,580,000.00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(),PKB],	438,000,000.00	436,907,600.00	99.75	0.00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	372,221,686.00	370,280,500.00	99.47	0.00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	10,550,000.00	3,647,343.00	34.57	0.00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	10,550,000.00	3,647,343.00	34.57	0.00
Belanja Pemeliharaan	23,736,205,428.00	18,739,245,242.00	78.94	19,640,967,024.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,980,811,216.00	11,365,800,588.00	75.86	12,414,934,963.00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0.00	0.00	0.00	150,221,162.00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	0.00	0.00	0.00	112,826,981.00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	102,290,000.00	52,459,830.00	51.28	81,981,450.00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	11,493,490,000.00	9,288,095,033.00	80.81	10,084,467,409.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,084,320,000.00	688,574,682.00	63.50	647,586,834.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	29,600,000.00	3,658,000.00	12.35	17,803,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	341,428,000.00	142,771,500.00	41.81	180,467,100.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	521,583,216.00	69,300,000.00	13.28	66,500,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	50,000,000.00	49,573,710.00	99.14	0.00
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	66,612,500.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	33,000,000.00	31,895,000.00	96.65	15,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	371,600,000.00	348,894,133.00	93.88	331,356,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40,500,000.00	10,993,000.00	27.14	6,465,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	4,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	4,000,000.00	2,998,000.00	74.95	499,900.00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	12,500,000.00	11,745,000.00	93.96	10,695,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0.00	0.00	0.00	76,800,000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	350,000,000.00	211,913,000.00	60.54	164,989,900.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	494,000,000.00	400,429,700.00	81.05	289,312,227.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	90,125,500.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0.00	0.00	0.00	10,975,000.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,605,760,606.00	6,360,871,148.00	83.63	5,243,816,578.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6,076,675,106.00	4,875,189,161.00	80.22	4,188,198,435.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	87,475,600.00	87,409,300.00	99.92	258,011,400.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	275,000,000.00	270,199,816.00	98.25	25,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	780,353,750.00	769,209,080.00	98.57	482,122,150.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	377,300,000.00	358,863,791.00	95.11	290,484,593.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	2,476,100.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	6,480,050.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	931,133,606.00	795,990,006.00	85.48	1,955,015,483.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	400,000,000.00	310,780,000.00	77.69	0.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	0.00	0.00	0.00	1,390,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	114,283,606.00	79,283,606.00	69.37	565,015,483.00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	416,850,000.00	405,926,400.00	97.37	0.00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15,000,000.00	14,950,000.00	99.66	0.00
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	15,000,000.00	14,950,000.00	99.66	0.00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	203,500,000.00	201,633,500.00	99.08	27,200,000.00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	53,500,000.00	51,950,000.00	97.10	27,200,000.00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	150,000,000.00	149,683,500.00	99.78	0.00
Belanja Perjalanan Dinas	51,778,424,600.00	47,000,504,721.00	90.77	61,218,049,342.92
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51,241,569,000.00	46,473,781,923.00	90.69	61,218,049,342.92
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,561,944,000.00	25,295,109,269.00	91.77	40,102,695,912.92
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,682,605,000.00	6,187,127,000.00	80.53	9,460,463,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,746,020,000.00	14,817,905,654.00	94.10	11,461,048,030.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	251,000,000.00	173,640,000.00	69.17	193,842,400.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	536,855,600.00	526,722,798.00	98.11	0.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	536,855,600.00	526,722,798.00	98.11	0.00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20,004,850,640.00	16,542,421,970.00	82.69	30,919,613,062.00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3,819,189,300.00	3,560,938,400.00	93.23	12,040,642,800.00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1,996,996,500.00	1,795,790,000.00	89.92	1,304,450,000.00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	0.00
Belanja Beasiswa	436,000,000.00	388,000,000.00	88.99	436,000,000.00
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0.00	0.00	0.00	8,927,000,000.00
Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	720,000,000.00	715,000,000.00	99.30	718,000,000.00
Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	655,192,800.00	651,148,400.00	99.38	655,192,800.00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16,185,661,340.00	12,981,483,570.00	80.20	18,878,970,262.00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16,105,661,340.00	12,937,800,630.00	80.33	18,874,970,262.00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	80,000,000.00	43,682,940.00	54.60	4,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	0.00	0.00	86,795,108,342.00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	0.00	0.00	86,795,108,342.00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	0.00	0.00	86,795,108,342.00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	86,777,422,576.00	86,755,177,576.00	99.97	0.00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	86,489,590,576.00	86,489,590,576.00	100.00	0.00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	83,905,956,636.00	83,905,956,636.00	100.00	0.00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2,583,633,940.00	2,583,633,940.00	100.00	0.00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	261,842,000.00	239,597,000.00	91.50	0.00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	261,842,000.00	239,597,000.00	91.50	0.00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	25,990,000.00	25,990,000.00	100.00	0.00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	25,990,000.00	25,990,000.00	100.00	0.00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	19,539,617,750.00	19,493,652,498.00	99.76	22,362,125,000.00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	19,539,617,750.00	19,493,652,498.00	99.76	22,362,125,000.00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	19,539,617,750.00	19,493,652,498.00	99.76	22,362,125,000.00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	103,333,514,136.63	102,694,762,061.74	99.38	114,046,949,974.35

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Barang dan Jasa BLUD	103,333,514,136.63	102,694,762,061.74	99.38	114,046,949,974.35
Belanja Barang dan Jasa BLUD	103,333,514,136.63	102,694,762,061.74	99.38	114,046,949,974.35
Belanja Bunga	3,030,073,200.00	2,604,109,048.00	85.94	3,891,664,397.00
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3,030,073,200.00	2,604,109,048.00	85.94	3,891,664,397.00
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	3,030,073,200.00	2,604,109,048.00	85.94	3,891,664,397.00
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	3,030,073,200.00	2,604,109,048.00	85.94	3,891,664,397.00
Belanja Subsidi	288,800,000.00	257,427,000.00	89.13	22,500,000.00
Belanja Subsidi kepada BUMN	169,200,000.00	141,427,000.00	83.58	15,000,000.00
Belanja Subsidi kepada BUMN	169,200,000.00	141,427,000.00	83.58	15,000,000.00
Belanja Subsidi kepada BUMN	169,200,000.00	141,427,000.00	83.58	15,000,000.00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	119,600,000.00	116,000,000.00	96.98	7,500,000.00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	119,600,000.00	116,000,000.00	96.98	7,500,000.00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	119,600,000.00	116,000,000.00	96.98	7,500,000.00
Belanja Hibah	107,866,625,274.00	100,924,658,095.00	93.56	125,218,563,895.00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	10,548,735,528.00	8,828,972,759.00	83.69	48,218,661,984.00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3,569,000,000.00	2,599,999,978.00	72.84	43,518,473,900.00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3,569,000,000.00	2,599,999,978.00	72.84	43,518,473,900.00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6,979,735,528.00	6,228,972,781.00	89.24	4,700,188,084.00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6,979,735,528.00	6,228,972,781.00	89.24	4,700,188,084.00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1,100,000,000.00	1,079,700,000.00	98.15	0.00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1,100,000,000.00	1,079,700,000.00	98.15	0.00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1,100,000,000.00	1,079,700,000.00	98.15	0.00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	52,227,187,346.00	47,068,956,936.00	90.12	35,002,402,911.00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2,069,000,000.00	1,516,526,662.00	73.29	463,200,000.00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,245,000,000.00	920,000,000.00	73.89	250,000,000.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	824,000,000.00	596,526,662.00	72.39	213,200,000.00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17,846,671,068.00	16,377,040,809.00	91.76	15,074,688,682.00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2,539,500,000.00	1,490,000,000.00	58.67	2,970,000,000.00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15,307,171,068.00	14,887,040,809.00	97.25	12,104,688,682.00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	32,311,516,278.00	29,175,389,465.00	90.29	19,464,514,229.00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0.00	0.00	0.00	1,055,000,000.00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	32,311,516,278.00	29,175,389,465.00	90.29	18,409,514,229.00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,186,052,400.00	1,186,052,400.00	100.00	0.00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,186,052,400.00	1,186,052,400.00	100.00	0.00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,186,052,400.00	1,186,052,400.00	100.00	0.00
Belanja Hibah Dana BOSP	42,804,650,000.00	42,760,976,000.00	99.89	41,997,499,000.00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	20,639,450,000.00	20,628,650,000.00	99.94	20,610,300,000.00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	20,639,450,000.00	20,628,650,000.00	99.94	20,610,300,000.00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	15,612,600,000.00	15,579,726,000.00	99.78	15,769,149,000.00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	15,612,600,000.00	15,579,726,000.00	99.78	15,769,149,000.00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	6,552,600,000.00	6,552,600,000.00	100.00	5,618,050,000.00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	6,552,600,000.00	6,552,600,000.00	100.00	5,618,050,000.00
Belanja Bantuan Sosial	10,332,790,000.00	10,248,016,470.00	99.17	6,281,105,000.00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9,564,000,000.00	9,480,000,000.00	99.12	6,074,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	9,564,000,000.00	9,480,000,000.00	99.12	5,700,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9,564,000,000.00	9,480,000,000.00	99.12	5,700,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0.00	0.00	0.00	374,000,000.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0.00	0.00	0.00	374,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	217,340,000.00	216,666,470.00	99.69	207,105,000.00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	8,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	8,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	197,340,000.00	196,666,470.00	99.65	199,105,000.00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	197,340,000.00	196,666,470.00	99.65	199,105,000.00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	551,450,000.00	551,350,000.00	99.98	0.00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	551,450,000.00	551,350,000.00	99.98	0.00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	551,450,000.00	551,350,000.00	99.98	0.00
JUMLAH BELANJA OPERASI	**1,633,047,882,207.14**	**1,530,675,206,524.02**	**93.73**	**1,626,774,552,877.00**
BELANJA MODAL	**510,478,614,181.72**	**452,449,274,206.91**	**88.63**	**342,913,941,175.94**
Belanja Modal Tanah	1,500,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00
Belanja Modal Tanah	1,500,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00
Belanja Modal Tanah Persil	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00
Belanja Modal Lapangan	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,637,788,822.00	57,908,777,769.00	93.95	43,107,823,165.00
Belanja Modal Alat Besar	3,814,296,000.00	3,792,396,780.00	99.42	679,975,000.00
Belanja Modal Alat Besar Darat	41,000,000.00	24,900,000.00	60.73	0.00
Belanja Modal Mesin Proses	41,000,000.00	24,900,000.00	60.73	0.00
Belanja Modal Alat Bantu	3,773,296,000.00	3,767,496,780.00	99.84	679,975,000.00
Belanja Modal Electric Generating Set	3,770,600,000.00	3,764,832,780.00	99.84	679,975,000.00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	2,696,000.00	2,664,000.00	98.81	0.00
Belanja Modal Alat Angkutan	14,653,465,800.00	13,622,628,884.00	92.96	5,727,066,500.00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	14,534,940,000.00	13,505,271,884.00	92.91	5,727,066,500.00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	8,715,200,000.00	8,604,600,000.00	98.73	1,827,736,500.00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2,500,000,000.00	1,652,064,000.00	66.08	0.00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	59,740,000.00	0.00	0.00	20,980,000.00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	45,000,000.00	35,590,000.00	79.08	37,850,000.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3,215,000,000.00	3,213,017,884.00	99.93	3,840,500,000.00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	0.00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	0.00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	88,525,800.00	87,357,000.00	98.67	0.00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	34,725,800.00	34,077,000.00	98.13	0.00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	53,800,000.00	53,280,000.00	99.03	0.00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	10,150,000.00	8,171,000.00	80.50	178,256,850.00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8,550,000.00	6,571,000.00	76.85	90,910,250.00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	8,550,000.00	6,571,000.00	76.85	84,110,250.00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	0.00
Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	0.00
Belanja Modal Alat Ukur	0.00	0.00	0.00	87,346,600.00
Belanja Modal Alat Ukur Universal	0.00	0.00	0.00	82,346,600.00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
Belanja Modal Alat Pertanian	375,000,000.00	363,602,700.00	96.96	570,000.00
Belanja Modal Alat Pengolahan	375,000,000.00	363,602,700.00	96.96	570,000.00
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	300,000,000.00	288,788,700.00	96.26	0.00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	75,000,000.00	74,814,000.00	99.75	0.00
Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0.00	0.00	0.00	570,000.00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8,480,823,111.00	7,922,598,685.00	93.41	5,513,808,470.00
Belanja Modal Alat Kantor	553,374,350.00	439,221,639.00	79.37	845,897,070.00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	312,620,100.00	310,601,649.00	99.35	260,384,250.00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	240,754,250.00	128,619,990.00	53.42	585,512,820.00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7,169,678,161.00	6,753,883,755.00	94.20	4,498,470,100.00
Belanja Modal Mebel	3,707,699,598.00	3,418,859,684.00	92.20	2,021,567,200.00
Belanja Modal Alat Pembersih	223,511,500.00	215,693,355.00	96.50	84,669,000.00
Belanja Modal Alat Pendingin	1,243,647,950.00	1,169,452,145.00	94.03	1,142,787,000.00
Belanja Modal Alat Dapur	241,396,580.00	239,286,250.00	99.12	23,518,000.00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,591,882,533.00	1,551,140,821.00	97.44	1,193,400,900.00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	161,540,000.00	159,451,500.00	98.70	32,528,000.00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	757,770,600.00	729,493,291.00	96.26	169,441,300.00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	70,298,900.00	68,338,392.00	97.21	24,920,200.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	659,721,700.00	633,404,899.00	96.01	81,021,100.00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0.00	0.00	0.00	63,500,000.00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	27,750,000.00	27,750,000.00	100.00	0.00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1,882,155,800.00	1,846,374,655.00	98.09	874,384,100.00
Belanja Modal Alat Studio	1,536,259,800.00	1,506,837,955.00	98.08	805,750,600.00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	469,621,100.00	465,176,366.00	99.05	15,850,000.00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	946,116,700.00	928,918,089.00	98.18	732,900,600.00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	37,950,000.00	35,298,000.00	93.01	0.00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	82,572,000.00	77,445,500.00	93.79	57,000,000.00
Belanja Modal Alat Komunikasi	345,896,000.00	339,536,700.00	98.16	68,633,500.00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	211,706,000.00	208,445,700.00	98.45	68,633,500.00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	134,190,000.00	131,091,000.00	97.69	0.00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6,447,505,966.00	6,363,954,214.00	98.70	3,403,184,500.00
Belanja Modal Alat Kedokteran	6,447,505,966.00	6,363,954,214.00	98.70	3,403,184,500.00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5,930,253,867.00	5,849,212,589.00	98.63	3,274,034,500.00
Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	517,252,099.00	514,741,625.00	99.51	0.00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0.00	0.00	0.00	129,150,000.00
Belanja Modal Alat Laboratorium	3,263,911,491.00	3,201,147,520.00	98.07	3,515,325,500.00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	155,623,000.00	152,404,390.00	97.93	15,928,000.00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	82,973,000.00	82,927,991.00	99.94	15,928,000.00
Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	16,100,000.00	13,088,399.00	81.29	0.00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	56,550,000.00	56,388,000.00	99.71	0.00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1,236,330,050.00	1,178,268,330.00	95.30	3,499,397,500.00
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1,236,330,050.00	1,178,268,330.00	95.30	3,499,397,500.00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1,849,833,441.00	1,848,349,800.00	99.91	0.00
Belanja Modal System/Power Supply	1,849,833,441.00	1,848,349,800.00	99.91	0.00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	22,125,000.00	22,125,000.00	100.00	0.00
Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	22,125,000.00	22,125,000.00	100.00	0.00
Belanja Modal Komputer	5,044,703,050.00	4,891,708,992.00	96.96	7,882,173,200.00
Belanja Modal Komputer Unit	3,650,091,400.00	3,532,680,787.00	96.78	6,791,460,200.00
Belanja Modal Komputer Jaringan	0.00	0.00	0.00	191,250,000.00
Belanja Modal Personal Computer	2,730,191,400.00	2,696,706,793.00	98.77	2,806,005,200.00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	919,900,000.00	835,973,994.00	90.87	3,794,205,000.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Modal Peralatan Komputer	1,394,611,650.00	1,359,028,205.00	97.44	1,090,713,000.00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1,137,511,150.00	1,107,548,138.00	97.36	919,531,000.00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	16,000,000.00	15,999,999.00	99.99	0.00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	241,100,500.00	235,480,068.00	97.66	171,182,000.00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	0.00	0.00	0.00	17,200,000.00
Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0.00	0.00	0.00	17,200,000.00
Belanja Modal Ukur/Instrumen	0.00	0.00	0.00	17,200,000.00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	168,828,450.00	166,516,500.00	98.63	0.00
Belanja Modal Sumur	98,828,450.00	96,864,000.00	98.01	0.00
Belanja Modal Sumur Pemboran	98,828,450.00	96,864,000.00	98.01	0.00
Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	70,000,000.00	69,652,500.00	99.50	0.00
Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	70,000,000.00	69,652,500.00	99.50	0.00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	197,996,250.00	192,252,695.00	97.09	156,770,000.00
Belanja Modal Alat Pelindung	9,375,000.00	9,031,400.00	96.33	70,270,000.00
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	9,375,000.00	9,031,400.00	96.33	70,270,000.00
Belanja Modal Alat SAR	188,621,250.00	183,221,295.00	97.13	86,500,000.00
Belanja Modal Alat Penolong	172,125,000.00	166,831,295.00	96.92	86,500,000.00
Belanja Modal Alat SAR Lainnya	16,496,250.00	16,390,000.00	99.35	0.00
Belanja Modal Rambu-Rambu	1,664,241,000.00	1,653,993,906.00	99.38	892,985,015.00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1,664,241,000.00	1,653,993,906.00	99.38	892,985,015.00
Belanja Modal Rambu Bersuar	124,000,000.00	123,597,390.00	99.67	652,503,800.00
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	796,016,000.00	789,692,295.00	99.20	240,481,215.00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	744,225,000.00	740,704,221.00	99.52	0.00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	207,870,000.00	203,810,650.00	98.04	34,900,000.00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	207,870,000.00	203,810,650.00	98.04	34,900,000.00
Belanja Modal Peralatan Permainan	0.00	0.00	0.00	34,900,000.00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	207,870,000.00	203,810,650.00	98.04	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0.00	0.00	0.00	10,211,897,850.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0.00	0.00	0.00	10,211,897,850.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0.00	0.00	0.00	10,211,897,850.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	11,220,111,500.00	11,211,111,500.00	99.91	810,588,558.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	11,220,111,500.00	11,211,111,500.00	99.91	810,588,558.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	11,189,357,200.00	11,180,357,200.00	99.91	10,500,000.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	30,754,300.00	30,754,300.00	100.00	800,088,558.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4,206,730,404.00	2,468,509,088.00	58.67	3,208,737,622.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4,206,730,404.00	2,468,509,088.00	58.67	3,208,737,622.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4,206,730,404.00	2,468,509,088.00	58.67	3,208,737,622.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96,422,653,597.00	78,343,963,108.63	81.25	116,081,400,906.04
Belanja Modal Bangunan Gedung	92,858,233,542.00	76,895,380,943.00	82.80	114,507,651,522.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	92,658,233,542.00	76,706,783,293.00	82.78	114,507,651,522.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	36,046,497,493.00	22,831,743,415.00	63.33	26,452,664,709.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	3,482,000.00	0.00	0.00	135,607,718.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	539,007,732.00	523,913,163.00	97.19	10,953,728,586.00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	17,092,853,409.00	16,330,158,181.00	95.53	17,337,536,354.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	37,577,773,888.00	35,683,035,713.00	94.95	56,761,414,820.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	150,000,000.00	149,149,806.00	99.43	99,297,690.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	691,382,020.00	654,363,893.00	94.64	2,217,752,148.00
Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0.00	0.00	0.00	7,426,913.00
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	391,000,000.00	369,424,983.00	94.48	402,245,778.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	165,000,000.00	163,757,139.00	99.24	116,473,806.00
Belanja Modal Taman	1,237,000.00	1,237,000.00	100.00	23,503,000.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	200,000,000.00	188,597,650.00	94.29	0.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	200,000,000.00	188,597,650.00	94.29	0.00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	564,420,055.00	501,506,927.00	88.85	47,426,850.00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	564,420,055.00	501,506,927.00	88.85	47,426,850.00
Belanja Modal Pagar	564,420,055.00	501,506,927.00	88.85	47,426,850.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3,000,000,000.00	947,075,238.63	31.56	1,526,322,534.04
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3,000,000,000.00	947,075,238.63	31.56	1,526,322,534.04
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3,000,000,000.00	947,075,238.63	31.56	1,526,322,534.04
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	336,329,284,338.72	301,645,432,305.28	89.68	169,257,395,654.90
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	303,529,408,213.72	271,655,238,340.28	89.49	150,358,212,895.90
Belanja Modal Jalan	303,529,408,213.72	271,655,238,340.28	89.49	150,358,212,895.90
Belanja Modal Jalan Kabupaten	290,698,408,213.72	260,680,920,237.28	89.67	142,476,938,359.90

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Belanja Modal Jalan Lainnya	12,831,000,000.00	10,974,318,103.00	85.52	7,881,274,536.00
Belanja Modal Bangunan Air	27,449,641,646.00	24,934,953,749.00	90.83	18,824,578,418.00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	17,766,712,992.00	16,212,680,727.00	91.25	12,131,714,634.00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0.00	0.00	0.00	198,080,793.00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	17,766,712,992.00	16,212,680,727.00	91.25	11,933,633,841.00
Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1,931,496,438.00	1,798,970,334.00	93.13	1,222,236,485.00
Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	650,166,559.00	636,771,916.00	97.93	0.00
Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	1,281,329,879.00	1,162,198,418.00	90.70	1,222,236,485.00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7,751,432,216.00	6,923,302,688.00	89.31	5,470,627,299.00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	7,751,432,216.00	6,923,302,688.00	89.31	4,718,037,299.00
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	0.00	0.00	0.00	752,590,000.00
Belanja Modal Instalasi	5,342,374,800.00	5,047,380,537.00	94.47	0.00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	5,342,374,800.00	5,047,380,537.00	94.47	0.00
Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	5,342,374,800.00	5,047,380,537.00	94.47	0.00
Belanja Modal Jaringan	7,859,679.00	7,859,679.00	100.00	74,604,341.00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	7,859,679.00	7,859,679.00	100.00	0.00
Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	7,859,679.00	7,859,679.00	100.00	0.00
Belanja Modal Jaringan Listrik	0.00	0.00	0.00	74,604,341.00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0.00	0.00	0.00	74,604,341.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14,588,887,424.00	14,551,101,024.00	99.74	13,767,321,450.00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	999,871,500.00	963,840,100.00	96.39	312,116,200.00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	999,871,500.00	963,840,100.00	96.39	312,116,200.00
Belanja Modal Buku Umum	999,871,500.00	963,840,100.00	96.39	233,487,300.00
Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0.00	0.00	0.00	78,628,900.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0.00	0.00	0.00	12,413,781,250.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0.00	0.00	0.00	12,413,781,250.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0.00	0.00	0.00	12,413,781,250.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	13,589,015,924.00	13,587,260,924.00	99.98	1,041,424,000.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	13,589,015,924.00	13,587,260,924.00	99.98	1,041,424,000.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	12,984,144,164.00	12,982,389,164.00	99.98	0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	604,871,760.00	604,871,760.00	100.00	1,041,424,000.00
JUMLAH BELANJA MODAL	**510,478,614,181.72**	**452,449,274,206.91**	**88.63**	**342,913,941,175.94**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
BELANJA TIDAK TERDUGA	**4,775,207,000.00**	**863,812,151.00**	**18.08**	**317,526,345.00**
Belanja Tidak Terduga	4,775,207,000.00	863,812,151.00	18.08	317,526,345.00
Belanja Tidak Terduga	4,775,207,000.00	863,812,151.00	18.08	317,526,345.00
Belanja Tidak Terduga	4,775,207,000.00	863,812,151.00	18.08	317,526,345.00
Belanja Tidak Terduga	4,775,207,000.00	863,812,151.00	18.08	317,526,345.00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**4,775,207,000.00**	**863,812,151.00**	**18.08**	**317,526,345.00**
BELANJA TRANSFER	**421,175,390,638.40**	**323,959,237,864.00**	**76.91**	**407,191,851,028.00**
Belanja Bagi Hasil	36,770,968,238.40	24,809,228,300.00	67.46	30,477,539,400.00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	34,153,426,383.40	23,737,950,400.00	69.50	28,912,456,100.00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	34,153,426,383.40	23,737,950,400.00	69.50	28,912,456,100.00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	34,153,426,383.40	23,737,950,400.00	69.50	28,912,456,100.00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2,617,541,855.00	1,071,277,900.00	40.92	1,565,083,300.00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2,617,541,855.00	1,071,277,900.00	40.92	1,565,083,300.00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2,617,541,855.00	1,071,277,900.00	40.92	1,565,083,300.00
Belanja Bantuan Keuangan	384,404,422,400.00	299,150,009,564.00	77.82	376,714,311,628.00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	3,187,642,400.00	2,769,121,496.00	86.87	1,574,736,000.00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	3,187,642,400.00	2,769,121,496.00	86.87	1,574,736,000.00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	3,187,642,400.00	2,769,121,496.00	86.87	1,574,736,000.00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	381,216,780,000.00	296,380,888,068.00	77.74	375,139,575,628.00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	381,216,780,000.00	296,380,888,068.00	77.74	375,139,575,628.00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	258,778,628,000.00	174,191,242,000.00	67.31	260,644,885,000.00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	122,438,152,000.00	122,189,646,068.00	99.79	114,494,690,628.00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	**421,175,390,638.40**	**323,959,237,864.00**	**76.91**	**407,191,851,028.00**
JUMLAH BELANJA	**2,569,477,094,027.26**	**2,307,947,530,745.93**	**89.82**	**2,377,197,871,425.94**
SURPLUS/DEFISIT	**(131,479,674,433.26)**	**59,096,413,923.92**	**(44.94)**	**76,585,033,132.00**

C. Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

i. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
ii. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/ Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
iii. (SILPA) tahun berjalan;
iv. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Netto dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) yang masing- masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan aparatur dan pelayanan kepadamasyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
PEMBIAYAAN DAERAH	**131,479,674,433.26**	**131,480,147,509.26**	**100.00**	**78,127,641,301.26**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**154,712,674,433.26**	**154,712,674,433.26**	**100.00**	**100,360,168,225.26**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	154,712,674,433.26	154,712,674,433.26	100.00	100,360,168,225.26
Penghematan Belanja	154,712,674,433.26	154,712,674,433.26	100.00	100,360,168,225.26
Penghematan Belanja-Belanja Operasi	154,712,674,433.26	154,712,674,433.26	100.00	85,594,301,725.00
Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	154,712,674,433.26	154,712,674,433.26	100.00	52,327,549,084.00
Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	0.00	0.00	0.00	10,496,379,000.00
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	0.00	0.00	0.00	22,770,373,641.00
Penghematan Belanja-Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	14,765,866,500.26
Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0.00	0.00	0.00	6,092,880,000.26
Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0.00	0.00	0.00	8,672,986,500.00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**154,712,674,433.26**	**154,712,674,433.26**	**100.00**	**100,360,168,225.26**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**23,233,000,000.00**	**23,232,526,924.00**	**99.99**	**22,232,526,924.00**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
Penyertaan Modal Daerah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	0.00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	0.00
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	0.00
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	0.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22,233,000,000.00	22,232,526,924.00	99.99	22,232,526,924.00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	22,233,000,000.00	22,232,526,924.00	99.99	0.00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	22,233,000,000.00	22,232,526,924.00	99.99	0.00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	22,233,000,000.00	22,232,526,924.00	99.99	0.00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0.00	0.00	0.00	22,232,526,924.00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	22,232,526,924.00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	22,232,526,924.00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**23,233,000,000.00**	**23,232,526,924.00**	**99.99**	**22,232,526,924.00**
PEMBIAYAAN NETTO	**131,479,674,433.26**	**131,480,147,509.26**	**100.00**	**78,127,641,301.26**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0.00**	**190,576,561,433.18**	**0.00**	**154,712,674,433.26**

BAB IV
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dikategorikan berhasil dicapai karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal. Walaupun ada dua indikator yang tidak tercapai yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM/Indeks Merit. Salah satu penyebab sektor pariwisata terhadap PDRB tidak berjalan lurus dengan kenaikan PDRB sektor pariwisata dikarenakan:

1. Belum tersedianya sentra souvenir yang terpadu di tempat wisata;
2. Keterbatasan tempat makan dan kuliner;
3. Tingginya harga penginapan jika dibandingkan dengan wilayah Bandar Lampung.

Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM Secara Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan sistem merit sudah dilaksanakan dengan baik yang meliputi: Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN; Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dan Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, maka mencabut Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem Dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), maka tugas dari KASN termasuk penilaian Sistem Merit diserahkan seluruhnya ke BKN Pusat Jakarta, Kabupaten Lampung Selatan melalui BKD Kabupaten Lampung Selatan, telah melakukan penilaian mandiri Sistem Merit melalui aplikasi Sipinter yang siap di verifikasi oleh BKN, sampai dengan 31 Desember 2024 tidak ada penilaian atas indikator sistem merit melalui aplikasi Sipinter, capaian indeks merit yang tersaji level I dengan kategori buruk yang merupakan penilaian dari BKN tahun 2023. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Capaian Kinerja dilihat berdasarkan tiap-tiap indikator digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Capaian Kinerja yang dilihat berdasarkan tiap-tiap Indikator berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

No	Sasaran strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama,	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	74.50	74.03	99.37
2	Meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	70.80	74.84	105.71
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.2	12.79	104.84
		Rata-rata lama Sekolah (RLS) (tahun)	8.20	7.98	97.32
		Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	10.576	11.540	109.11
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11.50	12.05	95.21
		Indeks Gini (poin)	0.281	0.239	85.05
4	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3.70	4.67	73.78
5	Meningkatnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	Indeks Infrastruktur (persen)	76.50	76.50	100.00
6	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB (persen / proxy)	29.87	26.23	87.81
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen / proxy)	12.80	15.82	123.59
		Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen / proxy)	2.90	0.75	25.86
		Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen / proxy)	25.50	23.88	93.65
7	Stabilitas inflasi daerah	Laju Tingkat Inflasi (persen)	3(+-1)	1.25	1.25
8	Meningkatnya nilai tukar petani	NTP (poin)	105	129.34	123.18
9	Meningkatnya kualitas SDM dan tata Kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM	III (baik)	I (buruk)	I (buruk)
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP (predikat)	BB	B (67.07)	B (67.07)
11	Meningkatnya nilai opini BPK	Opini BPK (opini)	WTP	WTP	WTP
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)	83.00	80.51	97.00

Tabel 4.2. Capaian Kinerja yang dilihat berdasarkan tiap-tiap Indikator berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

No	Sasaran strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56.16	56.16	100
2	Peningkatan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74.07	74.03	99.95
3	Peningkatan Penegakan Hukum dan Keamanan Daerah	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	100	100
4	Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	79.36	80.18	101.03
5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	2.63	3.89	147.91
6	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74.59	74.84	100.34
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	10	10.4	96
7	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7.81	7.98	102.18
8	Peningkatan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	64.38	64.38	100
9	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif	Tingkat Inflasi	,2-3	1.25	1.25
10	Perluasan Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.65	4.67	99.67
11	Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi	12.4	12.43	100.24
12	Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri	8.2	15.6	190.24
13	Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	23.59	23.88	101.23
14	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1.5	1.53	102
15	Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian	11.81	11.81	100
17	Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.68	70.45	105.65
18	Peningkatan kesiagaan Bencana	Indeks Resiko Bencana	185.95	205.36	89.56
19	Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Gelobal	Incremental Capital Outpot Ratio (ICOR)	6.98	6.1	87.39

B. Langkah-langkah untuk tahun mendatang guna peningkatkan kinerja

- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama masyarakat yang adil dan makmur;
- Meningkatkan Pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, perluasan akses layanan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan UMK;
- Meningkatkan aksesibilitas, kualitas infrastruktur dasar, dan pelayanan publik secara adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan;

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan Lampung Selatan yang digital, akuntabel, partisipatif, dan berbasis kinerja untuk mendukung pelayanan publik yang efisien dan responsive;
- Terwujudnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif;
- Mewujudkan masyarakat Lampung Selatan yang sehat dan cerdas melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan dasar yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan;
- Meningkatkan Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum, ketahanan budaya dan mitigasi bencana;
- Meningkatkan kualitas ASN, yang lebih kolaboratif sehingga menghasilkan regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik;
- Meningkatkan peran strategis dan pengaruh Kabupaten Lampung Selatan dalam kemitraan pembangunan lintas daerah, Nasional dan Internasional secara aktif, inovatif dan berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah kabupaten Lampung Selatan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap indikator pada tahun 2025 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Lampung Selatan.

Bupati Lampung Selatan,

Radityo Egi Pratama